

BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun sebagai arah dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan;

b. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan serta daya saing daerah yang berpihak, berkelanjutan, dan bermartabat secara berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan prinsip keterpaduan antar dokumen perencanaan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang meliputi keluaran, hasil, dan dampak.
19. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan, untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Program Prioritas adalah Program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknis penurunan Kinerja.

BAB II
RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Tahun 2025-2045.
(2) Selain mengacu pada RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Barat.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan:

a. memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah jangka waktu Tahun 2025-2029;
b. sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada setiap Perangkat Daerah berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
c. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif;
d. sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
e. sebagai instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran umum Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup kebijakan perumusan Visi dan Misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

(4) Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan, dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi.

(5) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI PANGANDARAN,

CITRA PITRIYAMI

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 2/115/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di awali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam Tujuan, strategi, kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah selama masa jabatan dan menjadi panduan dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan selama 5 (lima) tahun di Daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan guna keterpaduan antara aspek perencanaan dan penganggaran, serta penguatan indikator kinerja yang terukur untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan pembangunan yang berdampak.

RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi berupa ”Pembangunan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter” diterjemahkan ke dalam Misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang meliputi:

a. mempermudah akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
b. meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan;
c. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan;
d. mewujudkan penataan pariwisata yang aman, nyaman dan berkesinambungan;
e. meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan nasionalisme melalui penguatan pendidikan agama dan wawasan kebangsaan;
f. mewujudkan kemandirian ketahanan pangan;
g. meningkatkan birokrasi yang bersih dan melayani; dan
h. meningkatkan kesejahteraan sosial dan perekonomian, serta penguatan dan pemberdayaan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

RPJMD TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, Program Pembangunan Daerah, serta keuangan daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 secara berjenjang harus selaras dengan dokumen pada tingkat yang lebih tinggi dan dokumen acuan lainnya, diantaranya yakni dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2025-2029, dokumen RTRW Tahun 2018-2038, serta dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Daerah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Cita-cita luhur pembentukan Daerah diantaranya yakni mendekatkan pelayanan publik karena jarak yang cukup jauh dari Kabupaten Ciamis, mengelola potensi Daerah secara optimal, membuka lapangan kerja, mensejahterakan masyarakat di Daerah, melakukan penataan kewilayahan sesuai dengan kebutuhan, dan meningkatkan stabilitas pertahanan keamanan karena Daerah memiliki garis pantai cukup panjang dan langsung berhadapan dengan perairan internasional. Sejak tahun 2012 Daerah berdiri sebagai wilayah daerah otonomi baru yang mana masih bertumbuh untuk menjadi wilayah yang mampu menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya dalam rangka memperkokoh keutuhan nasional, mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat, serta mendukung pembangunan nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

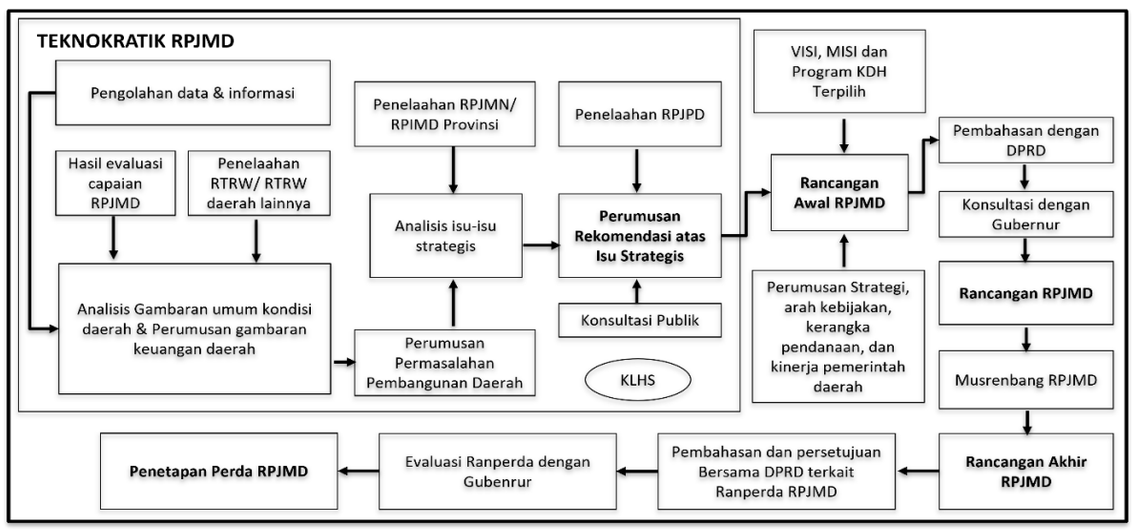
Secara umum, permasalahan di Daerah terdiri atas aspek geografis, demografi, ekonomi, sosial, dan daya saing. Permasalahan ini menjadi isu strategis yang perlu dijawab oleh Daerah. Isu strategis jangka menengah di Daerah secara ringkas dapat dijelaskan; belum optimalnya pengelolaan fiskal daerah, pengembangan SDM di sektor pendidikan dan kesehatan, sektor unggulan yang belum dapat mendorong perekonomian wilayah, terbatasnya konektivitas dan digitalisasi layanan, kurang optimalnya pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta masih tingginya angka kemiskinan. Isu ini harus menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Arah pembangunan jangka menengah dengan periode 5 (lima) tahun perencanaan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 mempertimbangkan potensi dan kemampuan daerah, oleh karena itu, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 harus menggunakan konsep *SMART-C* (*specific, measurable, agreeable, realistic, time-bounded, and continuously improve*). Penyusunan

dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, bawah-atas, dan atas-bawah. Oleh karena itu, untuk mengakomodir hal tersebut, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap dokumen perencanaan yang perlu disusun oleh Pemerintah Daerah diatur tahapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dapat digambarkan dalam kerangka logis sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Logis Tahapan Penyusunan RPJMD



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Secara umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam 6 (enam) tahapan, dimulai dari tahap persiapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Pada tahap persiapan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas masing-masing urusan dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dilakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 periode sebelumnya berdasarkan data capaian untuk setiap urusan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan. Perangkat Daerah akan memberikan masukan terhadap permasalahan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan Daerah sesuai dengan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis untuk dirumuskan menjadi suatu isu strategis. Dari isu strategis inilah yang dapat memberikan gambaran Pembangunan Daerah hingga jangka waktu yang ditetapkan yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan terkait lainnya dan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tahapan kedua adalah penyusunan rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan permasalahan, isu strategis, Visi, dan Misi yang telah ditetapkan, serta dilakukan identifikasi untuk menentukan tujuan pembangunan, Sasaran, arah kebijakan, hingga indikator untuk setiap Program. Proses ini dilakukan secara partisipatif bersama Perangkat Daerah. Pada tahapan ketiga, rancangan awal RPJMD akan memasuki tahap dokumen rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah melalui proses konsultasi dengan Gubernur. Dari dokumen tersebut, maka pada tahap keempat, dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan menjadi proses partisipatif yang penting dalam tahapan perencanaan pembangunan. Hal ini juga membantu memastikan bahwa Program dan proyek yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata.

Pada tahap kelima, dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 telah memasuki tahapan rancangan akhir. Pada tahap ini, maka seluruh proses penyusunan sudah mencapai kesepakatan dan validasi dari berbagai pemangku kepentingan. Tahap keenam yakni penetapan RPJMD Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat disahkan menjadi suatu dokumen perencanaan, maka perlu dilaksanakan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tersebut juga perlu dievaluasi bersama DPRD dan Gubernur sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah. Dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan sebagai pedoman Pembangunan Daerah dan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah digunakan 4 (empat) pendekatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Pendekatan politis, dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana program yang didalamnya harus memuat janji-janji politik Kepala Daerah Terpilih;
2. Pendekatan teknokratik, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, dengan tujuan untuk mendapatkan aspirasi, dan masukan dari masyarakat secara luas;
4. Pendekatan atas-bawah *(top-down)* dan bawah–atas (*bottom-up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah, daerah provinsi, hingga nasional.

Selain keempat pendekatan di atas, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan penganggaran berbasis money-follow program serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik,

Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

Kerangka kerja yang digunakan dalam analisis strategis RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 menggunakan *Balanced Scorecard*. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, kerangka ini membantu daerah untuk melihat gambaran besar sekaligus detail dari arah pembangunan yang ingin dicapai serta strategi yang akan dilakukan. Melalui *Balanced Scorecard*, rencana pembangunan tidak hanya fokus pada anggaran atau proyek fisik, tetapi juga memperhatikan kepuasan masyarakat, kelancaran proses kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggabungkan keempat perspektif ini ke dalam substansi dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029, pembangunan daerah menjadi lebih terukur, berkesinambungan, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Kemudian untuk mendapatkan strategi apa saja yang dinilai tepat untuk dilakukan dalam menjawab peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan daerah digunakan analisis SWOT atau *strengths-weaknesses-opportunities-threats*.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, bahwa penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini menjadi salah satu hal penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan berakhirnya periode perencanaan RPJMD sebelumnya serta terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa bakti Tahun 2025-2029, Pemerintah Daerah perlu menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD pada periode 5 (lima) tahun mendatang yakni Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

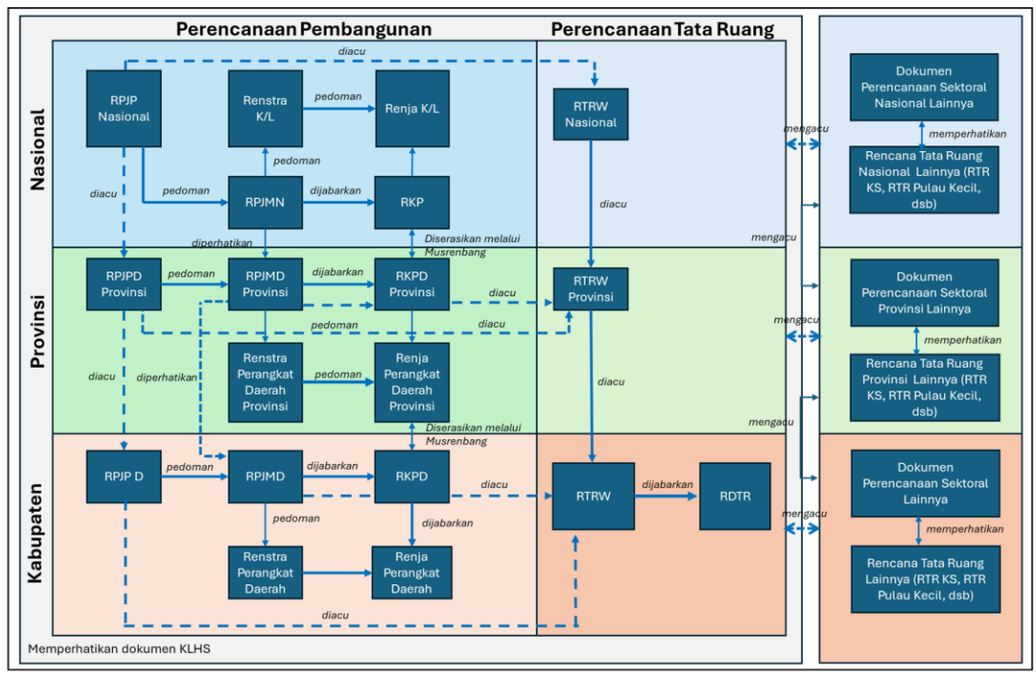
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9).

1.3 Hubungan Antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 harus selaras dengan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ada, serta dokumen RTRW Tahun 2018-2038.

Gambar 1. 2 Kerangka Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.3.1 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Tahun 2025–2029 memiliki hubungan langsung dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 karena RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang menjadi bagian dari tahapan pencapaian target jangka panjang provinsi. RPJPD Jawa Barat menetapkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan untuk 20 tahun ke depan, sementara RPJMD Daerah 2025–2029 berperan sebagai rencana operasional lima tahunan yang menerjemahkan arah pembangunan jangka panjang tersebut ke dalam program dan kegiatan konkret di tingkat kabupaten. Dengan demikian, setiap sasaran, indikator, dan prioritas dalam RPJMD Daerah harus selaras dan mendukung pencapaian visi besar Jawa Barat 2045, seperti peningkatan daya saing ekonomi daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta pengembangan pariwisata unggulan. Kesinambungan ini memastikan pembangunan di daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal jangka menengah, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya tujuan strategis jangka panjang provinsi.

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan atas tahapan pertama dalam periode 20 (dua puluh) tahun dokumen RPJPD Tahun 2025-2045. Dengan demikian, RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan yang sangat erat. Substansi

dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada tahap pertama arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan tema perkuat pondasi, yakni:

1. Peningkatan pemenuhan pelayanan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
2. Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dan pengembangan destinasi sarana dan prasarana pariwisata;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dan peningkatan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan inovatif;
4. Peningkatan keamanan Daerah yang bersih dari konflik sosial, politik, dan agama;
5. Pelestarian budaya dan tradisi serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan;
6. Peningkatan pemerataan dan kualitas infrastruktur serta pengembangan transportasi massal;
7. Penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang merata; dan
8. Peningkatan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Arah kebijakan pada 5 (lima) tahun pertama dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan upaya dalam mencapai Visi dan Misi dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, yakni:

Visi RPJPD Tahun 2025-2045:

"KABUPATEN PANGANDARAN IMPRESIF, INKLUSIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Misi RPJPD Tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, tenaga kerja, serta badan usaha milik negara), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan

Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045, maka dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.

1.3.3 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dipedomani oleh dokumen RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dipedomani RPJMD Provinsi melalui penyelarasan pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi. Dengan demikian, perencanaan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi pada dokumen RPJMD Provinsi.

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029:

”JABAR ISTIMEWA: Lembur Diurus Kota Ditata”

Misi Jawa Barat Tahun 2025-2029:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional; dan
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.

1.3.4 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan Program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung pencapaian Visi RPJMN Tahun 2025-2029.

Visi RPJMN Tahun 2025-2029:
"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"
Misi RPJMN Tahun 2025-2029:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan kerangka pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan yang di dalam proses penyelenggaraannya memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Muatan KLHS ini harus terintegrasi dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sehingga perencanaan yang disusun akan turut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terdapat 10 (sepuluh) isu tujuan pembangunan berkelanjutan prioritas dalam dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam penentuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas, dipertimbangkan juga isu dari dokumen perencanaan lainnya, yakni RTRW Tahun 2018-2038, KLHS RTRW Tahun 2018-2038, dan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas dalam dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 yakni:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan;
2. Pemberdayaan ekonomi lokal;
3. Pengembangan daya tarik wisata;
4. Ketidaksesuaian antara rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting;
5. Masih adanya rumah tidak layak huni;
6. Minimnya infrastruktur air limbah dan drainase;
7. Belum optimalnya pengelolaan persampahan;
8. Perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati;
9. Adanya risiko bencana dan perubahan iklim; dan
10. Ketahanan pangan dan produktivitas pertanian.

1.3.6 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan pada RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022.
Tujuan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042:
"Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Provinsi Jawa Barat termaju di Indonesia."
Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi perwujudan rencana penataan ruang ke dalam matra Program untuk 5 (lima) tahun periode perencanaan dengan memperhatikan pada RTRW dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.7 Hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RTRW Tahun 2018-2038

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW Tahun 2018-2038 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang RTRW Tahun 2018-2038.
Tujuan Penataan Ruang Daerah Tahun 2018-2038:
"KABUPATEN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN."

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi perwujudan rencana penataan ruang ke dalam matra Program untuk 5 (lima) tahun periode perencanaan dengan berpedoman pada RTRW. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 harus menyelaraskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi dan Program yang tercantum dalam RTRW Tahun 2018-2038.

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah perencanaan pembangunan untuk lima tahun perencanaan yakni Tahun 2025-2029 secara holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial berdasarkan kondisi dan potensi wilayah melalui kerangka berpikir yang logis dan sistematis.
Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:
1. Memberikan gambaran umum kondisi wilayah;
2. Menelaah Kinerja pembangunan Pemerintah Daerah berdasarkan capaian indikator pembangunan pada periode sebelumnya;
3. Menelaah Kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan;
4. Merumuskan permasalahan dan isu strategis Pembangunan Daerah berdasarkan capaian Kinerja pembangunan pada periode sebelumnya;
5. Merumuskan Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan; dan
6. Menetapkan Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja kunci beserta target untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Hubungan antara Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Terkait Lainnya;
4. Maksud dan Tujuan; dan

5. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang gambaran umum kondisi Daerah, gambaran umum keuangan Daerah, permasalahan, dan isu strategis Daerah. Gambaran umum kondisi Daerah terdiri atas:

1. Aspek Geografi dan Demografi;
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
3. Aspek Daya Saing Daerah;
4. Aspek Pelayanan Umum; dan
5. Capaian Pembangunan Sebelumnya.

Gambaran umum keuangan daerah terdiri atas:

1. Kinerja Keuangan Masa Lalu;
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan
3. Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Lima Tahun ke Depan.

Sub bab permasalahan dan isu strategis memuat informasi tentang hasil identifikasi permasalahan yang didapatkan berdasarkan data dan hasil verifikasi bersama pemangku kepentingan terkait yang dibandingkan dengan target atau standar yang berlaku, serta isu strategis pembangunan hingga lima tahun ke depan.

BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini memuat mengenai Visi dan Misi pembangunan pada periode perencanaan Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selanjutnya penjabaran mengenai Tujuan dan Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan Program Prioritas daerah berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah.

BAB IV. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat mengenai pengalokasian anggaran untuk setiap Program pembangunan dalam periode perencanaan Tahun 2025-2029. Pengalokasian ini dilakukan dengan memperhatikan target untuk setiap indikator Program sehingga dapat mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah. Serta memuat mengenai penetapan Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah beserta target setiap indikator untuk 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Daerah merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada Tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yang termasuk dalam wilayah laut di Provinsi Jawa Barat yang memiliki cakupan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai menuju laut lepas atau perairan kepulauan. Secara geografis daerah juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Jarak Daerah dengan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung sekitar kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) kilometer dan jarak dengan pusat pemerintahan di Jakarta berjarak kurang lebih 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kilometer. Berdasarkan letak astronomis, Daerah terletak pada 108°8’0” sampai dengan 108°50’0” Bujur Timur dan 7°24’0” sampai dengan 7°54’20” Lintang Selatan.

Gambar 2. 1 Letak Daerah



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diolah Tahun 2025

Gambar 2. 2 Letak Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

Lokasi ibu kota Daerah berada di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 (sepuluh) Kecamatan dan 93 (sembilan puluh) Desa, dengan atas administratif wilayah meliputi:

- Sebelah Utara : Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Timur : Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari, Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

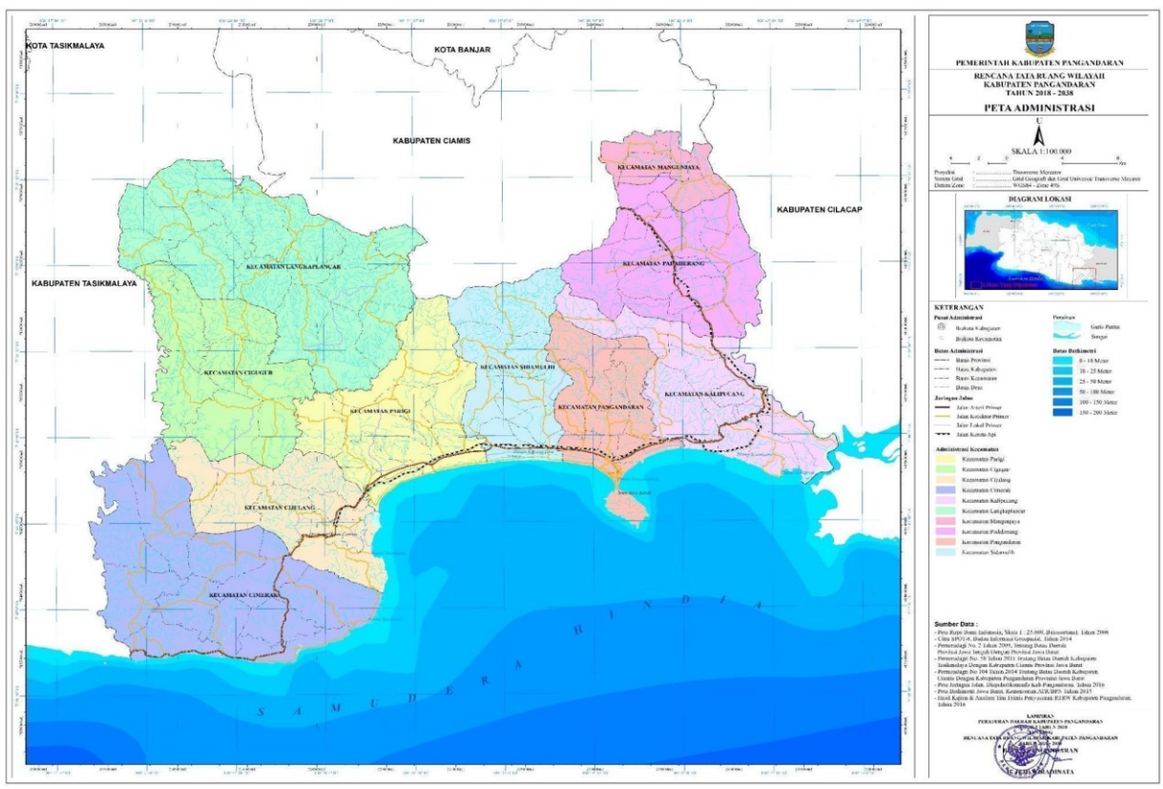
Luas wilayah kurang lebih 1.134,23 (seribu seratus tiga puluh empat koma dua tiga) kilometer persegi dengan luas per kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Administratif Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Desa
1	Parigi	111,23	10
2	Cijulang	94,37	7
3	Cimerak	190,22	11
4	Cigugur	117,82	7
5	Langkaplancar	205,54	15
6	Mangunjaya	31,98	5
7	Padaherang	112,76	14
8	Kalipucang	104,27	9
9	Pangandaran	75,57	8
10	Sidamulih	90,47	7
	Jumlah	1.134,23	93

Sumber: RTRW Tahun 2018-2038

Gambar 2. 3 Peta Administrasi Daerah



Sumber: RTRW Tahun 2018-2038

Posisi geografis Daerah terletak di ujung tenggara Provinsi Jawa Barat, memiliki posisi dan peran strategis yang signifikan dalam berbagai aspek, baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial budaya. Letak Daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah menjadikan Daerah sebagai jalur penting dalam distribusi barang dan jasa hal itu juga termuat dalam RTRW Provinsi Jawa Barat yang mana Daerah merupakan pusat kegiatan wilayah yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala nasional. Selain itu Daerah merupakan destinasi unggulan

di Provinsi Jawa Barat dan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, Daerah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi Wilayah Pangandaran dan sekitarnya, serta Kawasan Strategis Provinsi Perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Daerah dalam RTRW Nasional ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Pancangsanak (Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan) yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan. Salah satu area Kawasan Strategis Nasional Pancangsanak yaitu laguna yang memiliki nilai ekologis yang tinggi untuk kawasan di sekitarnya dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Daerah memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang dapat mendukung perekonomian karena sumbernya yang melimpah meliputi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Potensi sumber daya alam tersebut merupakan keunggulan komparatif Daerah yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah. Nilai tambah potensi Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan keunggulan lokal secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah memiliki kekayaan alam berupa pantai, perbukitan, hutan, pertanian, pariwisata, dan kekayaan lainnya yang dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata unggulan bertaraf nasional maupun internasional. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan kelautan memiliki peluang besar untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi melalui inovasi, pengolahan pascapanen, dan pemasaran yang lebih luas. Potensi budaya dan kearifan lokal juga menjadi modal penting untuk memperkuat identitas daerah sekaligus menarik minat wisatawan dan investor. Pengelolaan potensi tersebut secara terpadu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

1. Potensi pariwisata

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota perlu mengacu kepada Rencana Induk yang lebih tinggi dalam lingkup Nasional, yaitu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional maupun kebijakan pembangunan lainnya yang terkait dengan kepariwisataan.

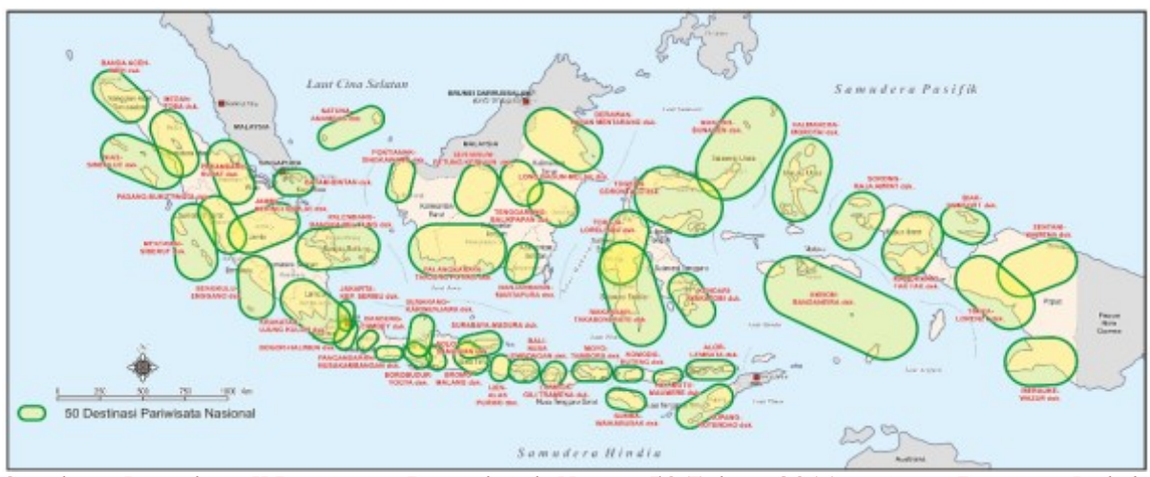
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) merupakan Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata Aksesibilitas serta Masyarakat yang saling terkait dan melengkap terwujudnya Kepariwisataan dalam tatanan Nasional. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional merupakan dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai tahun 2025 yang menekankan kepada 4 (empat) pilar utama dalam pembangunan pariwisata nasional, yaitu pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat. Sebagai sebuah pedoman di dalam pembangunan kepariwisataan, maka dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Daerah perlu mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
Disebutkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Pasal 4 bahwa :

A. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional;
B. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi; dan
C. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional yang menjadi dasar bagi arah kebijakan, strategi dan indikasi Program pembangunan kepariwisataan berdasarkan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025, meliputi; Pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional, Pemasaran Pariwisata Nasional, Industri Pariwisata Nasional dan Kelembagaan Kepariwisataan Nasional. Dari sisi perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional meliputi Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Gambar 2. 4 Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Indonesia berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025



Sumber : Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Berdasarkan kepada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 terdapat 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi di Indonesia. Di dalamnya terdapat pembagian yang lebih khusus berupa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang berjumlah 88 (delapan puluh delapan).

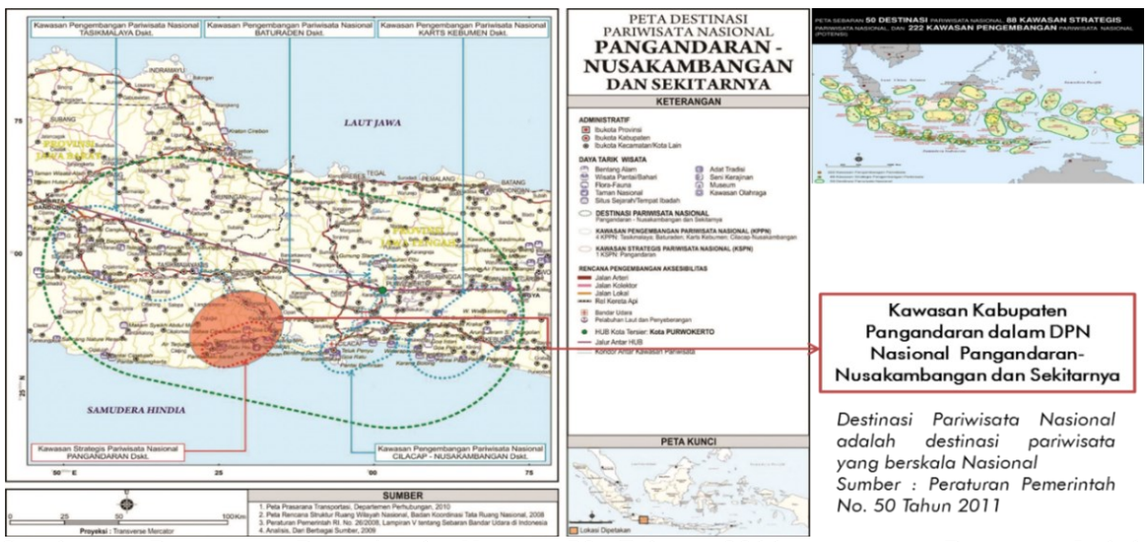
Visi pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2025 adalah “terwujudnya Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas

dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong Pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat." Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan kepariwisataan Indonesia, yaitu:

A. Mengembangkan industri pariwisata yang efisien, berdaya saing, kredibel, menyinergikan kemitraan antar usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
B. Mengembangkan destinasi pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
C. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang unggul, efektif, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara; dan
D. Mengembangkan kelembagaan dan tata kelola kepariwisataan yang efektif dan efisien serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, daerah termasuk dalam Destinasi Pariwisata Nasional Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya, yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. 5 Destinasi Pariwisata Nasional Pangandaran-Nusakambangan dan Sekitarnya



Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025

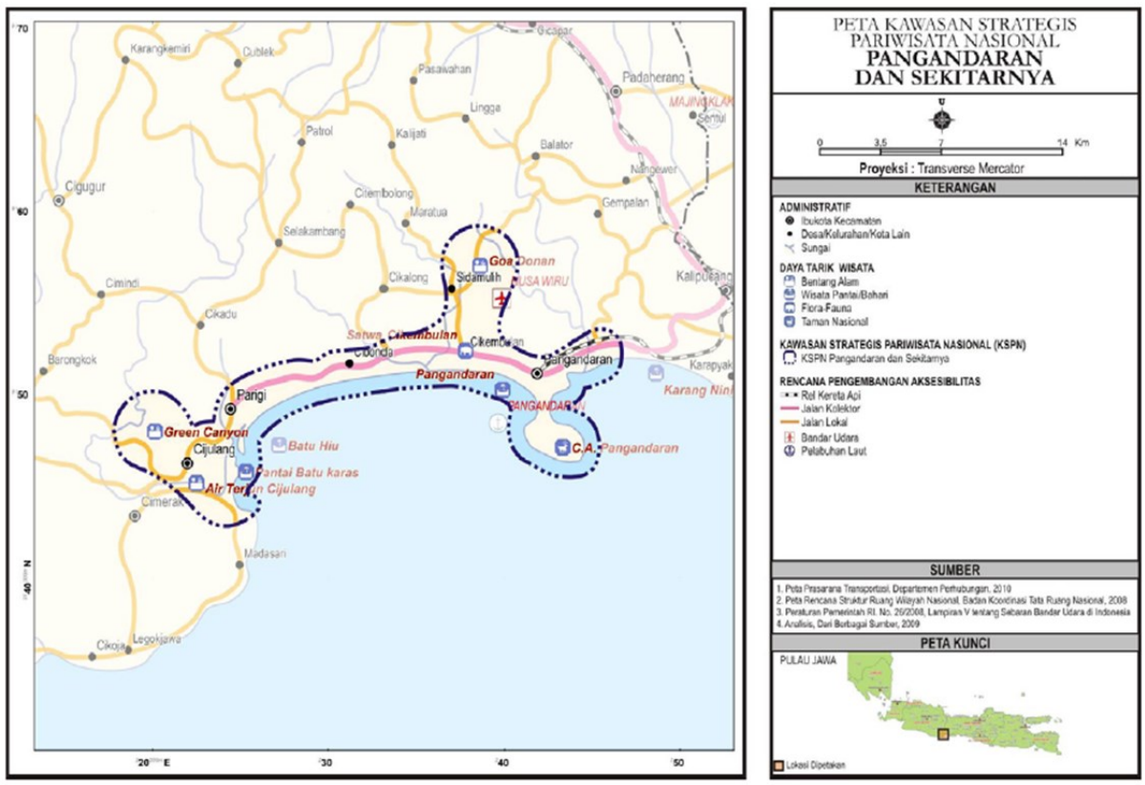
Daerah juga telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dengan penekanan terhadap tema pembangunan wisata berdasarkan kepada kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional mengedepankan pada aktivitas wisata bahari dan minat khusus. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional juga menjadi momentum untuk mendapat dukungan pembangunan kepariwisataan dari Pemerintah Pusat, khususnya melalui Kementerian Pariwisata dan juga Provinsi Jawa Barat, sehingga pembangunan kepariwisataan diharapkan mampu mempercepat akselerasi pembangunan dan berkontribusi dalam pembangunan pariwisata Nasional, khususnya Provinsi Jawa Barat. Secara lebih jelas berikut gambar perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pangandaran dan sekitarnya.

Adapun indikasi Program pembangunan destinasi pariwisata lingkup pembangunan destinasi pariwisata, yaitu:

A. Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Nasional;

B. Pembangunan daya tarik wisata;
C. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
D. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
E. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
F. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Gambar 2. 6 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



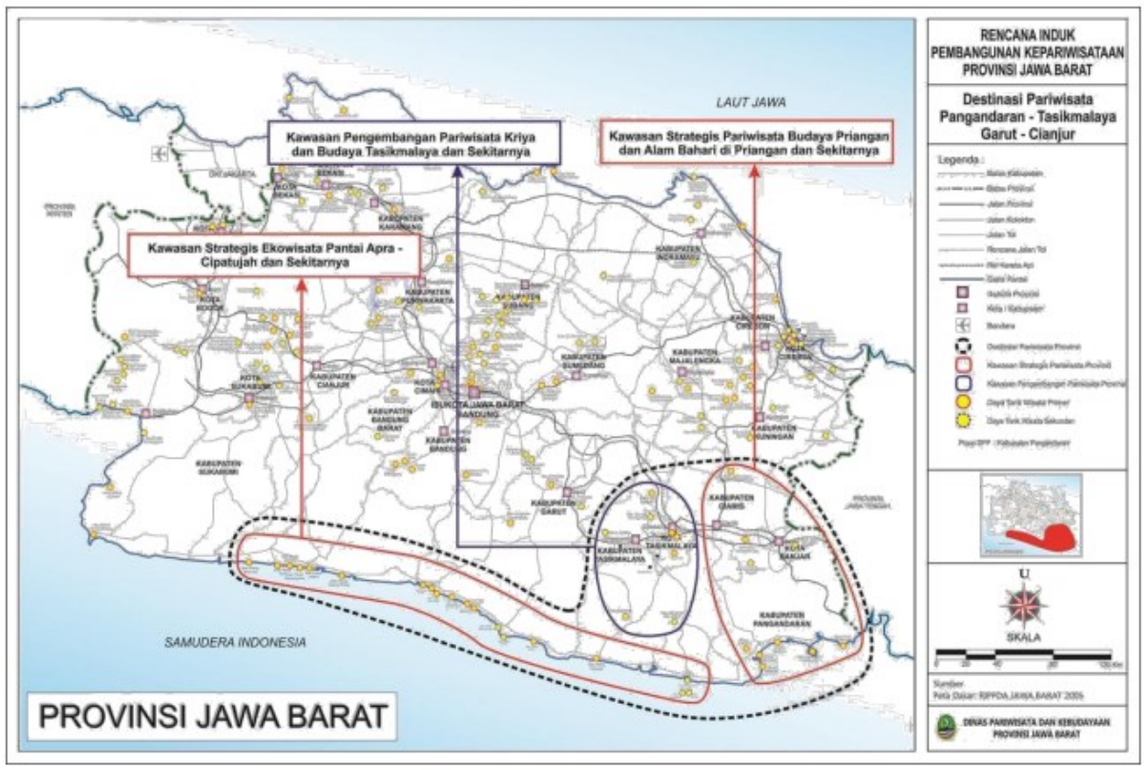
Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Berdasarkan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, daerah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan dan sekitarnya yang masuk dalam bagian Destinasi Pariwisata Pangandaran-Tasikmalaya-Garut-Cianjur.

Adapun Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi untuk Kawasan Budaya Priangan dan Alam Bahari di Priangan dan sekitarnya yaitu:

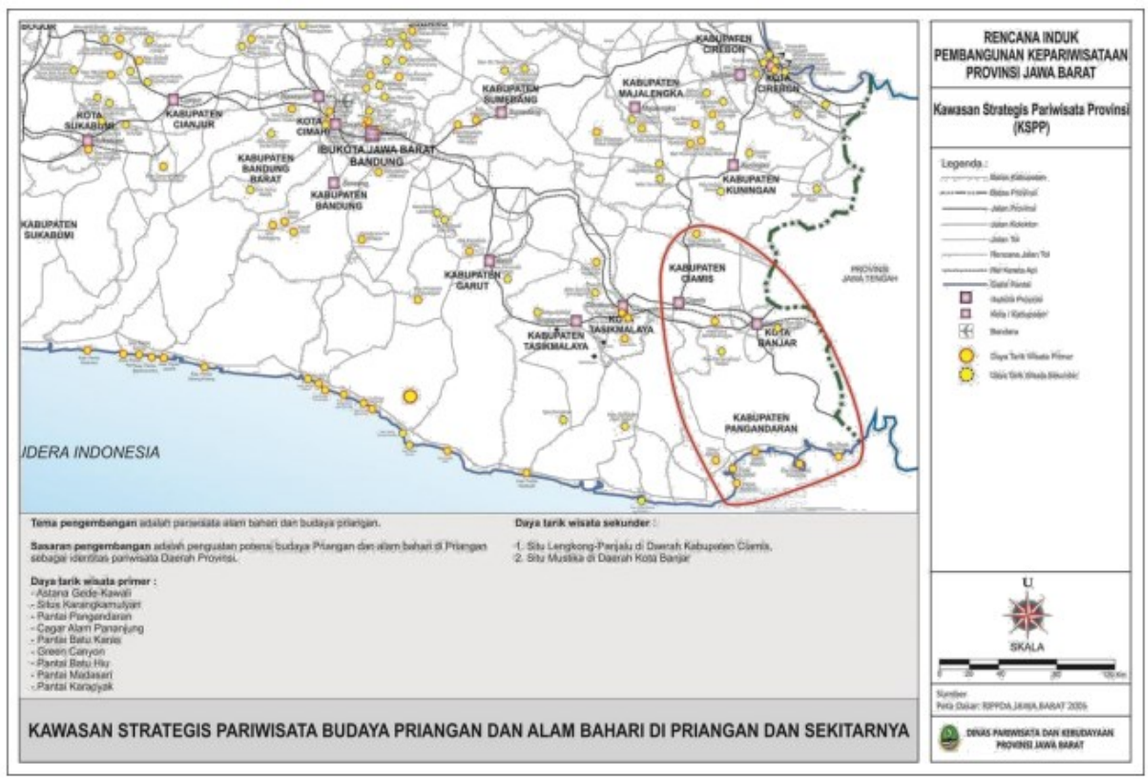
1. tema pengembangan adalah pariwisata alam bahari dan budaya Priangan;
2. sasaran pengembangan adalah penguatan potensi budaya Priangan dan alam bahari di Priangan sebagai identitas pariwisata Daerah Provinsi; dan
3. daya tarik wisata primer meliputi Astana Gede-Kawali dan Situs Karangkamulyan di Daerah Kabupaten Ciamis; serta Pantai Pangandaran, Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Karas, Green Canyon, Pantai Batu Hiu, Pantai Madasari, Pantai Karapyak, serta Gunung Galunggung dan Kampung Naga di Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan daya tarik wisata sekunder meliputi Situ Lengkong-Panjalu di Daerah Kabupaten Ciamis, dan Situ Mustika di Daerah Kota Banjar.

Gambar 2. 7 Destinasi Pariwisata Prioritas Pangandaran-Tasikmalaya-Garut-Cianjur



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025

Gambar 2. 8 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025

Selaras dengan Visi dan Misi Bupati terpilih, sektor pariwisata di merupakan salah satu tujuan utama destinasi wisata di Indonesia, hal ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang menetapkan daerah sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pembangunan kepariwisataan memerlukan landasan yang kokoh antara lain kebijakan strategis untuk dapat menciptakan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat guna memanfaatkan aktivitas pembangunan kepariwisataan secara luas untuk mendapatkan hasil yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Maka pada tahun 2018 telah disusun Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata.

Di dalam Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tersebut digambarkan kepariwisataan Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) wilayah yaitu:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pangandaran dan sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Cimerak dan sekitarnya;
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Langkaplancar Cigugur; dan
4. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Padaherang Mangunjaya.

Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan daerah terdapat 4 (empat) tujuan pokok yaitu :

1) Penataan destinasi Pariwisata;
2) Pembangunan Industri Pariwisata;
3) Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata; dan
4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan adalah pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempertahankan budaya, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingannya dalam suatu sinergi. Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan kepariwisataan nasional maupun pada tingkat destinasi adalah sinergi antar pemangku kepentingan pariwisata dalam merumuskan arah pembangunan dan pengembangan kepariwisataan. Hal yang sering terjadi adalah dalam penetapan rencana pengembangan pariwisata umumnya kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam hal ini pengembangan dan perencanaan pariwisata dapat dikatakan kurang optimal, mengingat kegiatan pariwisata adalah kegiatan multidisiplin dan multisektor. Menurut penelitian Bill Faulkner, *Griffith University* yang mengatakan bahwa "*effective involvement & coordination all of pemangku kepentingan who have a role of play in tourism development and/ or potentially affected by such development*". Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kurang terjadinya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menyusun rencana serta pengelolaan pariwisata yang mengakibatkan pengembangan kepariwisataan kurang optimal. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

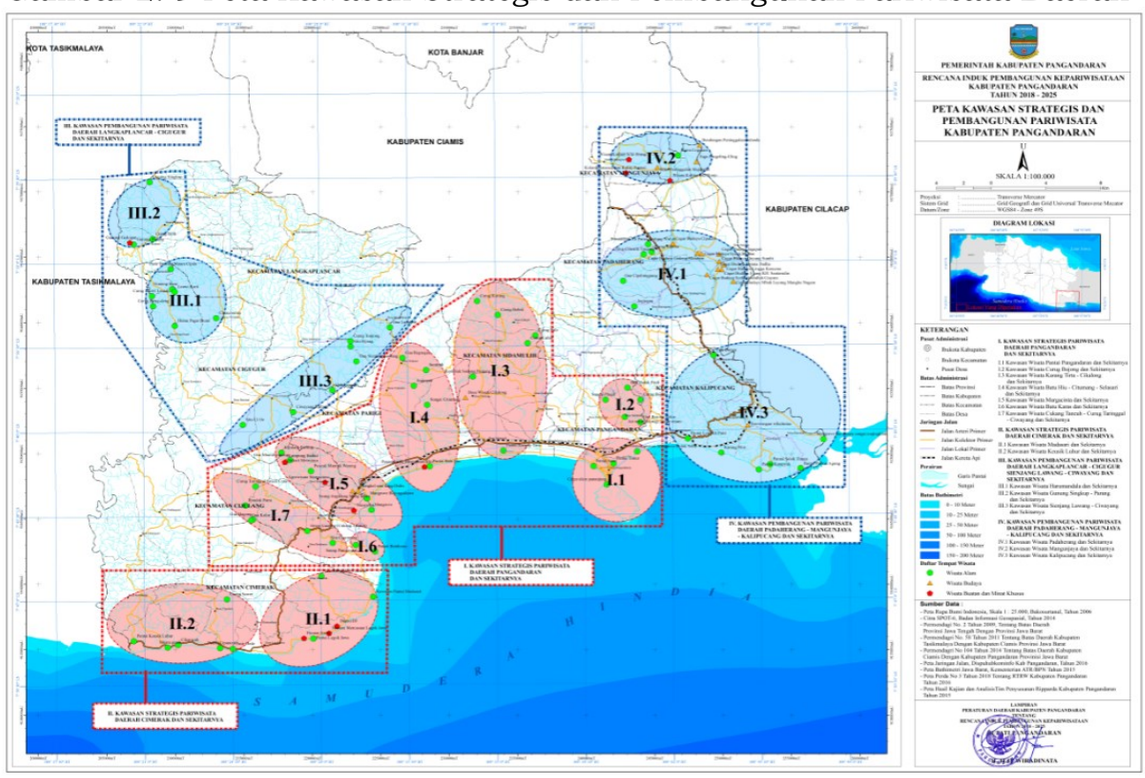
Dalam rangka pembangunan kepariwisataan daerah sebagai suatu destinasi wisata unggulan, dalam proses perencanaannya melibatkan berbagai pihak yang terkait satu dengan lainnya. Dengan kata lain diperlukan koordinasi yang tinggi antara Perangkat Daerah yang ada, khususnya yang menangani bidang kepariwisataan dengan pembina kepariwisataan di tingkat kabupaten maupun dengan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pembangunan kepariwisataan di wilayah ini. Masih terbatasnya Kinerja kepariwisataan daerah seperti kualitas produk wisata yang sebagian besar masih belum bersifat *customize* atau *market oriented*, lemahnya kemampuan pengelolaan, serta tingkat pertambahan investasi yang belum optimal, memperlihatkan bahwa penetapan pariwisata sebagai sektor prioritas dan andalan Pembangunan Daerah belum dapat diwujudkan secara optimal pula, dimana

pembangunan kepariwisataan telah dipilih oleh banyak Negara sebagai salah satu generator perekonomian.

Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa dalam proses pembangunan pariwisata daerah kurangnya pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Penetapan sektor pariwisata sebagai sektor andalan seharusnya didukung oleh tindakan-tindakan kolektif pembangunan yang mampu menciptakan sinergi para pelakunya guna diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Meskipun memiliki daerah pesisir yang cukup panjang sekitar 91 (sembilan puluh satu) kilometer dengan potensi wisata alam pantainya, juga memiliki potensi wisata alam lainnya, yaitu wisata cagar alam, wisata rawa, wisata goa, wisata hutan dan wisata sungai. Jenis potensi wisata lainnya yang dimiliki adalah wisata budaya dan wisata buatan/minat khusus.

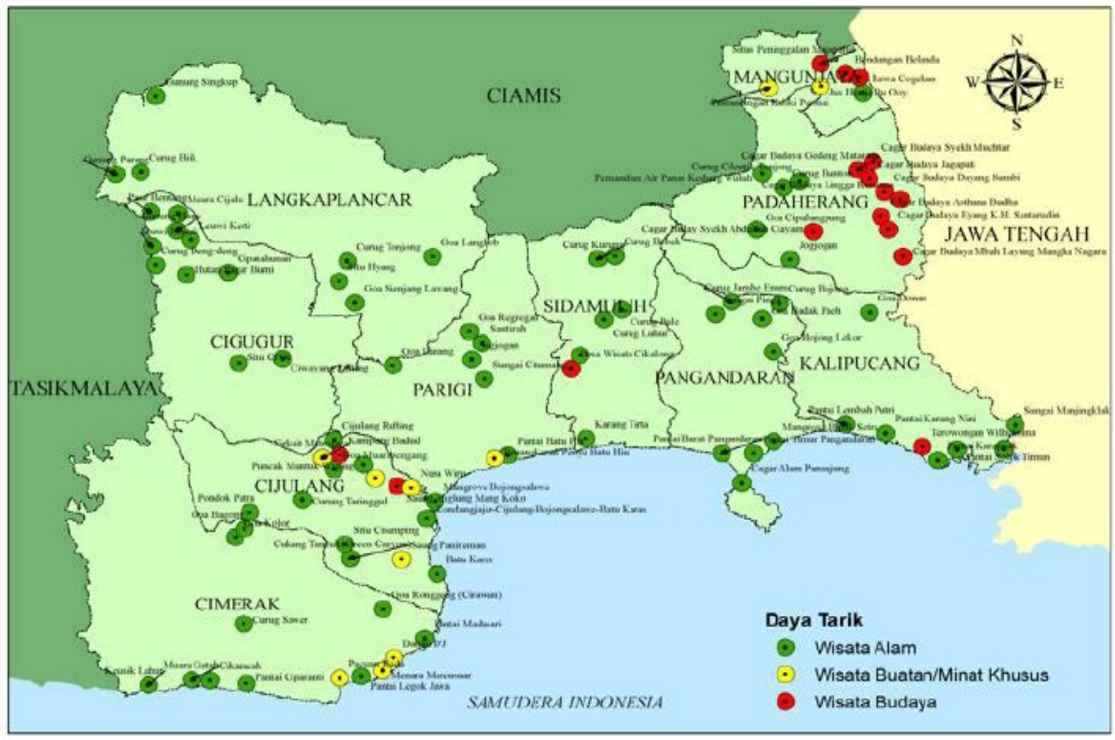
Gambar di bawah ini memperlihatkan sebaran titik tempat wisata, terlihat bahwa mayoritas jenis wisata yang ada merupakan wisata alam yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara terus menerus menata destinasi wisata baik destinasi yang sudah ada maupun yang baru.

Gambar 2. 9 Peta Kawasan Strategis dan Pembangunan Pariwisata Daerah



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–2025

Gambar 2. 10 Lokasi Tempat Wisata dan Jenis Daerah Tujuan Wisata Daerah



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–2025

Daya Tarik Wisata yang ada dapat dibagi ke dalam tiga kategori:

A. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya yang memperlihatkan kekhasan lokal dari kehidupan keseharian masyarakat, yang diantaranya adalah Batu Kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran, Gua Panggung berada di obyek wisata Cagar Alam Pangandaran dan Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang;
B. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam yang merupakan objek wisata berbasis pantai dan cagar alam yang diantaranya adalah Karang Nini, Lembah Putri, Karapyak, Palatar Agung, Pangandaran, Karang Tirta, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari dan Keusik Luhur;
C. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus yang merupakan objek wisata yang dibuat secara khusus untuk menunjang minat-minat tertentu yang diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon dan Curug Jambe serta Cagar Alam Pananjung.

Sebaran daya tarik wisata pada masing-masing Kawasan Pariwisata daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kawasan Pariwisata dan Sebaran Daya Tarik Wisata Daerah

No	Kawasan Pariwisata Daerah	Sub Pembangunan Kawasan	Sebaran Daya Tarik Wisata		
			Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Budaya	Daya Tarik Wisata Buatan
I	Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata	1) Kawasan Wisata Pantai Pangandaran dan Sekitarnya	1) Pantai Barat Pangandaran 2) Pantai Timur Pangandaran	1) Desa Wisata Babakan	

No	Kawasan Pariwisata Daerah	Sub Pembangunan Kawasan	Sebaran Daya Tarik Wisata		
			Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Budaya	Daya Tarik Wisata Buatan
	Daerah dan Sekitarnya		3) awasan Taman Wisata Alam Pananjung 4) Kawasan Mangrove Bulak Setra 5) Kawasan Pantai Cikembulan		
		2) Kawasan Wisata Curug Bojong dan Sekitarnya	1) Air Terjun (Curug) Bojong 2) Air Terjun (Curug) Jambe Enum 3) Sungai Pingit 4) Gua Bojong Lekor 5) Gua Badak Paeh		
		3) Kawasan Wisata Karang Tirta-Cikalong dan Sekitarnya	1) Pantai Karang Tirta 2) Air Terjun (Curug) Pule 3) Air Terjun (Curug) Luhur 4) Gua Macan 5) Gua Sodong Panjang	1) Desa Wisata Cikalong	
		4) Kawasan Wisata Pantai Batu Hiu-Citumang-Santirah dan Sekitarnya	1) Pantai Batu Hiu 2) Gua Lanang 3) Gua Regregan 4) Sungai Citumang 5) Gua Jogjogan 6) Gua Sienjang Lawang 7) Sungai Ciwayang 8) Air Terjun Curug Tonjong	1) Desa Wisata Selasari (Santirah)	1) Penangkaran Penyu Batu Hiu
		5) Kawasan Margacinta dan Sekitarnya	1) Sungai Cijulang 2) Gua Muara Bengang 3) Kawasan Mangrove Margacinta	1) Kampung Seni Badud 2) Padepokan Seni Sunda Jenggala Manik 3) Saung Angklung Mang Koko	1) Sirkuit Motocross Metro Jaya 2) Agrowisata Margacinta
		6) Kawasan Cukang Taneuh-Pondok Patra dan Sekitarnya	1) Green Canyon (Cukang Taneuh) 2) Green Coral (Curug Taringgul) 3) Pemandian Mata Air Cikalungkung 4) Sungai Muara		1) Agrowisata Pondok Patra

No	Kawasan Pariwisata Daerah	Sub Pembangunan Kawasan	Sebaran Daya Tarik Wisata		
			Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Budaya	Daya Tarik Wisata Buatan
			Cibodas 3) Gua Patra 5) Pemandian Mata Air Sodong Gebos 6) Gua Kolor 7) Gua Bagong		
		7) Kawasan Pantai Batu Karas dan Sekitarnya	1) Pantai Batukaras 2) Hutan Mangrove Batukaras 3) Danau Situ Cisamping		
II	Kawasan Pembangunan Pariwisata Kalipucang-Mangunjaya dan Sekitarnya	1) Kawasan Karang Nini-Majingklak dan Sekitarnya	1) Pantai Karang Nini 2) Pantai Lembah Putri 3) Pantai Karapyak 4) Pantai Solok Timun 5) Pantai Palatar Agung 6) Kawasan Muara dan Mangrove Pantai Majingklak	1) Terowongan Wilhelmina	
		2) Kawasan Sungai Jogjogan-Kedung Wuluh dan Sekitarnya	1) Sungai Jogjogan 2) Gua Cipalungpung 3) Air Terjun Curug Bunton 4) Curug Leutik Tonjong 5) Mata Air Panas Pemandian Kedung Wuluh	1) Makam Syech Muchtar 2) Situs Gedeng Mataram 3) Situs Jagapati 4) Situs Dayang Sumbi 5) Situs Lingga Kencana 6) Situs Astana Budha 7) Makam Eyang K.H Santarudin 8) Makam Mbah Layung Mangkunag ara 9) Makam Syech Abdullah Ciayam 10) Situs	1) Home Industri Jus Honje 2) Agrowisata Kaliki Permai

No	Kawasan Pariwisata Daerah	Sub Pembangunan Kawasan	Sebaran Daya Tarik Wisata		
			Daya Tarik Wisata Alam	Daya Tarik Wisata Budaya	Daya Tarik Wisata Buatan
				Batu Majapahit 11) Tugu Pangeling - Eling	
III	Kawasan Pembangunan Pariwisata Langkaplancar-Cigugur dan Sekitarnya	1) Kawasan Gunung Singkup-Parang dan Sekitarnya	1) Gunung Singkup 2) Gunung Parang 3) Air Terjun Curug Bilik	1) Patilasan Syech Abdul Hamid	
		2) Kawasan Pasir Bentang-Cipatahunan dan Sekitarnya	1) Panorama Pasir Bentang 2) Sungai Muara Cijalu 3) Hutan Gunung Haur 4) Sungai Leuwi Kerti 5) Air Terjun Curug Leuwi Leutak 6) Air Terjun Curug Dengdeng 7) Hutan Pagar Bumi		
IV	Kawasan Pembangunan Pariwisata Cimerak dan Sekitarnya	1) Kawasan Pantai Madasari dan Sekitarnya	1) Pantai Madasari 2) Pantai Legok Jawa 3) Gua Cirawun		1) Danau D'J 2) Pacuan Kuda Madasari
		2) Kawasan Pantai Ciparanti-Keusik Luhur dan Sekitarnya	1) Pantai Ciparanti 2) Pantai Cikaracak 3) Pantai Muara Gatah 4) Pantai Keusik Luhur 5) Air Terjun Curug Sawer		

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–2025

Adapun aktivitas wisata yang diselenggarakan di Daerah cukup beragam, dimana diagendakan berbagai kegiatan kepariwisataan seperti Nyuguh, Hajat Bumi, Upacara Adat, Gelar Budaya Tatar, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Upacara Adat Merlawu, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Hajat Laut, Ronggeng Gunung dan Kontes Burung Berkicau. Kemudian berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdapat rincian jumlah daya tarik wisata yang telah diperbaharui yaitu berdasarkan data pada tahun 2024. Adapun untuk data terkait indikator kebudayaan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Indikator Kebudayaan

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cagar Budaya dilestarikan	30	35	32	40	46
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	0	3	11	4	23
Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	30	30	26	40	46
Persentase Kelompok Budaya Aktif	100	100	218	209	209

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas indikator capaian kebudayaan menggambarkan perkembangan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan Daerah. Data tersebut menunjukan tren kenaikan akan tetapi hanya untuk indikator karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali.

Berdasarkan indikator diatas Daerah berhasil meningkatkan upaya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Peningkatan cagar budaya yang dikelola dan karya budaya yang direvitalisasi menunjukkan adanya sinergi antara pelestarian warisan budaya dan pengembangannya sebagai aset pariwisata dan identitas daerah. Namun, fluktuasi di beberapa indikator menandakan perlunya keberlanjutan program dan pembinaan, agar capaian yang tinggi dapat dipertahankan secara konsisten.

Potensi Daerah terkait pariwisata cukup banyak dan beragam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah dan Jenis Daya Tarik Wisata Daerah Tahun 2024

No	Kecamatan	Daya Tarik Wisata			Jumlah
		Alam	Buatan	Budaya	
1	Pangandaran	16	5	9	30
2	Parigi	51	1	11	63
3	Cijulang	10	6	2	18
4	Langkaplancar	8	2	5	15
5	Cigugur	15	2	7	24
6	Cimerak	34	1	7	42
7	Kalipucang	25	4	16	45
8	Padaherang	4	2	9	15
9	Mangunjaya	1	0	5	6
10	Sidamulih	8	1	2	11
Jumlah		172	24	73	269

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah daya tarik wisata daerah pada tahun 2024 berjumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daya tarik wisata yang tersebar di sepuluh kecamatan. Jenis daya tarik wisata terbagi menjadi tiga kategori, yaitu alam sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) lokasi, buatan 24 (dua puluh empat) lokasi, dan budaya 73 (tujuh puluh tiga) lokasi. Daya tarik wisata alam merupakan jenis yang paling dominan, mencerminkan potensi alam yang melimpah. Penyebaran daya tarik terbanyak terdapat di Kecamatan Parigi dengan 63 (enam puluh tiga) daya tarik wisata didominasi oleh wisata alam sebanyak 51 (lima puluh satu)

lokasi. Disusul oleh Kecamatan Cijulang dengan 43 (empat puluh tiga) lokasi dan Kecamatan Cimerak dengan 42 (empat puluh dua) lokasi. Sementara itu, jumlah daya tarik wisata paling sedikit terdapat di Kecamatan Sidamulih dengan hanya 6 (enam) lokasi. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata daerah masih sangat bertumpu pada kekayaan alam. Oleh karena itu, potensi wisata budaya dan buatan masih terbuka untuk dikembangkan guna menciptakan diversifikasi dan pemerataan sektor pariwisata di seluruh kecamatan.

Sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar untuk menunjang kepariwisataan tersedia. Pada Tahun 2025 terdapat 678 (enam ratus tujuh puluh delapan) akomodasi, yang terdiri dari hotel kelas bintang sebanyak 14 (empat belas) unit, hotel non bintang sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) unit, pondok wisata sebanyak 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) unit, dan 4 (empat) bumi perkemahan dengan ketersediaan masih banyak terpusat di Kecamatan Pangandaran yang memang sudah sangat terkenal di Indonesia bahkan mancanegara. Data ini menunjukkan bahwa akomodasi yang ada lebih banyak bertipe non-bintang dan pondok wisata, yang mencerminkan karakteristik destinasi wisata yang ramah dan terjangkau bagi berbagai kalangan wisatawan. Berikut adalah tabel jumlah akomodasi pada tahun 2025 berdasarkan jenisnya.

Tabel 2. 5 Jumlah dan Jenis Akomodasi Tahun 2025

No	Jenis Akomodasi	Jumlah
1	Hotel Bintang	14
2	Hotel Non Bintang	373
3	Pondok Wisata	287
4	Bumi Perkemahan	4
Jumlah		678

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2025

Selain itu produk wisata yang menjadi bagian dari kepariwisataan daerah adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman berupa rumah makan/restoran/kafe. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, jumlah restoran yang ada pada tahun 2024 adalah sebanyak 809 (delapan ratus sembilan), yang terbagi ke dalam beberapa jenis diantaranya rumah makan, bar rumah minum, dan kafe. Perkembangan jumlah restoran selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang cukup dinamis. Pada tahun 2020, jumlah total restoran tercatat sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) unit, yang terdiri dari 204 (dua ratus empat) rumah makan, 1 (satu) bar/rumah minum, dan 36 (tiga puluh enam) kafe. Hal ini menggambarkan bahwa rumah makan merupakan jenis restoran yang paling dominan, sementara bar/rumah minum dan kafe masih dalam jumlah yang relatif kecil. Memasuki tahun 2021, jumlah restoran mengalami penurunan drastis menjadi 78 (tujuh puluh delapan) unit. Penurunan ini paling terasa pada rumah makan yang berkurang menjadi 64 (enam puluh empat) unit, sedangkan bar/rumah minum bertambah menjadi 2 (dua) unit, dan jumlah kafe turun menjadi 12 (dua belas) unit. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, di mana jumlah total restoran turun menjadi 67 (enam puluh tujuh) unit, dengan rincian 58 (lima puluh delapan) rumah makan, 2 (dua) bar/rumah minum, dan 7 (tujuh) kafe.

Penurunan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 ini berkaitan erat dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak pelaku usaha kuliner harus menghentikan operasional mereka atau bahkan menutup usahanya secara permanen. Namun, pada tahun 2023, sektor restoran mulai menunjukkan pemulihan yang cukup menggembirakan. Jumlah total restoran melonjak menjadi 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) unit. Kenaikan ini terutama dipicu oleh pertumbuhan jumlah rumah makan

yang meningkat tajam menjadi 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit, diikuti oleh bar/rumah minum yang bertambah menjadi 5 unit, dan kafe yang naik menjadi 39 (tiga puluh sembilan) unit. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pariwisata daerah yang mendorong kembali geliat usaha di sektor kuliner. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan yang sangat signifikan dengan jumlah total restoran mencapai 809 (delapan ratus sembilan) unit.

Pertumbuhan pesat rumah makan menunjukkan adanya ekspansi besar-besaran di sektor ini. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan, perubahan gaya hidup masyarakat, serta semakin tingginya kebutuhan akan fasilitas makan yang lebih banyak dan beragam. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rumah makan tetap menjadi tulang punggung perkembangan sektor restoran. Meskipun sektor kafe dan bar/rumah minum mengalami perkembangan, kontribusinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan rumah makan. Fluktuasi yang terjadi selama lima tahun terakhir menggambarkan ketahanan sektor kuliner terhadap berbagai tantangan, serta potensi besar yang dimiliki dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kuliner. Produk wisata lainnya yang juga menjadi bagian dari kepariwisataan daerah adalah Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Jumlah Usaha Pendukung Pariwisata 2020-2024

No	Jenis Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Makan	204	64	58	233	809
2	Bar Rumah Minum	1	2	2	5	N/A
3	Kafe	36	12	7	39	N/A
4	Karaoke	4	4	4	4	4
5	*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*	N/A	N/A	10	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan usaha penyelenggara kegiatan hiburan, rekreasi, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* selama periode tahun 2020 hingga tahun 2023 menunjukkan dinamika yang menarik, meskipun secara keseluruhan jumlah usahanya cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah usaha yang tercatat stabil sebanyak 4 (empat) unit, seluruhnya berasal dari usaha karaoke. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan pandemi COVID-19, usaha karaoke tetap mampu bertahan tanpa mengalami penurunan jumlah. Sementara itu, pada kedua tahun tersebut, tidak terdapat data terkait usaha *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*, yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor.

Tahun 2022 menjadi titik perubahan penting. Jumlah usaha penyelenggara kegiatan hiburan, rekreasi, dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* meningkat signifikan menjadi 14 (empat belas) unit. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya aktivitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*, yang mencatatkan 10 (sepuluh) usaha aktif, sementara usaha karaoke tetap stabil sebanyak 4 (empat) unit. Hal ini dapat menandakan adanya pemulihan sektor pariwisata setelah dua tahun terdampak pandemi. Kehadiran kembali usaha *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* pada tahun 2022 mencerminkan bangkitnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan acara besar, sekaligus menggambarkan peningkatan kebutuhan terhadap fasilitas pertemuan dan rekreasi di Pangandaran.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa usaha karaoke memiliki tingkat stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan usaha *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* dalam kurun waktu tahun 2020–2023. Usaha karaoke mampu bertahan dalam kondisi krisis sekalipun, sedangkan usaha *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* sangat bergantung pada situasi eksternal seperti kondisi kesehatan masyarakat dan kebijakan terkait penyelenggaraan *event*.

Pengelola destinasi wisata cukup beragam mulai dari Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, hingga destinasi wisata yang berada dalam kerangka desa wisata. Terdapat 13 desa wisata yang telah ditetapkan sebagai daya tarik yang mengutamakan kearifan lokal yakni sebagai berikut.

Tabel 2. 7 Desa Wisata yang Telah Ditetapkan Daerah Tahun 2023

No	Nama Desa Wisata	Desa	Kecamatan
1	Desa Wisata Pamotan	Desa Pamotan	Kecamatan Kalipucang
2	Desa Wisata Bojongsari	Desa Bojongsari	Kecamatan Padaherang
3	Desa Wisata Cikalong	Desa Cikalong	Kecamatan Sidamulih
4	Desa Wisata Selasari	Desa Selasari	Kecamatan Parigi
5	Desa Wisata Parakanmanggu	Desa Parakanmanggu	Kecamatan Parigi
6	Desa Wisata Kertayasa	Desa Kertayasa	Kecamatan Cijulang
7	Desa Wisata Batukaras	Desa Batukaras	Kecamatan Cijulang
8	Desa Wisata Cibanten	Desa Cibanten	Kecamatan Cijulang
9	Desa Wisata Cimindi	Desa Cimindi	Kecamatan Cigugur
10	Desa Wisata Kampung Cisangkal	Desa Bangunkarya	Kecamatan Langkaplancar
11	Desa Wisata Sukamulya	Desa Sukamulya	Kecamatan Langkaplancar
12	Desa Wisata Margacinta	Desa Margacinta	Kecamatan Cijulang
13	Desa WIsata Bagolo	Desa Bagolo	Kecamatan Kalipucang

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2025

Selanjutnya untuk mempermudah kegiatan wisatawan yang berkunjung terdapat usaha jasa biro dan agen perjalanan wisata dilengkapi dengan pramuwisata, berikut adalah data usaha biro dan agen perjalanan wisata serta pramuwisata yang telah terdata.

Tabel 2. 8 Usaha Jasa Biro, Agen Perjalanan Wisata dan Pramuwisata Tahun 2020-2024

No	Jenis Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Biro Perjalanan Wisata	3	3	3	6	6
2	Agen Perjalanan Wisata	27	27	27	27	27
3	Daftar Anggota Pramuwisata Baru Himpunan Pramuwisata Indonesia Dewan Pimpinan	129	127	127	126	126

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.7 mengenai usaha jasa biro dan agen perjalanan wisata selama periode tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa terjadi dinamika yang relatif stabil dalam jumlah pelaku usaha di sektor pariwisata tersebut. Jumlah biro perjalanan wisata menunjukkan fluktuasi kecil, yakni dari 3 (tiga) unit usaha pada tahun 2020 hingga tahun 2022, lalu meningkat signifikan menjadi 6 (enam) unit pada tahun 2023 dan tetap stabil di angka yang sama pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat atau peluang usaha di sektor biro perjalanan wisata dalam dua tahun terakhir, yang kemungkinan

didorong oleh pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi dan meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, jumlah agen perjalanan wisata cenderung stabil, berada pada angka 27 (dua puluh tujuh) unit dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan kondisi pasar yang konsisten dan mungkin telah mencapai titik jenuh dalam jangka pendek, atau terdapat kendala dalam ekspansi usaha baru di segmen ini.

Adapun jumlah anggota pramuwisata baru Himpunan Pramuwisata Indonesia Dewan Pimpinan Daerah mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun. Dari 129 (seratus dua puluh sembilan) anggota pada tahun 2020, turun menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) di tahun 2021, kemudian tetap di angka 127 (seratus dua puluh tujuh) pada tahun 2022, dan menurun kembali menjadi 126 (seratus dua puluh enam) pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya regenerasi tenaga kerja pramuwisata, minat yang menurun dari generasi muda terhadap profesi ini, atau adanya pergeseran ke profesi lain yang lebih menjanjikan secara ekonomi. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa meskipun jumlah agen perjalanan wisata relatif stabil, terdapat kecenderungan pertumbuhan pada biro perjalanan wisata dan sedikit penurunan pada keanggotaan pramuwisata.

Berikut adalah tabel fasilitas wisata yang terdapat di Daerah, guna mendukung aktivitas wisata.

Tabel 2. 9 Fasilitas Wisata Daerah Tahun 2020-2023

No	Jenis Fasilitas Wisata	2020	2021	2022	2023
1	Gazebo	N/A	3	3	3
2	Toilet	N/A	6	6	6
3	Lampu Taman	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Loket/*Ticketing*	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Tempat Parkir	N/A	4.662 m^2	4.662 m^2	4.662 m^2
6	Pedestrian	N/A	4.662 m^2	4.662 m^2	4.662 m^2
7	Usaha Jasa Pariwisata *Boogie*/Ban Batukaras	N/A	23	23	23
8	Angkutan Sungai Dan Danau Wisata	N/A	80	80	80
9	Data Pemilik Perahu Pesiar	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tahun 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.8 mengenai fasilitas wisata selama periode 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa terjadi stagnasi dalam pengelolaan dan pendataan fasilitas wisata dalam rentang waktu empat tahun terakhir, meskipun tidak semua fasilitas memiliki data lengkap untuk setiap tahun. Gazebo dan toilet tetap stabil di angka 6 (enam) unit sejak 2021 hingga 2023. Hal ini menunjukkan keberlanjutan dalam penyediaan fasilitas dasar bagi wisatawan. Selanjutnya, tidak terdapat data Lampu Taman dan Loket/*Ticketing* dari tahun 2020 hingga 2023 untuk kedua jenis fasilitas ini. Hal ini bisa berarti fasilitas tersebut belum tersedia, belum terdata, atau belum menjadi prioritas utama dalam pengembangan wisata. Ketiadaan data ini juga menunjukkan perlunya peningkatan pencatatan dan pendataan terhadap elemen pendukung kenyamanan wisata. Untuk tempat parkir dan pedestrian, kedua fasilitas ini menunjukkan data yang sama dari tahun 2021 hingga 2023, yaitu masing-masing seluas 4.662 (empat ribu enam ratus enam puluh dua) meter persegi. Konsistensi luas fasilitas ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar telah tersedia dan tetap

dipertahankan dalam jangka waktu tersebut. Fasilitas ini penting sebagai penunjang kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan.

Jumlah usaha jasa pariwisata tetap pada angka sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit dari tahun 2021 hingga 2023 yang menandakan stabilitas usaha lokal yang mendukung kegiatan wisata air. Hal ini juga mencerminkan peran penting masyarakat setempat dalam menyediakan layanan wisata yang khas dan berkelanjutan. Fasilitas angkutan sungai dan danau wisata pun tetap konsisten dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap diversifikasi atraksi wisata di daerah ini. Secara keseluruhan, stabilitas jumlah fasilitas seperti toilet, tempat parkir, dan usaha jasa pariwisata juga menunjukkan adanya upaya pemeliharaan dan kesinambungan dalam penyediaan sarana wisata.

Kemudian terdapat juga kelembagaan yang terkait langsung dengan aktivitas wisata, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Kelembagaan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023
1	Data Pengurus Organisasi Kuda Wisata Pangandaran	N/A	65	65	65
2	Pengelola Goa	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Pengelola Museum	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

Berdasarkan Tabel 2.9 mengenai kelembagaan pariwisata pada tahun 2020 hingga 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mencerminkan kondisi serta konsistensi peran kelembagaan dalam mendukung sektor pariwisata daerah. Meskipun data yang tersedia cukup terbatas dan tidak mencakup seluruh tahun secara menyeluruh, informasi yang ditampilkan tetap memberikan gambaran penting mengenai eksistensi dan keberlanjutan lembaga-lembaga pendukung pariwisata lokal. Pertama, data pengurus Organisasi Kuda Wisata Pangandaran menunjukkan jumlah yang stabil, yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) orang pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Meskipun tidak terdapat data pada tahun 2020, kestabilan jumlah pengurus pada tahun-tahun setelahnya mengindikasikan bahwa organisasi ini memiliki struktur yang solid dan peran yang cukup konstan dalam mendukung kegiatan wisata berkuda di kawasan Pangandaran. Hal ini juga menunjukkan bahwa sektor wisata kuda merupakan bagian penting dalam atraksi wisata lokal yang masih dijaga keberlangsungannya oleh komunitas maupun pemerintah daerah.

Secara umum, tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kelembagaan pariwisata yang sudah terbentuk dan aktif seperti Organisasi Kuda Wisata Pangandaran, namun sebagian lainnya seperti pengelola goa dan museum belum menunjukkan perkembangan yang signifikan atau setidaknya belum terdata dengan baik. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pelaku pariwisata untuk memperkuat aspek kelembagaan, karena kelembagaan yang kuat merupakan pondasi penting bagi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan profesional.

2. Potensi Pertanian

Saat ini Daerah masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, yaitu masih sebagai penyumbang tertinggi. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 25,60 (dua puluh lima koma enam nol) persen lebih tinggi bila

dibandingkan dengan sektor lainnya, sektor ini telah berperan besar dalam pembangunan, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto, penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sub sektor dan sektor lainnya.

Pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan), beberapa komoditas dapat dikategorikan sebagai komoditi unggulan, dan prospektif untuk dikembangkan. Saat ini pengembangan agribisnis komoditas unggulan muncul menjadi salah satu alternatif peluang investasi dalam pembangunan sektor pertanian. Mengemukanya fenomena tersebut dalam konteks perencanaan wilayah dan otonomi daerah, terjadi karena pendekatan tersebut yang diyakini dan telah teruji sebagai model yang layak dikembangkan menuju pertanian yang tangguh, khususnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Sasaran pembangunan pertanian daerah ditetapkan berdasarkan Program revitalisasi pertanian, meliputi kegiatan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah adanya usaha di sektor hulu usaha tani (*on farm*), hilir (*off farm*) dan usaha penunjang lainnya, peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto kategori pertanian, peningkatan ekspor produk pertanian segar maupun olahan, peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani, penguatan kelembagaan petani, peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif, dan peningkatan pendapatan petani.

A. Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura

a) Komoditas Padi

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional, dan menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian kedepan. Pada tahun 2022 produksi padi tercatat sebanyak 210.145 (dua ratus sepuluh ribu seratus empat puluh lima) ton dan mengalami penurunan sebesar 4.120,98 (empat ribu seratus dua puluh koma sembilan delapan) ton dibanding tahun 2021. Penurunan produksi ini dapat disebabkan karena menurunnya luas panen dan juga produktivitasnya. Namun pada tahun 2024, produksi tanaman padi mengalami peningkatan hingga menjadi sebanyak 215.345 (dua ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima) ton dengan luas lahan sawah yang tetap yaitu 16.727 (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektar.

Tabel 2. 11 Perkembangan Luas Sawah, Produktivitas dan Produksi Komoditas Padi Tahun 2020-2024

Data	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Padi	Ton/ Ha	6,3	6,3	6,22	6,23	6,08
Luas Lahan Sawah	Ha	16.564	16.747	16.727	16.727	16.727
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar	Ton	6,3	6,2	6,24	6,24	6,09
Produksi Tanaman Padi/Bahan	Ton	205.981,12	214.265,66	210.144,68	211.285,68	215.344,84

Data	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pangan Utama Lokal Lainnya						

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.10, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat dinamika dalam produktivitas dan luas lahan sawah, serta fluktuasi dalam produksi tanaman padi selama periode lima tahun tersebut. Pertama, dari sisi produktivitas padi terlihat adanya penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, produktivitas tercatat sebesar 6,3 (enam koma tiga) ton per hektar dan mengalami penurunan setiap tahunnya hingga menjadi 6,08 (enam koma nol delapan) ton per hektar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan efisiensi hasil panen per hektar lahan sawah yang dapat menjadi indikasi berbagai tantangan, seperti penurunan kesuburan tanah, perubahan iklim, atau gangguan hama dan penyakit. Selanjutnya, luas lahan sawah daerah relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, luas lahan mencapai 16.564 hektar dan mengalami sedikit peningkatan hingga mencapai 16.727 hektar pada tahun 2022. Namun, setelah itu luas lahan tetap stagnan pada angka yang sama hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ekspansi signifikan dalam pembukaan lahan baru untuk pertanian padi, yang berarti produksi sangat tergantung pada produktivitas lahan yang tersedia.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar juga menunjukkan tren yang serupa dengan produktivitas padi secara keseluruhan. Dari angka 6,3 (enam koma tiga) ton pada tahun 2020, terjadi penurunan hingga mencapai 6,09 (enam koma nol sembilan) ton per hektar pada tahun 2024. Kesamaan tren ini mengindikasikan bahwa tidak hanya padi, tetapi juga bahan pangan utama lain yang ditanam di wilayah ini mengalami tantangan dalam peningkatan hasil produksi per hektar. Dari sisi produksi total tanaman padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (dalam ton), terlihat bahwa jumlah produksi sempat meningkat dari 205.981 ton pada tahun 2020 menjadi 214.265 ton pada tahun 2021. Namun, setelah itu mengalami fluktuasi dengan penurunan menjadi 210.144 ton pada tahun 2022, kemudian naik kembali menjadi 215.384 ton pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan produktivitas per hektar, total produksi masih dapat dijaga bahkan meningkat, kemungkinan besar karena stabilitas atau sedikit peningkatan luas lahan sawah.

Secara keseluruhan, tren data menunjukkan bahwa daerah menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan sawahnya. Meski demikian, keberhasilan dalam menjaga stabilitas luas lahan pertanian dan upaya pengelolaan yang memungkinkan produksi tetap tinggi menjadi aspek positif. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap faktor penyebab penurunan produktivitas, serta inovasi dalam teknologi pertanian dan sistem irigasi agar ketahanan pangan daerah dapat terus terjaga di masa mendatang.

Selain komoditas padi, terdapat juga komoditas jagung sebagai pengganti padi. Dari tahun 2020 hingga tahun 2024, produktivitas jagung cukup fluktuatif yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 Perkembangan Produktivitas Jagung Tahun 2020-2024

Komoditas	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jagung	Ton/ Ha	6,01	6,45	6,24	5,68	5,92

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Berdasarkan Tabel 2.12 yang menunjukkan perkembangan produktivitas jagung daerah dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa produktivitas jagung di wilayah ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa produktivitas jagung mengalami peningkatan pada awal periode, namun kemudian menurun selama dua tahun berturut-turut sebelum akhirnya menunjukkan sedikit pemulihan pada tahun terakhir. Penurunan dua tahun berturut-turut ini menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam sektor pertanian jagung. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain: ketergantungan pada cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit tanaman, penurunan kualitas lahan, serta keterbatasan dalam penerapan teknologi pertanian modern. Faktor sosial-ekonomi seperti terbatasnya akses petani terhadap modal dan pelatihan juga mungkin turut mempengaruhi.

Pada tahun 2024, produktivitas sedikit meningkat menjadi 5,92 ton per hektar. Meskipun angka ini masih belum kembali ke tingkat yang dicapai pada tahun 2020 atau 2021, peningkatan ini memberikan harapan akan adanya potensi perbaikan dalam sektor pertanian jagung di masa mendatang. Kenaikan ini dapat mencerminkan adanya intervensi pemerintah, perbaikan praktik budidaya, atau perbaikan faktor eksternal lainnya. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa produktivitas jagung belum stabil dan masih rentan terhadap berbagai faktor eksternal dan internal.

b) Komoditas Biofarmaka

Prospek pengembangan komoditas biofarmaka khususnya untuk komoditas jahe, laos, kencur, kunyit, dan kapulaga cukup potensial untuk dikembangkan mengingat ketersediaan sumberdaya lahan yang cukup luas, iklim yang cocok, teknologi yang tersedia, serta sumber daya manusia yang cukup terampil dalam budidaya komoditas tersebut. Di samping itu, pasar komoditas tersebut masih terbuka lebar. Komoditas biofarmaka di didominasi oleh kapulaga, jahe, kencur, dan kunyit yang cukup tinggi produksinya. Produksi kapulaga merupakan produksi komoditas biofarmaka dengan jumlah tertinggi diantara komoditas biofarmaka lainnya meskipun produksinya mengalami penurunan setiap tahunnya mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan produksi sebesar 742 (tujuh ratus empat puluh dua) ton. Produksi jahe cukup fluktuatif dimana produksi tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah produksi sebanyak 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) ton dan mengalami penurunan pada tahun 2023 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 hingga menjadi sebesar 198 (seratus sembilan puluh delapan) ton.

Produksi kencur terus mengalami peningkatan mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 dengan jumlah produksi sebanyak 116 (seratus enam belas) ton. Produksi kunyit cukup fluktuatif dimana produksi tertinggi yaitu pada tahun 2024 dengan jumlah produksi sebanyak 112 (seratus dua belas) ton dan mengalami penurunan pada tahun 2023 namun mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024. Beberapa komoditas seperti

lengkuas, temulawak, mengkudu/pace, dan mahkota dewa memiliki data yang terbatas dan tidak konsisten tiap tahunnya. Lengkuas misalnya, memiliki produksi yang relatif kecil dan fluktuatif (dari 9,75 (sembilan koma tujuh lima) ton di tahun 2021 menjadi 40,94 (empat puluh koma sembilan empat) ton di 2024). Sementara itu, data untuk temulawak dan komoditas lainnya hanya tercatat pada tahun-tahun tertentu, menunjukkan bahwa komoditas ini belum menjadi prioritas pengembangan atau belum memiliki pasar yang stabil.

Tabel 2. 13 Perkembangan Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditas Biofarmaka Tahun 2021–2024

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)				Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Jahe	28,79	56,31	10,91	12,44	214,67	1.137,54	155,13	197,27
2	Laos/ Lengkuas	0,69	0,37	-	2,64	9,79	8,12	10,85	40,24
3	Kencur	2,07	2,98	2,60	10,14	23,51	32,33	42,39	115,54
4	Kunyit	2,36	3,19	0,7	8,14	33,27	39,97	34,77	111,68
5	Lempuyang	0,02	-	0,02	-	0,50	-	-	-
6	Temulawak	0,01	-	-	-	0,14	-	-	-
7	Kapulaga	148,7	154,9	3,84	60,66	2.089,15	1.487,06	1.075,3	742,03
8	Mengkudu/Pace*)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mahkota Dewa *)	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Daerah memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas biofarmaka, khususnya jahe, kapulaga, kencur, dan kunyit. Namun, fluktuasi dalam luas tanam, panen, dan produksi menunjukkan adanya tantangan dalam hal konsistensi produksi yang mungkin disebabkan oleh faktor cuaca, ketersediaan lahan, sarana produksi, serta minat petani. Pengembangan yang lebih terarah dan berkelanjutan melalui dukungan teknis dan kebijakan akan sangat diperlukan agar komoditas-komoditas ini dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian daerah.

c) Komoditas Sayuran

Komoditas sayuran yang mayoritas dibudidayakan oleh petani adalah sayuran dataran rendah yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Beberapa sayuran yang teridentifikasi sebagai komoditas banyak diusahakan oleh para petani adalah cabe merah, cabe rawit, tomat, kacang panjang, kangkung, bayam, dan buncis. Sedangkan komoditas sayuran lainnya belum menjadi prioritas, namun sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Beberapa daerah sentra produksi utama tanaman sayuran adalah Kecamatan Langkaplancar, Parigi, Kalipucang, Padaherang, Mangunjaya, dan Cimerak.

Produksi tanaman sayuran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 cukup fluktuatif. Terdapat produksi tanaman sayuran yang mengalami penurunan namun meningkat kembali seperti cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, dan terung. Terdapat pula produksi tanaman sayuran yang terus mengalami peningkatan seperti bawang merah dan tomat. Produksi komoditas sayuran yang paling tinggi yaitu cabai rawit pada tahun 2021 dan 2024 yaitu sebanyak 249 (dua ratus sembilan puluh empat) ton dan 256 (dua ratus lima puluh enam) ton, serta cabai besar pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) ton dan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) ton. Kondisi daerah dengan lingkungan

tropis dan curah hujan yang cukup, suhu hangat, dan tanah gembur sangat cocok untuk ditanami cabai sehingga produksi cabai cukup tinggi.

Tabel 2. 14 Luas Panen dan Produksi Komoditas Sayuran Tahun 2021–2024

No	Komoditi	Luas Panen (Ha)				Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Bawang daun	21	6	6	3	71,1	25,0	25,4	11,3
2	Bawang merah	5	4	7	23	14,5	20,1	49,4	94,7
3	Bawang putih	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bayam	21	4	1	1	63,9	11,7	3,4	2,7
5	Buncis	13	7	-	-	45,1	25,5	-	-
6	Cabai besar	33	32	47	49	191,2	162,5	294,9	226,5
7	Cabai keriting	21	9	13	16	96,4	31,6	72,3	74,7
8	Cabai rawit	49	15	21	46	248,4	102,7	134,9	255,6
9	Kacang panjang	49	19	31	29	247,2	88,3	155,8	113,3
10	Kangkung	43	33	21	30	175,4	115,5	81,0	107,4
11	Labu siam	22	11	-	-	-	-	-	-
12	Petsai	22	9	9	9	112,9	42,4	32,3	23,2
13	Terung	2	5	20	27	135,1	63,8	114,8	118,5
14	Tomat	-	-	9	29	8	27,5	62,8	147
15	Wortel	2	5	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Produksi kacang panjang dan kangkung konsisten dan produktif. Kacang panjang dan kangkung menunjukkan tren yang stabil dan produktivitas yang cukup baik. Hal ini mencerminkan bahwa tanaman sayuran ini sangat adaptif terhadap kondisi lokal dan memiliki permintaan pasar yang stabil. Produksi sayuran daun seperti bayam, bawang daun, dan sawi mengalami fluktuasi dalam hal produksi. Misalnya, bayam yang memiliki produksi sebesar 63,9 (enam puluh tiga koma sembilan) ton pada 2021 menurun drastis menjadi hanya 2,7 (dua koma tujuh) ton pada 2024. Demikian pula dengan bawang daun yang produksinya turun dari 71,1 (tujuh puluh satu koma satu) ton pada 2021 menjadi 11,3 (sebelas koma tiga) ton di 2024. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berkurangnya minat petani untuk menanam jenis ini, kendala cuaca, atau perubahan pola konsumsi pasar.

Beberapa komoditas seperti wortel, terung, petai, dan labu siam menunjukkan data yang tidak konsisten, bahkan kosong pada beberapa tahun. Misalnya, wortel hanya tercatat memiliki produksi pada 2022 dan 2023, dengan produksi tertinggi sebesar 147,4 (seratus empat puluh tujuh koma empat) ton di 2023. Demikian pula dengan terung, yang tidak memiliki data pada 2024. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa komoditas ini belum memiliki nilai ekonomi yang kuat di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, produksi sayuran menunjukkan bahwa meskipun beberapa komoditas mengalami penurunan baik dari sisi luas panen maupun volume produksi, beberapa komoditas utama seperti cabai besar, cabai rawit, bawang merah, tomat, dan kacang panjang menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi pengembangan pertanian sayuran, terutama jika didukung oleh peningkatan teknologi budidaya, penyediaan benih unggul, serta pendampingan petani secara intensif.

d) Komoditas Buah-Buahan

Potensi yang dimiliki terkait keragaman agroklimat, sesuai untuk pengembangan berbagai jenis komoditas hortikultura, terutama komoditas buah-buahan, salah satu diantaranya adalah komoditas alpukat, durian, duku, pisang, sawo, manga, manggis, dan petai. Komoditas tersebut menjadi komoditas yang diunggulkan karena dari sisi agroklimat sangat cocok untuk pengembangan komoditas tersebut, bahkan komoditas ini bisa dijadikan oleh-oleh para wisatawan. Walaupun produksi maupun luas panennya komoditas tersebut sifatnya tidak stabil.

Produksi buah-buahan tertinggi yaitu komoditas pisang pada tahun 2021, 2023 dan 2024, serta sawo pada tahun 2022. Disusul oleh petai, durian, dan alpukat pada tahun 2021; pisang, petai dan durian pada tahun 2022; durian, manggis, dan petai pada tahun 2023, serta manggis, durian, dan petai pada tahun 2024. Dapat dilihat bahwa pisang, sawo, petai, durian, dan manggis merupakan komoditas dengan produksi paling banyak. Anggur, buah naga, dan rambutan terus mengalami peningkatan mulai tahun 2021 hingga tahun 2024.

Tabel 2. 15 Produksi Buah-buahan Tahunan menurut Jenis Tanaman Tahun 2021-2024

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	234,6	109,6	163,6	158,6
2	Anggur	-	0,2	5,1	13,9
3	Belimbing	-	2,1	4,2	2,0
4	Buah Naga	-	2,7	5,2	3,4
5	Duku/Langsat	84,9	-	-	301,6
6	Durian	267,5	286,4	1.495,5	597,2
7	Jambu Air	1,3	5,0	1,9	-
8	Jambu Biji	0,8	17,3	7,0	23,3
9	Jeruk Siam/Keprok	153,5	114,9	133,9	138,2
10	Lengkeng	0,9	7,8	-	9,8
11	Mangga	27,9	7,8	100,2	52,9
12	Manggis	11	171,3	1.276,5	678,6
13	Nenas	-	-	1,2	16,1
14	Nangka/ Cempedak	12,6	9,7	65,6	81,8
15	Pepaya	63,3	17,4	120,6	44,1
16	Pisang	7.495,9	500,8	4.967,0	2.213,4
17	Rambutan	-	58,6	136,5	183,6
18	Salak	-	4,0	1,1	0,6
19	Sawo	20,8	699,1	113,0	372,8
20	Sirsak	-	0,9	-	-
21	Sukun	0,9	-	-	-
22	Melinjo	4,3	-	-	-
23	Petai	619,0	500,8	1.008,8	399,9

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Durian dan manggis merupakan komoditas unggulan dengan lonjakan produksi. Komoditas durian menunjukkan perkembangan produksi yang sangat pesat. Pada tahun 2021, produksi durian berada di angka 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) ton, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 1.495,5 (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma lima) ton pada 2023, sebelum sedikit menurun ke 597,2 (lima ratus sembilan puluh tujuh koma dua) ton pada 2024. Manggis pun mengalami pola serupa, dari hanya 11 (sebelas) ton di tahun 2021 menjadi 1.276,5 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima) ton pada 2023, dan turun ke 678,6 (enam ratus tujuh puluh delapan koma enam) ton pada 2024. Hal ini menandakan bahwa kedua buah ini berpotensi menjadi komoditas ekspor atau unggulan lokal, meskipun perlu perhatian terhadap fluktuasi produksinya.

Produksi petai cukup konsisten dan produktif. Petai merupakan salah satu komoditas buah tahunan yang memiliki tren produksi cukup stabil dan

tinggi. Produksi pisang mengalami fluktuasi produksi yang ekstrem dengan penurunan sangat tajam dari 7.495,9 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma sembilan) ton di tahun 2021 menjadi hanya 500,8 (lima ratus koma delapan) ton di 2022, sebelum kembali naik ke 4.967 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) ton pada 2023 dan menurun lagi ke 2.213,4 (dua ribu dua ratus tiga belas koma empat) ton di 2024. Fluktuasi ekstrem ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor cuaca, serangan hama, atau perubahan pola tanam. Meski demikian, potensi pisang masih besar, mengingat produksinya bisa sangat tinggi pada tahun-tahun tertentu.

Beberapa komoditas lain seperti jeruk siam/keprok, nangka/cempedak, dan pepaya menunjukkan tren produksi yang relatif stabil. Pepaya dan nangka juga menunjukkan potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, meskipun produksi masih tergolong sedang. Buah-buahan seperti anggur, belimbing, buah naga, jambu biji, jambu air, dan sirsak memiliki angka produksi yang relatif kecil dan belum menunjukkan perkembangan berarti. Produksi anggur misalnya, hanya 1,2 (satu koma dua) ton pada 2023 dan 13,9 (tiga belas koma sembilan) ton di 2024, yang menandakan bahwa buah ini mungkin masih dalam tahap pengembangan atau belum menjadi komoditas utama. Hal yang sama juga terjadi pada sukun, melinjo, dan salak, yang produksinya tidak tercatat konsisten.

Beberapa buah tropis seperti rambutan, sawo, dan mangga memiliki peluang pasar yang besar, namun belum menunjukkan stabilitas produksi. Contohnya buah mangga yang menunjukkan tren kenaikan, dari 9 (sembilan) ton pada 2021 menjadi 132,1 (seratus tiga puluh dua koma satu) ton pada 2024, yang menandakan adanya potensi untuk peningkatan skala produksi jika mendapat perhatian lebih. Secara keseluruhan, daerah memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai jenis buah-buahan tropis, terutama durian, manggis, petai, dan pisang. Namun, masih terlihat ketidakkonsistenan dalam produksi sejumlah komoditas, yang bisa disebabkan oleh kendala teknis, iklim, maupun manajemen budidaya. Untuk mengoptimalkan sektor hortikultura ini, diperlukan strategi pengembangan komoditas unggulan secara berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, potensi buah-buahan di Pangandaran tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional.

B. Peternakan

Daerah memiliki potensi pengembangan peternakan, yaitu diantaranya: 1) Ternak besar (sapi, kerbau, kuda, domba, kambing dan kelinci), 2) Ternak unggas berupa ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik. Salah satu ternak unggulan yang paling berpotensi untuk dikembangkan antara lain adalah domba, kambing, sapi potong, ayam buras, ayam pedaging dan ayam petelur. Populasi ternak besar tertinggi yaitu domba, diikuti oleh sapi dan kambing. Populasi ternak unggas tertinggi yaitu ayam pedaging, diikuti oleh ayam petelur dan ayam buras. Populasi ternak besar dan ternak unggas dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebagian besar mengalami penurunan, hanya kuda dan itik yang mengalami peningkatan yaitu sebanyak 10 ekor dan 5.714 ekor. Berikut diuraikan data jumlah ternak berdasarkan kelas dan jenis ternak.

Tabel 2. 16 Populasi Ternak Besar Tahun 2022-2023

No	Jenis Ternak	Populasi		Peningkatan/Penurunan (Ekor)
		2022	2023	
1	Sapi	18.847	16.544	-2.303
2	Kerbau	356	234	-122
3	Kambing	11.929	10.136	-1.793

No	Jenis Ternak	Populasi		Peningkatan/Penurunan (Ekor)
		2022	2023	
4	Domba	29.311	26.154	-3.157
5	Kuda	139	149	10

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2. 17 Populasi Ternak Unggas Tahun 2022-2023

No	Jenis Ternak	Populasi		Peningkatan/Penurunan (Ekor)
		2022	2023	
1	Ayam Buras	346.023	335.626	-10.3976
2	Ayam Pedaging	1.566.661	516.900	-1.049.761
3	Ayam Petelur	619.327	227.168	-392.159
4	Itik	21.207	26.921	5.714

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2. 18 Produksi Ternak Besar dan Ternak Unggas Tahun 2022-2023

No	Jenis Produksi	Satuan	Jumlah (Ton)			
			2020	2021	2022	2023
1	Daging Sapi	Ton	662,69	731,99	1.127,20	769,48
2	Daging Kambing	Ton	14,66	12,06	19,72	15,20
3	Daging Domba	Ton	42,74	45,74	63,44	43,59
4	Daging Kerbau	Ton	4,45	6,52	8,73	3,22
7	Daging Ayam Pedaging	Ton	1.880,59	2.549,84	2.573,02	516,90
8	Daging Ayam Kampung	Ton	376,21	N/A	N/A	335,62
9	Daging Itik	Ton	21,73	131,71	137,39	26,92
10	Telur Ayam Ras	Ton	3.875,71	3.580,73	2.630,46	2.828,04
11	Telur Ayam Kampung	Ton	869,86	N/A	N/A	725,67
12	Telur Itik	Ton	178,00	131,71	137,39	139,99

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel di atas menunjukkan perkembangan produksi berbagai jenis daging dan telur di wilayah tersebut dalam periode 2020 hingga 2023. Produksi daging sapi mengalami fluktuasi, dengan kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 1.127,20 (seribu seratus dua puluh tujuh koma dua nol) ton sebelum menurun di tahun 2023 menjadi sebesar 769,48 ton (tujuh ratus enam puluh sembilan koma empat delapan). Produksi daging kambing relatif stabil dengan sedikit kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebesar 15,20 (lima belas koma dua nol) ton. Produksi daging domba sempat meningkat hingga tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 63,44 (enam puluh tiga koma empat empat) namun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 43,59 (empat puluh tiga koma lima sembilan) ton. Daging kerbau juga menunjukkan tren naik hingga tahun 2022 menjadi sebesar 8,73 (delapan koma tujuh tiga) ton sebelum mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,32 (dua koma tiga dua) ton.

Produksi daging ayam pedaging mendominasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2.573,02 (dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma nol dua) ton, meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi 516,90 (lima ratus enam belas koma sembilan nol) ton. Sementara itu, daging ayam kampung baru tercatat produksinya kembali pada tahun 2023 sebesar 335,62 (tiga ratus tiga puluh tiga koma enam dua) ton. Produksi daging itik meningkat dari sebesar 21,73 (dua puluh satu koma tujuh tiga) ton pada tahun 2020 menjadi 26,92 (dua puluh enam koma sembilan dua) ton pada tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Untuk telur ayam ras, produksinya cenderung tinggi dengan capaian

terbesar pada tahun 2021 sebesar 3.580,73 (tiga ribu lima ratus delapan puluh koma tujuh tiga) ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 2.630,46 (dua ribu enam ratus tiga puluh koma empat enam) ton dan sedikit mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi sebesar 2.828,04 (dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma nol empat) ton. Produksi telur ayam kampung pada tahun 2023 tercatat sebesar 725,67 (tujuh ratus dua puluh lima koma enam tujuh) ton. Produksi telur itik relatif stabil dari tahun 2021 sampai tahun 2023 setelah mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga menjadi sebesar 139,99 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) ton pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, produksi protein hewani di wilayah Pangandaran menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti permintaan pasar, ketersediaan pakan, serta kondisi peternakan. Daging ayam pedaging dan telur ayam ras tetap menjadi komoditas utama, sedangkan komoditas lain seperti daging sapi dan domba mengalami fluktuasi yang perlu dicermati untuk perencanaan ketahanan pangan daerah ke depan.

C. Komoditas Perkebunan

Pengelolaan perkebunan daerah terdiri dari Perkebunan Besar Negara/Swasta yang tercatat seluas 4.324,35 hektar yang pengelolaannya oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Batulawang; dan perkebunan rakyat yang tercatat seluas 39.029,52 hektar. Perkebunan rakyat terdiri dari komoditas tanaman tahunan dan tanaman semusim, yang diusahakan pada lahan masyarakat yang ditanami atau dikembangkan menjadi kawasan perkebunan. Komoditi yang dikembangkan didominasi oleh komoditi kelapa dalam, kelapa deres, cengkeh, kakao, pala, kopi robusta dan karet. Komoditas tersebut menggambarkan bahwa Daerah sangat potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan terutama komoditas yang diunggulkan di daerah. Tanaman perkebunan rakyat dengan produksi tertinggi yaitu kelapa pada tahun 2021 hingga 2024, diikuti oleh kelapa sawit, kopi, dan kakao dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan untuk komoditas tanaman semusim yaitu komoditas tembakau, walaupun hanya dikembangkan di Kecamatan Mangunjaya dan Padaherang.

Tabel 2. 19 Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2021-2024

No	Komoditi	Luas Tanam (Ha)				Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Karet	0,7	0,7	666,4	670,4	0,2	0,2	204,2	202,1
2	Kelapa	34,1	34,0	34.030,9	34.108,4	84,8	85,3	85.769,7	49.637,4
3	Kelapa sawit	0,0	0,0	47,9	79,8	-	-	238,0	239,7
4	Kopi	0,6	0,6	633,0	642,0	0,3	0,3	276,4	279,6
5	Kakao	0,9	0,9	887,4	886,4	0,3	0,3	241,3	244,1
6	Pala	1,3	1,4	1.458,0	1.467,9	0,0	0,1	12,9	12,8
7	Lada	0,1	0,1	79,7	79,7	0,0	0,0	35,9	34,8
8	Tembakau	0,0	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	31,2	31,6

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Tabel 2.19, dapat disimpulkan bahwa sektor perkebunan rakyat mengalami perkembangan yang cukup positif dalam hal perluasan lahan, terutama pada komoditas seperti karet, kopi, dan kelapa sawit. Kelapa masih menjadi komoditas unggulan dengan produksi tertinggi meski menunjukkan penurunan signifikan di tahun terakhir. Adanya pertumbuhan luas tanam pada beberapa komoditas menunjukkan adanya upaya diversifikasi tanaman perkebunan oleh petani maupun pemerintah daerah. Namun demikian, peningkatan luas tanam tidak selalu diiringi dengan lonjakan produksi yang sepadan. Hal ini mengindikasikan perlunya

peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi, perbaikan sistem pertanian, serta penanganan terhadap faktor-faktor yang menghambat hasil panen.

Komoditas pala dan kakao, meski stabil, berpotensi untuk lebih dikembangkan sebagai sumber ekonomi alternatif. Perkembangan ini menggambarkan bahwa Daerah memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan rakyat. Untuk memaksimalkan potensi ini, perlu adanya dukungan dalam bentuk pelatihan, teknologi pertanian, dan akses pasar yang lebih baik bagi petani.

3. Potensi kelautan

Dengan garis pantai yang panjang kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) kilometer, lahan laut yang cukup luas, dan kekayaan ikan laut yang berlimpah, tetapi masyarakat tidak tergantung kepada laut saja, dan masyarakat tidak melupakan potensi budidaya perikanan. Masyarakat Pangandaran menggali potensi air payau dengan membangun tambak-tambak ikan air tawar dan perairan umum. Potensi perikanan air tawar tetap dilakukan dengan mengusahakan budidaya ikan air tawar yang bahkan memiliki luas sangat besar jika dibandingkan dengan usaha perikanan tambak.

Produksi ikan tangkapan hasil nelayan di laut sangat tergantung kepada kondisi alam dan cuaca sehingga produksi ikan mengalami siklus musiman bukan hanya disebabkan kemampuan nelayan untuk melaut faktor gangguan cuaca seperti badai dan gelombang pasang yang akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan para nelayan untuk beraktivitas ke laut dan akan berdampak pada hasil tangkapan ikan (produksi). Jumlah produksi hasil perikanan budidaya dan ikan tangkap pada tahun 2021-2022 yaitu sebagai berikut.

A. Produksi Ikan Tangkap

Produksi ikan tangkap yaitu hasil tangkapan para nelayan di laut dengan beraneka ragam jenis ikan seperti pada tabel di bawah:

Tabel 2. 20 Produksi Ikan Tangkap (Ikan Laut) Tahun 2023-2024

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Alu – alu (Sphyraena barracuda)	4,420	78.726.525	2,235	29.573.939
2	Ayam-ayam; Kambing-kambing (Abalistes filamentosus)	0,040	1.152.274	0,011	212.828
3	Ayam-ayam; Kambing-kambing (Rhinecanthus verrucosus)	0,020	491.980	0,047	909.356
4	Bandeng (Chanos chanos)	0,200	2.511.315	0,173	2.458.370
5	Bambangan (Lutjanus erythropterus)	4,260	146.999.322	1,978	72.242.224
6	Baronang (Siganus canaliculatus)	0,010	64.572	0,008	279.448
7	Bawal Hitam (Parastromateus niger)	13,300	635.808.238	20,730	942.683.578
8	Bawal Putih (Pampus argenteus)	93,680	5.936.469.811	95,049	14.651.666.351
9	Belanak (Mugil cephalus)	0,000	63.788	0,002	71.800

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
10	Beloso (Saurida longimanus)	24,300	203.178.831	8,094	80.142.145
11	Bulu Ayam (Thryssa hamiltonii)	8,940	30.392.000	0,000	0
12	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	18,470	257.528.849	1,968	36.730.472
13	Cendro (Lestrolepis japonica)	15,160	177.840.145	11,395	115.930.627
14	Cucut Lanjam (Carcharhinus Fitzroyensis)	5,110	90.048.419	7,878	137.446.640
15	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	21,190	998.558.526	18,775	831.859.039
16	Ekor Kuning (Paracaesio brevidentata)	63,680	1.201.340.952	10,916	215.731.390
17	Gabus Laut (Rachycentron canadum)	1,290	21.381.218	0,246	4.135.752
18	Gerot-gerot (Pomadasys andamanensis)	14,130	148.418.262	0,000	0
19	Golok- golok (Chirocentrus dorab)	155,140	897.567.306	15,612	196.940.612
20	Gulamah (Gymnocranius griseus)	23,280	2.695.845.681	23,861	1.292.305.743
21	Gurita (Octopus aegina)	0,350	23.317.290	2,337	77.497.733
22	Hiu Botol (Centroscymnus crepidater)	0,000	0	0,116	1.740.000
23	Hiu Sirip Putih (Carcharhinus longimanus)	0,000	0	0,076	1.292.000
24	Japuh (Dussumieria acuta)	17,610	141.299.217	5,128	85.066.842
25	Jenaha (Lutjanus russellii)	0,000	0	1,507	46.858.658
26	Kakap (Liopropoma randalli)	19,690	700.687.435	7,253	239.505.162
27	Kakap Batu (Lobotes surinamensis)	0,000	0	0,001	30.500
28	Kakap Hitam (Macolor niger)	2,700	104.622.750	1,252	56.682.109
29	Kakap Merah (Etelis coruscans)	12,250	492.603.468	1,378	54.009.332
30	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	0,000	0	0,187	7.329.278
31	Kapasan (Prionurus chrysurus)	20,210	534.822.813	0,000	0
32	Kapas-kapas (Gerres erythrourus)	2,900	86.347.013	4,886	140.166.621
33	Kembung (Rastrelliger faughni)	454,430	4.905.797.305	536,386	4.751.112.458
34	Kepiting (Carpilius maculatus)	0,000	0	0,114	722.418
35	Kerapu Balong (Epinephelus bleekeri)	8,070	409.913.601	1,386	65.543.445

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
36	Kerapu Bebek; Kerapu Tikus (Cromileptes altivelis)	0,000	0	0,004	200.000
37	Kerapu Lumpur (Epinephelus amblycephalus)	0,140	4.991.744	0,045	1.350.000
38	Kerong - kerong (Helotes sexlineatus)	0,510	4.509.836	0,281	1.431.976
39	Kerong-kerong (Terapon jarbua)	1,070	4.447.440	0,058	295.568
40	Kerot-kerot (Pomadasys argyreus)	4,320	56.020.000	8,002	115.842.793
41	Kuniran; Biji Nangka (Parupeneus cyclostomus)	0,090	1.285.036	0,001	12.000
42	Kurisi (Nemipterus balinensoides)	5,520	85.533.616	1,317	21.073.420
43	Kurisi (Nemipterus japonicus)	1,450	27.033.215	5,115	77.114.727
44	Kurau ; Senangin (Eleutheronema tetradactylum)	6,870	157.694.611	3,739	47.319.405
45	Kuwe (Carangoides armatus)	16,880	399.501.811	17,723	665.375.406
46	Layang (Decapterus maruadsi)	22,920	179.193.949	10,290	98.272.536
47	Layang Anggur (Decapterus kurroides)	0,000	0	0,017	425.000
48	Layang Benggol (Decapterus russelli)	0,000	0	0,016	114.016
49	Layang Lidi; Layar Deles (Decapterus macrosoma)	0,000	0	0,120	1.753.200
50	Layaran (Istiophorus platypterus)	5,540	115.900.817	3,726	76.559.772
51	Layur (Trichiurus lepturus)	236,190	6.136.456.646	360,965	9.822.966.905
52	Lemadang (Coryphaena hippurus)	0,180	3.391.666	0,421	11.771.858
53	Lemuru/Trongtong (Sardinella albella)	4,990	83.006.471	10,937	314.781.138
54	Lidah (Cynoglossus arel)	38,780	255.558.876	15,099	86.577.666
55	Lobster Bambu (Panulirus versicolor)	0,000	0	0,025	2.750.000
56	Lobster Mutiara (Panulirus ornatus)	0,030	19.555.000	1,259	331.929.293
57	Lobster Pasir (Panulirus homarus)	0,270	57.181.001	4,822	555.856.441
58	Manyung Besar (Arius thalassinus)	15,190	283.396.264	15,035	281.121.440
59	Marlin Hitam (Istiompax indica)	0,840	13.732.597	0,165	2.875.290
60	Pari Hidung Sekop (Aptychotrema rostrata)	0,000	0	0,083	415.000
61	Pari Kelapa (Trygon sephen)	2,240	40.620.898	1,285	19.561.555

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
62	Pari Kelelawar (Gymnura micrura)	0,000	0	0,059	898.157
63	Pari Kembang (Neotrygon kuhlii)	35,330	367.398.515	11,053	138.249.501
64	Pedang (Xiphias gladius)	16,770	239.460.452	4,466	50.111.302
65	Peperek Bondolan (Leiognathus bindus)	10,800	164.048.846	9,867	269.101.267
66	Petek (Equulites laterofenestra)	14,270	96.640.729	14,918	57.507.431
67	Rajungan (Portunus pelagicus)	1,070	50.792.262	13,206	578.444.360
68	Rajungan Angin (Podophthalmus vigil)	1,270	5.802.816	0,486	2.586.006
69	Remang (Congresox talabon)	1,430	45.505.222	1,577	39.697.887
70	Sebelah (Psettodes erumei)	1,800	32.502.482	2,275	37.239.475
71	Selar Bentong (Selar crumenophthalmus)	31,520	687.363.386	9,322	206.545.602
72	Selar Bulat (Alepes djedaba)	0,000	0	0,932	23.258.992
73	Selar Hijau (Atule mate)	0,000	0	0,704	17.600.000
74	Selar Kuning (Selaroides leptolepis)	62,100	221.456.720	5,646	35.716.596
75	Semar (Lampris guttatus)	165,980	1.013.232.694	1,276	11.190.520
76	Siro (Amblygaster sirm)	0,250	3.437.856	0,269	4.041.098
77	Sotong (Pharaoh cuttlefish)	2,700	87.290.745	2,383	78.622.319
78	Swanggi (Priacanthus hamrur)	11,530	79.280.816	0,523	4.833.979
79	Talang - talang (Scomberoides lysan)	04,050	48.541.826	7,519	71.239.572
80	Tembang (Sardinella gibbosa)	48,490	129.109.611	41,083	104.312.240
81	Tenggiri (Scomberomorus commerson)	103,170	5.512.130.014	81,519	3.316.948.351
82	Tenggiri Papan (Scomberomorus guttatus)	8,840	541.555.320	1,569	93.777.561
83	Tetengkek (Megalaspis cordyla)	57,920	565.836.720	26,305	340.621.570
84	Tiga Waja (Otolithes ruber)	137,670	1.673.410.331	57,533	787.567.181
85	Tongkol (Auxis thazard)	78,210	1.450.057.006	118,572	1.437.308.692
86	Tongkol Abu-abu (Thunnus tonggol)	62,210	427.061.716	60,862	477.340.666
87	Tongkol Banyar (Euthynnus lineatus)	22,650	343.767.950	210,335	2.115.549.430
88	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (Thunnus albacares)	0,450	8.971.588	0,047	1.090.000

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
89	Udang Brintik (Metapenaeus lysianassa)	0,000	130.860	0,004	165.740
90	Udang Dogol (Metapenaeus monoceros)	100,980	5.604.136.024	113,091	7.574.874.484
91	Udang Grogo (Acetes indicus)	409,040	4.996.879.780	232,781	4.585.785.700
92	Udang Harimau (Parapenaeopsis sculptilis)	0,130	25.467.828	0,019	2.849.788
93	Udang Jerbung	13,750	1.941.224.150	31,670	3.757.030.244
94	Udang Krosok Kuning (Megokris granulosus)	103,490	2.034.156.568	49,492	1.326.732.044
95	Udang Windu (Penaeus monodon)	15,230	3.788.148.596	18,136	3.404.163.472
	Jumlah	2.891,950	59.739.696.176	2.371,034	67.276.547.611

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Daerah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.20, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan tabel “Produksi Ikan Tangkap (Ikan Laut)” tahun 2023 dan 2024, terlihat bahwa total produksi mengalami penurunan sangat signifikan dari 2.891,95 ton (dua ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma sembilan lima ton) pada 2023 menjadi 2.371,034 ton (dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma nol tiga empat ton) pada 2024. Meskipun dari sisi volume terjadi penurunan, nilai produksi justru meningkat dari Rp59.739.696.176 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) pada 2023 menjadi Rp67.276.547.611 (enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah) pada 2024.

Kenaikan nilai produksi ini mengindikasikan adanya peningkatan harga jual atau pergeseran hasil tangkapan pada jenis ikan bernilai tinggi, seperti Udang Grogo, Udang Krosok Kuning, dan beberapa jenis tuna serta tongkol. Namun, banyak jenis ikan mengalami penurunan volume produksi, yang dapat disebabkan oleh faktor musim, cuaca, atau ketersediaan stok di alam. Secara keseluruhan, meskipun jumlah tangkapan berkurang, peningkatan nilai produksi menunjukkan potensi keuntungan ekonomi yang tetap terjaga, asalkan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan secara berkelanjutan.

B. Produksi Ikan Budidaya Tambak/Air Payau

Tabel 2. 21 Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Payau Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Bandeng (Chanos chanos)	1,000	31.004.000	0,550	13.750.000
2	Kepiting Bakau (Scylla serrata)	0,486	51.195.000	0,160	14.400.000
3	Udang Vaname	68,000	3.633.312.000	270,342	33.238.393.500

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
	(Penaeus vannamei)				
4	Udang Vaname (Penaeus vannamei)	143,000	7.682.293.000	0,000	0
Jumlah		212,311	11.397.804.000	271,052	33.266.543.500

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Daerah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.21, dapat disimpulkan bahwa terlihat adanya peningkatan total produksi dari 212,311 ton (dua ratus dua belas koma tiga ratus sebelas ton) pada tahun 2023 menjadi 271,052 ton (dua ratus tujuh puluh satu koma nol lima dua ton) pada tahun 2024. Peningkatan ini juga diikuti lonjakan nilai produksi dari Rp11.397.804.000 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah) menjadi Rp33.266.543.500 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Peningkatan terbesar terjadi pada komoditas Udang Vaname yang produksinya melonjak dari 68 ton (enam puluh delapan ton) pada 2023 dengan nilai Rp3.633.312.000 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) menjadi 270 ton (dua ratus tujuh puluh ton) pada 2024 dengan nilai Rp33.238.393.500 (tiga puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Sementara itu, Bandeng mengalami penurunan produksi dari 1 ton (satu ton) senilai Rp31.004.000 (tiga puluh satu juta empat ribu rupiah) menjadi 0,55 ton (nol koma lima lima ton) senilai Rp13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kepiting Bakau juga turun dari 0,486 ton (nol koma empat delapan enam ton) senilai Rp51.195.000 (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi 0,16 ton (nol koma satu enam ton) senilai Rp14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Secara keseluruhan, peningkatan total nilai produksi terutama didorong oleh lonjakan produksi Udang Vaname, meskipun beberapa jenis ikan seperti Bandeng dan Kepiting Bakau mengalami penurunan produksi dan nilai jual. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus budidaya pada komoditas bernilai tinggi yang mampu meningkatkan pendapatan meskipun jumlah jenis komoditas yang dibudidayakan relatif sedikit.

C. Produksi Ikan Budidaya Air Tawar

Tabel 2. 22 Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Tahun 2023 - 2024

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum)	900	13.500.000	0,5	12.500.000
2	Gurame; Gurami (Osphronemus goramy)	5.820	309.786.500	4,521	349.700.000

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
3	Lele (Clarias batrachus)	15.871	269.841.000	21,788	455.171.820
4	Mas (Cyprinus carpio)	477	17.073.000	0,53	13.385.000
5	Nila (Oreochromis niloticus)	67.826	1.706.835.000	35,955	1.157.043.500
6	Sidat (Anguilla anguilla)	82	13.120.000	N/A	N/A
7	Tawes (Barbodes priacanthus)	199	6.450.000	0,498	16.540.000
8	Udang Galah	0	0	0,129	9.030.000
9	Udang Vanname	0	0	0,6	18.000.000
Jumlah		91.175	2.336.605.500	64,251	2.031.370.320

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Daerah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.22, terlihat adanya penurunan signifikan pada total produksi ikan. Namun, meskipun volume produksi menurun, nilai produksi hanya mengalami sedikit penurunan, yang menunjukkan bahwa harga jual rata-rata ikan cenderung meningkat. Beberapa komoditas mengalami penurunan produksi yang cukup tajam, seperti Nila, Gurame, dan Lele. Komoditas baru yang mulai tercatat produksinya pada 2024 antara lain Udang Galah dan Udang Vanname, meskipun volumenya kecil, nilai produksinya cukup tinggi. Secara keseluruhan, meskipun total produksi menurun, terdapat indikasi pergeseran pola budidaya ke jenis ikan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi atau adanya peningkatan harga jual di pasar. Kondisi ini dapat menjaga stabilitas nilai produksi meski jumlah hasil panen mengalami penurunan.

D. Produksi Ikan Perairan Umum (Sungai)

Tabel 2. 23 Jumlah Produksi Ikan dari Perairan Umum Tahun 2023 – 2024

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Baung Putih (Hemibagrus nemurus)	1.974	42.632.000	2.008	42.370.000
2	Belanak (Mugil cephalus)	0	0	1.185	25.375.000
4	Betutu (Oxyeleotris marmorata)	0,12	1.800.000	2,32	69.150.000
5	Beunteur (Puntius binotatus)	524	7.860.000	0.06	1.200.000

No	Jenis Ikan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
6	Gabus (Channa striata)	186	4.650.000	519	12.790.000
7	Kakap Putih; Baramundi (Lates calcarifer)	2.057	71.995.000	0.89	31.325.000
8	Kepiting Bakau (Scylla serrata)	0	0	2.45	215.600.000
9	Keting (Mystus nigriceps)	22	440.000	0.03	300.000
10	Lalawak (Barbonymus balleroides)	1.543	23.145.000	0	0
11	Lukas (Labiobarbus festivus)	0,08	1.200.000	211	5.288.500.016
12	Mujair (Oreochromis mossambicus)	0,53	7.450.000	293	4.878.999.952
13	Nila (Oreochromis niloticus)	5.096	76.775.000	1.82	27.750.000
14	Nilem (Osteochilus vittatus)	1.669	28.665.000	1.182	15.520.000
15	Paray (Rasbora argyrotaenia)	932	13.980.000	1.529	29.545.000
16	Sidat (Anguilla anguilla)	85	5.370.000	94	4.937.000.001
17	Tawes (Barbodes gonionotus)	2.444	49.066.000	6.123	105.726.500
18	Udang Danau (Palaemon paucidens)	2.688	18.816.000	4.303	43.030.000
Jumlah		28.168	1.248.544.000	25.317	16.512.301.471

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Daerah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.23, terlihat bahwa total produksi ikan mengalami penurunan. Meskipun volume produksi menurun, nilai produksi justru meningkat signifikan dari Rp. 1.248.544.000 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 16.512.301.471 (enam belas miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan harga jual rata-rata atau adanya pergeseran kontribusi ke jenis ikan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Beberapa jenis ikan mengalami kenaikan produksi, seperti Baung Putih, Gabus, serta Tawes. Kenaikan paling mencolok terjadi pada jenis ikan Lukas yang produksinya melonjak dari 0,08 (nol koma nol delapan) ton menjadi 211 (dua ratus sebelas) ton dengan nilai produksi yang juga meningkat tajam. Namun, sebagian besar jenis ikan lain mengalami penurunan produksi, seperti Udang Galah dan Beunteur.

Secara umum, meskipun volume produksi total menurun, peningkatan nilai produksi yang sangat besar mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 terdapat perbaikan harga jual atau dominasi produksi ikan dengan nilai jual lebih tinggi. Fenomena ini dapat menjadi sinyal positif bagi kesejahteraan nelayan apabila kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada pendapatan mereka, meskipun secara kuantitas hasil tangkapan berkurang.

Tabel 2. 24 Produksi Ikan di Daerah Tahun 2024

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)
1	Ikan gurame	4,52
2	Ikan lele	21,79
3	Ikan mas	0,53
4	Ikan mujair	-
5	Ikan nila	35,96
6	Ikan nilem	-
7	Ikan tawes	0,50
8	Udang galah	0,13
	Jumlah	63,43

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Tabel 2.24, dapat disimpulkan bahwa perikanan air tawar pada tahun 2024 masih didominasi oleh dua komoditas utama, yaitu ikan nila dan ikan lele, yang secara bersama-sama menyumbang lebih dari 90 persen dari total produksi. Hal ini mencerminkan kecenderungan pembudidaya untuk fokus pada jenis ikan yang memiliki pasar kuat dan efisiensi budidaya yang baik. Di sisi lain, rendahnya produksi beberapa jenis ikan lain dan hilangnya produksi ikan mujair serta nilem menunjukkan adanya tantangan dalam keberagaman komoditas perikanan. Perlu adanya upaya dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong diversifikasi komoditas melalui pelatihan dan bantuan teknis, meningkatkan ketahanan budidaya terhadap penyakit dan perubahan iklim, dan menjamin akses pasar bagi komoditas selain ikan nila dan ikan lele. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan pendekatan yang strategis, sektor perikanan air tawar masih memiliki potensi besar untuk tumbuh dan mendukung ketahanan pangan serta ekonomi masyarakat lokal.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan, sementara daya tampung lingkungan mengacu pada batas kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah dan pencemaran tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Ketika perubahan iklim memperparah kondisi lingkungan, kedua aspek ini menjadi semakin tertekan. Misalnya, kenaikan suhu global mempercepat kerusakan sumber daya alam seperti air bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati. Kekeringan yang berkepanjangan mengurangi ketersediaan air dan lahan produktif, sehingga

menurunkan daya dukung wilayah terhadap populasi manusia dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, perubahan pola curah hujan dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim memperbesar risiko bencana seperti banjir dan longsor, yang mengakibatkan akumulasi limbah, kerusakan habitat, serta menurunkan kemampuan lingkungan dalam menyerap dampak tersebut—artinya, daya tampung lingkungan ikut menurun.

Lebih jauh, perubahan iklim juga mendorong urbanisasi tidak terkendali dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Hal ini mempercepat degradasi lingkungan dan meningkatkan emisi karbon, menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam Pembangunan Daerah. Sebagai wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan sangat bergantung pada sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, menjadikan Daerah berada pada posisi yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi.

Implikasi perubahan iklim terhadap ketahanan pangan telah menurunkan daya dukung lahan pertanian, mengganggu kalender tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta mempersempit ruang budidaya perikanan. Akibatnya, masyarakat rentan terhadap kenaikan harga pangan, defisit pasokan lokal, dan penurunan pendapatan petani. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup baik dalam skala besar, menengah dan kecil, rusaknya sumber air, dan ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam peraturan tersebut mengatur perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup; KLHS; Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; Studi Kelayakan Lingkungan; Perizinan Lingkungan; Pemeliharaan lingkungan hidup; peran serta masyarakat; pengawasan; pejabat pengawas lingkungan hidup daerah; pembinaan; larangan; kelembagaan; fasilitasi penyelesaian sengketa; standar pelayanan minimal; data dan informasi lingkungan; dan sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia tanpa menyebabkan kerusakan permanen yang tak dapat diperbaiki. Sejauh mana kapasitas lingkungan mampu menampung berbagai kebutuhan sumber daya, seperti air, lahan, dan pangan. Daya Dukung Lingkungan Hidup memungkinkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya secara berimbang, sehingga langkah pengelolaan yang diambil dapat bersifat adaptif dan preventif. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, penghitungan kebutuhan air mencakup konsumsi untuk sektor pertanian, industri, dan rumah tangga. Selain menghitung konsumsi air, ketersediaan air dalam jangka panjang juga dipetakan, khususnya karena Pangandaran adalah wilayah dengan intensitas tinggi dalam kegiatan pertanian dan pariwisata. Dengan memetakan kebutuhan serta ketersediaan air, maka dapat memberikan dasar bagi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, sehingga kualitas dan kuantitas air di wilayah ini dapat tetap terjaga.

Selain air, pemetaan kebutuhan dan ketersediaan lahan juga merupakan bagian penting sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap lahan yang digunakan untuk kegiatan berbeda, seperti pertanian, pemukiman, konservasi, dan lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah degradasi lahan yang merusak. Lebih lanjut, juga perlu dilakukan penghitungan dan pemetaan daya dukung pangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Proses ini melibatkan evaluasi produksi pangan lokal, akses pangan, serta kecukupan gizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui analisis daya dukung pangan, maka dapat mendukung aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Penyedia Pangan

Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan daerah melibatkan beberapa faktor kunci, termasuk:

1. Ketersediaan lahan pertanian: evaluasi terhadap luas lahan pertanian yang tersedia di daerah, termasuk lahan sawah, ladang, dan perkebunan. Ini akan memberikan gambaran tentang potensi produksi pangan di wilayah tersebut.
2. Produktivitas lahan: mengukur produktivitas lahan pertanian, yang mencakup hasil tanaman dan peternakan per unit luas lahan. Ini membantu dalam memperkirakan sejauh mana lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Kebutuhan pangan penduduk: menghitung kebutuhan pangan penduduk, termasuk kebutuhan gizi dan kalori yang diperlukan oleh penduduk setempat.
4. Produksi pangan lokal: menilai produksi pangan lokal, termasuk hasil pertanian, perikanan, dan peternakan.

Tabel 2. 25 Hasil Analisis Daya Dukung Pangan Berdasarkan Ketersediaan dan Kebutuhan Tiap Kecamatan Tahun 2024

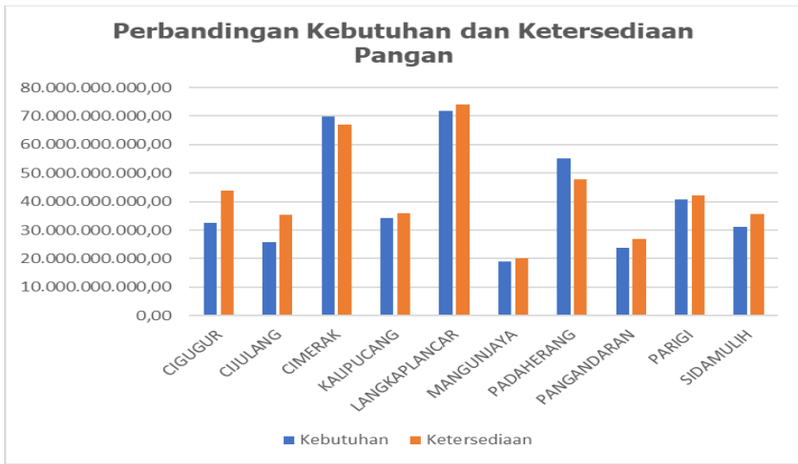
No	Kecamatan	IJE Pangan Kabupaten	IJE Pangan Grid	Populasi Grid	Kebutuhan	Ketersediaan	Status
1	Cigugur	4.023,57	500,40	41.434,00	32.515.331.500,00	43.863.986.168,17	Belum Terlampaui
2	Cijulang	4.023,57	430,20	32.862,00	25.788.454.500,00	35.484.816.276,41	Belum Terlampaui
3	Cimerak	4.023,57	751,27	88.957,00	69.809.005.750,00	67.062.394.436,50	Terlampaui
4	Kalipucang	4.023,57	436,48	43.457,00	34.102.880.750,00	36.002.804.731,28	Belum Terlampaui
5	Langkaplancar	4.023,57	804,11	91.627,00	71.904.288.250,00	74.066.604.125,08	Belum Terlampaui
6	Mangunjaya	4.023,57	194,21	24.169,00	18.966.622.750,00	19.998.341.131,24	Belum Terlampaui
7	Padaherang	4.023,57	542,58	70.277,00	55.149.875.750,00	47.780.136.576,85	Terlampaui
8	Pangandaran	4.023,57	325,69	30.137,00	23.650.010.750,00	26.864.620.748,55	Belum Terlampaui
9	Parigi	4.023,57	502,89	51.838,00	40.679.870.500,00	42.227.244.506,69	Belum Terlampaui
10	Sidamulih	4.023,57	396,75	39.551,00	31.037.647.250,00	35.540.884.200,37	Belum Terlampaui
KAB. PANGANDARAN		4.023,57	4.023,57	514.309,00	403.603.987.750,00	428.891.832.901,12	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, Daerah masih berada dalam status "Belum Terlampaui," dengan total ketersediaan pangan sebesar 428,9 (empat ratus dua puluh

delapan koma sembilan) miliar kilogram per tahun, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kebutuhan pangan sebesar 408,6 (empat ratus delapan koma enam) miliar kilogram per tahun. Namun, penting untuk diingat bahwa status ini merupakan rata-rata umum, dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di setiap bagian wilayah kecamatan. Misalnya, Kecamatan Cimerak dan Padaherang termasuk dalam kategori "Terlampaui," di mana kebutuhan pangan lebih tinggi dari ketersediaannya, dengan defisit masing-masing 2,7 (dua koma tujuh) miliar rupiah dan 7,3 (tujuh koma tiga) miliar rupiah. Di sisi lain, kecamatan seperti Cigugur, Cijulang, dan Langkaplancar menunjukkan bahwa ketersediaan pangan lebih tinggi dari kebutuhan, meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Perlu dicatat bahwa variasi kondisi di dalam setiap kecamatan bisa lebih jelas terlihat melalui peta hasil analisis, yang dapat mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian khusus terkait ketersediaan pangan.

Gambar 2. 11 Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Beras Setiap Kecamatan (meter kubik per tahun) Tahun 2024



Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Tabel berikut menunjukkan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan dalam periode tahun 2024, 2025, dan 2029. Data ini mencerminkan proyeksi kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan angka yang mencapai 403,60 (empat ratus tiga koma enam nol) miliar rupiah pada tahun 2024, meningkat menjadi 408,31 (empat ratus delapan koma tiga satu) miliar rupiah di tahun 2025, dan mencapai 417,48 (empat ratus tujuh belas koma empat delapan) miliar rupiah di tahun 2029. Sementara itu, ketersediaan tetap berada pada angka 428,89 (empat ratus dua puluh delapan koma delapan sembilan) miliar rupiah di seluruh periode tersebut. Meskipun kebutuhan mengalami kenaikan, status dalam tabel menunjukkan bahwa kebutuhan masih "Belum Terlampaui," yang berarti ketersediaan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam rentang waktu tersebut.

Tabel 2. 26 Produksi Pangan Tahun 2024

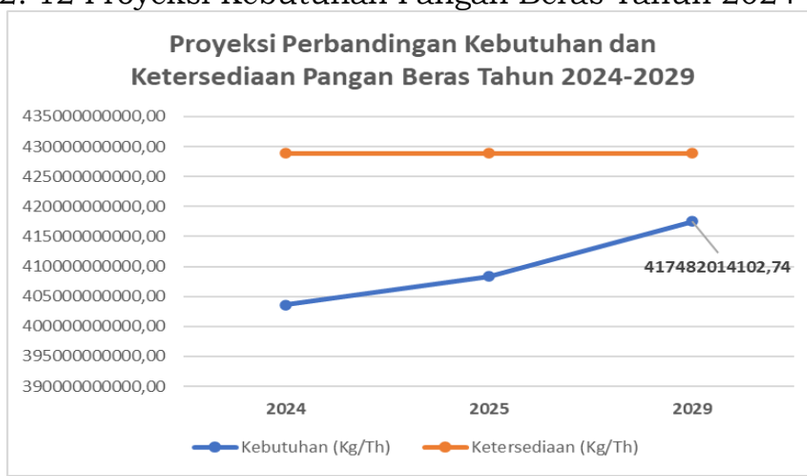
Tahun	Kebutuhan	Ketersediaan	Status
2024	403.603.987.750,00	428.891.832.901,12	Belum Terlampaui
2025	408.314.808.774,02	428.891.832.901,12	Belum Terlampaui
2029	417.482.014.102,74	428.891.832.901,12	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Pada tahun 2024, ketersediaan pangan sebesar 428,9 (empat ratus dua puluh delapan koma sembilan) miliar kilogram per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan sebesar 403,6 (empat ratus tiga koma enam) miliar kilogram per tahun, sehingga statusnya "Belum Terlampaui." Tren ini

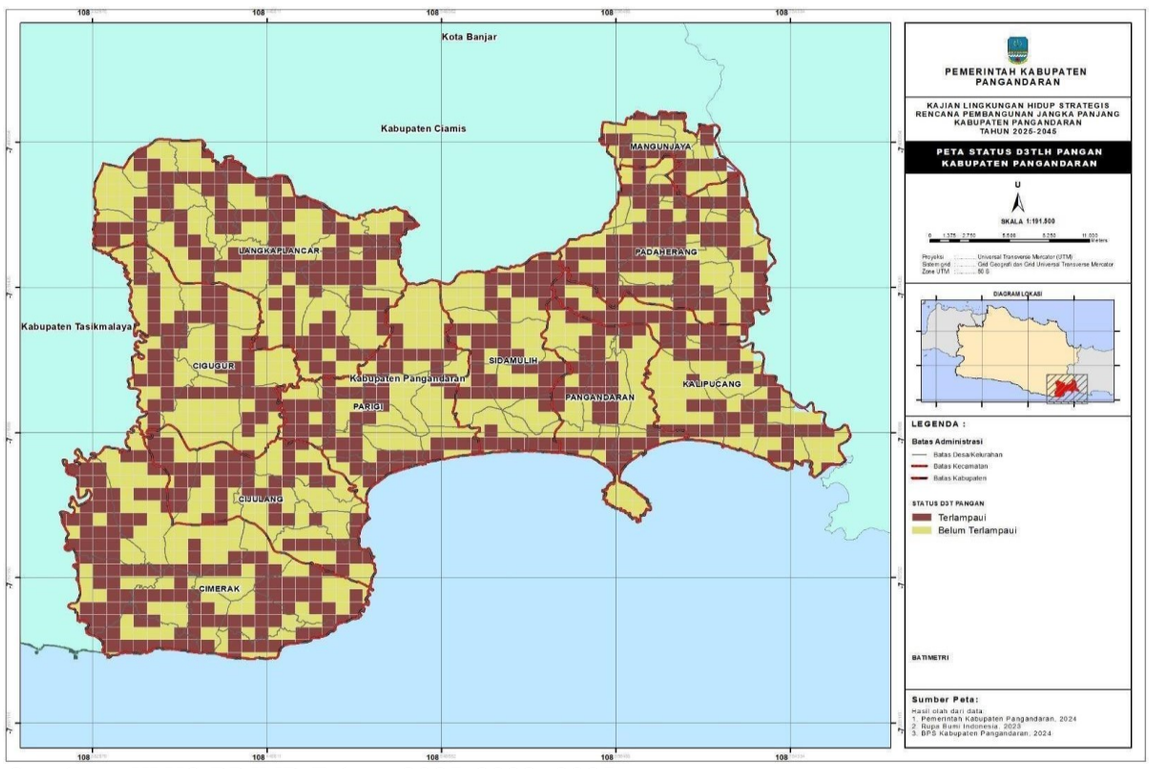
berlanjut hingga tahun 2035, di mana ketersediaan pangan tetap lebih tinggi dibandingkan kebutuhan yang meningkat secara bertahap, mencapai 423,1 (empat ratus dua puluh tiga koma satu) miliar kilogram per tahun pada tahun tersebut. Namun, mulai tahun 2040, proyeksi menunjukkan perubahan status menjadi "Terlampaui," karena kebutuhan pangan diperkirakan akan melebihi ketersediaan. Pada tahun 2040, kebutuhan pangan mencapai 433,0 (empat ratus tiga puluh tiga koma nol) miliar kilogram per tahun, sementara ketersediaan tetap di angka 428,9 (empat ratus dua puluh delapan koma sembilan) miliar kilogram per tahun, menciptakan defisit. Tren defisit ini berlanjut hingga tahun 2045, dengan kebutuhan pangan yang diproyeksikan mencapai 447,4 (empat ratus empat puluh tujuh koma empat) miliar kilogram per tahun, lebih besar dari ketersediaan yang tetap stagnan di angka 428,9 (empat ratus dua puluh delapan koma sembilan) miliar kilogram per tahun. Proyeksi ini menunjukkan bahwa tanpa peningkatan ketersediaan pangan, daerah akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa mendatang.

Gambar 2. 12 Proyeksi Kebutuhan Pangan Beras Tahun 2024-2029



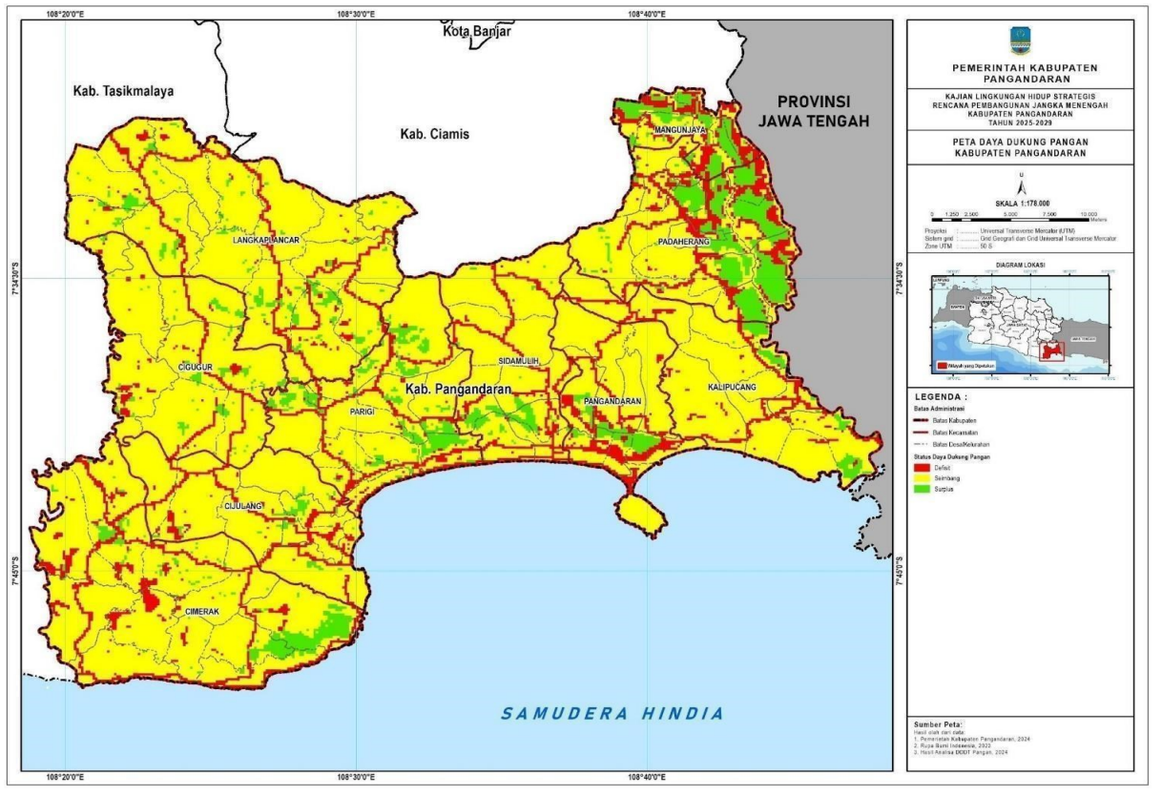
Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2. 13 Peta Daya Dukung Pangan Daerah



Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2. 14 Peta Daya Dukung Pangan Daerah



Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

b. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Penyedia Air

Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Penyedia Air dapat memastikan bahwa pasokan air mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, termasuk air untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan rumah tangga lainnya. Selain itu juga mempertimbangkan kebutuhan air untuk penggunaan komersial, industri, pertanian, dan lainnya. Dengan melakukan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kebutuhan air penduduk terpenuhi dengan baik, dan sumber daya air yang ada dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kebutuhan air dihitung dengan merujuk pada standar minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Tabel 2. 27 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tiap Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Populasi Grid	Kebutuhan	Ketersediaan	Status
1	Cigugur	41.434,00	67.967.639,34	173.705.641,64	Belum Terlampaui
2	Cijulang	32.862,00	93.670.799,96	128.583.129,47	Belum Terlampaui
3	Cimerak	89.189,00	137.193.840,57	222.694.655,90	Belum Terlampaui
4	Kalipucang	43.457,00	71.496.943,06	98.294.432,17	Belum Terlampaui
5	Langkaplancar	91.772,00	102.257.596,72	269.924.706,02	Belum Terlampaui
6	Mangunjaya	24.169,00	67.347.864,69	27.190.014,66	Terlampaui
7	Padaherang	70.277,00	149.128.639,74	90.958.449,39	Terlampaui
8	Pangandaran	30.137,00	52.239.052,65	105.487.167,18	Belum Terlampaui

No	Kecamatan	Populasi Grid	Kebutuhan	Ketersediaan	Status
9	Parigi	51.838,00	119.002.799,63	156.379.603,56	Belum Terlampaui
10	Sidamulih	39.551,00	61.545.724,08	128.345.396,06	Belum Terlampaui
Kab. Pangandaran		514.686,00	921.850.900,45	1.401.563.196,04	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Kebutuhan air total untuk seluruh wilayah ini adalah 921,8 (sembilan ratus dua puluh satu koma delapan) juta meter kubik, sementara ketersediaan airnya mencapai 1,4 (satu koma empat) miliar meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, daerah masih dalam kategori "Belum Terlampaui" dalam hal daya dukung air, karena kebutuhan air masih di bawah ketersediaan yang ada. Secara lebih rinci, dari sepuluh kecamatan yang ada di Daerah, delapan diantaranya, yaitu Kecamatan Cigugur, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, Langkaplancar, Pangandaran, Parigi, dan Sidamulih, masih dalam status "Belum Terlampaui." Ini berarti kebutuhan air di kecamatan-kecamatan tersebut masih dapat dipenuhi oleh ketersediaan air yang ada.

Namun, terdapat dua kecamatan yang berada dalam kategori "Terlampaui," yaitu Kecamatan Mangunjaya dan Padaherang. Di Kecamatan Mangunjaya, dengan populasi sebanyak 24.169,00 (dua puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan koma nol nol) jiwa, kebutuhan air mencapai 67,3 (enam puluh tujuh koma tiga) juta meter kubik, sedangkan ketersediaannya hanya 27,1 (dua puluh tujuh koma satu) juta meter kubik. Di Kecamatan Padaherang, dengan populasi sebanyak 70.277 (tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa, kebutuhan airnya sebesar 149,1 (seratus empat puluh sembilan koma satu) juta meter kubik melebihi ketersediaan air yang hanya sebesar 90,9 (sembilan puluh koma sembilan) juta meter kubik. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air di dua kecamatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air yang ada, sehingga termasuk dalam kategori "Terlampaui".

Tabel 2. 28 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2024-2029

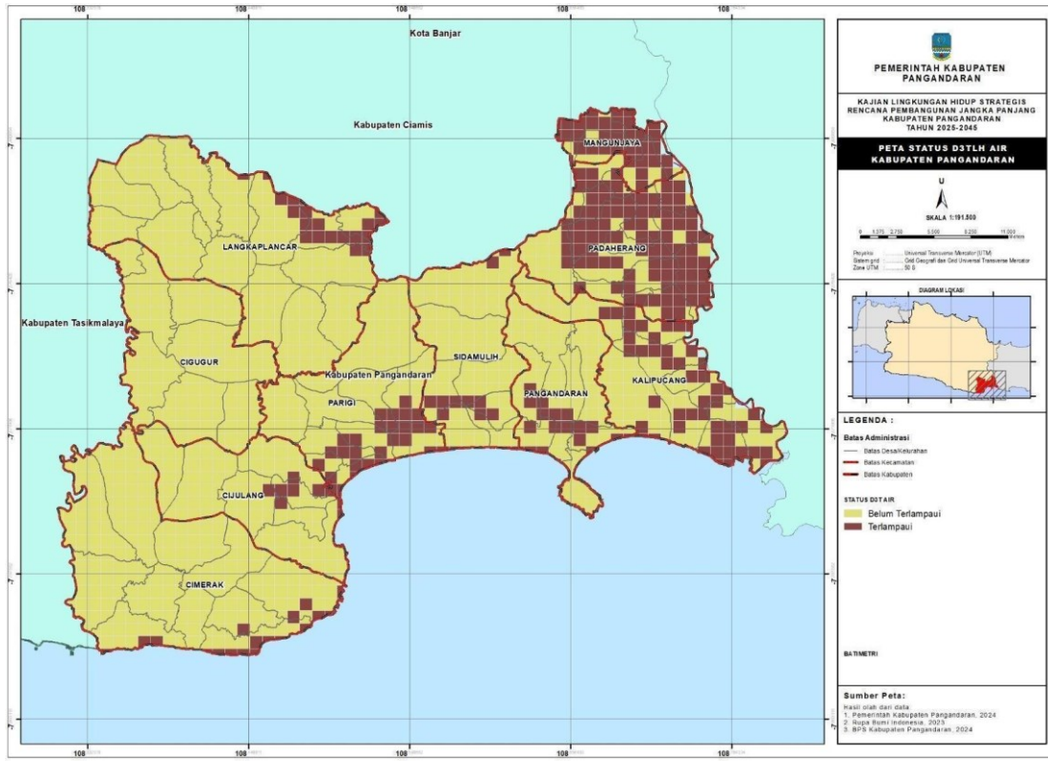
No	Tahun	Kebutuhan	Ketersediaan	Status
1.	2024	921.850.900,45	1.401.563.196,04	Belum Terlampaui
2.	2025	932.610.642,01	1.401.563.196,04	Belum Terlampaui
3.	2029	953.548.979,45	1.401.563.196,04	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan dan ketersediaan air dari tahun 2024 hingga 2045, terlihat bahwa kebutuhan air terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, kebutuhan air tercatat sebesar 921,8 (sembilan ratus dua puluh satu koma delapan) juta meter kubik dan terus bertambah hingga mencapai 1,0 (satu koma nol) miliar meter kubik pada tahun 2045. Meski demikian, ketersediaan air tetap konstan di angka 1,4 (satu koma empat) miliar meter kubik sepanjang periode tersebut. Meskipun ada peningkatan kebutuhan air yang signifikan dari tahun ke tahun, status daya dukung air masih berada dalam kategori "Belum Terlampaui" hingga tahun 2045. Ini berarti, ketersediaan air di wilayah tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air yang semakin meningkat, setidaknya hingga tahun 2045. Dengan demikian, Daerah diprediksi akan tetap mampu

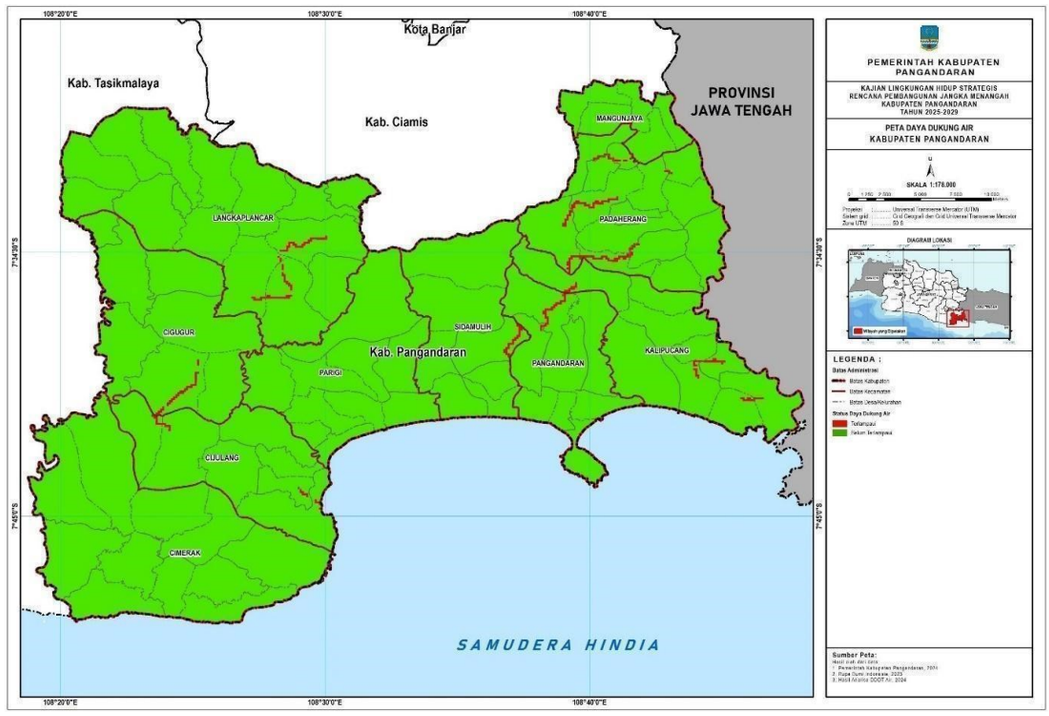
mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air selama periode yang diproyeksikan.

Gambar 2. 15 Peta Daya Dukung Air Daerah



Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2. 16 Peta Daya Dukung Air Daerah



Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Energi, air, dan pangan merupakan kesatuan yang saling berkaitan dan penting untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2045 yaitu berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan serta merupakan Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029.

1. Ketahanan Energi

Ketahanan energi merupakan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Ketersediaan energi yang memadai, terjangkau, dan berkelanjutan akan mendukung produktivitas sektor pertanian, industri, dan layanan publik. Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator yang mencerminkan tingkat pemanfaatan energi oleh masyarakat dan dunia usaha. Kecukupan energi juga berpengaruh langsung terhadap pengelolaan air—baik melalui sistem irigasi, pengolahan air bersih, maupun penyediaan air minum—serta menunjang proses produksi pangan, mulai dari pengolahan lahan hingga distribusi hasil pertanian.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi listrik per kapita di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) kilowatt-hour per kapita. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.173 (seribu seratus tujuh puluh tiga) kilowatt-hour per kapita pada tahun 2022. Konsumsi listrik per kapita di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebesar 1.411 (seribu empat ratus sebelas) kilowatt-hour per kapita. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan konsumsi listrik per kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sementara itu, untuk Daerah, konsumsi listrik berdasarkan banyaknya *kilowatt-hour* listrik yang terjual menurut bulan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29 Banyaknya *kilowatt-hour* Listrik yang Terjual Menurut Bulan Tahun 2024

No	Bulan	Sosial	Rumah Tangga	Bisnis	Industri
1.	Januari	870.100	10.514.758	4.255.701	1.080.411
2.	Februari	1.685.895	19.740.526	7.789.934	2.113.225
3.	Maret	2.611.462	30.107.786	11.631.560	3.200.826
4.	April	3.515.675	40.715.153	15.089.242	4.140.253
5.	Mei	4.456.455	52.016.281	19.859.001	5.084.071
6.	Juni	5.378.730	62.284.796	23.871.448	5.958.253
7.	Juli	6.378.891	73.167.388	29.017.330	5.774.230
8.	Agustus	7.244.335	83.164.014	32.859.350	6.731.066
9.	September	8.128.085	93.104.923	36.776.055	7.582.988
10.	Oktober	9.142.220	103.876.414	41.157.078	8.322.655
11.	November	10.271.802	114.715.358	45.616.705	9.058.740
12.	Desember	11.445.263	125.916.849	50.818.004	9.844.714
Total		11.445.263	125.916.849	50.818.004	9.844.714

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel di atas menyajikan data penggunaan atau konsumsi sumber daya berdasarkan empat sektor utama, yaitu sosial, rumah tangga, bisnis, dan industri, yang dicatat secara bulanan sepanjang satu tahun. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa sektor rumah tangga memiliki angka penggunaan tertinggi dibandingkan sektor lainnya, yang mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat dalam konsumsi sumber daya untuk kehidupan sehari-hari. Sektor bisnis dan industri juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, mengindikasikan adanya aktivitas ekonomi yang aktif

di daerah ini, baik dalam bentuk usaha kecil, menengah, maupun industri skala besar. Selain itu, terdapat fluktuasi konsumsi di setiap bulan yang dapat mencerminkan pola musiman dalam penggunaan sumber daya. Beberapa bulan menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mungkin berkaitan dengan faktor-faktor tertentu seperti musim liburan, peningkatan aktivitas ekonomi, atau kebutuhan sosial yang lebih tinggi pada periode tertentu. Sebaliknya, bulan-bulan dengan angka lebih rendah bisa menjadi indikator adanya pengurangan aktivitas atau efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

2. Ketahanan Air

Air adalah sumber daya strategis yang menentukan kelangsungan hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Indeks Ketahanan Air mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan, mengelola, dan melindungi sumber daya air secara berkelanjutan. Ketersediaan air yang terjamin tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga, tetapi juga menjadi syarat utama bagi ketahanan pangan melalui irigasi pertanian dan mendukung ketahanan energi melalui pembangkit listrik tenaga air maupun proses pendinginan pada pembangkit lainnya. Tanpa pengelolaan air yang baik, ketahanan pangan dan energi akan rentan terganggu.

Indeks Ketahanan Air merupakan ukuran ketersediaan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur sedini mungkin indikator keamanan air, yang diperlukan sebagai perangkat untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Indeks Ketahanan Air dihitung berdasarkan lima pilar pengelolaan sumber daya air, yaitu: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, sistem informasi sumber daya air.

Skor ketahanan air Indonesia berdasarkan *Asian Water Development Outlook*, *Asian Development Bank* pada tahun 2020 yaitu berada pada tingkat ’moderat’ (*capable*) dengan skor indeks 67,85 (enam puluh tujuh koma delapan lima). Berdasarkan target Kebijakan Nasional Sumber Daya Air tahun 2030, ketahanan air Indonesia diharapkan mencapai tingkat ’handal’ (*effective*). Untuk Indeks Ketahanan Air berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan wilayah sungai. Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori ‘moderat’ dengan skor indeks 65,68 (enam puluh lima koma enam delapan). Tingkat moderat memiliki arti bahwa suatu daerah mampu dalam akses ke air minum yang aman dan fasilitas sanitasi membaik; keamanan air ekonomi sedang; tata kelola lingkungan moderat, dengan tekanan yang jelas pada ekosistem; serta ada beberapa komitmen kelembagaan untuk mengurangi risiko bencana.

Jumlah dan nilai air yang disalurkan di Daerah menurut bulan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30 Jumlah dan Nilai Air yang Disalurkan Menurut Bulan Tahun 2024

No	Bulan	Volume Air yang Disalurkan (m^3)	Nilai Air Bersih yang Disalurkan (Rp.)
1.	Januari	48.776	324.163.300
2.	Februari	52.683	329.427.000
3.	Maret	51.756	341.958.300

No	Bulan	Volume Air yang Disalurkan (m^3)	Nilai Air Bersih yang Disalurkan (Rp.)
4.	April	51.534	333.017.100
5.	Mei	51.633	348.767.000
6.	Juni	55.224	352.204.800
7.	Juli	51.705	341.346.000
8.	Agustus	54.348	353.535.300
9.	September	52.569	331.568.200
10.	Oktober	50.500	317.601.300
11.	November	55.121	342.477.900
12.	Desember	48.390	316.723.900
Total		623.239	4.032.790.100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel di atas menunjukkan data mengenai volume air bersih yang disalurkan dan nilai ekonominya selama tahun 2024, dari bulan Januari hingga Desember. Data ini menggambarkan jumlah air bersih yang digunakan oleh masyarakat serta nilai total yang dihasilkan dari distribusi air tersebut dalam satuan rupiah. Berdasarkan tabel, total volume air bersih yang disalurkan sepanjang tahun adalah 623.239 (enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan) meter kubik, dengan nilai total sebesar 4.032.790.100 (empat miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu seratus) rupiah. Rata-rata volume air yang didistribusikan setiap bulan berkisar antara 48.390 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) meter kubik hingga 55.705 (lima puluh lima ribu tujuh ratus lima) meter kubik yang menunjukkan adanya fluktuasi konsumsi air bersih di berbagai bulan.

Konsumsi air tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 55.705 (lima puluh lima ribu tujuh ratus lima) meter kubik, sedangkan konsumsi terendah terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 48.390 (empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) meter kubik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim kemarau atau hujan, peningkatan jumlah wisatawan, atau kebutuhan domestik yang berubah sepanjang tahun. Dari sisi nilai ekonomi, pendapatan dari distribusi air bersih juga berfluktuasi mengikuti jumlah volume air yang disalurkan. Nilai tertinggi terjadi pada bulan Juni, mencapai 352.204.800 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus) rupiah, sementara nilai terendah tercatat pada bulan Januari sebesar 324.163.300 (tiga ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus) rupiah. Perubahan nilai ini kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah pelanggan, kebijakan tarif, serta faktor ekonomi yang memengaruhi konsumsi air.

3. Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan berarti kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri secara berkelanjutan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Indeks Ketahanan Pangan digunakan untuk mengukur ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Produksi pangan yang stabil memerlukan dukungan energi untuk mekanisasi pertanian dan air yang cukup untuk irigasi. Sebaliknya, ketidakstabilan pasokan energi atau air akan mengancam produktivitas pangan. Oleh karena itu, pangan, air, dan energi membentuk mata rantai yang saling menguatkan.

Berdasarkan Buku Indeks Ketahanan Pangan 2022, Buku Indeks Ketahanan Pangan 2023, dan Buku Indeks Ketahanan Pangan 2024, Daerah berada pada peringkat 107 (seratus tujuh) dengan nilai 81,12 (delapan puluh satu koma satu dua) pada tahun 2022, peringkat 86 (delapan puluh enam)

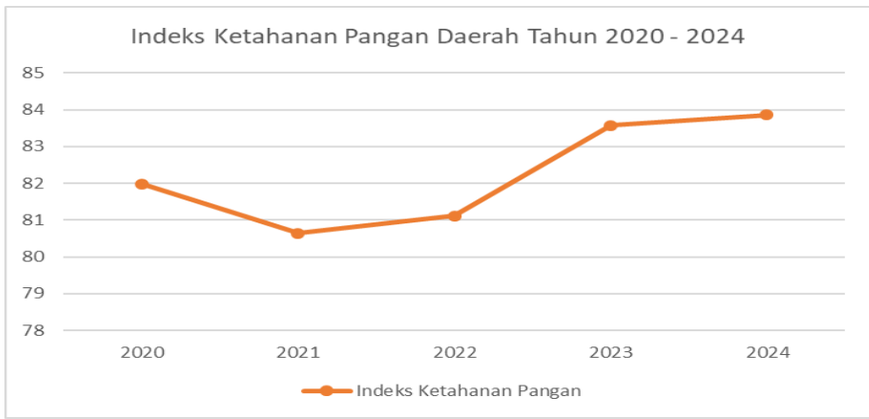
dengan nilai 83,57 (delapan puluh tiga koma lima tujuh) pada tahun 2023, dan peringkat 144 dengan nilai 83,86 (delapan puluh tiga koma delapan enam) pada tahun 2024. Dari ketiga tahun tersebut, Daerah termasuk dalam kategori sangat tahan atau kelompok 6 (enam) yang artinya merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik dan terus mengalami peningkatan skor.

Tabel 2. 31 Indeks Ketahanan Pangan tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Ketahanan Pangan	81,99	80,64	81,12	83,57	83,86

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Gambar 2. 17 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan data dalam tabel dan dan grafik Indeks Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam Indeks Ketahanan Pangan selama periode tersebut. Pada tahun 2020, indeks tercatat sebesar 81,99 (delapan puluh satu koma sembilan sembilan), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 80,64 (delapan puluh koma enam empat). Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, dampak pandemi COVID-19 atau gangguan dalam distribusi pangan. Namun, mulai tahun 2022, indeks kembali menunjukkan tren peningkatan, dengan angka 81,12 (delapan puluh satu koma satu dua), lalu naik signifikan pada tahun 2023 menjadi 83,57 (delapan puluh tiga koma lima tujuh), dan terus meningkat hingga 83,86 (delapan puluh tiga koma delapan enam) pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dalam sektor ketahanan pangan, seperti kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat produksi pangan lokal, meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan, serta memperbaiki sistem distribusi dan cadangan pangan. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan, tren indeks yang meningkat dalam dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan kondisi ketahanan pangan daerah.

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan tiga pilar vital yang saling terhubung dan perlu dikelola secara terintegrasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan energi terbarukan seperti bioenergi dari limbah pertanian tidak hanya mendukung ketahanan energi, tetapi juga mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi pertanian.

Di sisi lain, pengelolaan air secara efisien melalui teknologi irigasi hemat energi dan pemanenan air hujan turut mendukung produktivitas pangan dan konservasi sumber daya. Sinergi ini menciptakan sistem yang saling memperkuat, dimana ketersediaan dan keberlanjutan satu sektor mendukung ketahanan sektor lainnya, sehingga membangun ketahanan wilayah secara menyeluruh terhadap perubahan iklim dan tekanan sumber daya.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merujuk pada kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan manusia, keberlanjutan alam, dan keharmonisan antara keduanya. Lingkungan hidup yang berkualitas tidak hanya berarti bebas dari pencemaran, tetapi juga mencakup aspek ekosistem yang sehat, ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta kemampuan masyarakat untuk hidup dengan kualitas hidup yang baik. Berikut adalah beberapa elemen penting yang membentuk lingkungan hidup yang berkualitas :

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air adalah suatu angka yang digunakan untuk menggambarkan kualitas air secara keseluruhan, berdasarkan parameter-parameter tertentu yang diukur di dalam air. Indeks Kualitas Air sering digunakan untuk menilai apakah air tersebut layak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi manusia, pertanian, atau keperluan industri.

Tabel 2. 32 Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	77,79	43,33	50	50	34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

Pada tabel di atas menunjukkan Indeks Kualitas Air lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air menunjukkan nilai sebesar 77,79 (tujuh puluh tujuh koma tujuh sembilan) yang berarti bahwa pada tahun tersebut kualitas air berada dalam kategori baik yang mencerminkan kondisi lingkungan perairan yang masih cukup bersih, sedangkan pada tahun terakhir yaitu tahun 2024, Indeks Kualitas Air mengalami penurunan cukup besar menjadi sebesar 34 (tiga puluh empat) yang menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan karena sudah masuk dalam kategori buruk.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kualitas udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi polutan udara tertentu. Indeks Kualitas Udara membantu masyarakat untuk mengetahui seberapa baik atau buruk kualitas udara di sekitarnya dan untuk memberikan panduan terkait kesehatan serta keselamatan. Hasil pengukuran indeks kualitas udara pada tahun 2020 yaitu sebesar 51,67 (lima puluh satu koma enam tujuh) dan selalu mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2024 menjadi sebesar 93,18 (sembilan puluh tiga koma satu delapan). Hasil pengukuran indeks kualitas udara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 33 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Udara	51,67	87,86	88,16	90,96	93,18

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

3. Indeks Kualitas Lahan

Tabel 2. 34 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lahan	65,62	38,17	38,21	38,73	38,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kualitas Lahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan terutama dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, kualitas lahan berada pada kondisi yang sangat baik, dengan nilai indeks mencapai 65,62 (enam puluh lima koma enam dua). Angka ini merupakan capaian tertinggi selama periode lima tahun terakhir dan mencerminkan keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan kawasan pada tahun tersebut. Namun demikian, capaian tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana nilai indeks turun drastis menjadi 38,17 (tiga puluh delapan koma satu tujuh). Penurunan ini mengindikasikan adanya degradasi lahan yang cukup besar, yang diduga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain alih fungsi lahan, deforestasi, serta pembangunan yang tidak terkendali.

Meskipun sempat menurun tajam, pada tahun 2022 mulai terlihat adanya perbaikan, dengan indeks naik sedikit menjadi 38,21 (tiga puluh delapan koma dua satu). Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2023 dengan capaian 38,73 (tiga puluh delapan koma tujuh tiga), yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dan pengendalian terhadap kerusakan lahan, meskipun masih berada jauh dibawah capaian tahun 2020. Pada tahun 2024 kembali terjadi sedikit penurunan menjadi 38,67 (tiga puluh delapan koma enam tujuh), yang mencerminkan kondisi tutupan lahan yang relatif stagnan dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan belum sepenuhnya berhasil dan kualitas lahan masih rentan terhadap tekanan lingkungan dan aktivitas manusia.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menunjukkan tren fluktuatif. Indeks tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 65,08 (enam puluh lima koma nol delapan), sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar 58,99 (lima puluh delapan koma sembilan sembilan). Jika dibandingkan dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup nasional yang berada di kisaran 70 (tujuh puluh), capaian ini masih berada di bawah standar. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, khususnya pada aspek kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

Beberapa kebijakan daerah seperti Program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pengawasan industri ramah lingkungan telah dilaksanakan, namun belum optimal dalam menahan laju penurunan indeks. Diperlukan langkah korektif yang lebih terintegrasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 35 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,08	60,24	62,87	64,44	58,99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

5. Timbulan sampah yang ditangani

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi sampah menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, volume produksi sampah tercatat sebesar 183.136,8 (seratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam koma delapan) meter kubik dan terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 194.297,0 (seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma nol) meter kubik pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat mencerminkan pertumbuhan populasi, aktivitas ekonomi, atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu, volume sampah yang berhasil diatasi juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, hanya 35.338,6 (tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma enam) meter kubik sampah yang ditangani. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 57.774,8 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma delapan) meter kubik, dan terus naik hingga mencapai puncaknya di 92.679,7 (sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh) meter kubik pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, volume sampah yang ditangani sedikit menurun menjadi 92.310,0 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus sepuluh koma nol) meter kubik, meskipun jumlah ini tetap jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Timbulan sampah yang ditangani cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36 Timbulan sampah yang ditangani

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume produksi sampah (m3)	183.136,8	184.242,0	188.985,1	192.099,0	194.297,0
2	Volume sampah yang ditangani (m3)	35.338,6	57.774,8	77.173,1	92.679,7	92.310,0
3	Persentase Penanganan Sampah	16,84%	19,30%	28,66%	47,59 %	47,51%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

6. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui *Reduce, Reuse, Recycle*

Pengelolaan sampah berbasis konsep *Reduce, Reuse, Recycle* mengalami dinamika yang beragam selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah sampah yang dikelola melalui konsep *Reduce, Reuse, Recycle* tercatat sebesar 1.489,19 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma satu sembilan) ton per tahun, menjadi titik awal dari data yang diamati. Tahun 2021 menunjukkan pengurangan luar biasa dengan jumlah sampah yang terkurangi melalui *Reduce, Reuse, Recycle* mencapai 7.493,45 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma empat lima) ton per tahun. Peningkatan ini dapat mencerminkan betapa intensifnya Program atau kampanye yang efektif dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle*. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan, dengan jumlah sampah *Reduce, Reuse,*

Recycle yang dikelola hanya mencapai 2.472,14 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua koma satu empat) ton per tahun. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya partisipasi masyarakat, terbatasnya fasilitas pengelolaan, atau kendala lainnya.

Tren stabil mulai terlihat pada tahun 2023 dan 2024, di mana jumlah sampah *Reduce, Reuse, Recycle* sedikit meningkat menjadi 2.479,29 (dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan) ton per tahun, dan dilanjutkan dengan kenaikan pada tahun 2024 menjadi 2.764,84 (dua ribu tujuh ratus enam puluh empat koma delapan empat) ton per tahun. Peningkatan ini menunjukkan tidak adanya pemulihan atau penghentian dalam upaya pengelolaan sampah berbasis *Reduce, Reuse, Recycle*. Jumlah sampah yang terkurangi karena adanya pengolahan *Reduce, Reuse, Recycle* terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah 3R (ton/tahun)	1.489,19	7.493,45	2.472,14	2.479,29	2.764,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

7. Persentase cakupan area pelayanan sampah

Persentase cakupan area pelayanan didapat dari jumlah area pelayanan pengelolaan sampah dengan luas area Kabupaten. Dari hasil perhitungan, persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah daerah cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 170,25 (seratus tujuh puluh koma dua lima) kilometer persegi, meningkat seiring berjalannya waktu sampai tahun 2024 sebesar 311,29 (tiga ratus sebelas koma dua sembilan) kilometer persegi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 38 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km^2)	170,25	195,12	289,75	311,29	311,29
2	Luas area Kabupaten (km^2)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
Persentase cakupan area pelayanan (%)		16,83	19,29	28,65	30,94	30,94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2025

8. Persentase Rumah Tangga Sanitasi Aman

Sanitasi Aman merujuk pada lingkungan tempat tinggal di tingkat rumah tangga yang memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, serta mendukung pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat.

Tabel 2. 39 Persentase Rumah Tangga Layanan Sanitasi Aman

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman (Persen)	4,84	2,37	3,59	3,53	4,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tabel di atas didapat rumah tangga sanitasi aman relatif mengalami kenaikan fluktuatif, dimana dari tahun 2019 sebesar 3,76 (tiga koma tujuh enam) persen menjadi 4,73 (empat koma tujuh tiga) persen pada tahun 2024. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada tahun 2024 sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang berada di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran.

9. Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum

Persentase Rumah Tangga Akses Air Minum merujuk pada proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang layak sesuai standar kesehatan. Air minum yang layak adalah air yang bebas dari kontaminasi, memiliki kualitas yang memenuhi standar, dan aman untuk dikonsumsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 40 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	65,9	61,86	60,32	86,47	N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, 2025

Pada tabel di atas didapat bahwa penduduk dengan akses air minum cenderung fluktuatif, mengalami penurunan hingga tahun 2022, namun mengalami kenaikan pada tahun tahun 2023 yaitu sebesar 86,47 (delapan puluh enam koma empat tujuh) persen. Persentase penduduk berakses air minum terendah berada pada tahun 2020 sebesar 60,32 (enam puluh koma tiga dua) persen dan tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 86,47 (delapan puluh enam koma empat tujuh) persen. Artinya, pada tahun 2023 banyak realisasi Program air minum.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

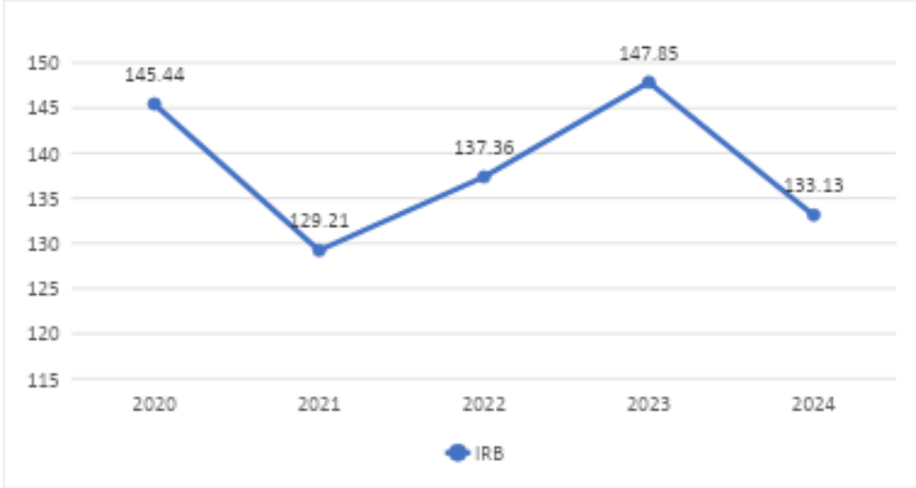
Daerah memiliki risiko bencana yang tinggi, seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor dan geleombang pasang. Pada 17 Juli 2006 pernah mengalami bencana tsunami, yang disebabkan oleh gempa berkekuatan 7,7 (tujuh koma tujuh) skala Richter di Samudra Hindia. Tsunami ini menerjang pesisir Pangandaran dengan ketinggian gelombang mencapai 5–7 (lima hingga tujuh) meter, menyebabkan kerusakan parah dan menelan lebih dari 600 (enam ratus) korban jiwa, serta merusak ribuan rumah, fasilitas publik, dan infrastruktur. Kejadian Tsunami di Daerah ini dipicu oleh gempa bumi subduksi akibat pergerakan Lempeng Indo-Australia yang menyusup ke

bawah Lempeng Eurasia. Wilayah geografis yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa, berada di zona rawan tsunami karena berdekatan dengan zona pertemuan lempeng aktif di Samudra Hindia. Selain faktor geologi, kurangnya sistem peringatan dini saat itu menyebabkan keterlambatan evakuasi masyarakat, sehingga memperbesar jumlah korban. Upaya yang dilakukan pasca bencana tersebut sebagai langkah mitigasi dan resiliensi pasca tsunami antara lain dengan pemasangan sistem peringatan dini yang berupa alat deteksi gempa dan tsunami (*buoy*) untuk memberikan peringatan lebih cepat, akan tetapi kondisi saat ini alat tersebut yang terpasang di laut tidak berfungsi optimal dan bahkan ada beberapa yang tidak berfungsi. Selain pemasangan alat deteksi, pembangunan jalur evakuasi dengan menggunakan jalan eksisting yang diberi papan petunjuk untuk mengarahkan ke tempat evakuasi di dataran tinggi agar masyarakat dapat lebih cepat sampai ditempat yang lebih aman. Langkah selanjutnya yang diambil pasca tsunami yaitu edukasi dan simulasi bencana dilakukan secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan, masyarakat terhadap bencana, serta konservasi ekosistem pesisir seperti penanaman *mangrove* atau sabuk hijau dilakukan sebagai benteng alami untuk mengurangi dampak tsunami.

Berdasarkan sejarah masa lalu terkait kejadian bencana maka resiliensi terhadap bencana ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Resiliensi ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari kesiapsiagaan masyarakat, infrastruktur yang tangguh, hingga kelestarian ekosistem. Masyarakat telah menerapkan strategi adaptasi berbasis kearifan lokal, seperti menyesuaikan pola pertanian dan perikanan dengan kondisi cuaca serta membangun komunitas tangguh bencana. Dari sisi infrastruktur seperti jalur evakuasi telah diperkuat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Selain itu, upaya pelestarian ekosistem, seperti rehabilitasi hutan *mangrove*, perlindungan daerah aliran sungai, dan konservasi terumbu karang, terus dilakukan untuk mendukung daya tahan lingkungan terhadap perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan resiliensi daerah, sehingga mampu bertahan dan bangkit kembali setelah mengalami peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan.

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat risiko suatu wilayah terhadap bencana berdasarkan tiga komponen utama yaitu komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Indeks Risiko Bencana digunakan untuk membantu pemerintah dalam perencanaan mitigasi bencana, alokasi sumber daya, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Semakin tinggi nilai Indeks Risiko Bencana, semakin tinggi pula risiko bencana di suatu wilayah. Adapun Indeks Risiko Bencana Daerah lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 18 Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tahun 2025

Indeks Risiko Bencana lima tahun terakhir menunjukan kondisi risiko bencana yang fluktuatif dengan kecenderungan masih berada pada level tinggi. Pada tahun 2020 Indeks Risiko Bencana sebesar 145,44 (seratus empat puluh lima koma empat empat) dan mengalami penurunan signifikan menjadi 129,21 (seratus dua puluh sembilan koma dua satu) pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 secara bertahap naik menjadi 137,36 (seratus tiga puluh tujuh koma tiga enam) dan 147,85 (seratus empat puluh tujuh koma delapan lima) yang artinya risiko bencana mengalami kenaikan. Naiknya risiko bencana disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mencerminkan peningkatan tingkat bahaya kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, beberapa penyebab naiknya Indeks Risiko Bencana diantaranya peningkatan ancaman bahaya seperti aktivitas tektonik yang meningkat karena berada di zona *megathrust* Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang terus mengalami pergerakan dan berpotensi menyebabkan gempa besar serta tsunami, perubahan iklim, deforestasi dan degradasi lingkungan. Selain itu meningkatnya kerentanan seperti pertumbuhan penduduk dan permukiman di daerah rawan bencana, kurangnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Pada tahun 2024, Indeks Risiko Bencana mengalami penurunan kembali menjadi 133,13 (seratus tiga puluh tiga koma satu tiga). Meskipun angka ini menunjukkan adanya penurunan risiko dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih relatif tinggi dan menunjukkan bahwa risiko bencana belum sepenuhnya terkendali.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Indeks Ketahanan Daerah yang mengukur kapasitas suatu daerah dapat dilakukan monitoring dan evaluasi naik dan turunnya risiko bencana di daerah tersebut. Indeks Ketahanan Daerah dapat dilihat pada Gambar di bawah.

Gambar 2. 19 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Indeks Ketahanan Daerah merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari berbagai risiko, termasuk bencana alam, tekanan sosial-ekonomi, serta gangguan terhadap pelayanan dasar. Dengan karakteristik wilayah pesisir dan kerentanan terhadap bencana serta dinamika pembangunan yang tinggi, Indeks Ketahanan Daerah menjadi barometer penting dalam melihat efektivitas kebijakan Pembangunan Daerah secara keseluruhan.

Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, Indeks Ketahanan Daerah berada di angka 0,76 (nol koma tujuh enam), mencerminkan tingkat ketahanan yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam menjadi 0,68 (nol koma enam delapan), yang menunjukkan menurunnya kapasitas daerah dalam menghadapi risiko, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana nilai Indeks Ketahanan Daerah tidak mengalami perubahan dan tetap berada di angka 0,68 (nol koma enam delapan), menandakan bahwa belum terjadi pemulihan signifikan. Memasuki tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,70 (nol koma tujuh nol), yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan dalam sistem ketahanan daerah, meskipun masih belum kembali ke tingkat ketahanan seperti tahun 2021.

Dari tren tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan daerah sangat dinamis dan sensitif terhadap perubahan lingkungan dan kebijakan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah perlu menjadikan Indeks Ketahanan Daerah sebagai alat navigasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan dan ketahanan sosial masyarakatnya. Dalam konteks perencanaan pembangunan ke depan, menjaga dan meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam hal terkait luasan potensi bencana dapat dilihat berdasarkan jenis bencana yaitu:

1) Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

Di bagian tengah-timur Pangandaran terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Daerah yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Daerah juga sangat rawan terkena bencana tsunami. Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan

kemiringan lereng yang landai menjadi semacam "kantung tsunami" sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan daerah yang rawan gempa dan tsunami.

Tabel 2. 41 Luasan Potensi Gempa

No	Kerawanan Gempa	Luas (Ha)
1	MMI. VII – VIII	84.879,54
2	MMI. > VII	28.445,56
	Grand Total	113.325,10

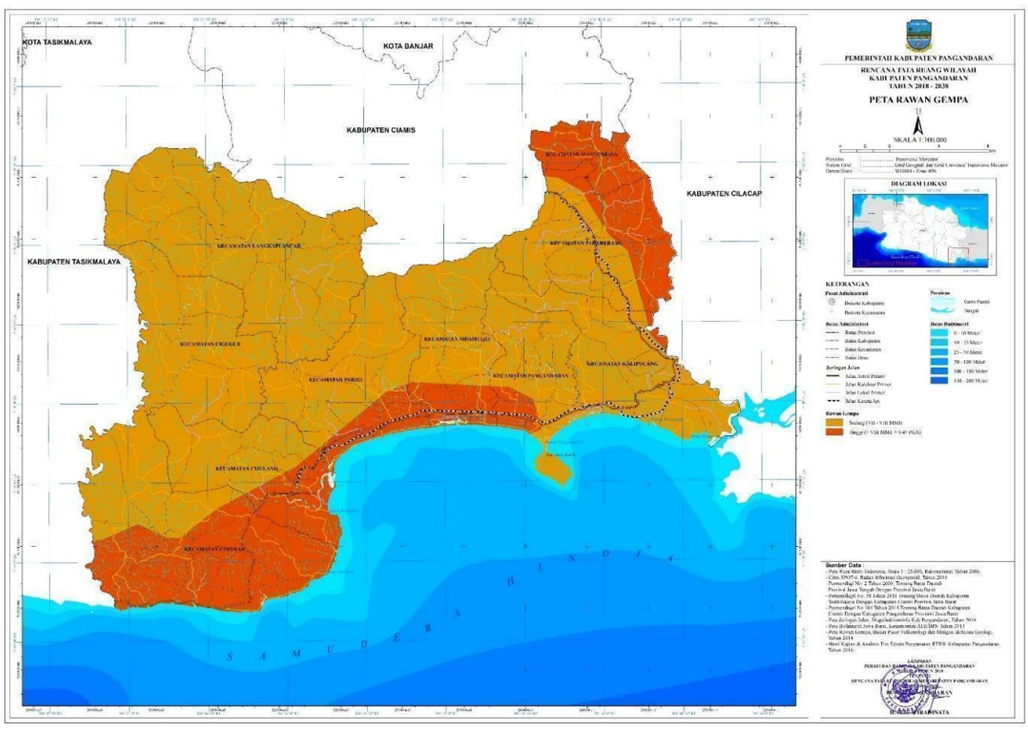
Sumber: RTRW Tahun 2018 – 2038

Tabel 2. 42 Luasan Potensi Tsunami

No	Kerawanan Tsunami	Luas (Ha)
1	Zona Rawan Rendah Total	691,25
2	Zona Rawan Menengah Total	1.148,45
3	Zona Rawan Tinggi Total	1.425,42
	Grand Total	3.265,12

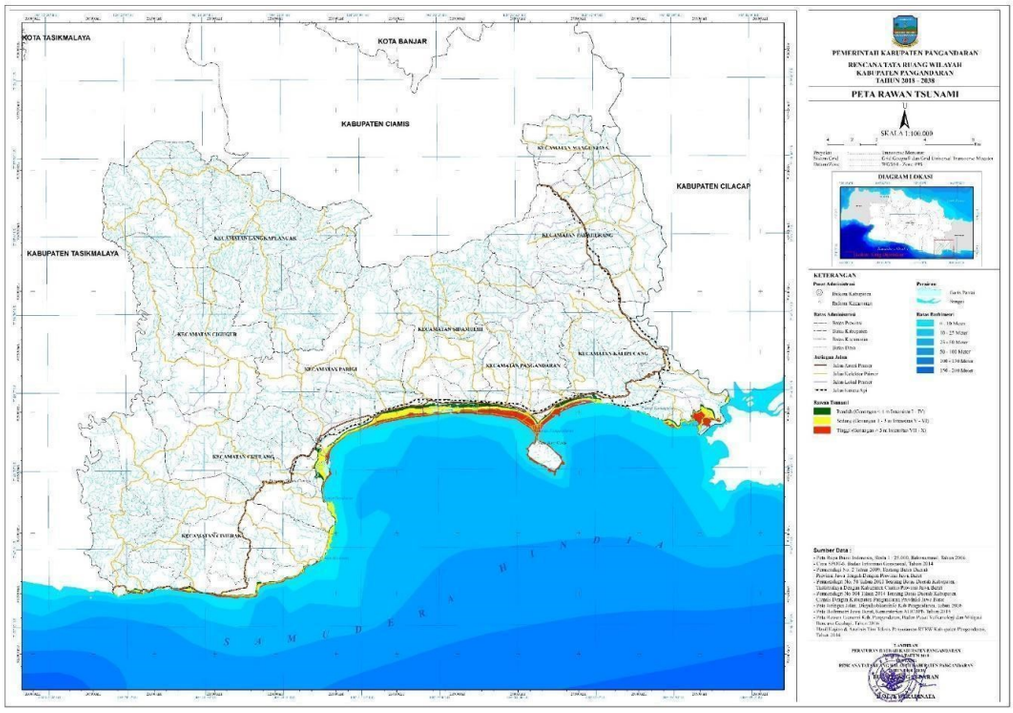
Sumber: RTRW Tahun 2018 – 2038

Gambar 2. 20 Peta Rawan Gempa



Sumber : Materi Teknis RTRW Tahun 2018 - 2038

Gambar 2. 21 Peta Rawan Tsunami



Sumber : Materi Teknis RTRW Tahun 2018 – 2038

2) Rawan Bencana Gerakan Tanah

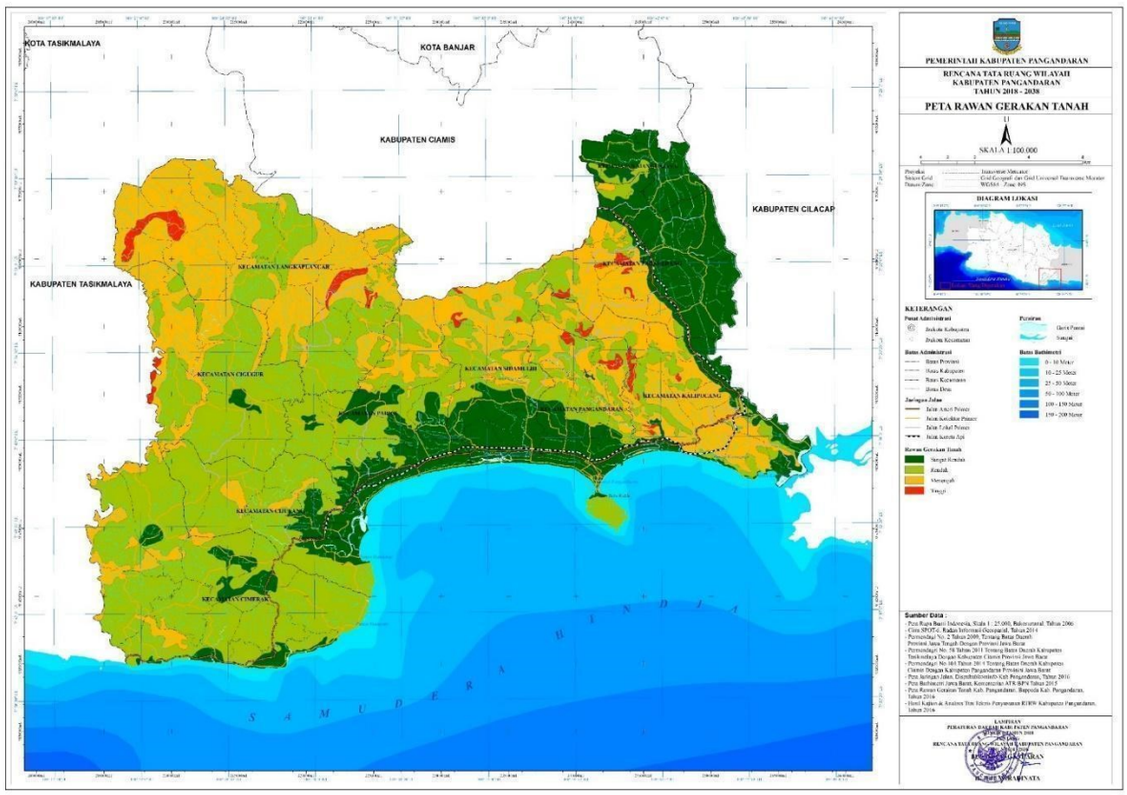
Kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar mengakibatkan daerah perbukitan Pangandaran rawan bencana gerakan tanah. Curah hujan tinggi serta alih fungsi lahan di daerah perbukitan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi gerakan tanah. Daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang besar sebaiknya dikelola dan dikonservasi dengan baik. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43 Luasan Potensi Gerakan Tanah

No	Kerawanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	25.774,32
2	Rendah	51.309,74
3	Menengah	34.519,48
4	Tinggi	1.721,57
	Grand Total	113.325,11

Sumber: RTRW Tahun 2018 – 2038

Gambar 2. 22 Peta Rawan Gerakan Tanah



Sumber : Materi Teknis RTRW Tahun 2018 – 2038

3) Rawan Bencana Banjir

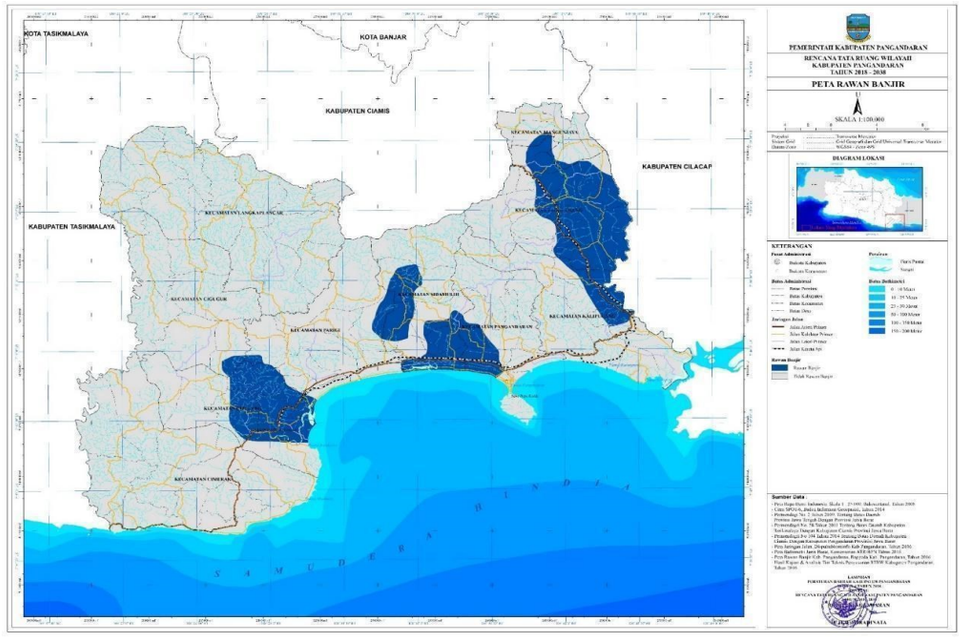
Wilayah Daerah yang berupa dataran rendah merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Daerah yang rawan banjir.

Tabel 2. 44 Luasan Potensi Bencana Banjir

No	Kerawanan Banjir	Luas (Ha)
1	Tidak Rawan Banjir	95.144,98
2	Rawan Banjir	18.180,35
	Grand Total	113.325,33

Sumber: RTRW Tahun 2018 – 2038

Gambar 2. 23 Peta Rawan Banjir



Sumber : Materi Teknis RTRW Tahun 2018 - 2038

4) Perubahan Iklim

Perubahan iklim kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam Pembangunan Daerah. Sebagai wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan sangat bergantung pada sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, memberikan implikasi pada wilayah dengan posisi yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, baik secara ekologis maupun sosial-ekonomi. Berikut data yang menunjukan sejumlah indikator yang mengkonfirmasi adanya tren ketidakteraturan iklim dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. 45 Iklim Ekstrim berdasarkan waktu terjadinya Tahun 2022-2024

Uraian	Curah Hujan (mm)	Tx (suhu Maksimum)	Tn (Suhu Minimum)	Tav (Suhu Rata-rata)	RH (Kelembapan Relatif)	WX (Kecepatan Angin)
Indikator	155,2	36,0	17,0	29,3	64,0	21,0
Tanggal terjadi	16 Juli 2022	18 Oktober 2023	13 Oktober 2023	17 Oktober 2023	20 Desember 2023	09 November 2024

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2025

Berdasarkan data diatas, salah satu indikator yang mencolok adalah suhu maksimum yang tercatat mencapai 36 (tiga puluh enam) derajat *celcius* pada 16 Juli 2022. Suhu ini menunjukkan terjadinya peristiwa panas ekstrem, yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sektor pertanian, kesehatan masyarakat, dan ketersediaan air bersih. Suhu udara yang tinggi ini berdampak langsung terhadap produktivitas tanaman pangan, terutama padi dan hortikultura. Ketika suhu lingkungan terlalu panas, proses fotosintesis tanaman terganggu, dan evaporasi air dari tanah menjadi lebih cepat, menyebabkan stres tanaman dan menurunkan hasil panen. Di sisi lain, suhu minimum tercatat mencapai 17 (tujuh belas) derajat *celcius* pada 18 Oktober 2023, menunjukkan fluktuasi suhu harian yang tajam. Perbedaan suhu ekstrem semacam ini berisiko menimbulkan gangguan pada tanaman pertanian dan meningkatkan kerentanan kelompok rentan terhadap penyakit.

Rata-rata suhu harian yang tercatat sebesar 29,3 (dua puluh sembilan koma tiga) derajat *celcius* pada 23 Oktober 2023, menandakan bahwa suhu lingkungan secara umum berada pada tingkat yang cukup tinggi. Kombinasi suhu tinggi dengan kelembaban relatif yang rendah (64 (enam puluh empat) persen pada 17 Oktober 2023) semakin mengindikasikan kondisi kekeringan atau musim kemarau yang menguat. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan debit air sungai, terganggunya irigasi sawah, serta meningkatnya kebutuhan akan suplai air bersih bagi masyarakat.

Lebih lanjut, kecepatan angin yang tercatat sebesar 21,0 (dua puluh satu koma nol) meter per detik pada 20 Desember 2023 tergolong kuat dan berpotensi memicu gelombang laut tinggi, kerusakan infrastruktur ringan, serta memperbesar risiko bencana hidrometeorologi seperti gelombang ekstrim dan abrasi pantai. Mengingat Daerah memiliki garis pantai yang panjang dan menjadi pusat kegiatan wisata, risiko ini perlu diantisipasi secara serius melalui sistem peringatan dini dan penataan kawasan pesisir yang adaptif terhadap iklim. Implikasi perubahan iklim terhadap ketahan pangan telah menurunkan daya dukung lahan pertanian, mengganggu kalender tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta mempersempit ruang budidaya perikanan. Akibatnya, masyarakat rentan terhadap kenaikan harga pangan, defisit pasokan lokal, dan penurunan pendapatan petani.

Selain indikator diatas pada indikator Gas Rumah Kaca, kontribusi penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Daerah masih belum optimal di semua sektor. Meskipun demikian, pada sektor lingkungan terjadi peningkatan signifikan intensitas emisi, yaitu dari 333,968933 TonCO_2eq pada tahun 2022 menjadi 1320,7261 TonCO_2eq pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengendalian emisi, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan kendaraan bermotor, serta perubahan tata guna lahan.

2.1.1.7 Demografi

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat tren peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Adapun jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 46 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

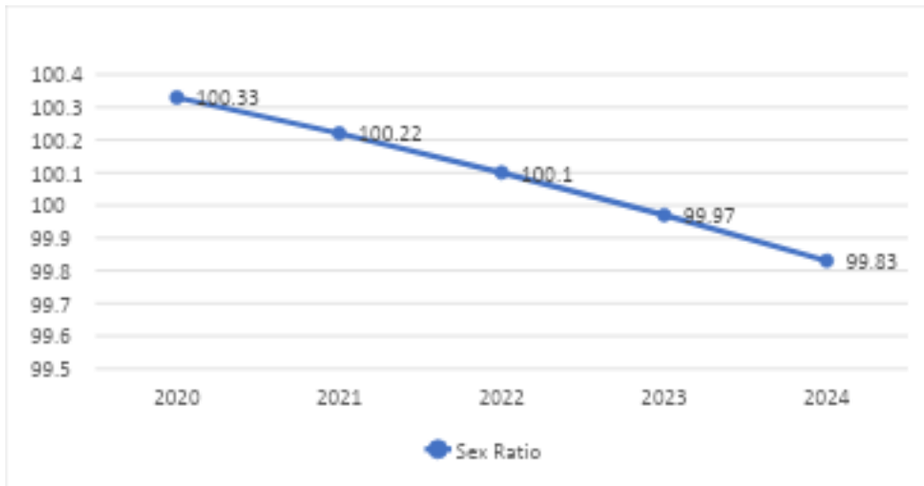
No	Uraian	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki-laki	211.552	213.025	214.406	215.696	216.868
2	Perempuan	210.859	212.562	214.190	215.768	217.236
	Jumlah	422.411	425.587	428.596	431.464	434.104

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk meningkat dari 422.411 (empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus sebelas) jiwa pada tahun 2020 menjadi 434.104 (empat ratus tiga puluh empat ribu seratus empat) jiwa pada tahun 2024, dengan rata-rata kenaikan sekitar 2.923 (dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga) jiwa per tahun. Jumlah penduduk laki-laki setiap tahun lebih tinggi dibanding penduduk perempuan meski selisihnya tidak signifikan, peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada kebutuhan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus disiapkan seiring bertambahnya jumlah penduduk,

serta ketersediaan sumber daya dan kesempatan kerja yang harus meningkat untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk.

Gambar 2. 24 *Sex Ratio* Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sex ratio (rasio jenis kelamin) mengacu pada jumlah laki-laki per 100 (seratus) perempuan dalam suatu populasi. Berdasarkan grafik diatas terjadi tren penurunan *sex ratio* dari tahun 2020 hingga 2024, tahun 2020 *sex ratio* sebesar 100,33 (seratus koma tiga tiga) yang artinya lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, pada tahun 2024 *sex ratio* menurun menjadi 99,83 (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga) yang artinya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Penurunan *sex ratio* dari 100,33 (seratus koma tiga tiga) pada tahun 2020 menjadi 99,83 (sembilan puluh sembilan koma delapan tiga) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah perempuan dalam populasi semakin mendekati atau bahkan melebihi jumlah laki-laki.

2) Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah, pada tahun 2024, penyebaran penduduk bervariasi antar Kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 227,33 (dua ratus dua puluh tujuh koma tiga tiga) jiwa per kilometer persegi yaitu di Kecamatan Cigugur yang luas wilayahnya 97,29 (sembilan puluh tujuh koma dua sembilan) kilometer persegi sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Mangunjaya dengan kepadatan 1.010,98 (seribu sepuluh koma sembilan delapan) jiwa per kilometer persegi. Berikut ini persentase jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2024.

Tabel 2. 47 Kepadatan Penduduk Tahun 2024

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km^2
1	Cimerak	11,72	429,80
2	Cijulang	6,44	317,42
3	Cigugur	5,35	227,33
4	Langkaplancar	11,98	293,48
5	Parigi	10,90	482,75
6	Sidamulih	7,07	393,50
7	Pangandaran	13,83	987,66
8	Kalipucang	8,96	284,42
9	Padaherang	16,11	589,16
10	Mangunjaya	7,64	1010,98

No	Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km^2
	Jumlah	100,00	429,41

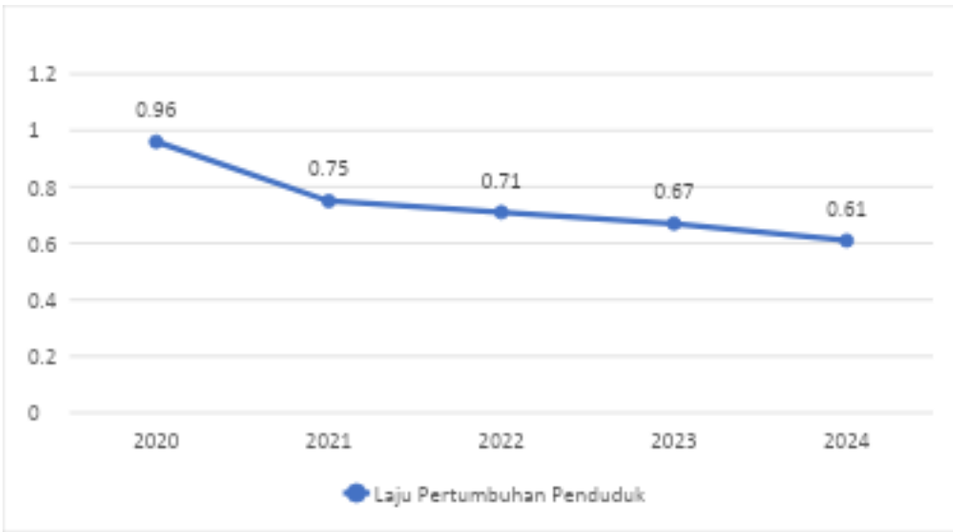
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kecamatan Mangunjaya dan Kecamatan Pangandaran merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi hal ini dapat berimplikasi pada pengelolaan tata ruang yang harus ditingkatkan untuk menghindari masalah seperti ketersediaan sanitasi dan air bersih. Berdasarkan tabel pun, pertumbuhan penduduk yang tidak merata antar wilayah sering kali menimbulkan ketimpangan pembangunan, tekanan pada fasilitas umum, serta persoalan sosial dan lingkungan di daerah yang mengalami ledakan penduduk. Sementara itu, wilayah lain justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan jumlah penduduk, yang berdampak pada menurunnya produktivitas lokal dan pelayanan publik. Dalam konteks Daerah, kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan penduduk yang seimbang melalui pendekatan stimulus ekonomi lokal dengan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata desa agar penduduk memiliki sumber penghidupan yang layak di wilayah asalnya. Hal ini akan mengurangi migrasi keluar dan menciptakan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Selain itu Kebijakan penataan ruang yang mengintegrasikan aspek kependudukan penting untuk mencegah pemusatan penduduk di kawasan rentan, seperti pesisir rawan bencana atau kawasan konservasi. Penyusunan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang harus memperhitungkan kapasitas tampung wilayah terhadap pertumbuhan penduduk.

3) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk daerah adalah 0,96 (nol koma sembilan enam) persen dan pada tahun 2024 menjadi 0,61 (nol koma enam satu) persen. Faktor penyebab yang memungkinkan penurunan laju pertumbuhan penduduk ini adalah penurunan angka kelahiran dan migrasi keluar daerah dimana sebagian penduduk berpindah ke luar daerah untuk bekerja ataupun sekolah.

Gambar 2. 25 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

4) Komposisi Penduduk

Potensi dan tantangan Pembangunan Daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya Pembangunan Daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 (nol sampai empat belas) tahun dan usia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas, struktur penduduk berdasarkan usia 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

a. Kelompok usia muda (0-14 (nol sampai empat belas) tahun) mengalami sedikit perubahan yaitu tahun 2023 sebesar 89.548 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan) jiwa dan tahun 2024 sebesar 89.568 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan) jiwa yang menunjukan angka kelahiran masih stabil.
b. Kelompok usia produktif (15-64 (lima belas sampai enam puluh empat) tahun) pada tahun 2023 sebesar 259.973 (dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 260.493 (dua ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa yang menunjukan penduduk usia kerja masih meningkat dan potensi tenaga kerja cukup besar.
c. Kelompok usia lansia (diatas 65 (enam puluh lima) tahun) pada tahun 2023 sebesar 45.943 (empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga) jiwa dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 48.043 (empat puluh delapan ribu empat puluh tiga) jiwa yang menunjukan penuaan populasi yang bisa berdampak pada kebutuhan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 48 Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023-2024

No	Struktur Usia	2023			2024		
		Laki – laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Laki – laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4	16.136	15.441	31.577	16.449	15.745	32.194
2	5 – 9	14.419	13.722	28.147	14.517	13.876	28.393
3	10 – 14	15.411	14.413	29.824	14.966	14.015	28.981
4	15 – 19	16.774	15.795	32.569	16.710	15.710	32.420
5	20 – 24	16.872	15.950	32.822	16.720	15.809	32.529
6	25 – 29	16.932	15.875	32.807	16.991	15.950	32.941
7	30 – 34	15.881	15.206	31.087	16.066	15.244	31.310
8	35 – 39	14.624	14.503	29.127	14.682	14.682	29.508
9	40 – 44	13.710	13.964	26.674	13.775	13.897	27.672
10	45 – 49	13.746	14.514	28.260	13.598	14.347	27.939
11	50 – 54	13.855	15.006	28.861	13.838	14.885	28.721
12	55 – 59	13.344	14.585	27.929	13.283	14.688	27.971
13	60 – 64	12.041	12.865	24.906	12.257	13.166	25.423
14	65- 69	9.534	10.025	19.559	9.754	10.497	20.251
15	70 – 74	6.737	6.837	13.574	7.024	7.188	14.212
16	>75	5.580	7.067	12.741	6.096	7.543	13.639
Jumlah		215.696	215.768	431.464	21.868	217.236	434.104

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2. 49 Proyeksi Penduduk tahun 2025-2029 berdasarkan Kelompok Umur

Usia Penduduk	Jumlah Penduduk (jiwa/tahun)				
	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	32.432	32.672	32.914	33.157	33.402
5-9	28.603	28.814	29.028	29.242	29.459
10-14	29.195	29.411	29.629	29.848	30.069
15-19	32.659	32.901	33.145	33.390	33.637
20-24	32.769	33.012	33.256	33.502	33.750
25-29	33.184	33.430	33.677	33.926	34.177
30-34	31.541	31.775	32.010	32.247	32.485
35-39	29.726	29.946	30.167	30.391	30.616
40-44	27.876	28.083	28.290	28.500	28.711
45-49	28.145	28.354	28.563	28.775	28.988
50-54	28.933	29.147	29.363	29.580	29.799
55-59	28.177	28.386	28.596	28.808	29.021
60-64	25.611	25.800	25.991	26.183	26.377
65-69	20.400	20.551	20.703	20.857	21.011
70-74	14.317	14.423	14.529	14.637	14.745
>75	13.739	13.841	13.944	14.047	14.151
Total	437.307	440.546	443.805	447.090	450.398

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan proyeksi diatas, jumlah total penduduk mengalami peningkatan dari 437.307 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh) jiwa pada 2024 menjadi 450.398 (empat ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa pada tahun 2029. Kenaikan rata-rata sekitar 3.000 (tiga ribu) jiwa per tahun yang mencerminkan laju pertumbuhan yang relatif rendah tetapi konsisten. Dominasi kelompok usia produktif (15-64 (lima belas sampai enam puluh empat) tahun) terus bertambah, menunjukkan bahwa daerah masih berada dalam periode bonus demografi, hal ini menjadikan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola dengan baik terutama melalui penyediaan lapangan pekerjaan.

Tren pertumbuhan kelompok usia muda (0-14 (nol sampai empat belas) tahun) menunjukan peningkatan yang menggambarkan tingkat kelahiran yang cukup stabil dan menandakan perlunya perhatian terhadap pembangunan sektor pendidikan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perlindungan anak. Selain peningkatan penduduk usia produktif, penduduk lansia mengalami peningkatan dari 74.067 (tujuh puluh empat ribu enam puluh tujuh) jiwa pada 2025 menjadi 76.285 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima) jiwa pada 2029, hal ini mengindikasikan bahwa penduduk lanjut usia akan semakin banyak yang tentunya memerlukan kebijakan khusus seperti pengembangan sistem jaminan sosial, pelayanan kesehatan lansia serta fasilitas umum yang ramah terhadap lansia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk secara keseluruhan, beban terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi akan semakin tinggi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi umumnya diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto dalam satu tahun. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar peningkatan output barang dan jasa yang dihasilkan, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dengan capaian sebesar -0,05 (*minus* nol koma nol lima) persen karena pandemi COVID-19. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan tiap tahunnya dan pada tahun 2024 capaian laju pertumbuhan ekonominya sebesar 5,12 (lima koma satu dua) persen.

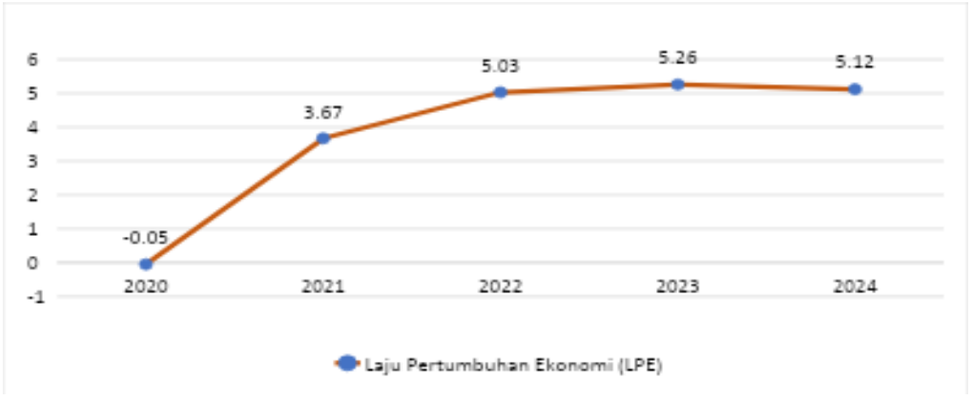
Tabel 2. 50 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2023 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,79	2,28	3,45	1,38	3,37
B	Pertambangan dan Penggalian	0,64	8,97	0,90	1,06	0,98
C	Industri Pengolahan	-0,40	5,45	8,54	4,05	2,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,93	9,99	6,95	1,44	1,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,86	11,48	3,14	-0,78	7,52
F	Konstruksi	-7,98	5,90	-2,32	5,98	8,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,58	3,57	5,80	4,49	3,53
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,45	3,37	7,65	16,31	10,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,32	3,12	10,47	6,21	5,73
J	Informasi dan Komunikasi	33,84	7,22	4,02	4,84	6,22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,76	5,99	4,34	1,47	1,35
L	Real Estate	9,29	9,90	7,72	3,24	4,73
M,N	Jasa Perusahaan	-12,24	8,53	9,40	2,00	2,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,17	-2,89	0,03	1,93	6,74
P	Jasa Pendidikan	5,25	2,60	2,23	4,81	5,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-4,54	7,23	6,46	4,32	6,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,86	1,21	13,50	10,47	3,13
	Produk Domestik Regional Bruto	-0,05	3,67	5,03	5,26	5,21

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Adapun laju pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya dalam grafik dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, mencerminkan kondisi sosial ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -0,05 (*minus* nol koma nol lima) persen akibat pandemi COVID-19 yang menghantam hampir seluruh sektor, terutama pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pangandaran. Tahun 2021 menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 3,67 (tiga koma enam tujuh) persen, seiring dengan mulai membaiknya mobilitas masyarakat dan adaptasi pelaku ekonomi terhadap kondisi kenormalan baru.

Pemulihan ekonomi berlanjut secara signifikan pada tahun 2022 dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,03 (lima koma nol tiga) persen, didorong oleh meningkatnya kembali aktivitas wisata dan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2023 yang mencapai 5,26 (lima koma dua enam) persen, menandakan stabilitas ekonomi yang mulai terbentuk. Namun, pada tahun 2024, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 5,12 (lima koma satu dua) persen. Meski demikian, angka ini masih tergolong sehat dan menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Pangandaran cukup kuat. Ke depan, diperlukan upaya penguatan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata yang berkelanjutan, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian Daerah dalam peningkatan perekonomian diantaranya mengembangkan potensi unggulan daerah seperti penguatan sektor pariwisata berkelanjutan dan terintegrasi menjadi kunci, karena sektor ini sangat dominan dalam memengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu penguatan pada sektor unggulan lainnya seperti pertanian, kehutan dan kelautan yang merupakan sektor dengan kontribusi paling besar terhadap Produk Domestik Regional perlu di optimalkan sebagai salah satu upaya dalam diversifikasi ekonomi agar ketergantungan pada pariwisata tidak membuat ekonomi rentan terhadap guncangan eksternal. Investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur dasar akan meningkatkan ketahanan ekonomi jangka panjang. Mendorong sektor pertanian modern dan hilirisasi produk lokal agar pertumbuhan lebih inklusif, terutama bagi masyarakat pedesaan.

B. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

dalam suatu wilayah dibandingkan dengan total populasi. Indikator ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan dianggap miskin. Data mengenai persentase penduduk miskin biasanya dikumpulkan dan dianalisis oleh lembaga statistik nasional melalui survei sosial dan ekonomi. Penurunan persentase penduduk miskin menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, karena mencerminkan peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di suatu negara atau daerah. Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan berdasarkan data lima tahun terakhir mengalami kenaikan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan, hal ini terlihat dari persentase penduduk di atas miskin yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

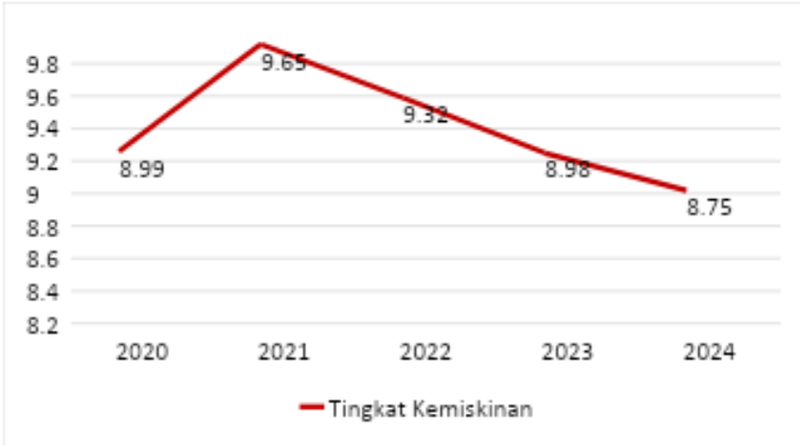
Tabel 2. 51 Tabel Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Penduduk Miskin (%)	Jumlah Jiwa
2020	8,99	36.050
2021	9,65	39.070
2022	9,32	37.910
2023	8,98	36.700
2024	8,75	35.950

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Persentase penduduk miskin dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 27 Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2024

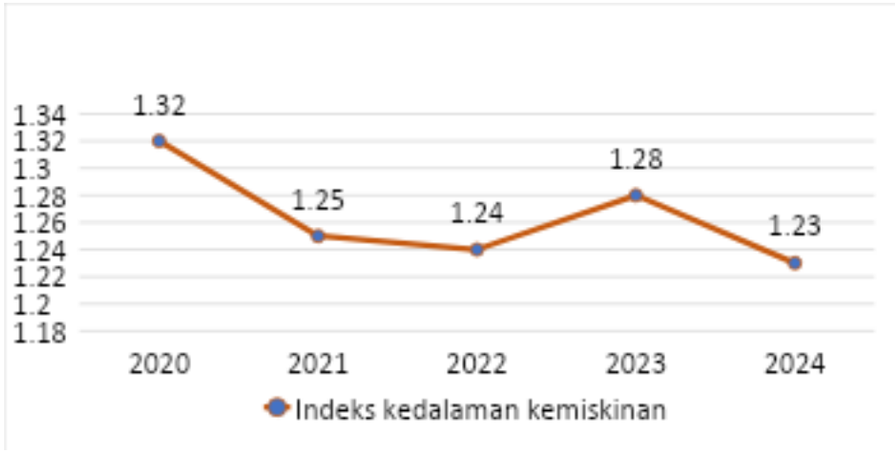


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data diatas penduduk miskin pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, salah satu faktor kenaikan angka kemiskinan adalah pandemi COVID-19. Pada tahun 2024 angka kemiskinan turun menjadi 8,75 (delapan koma tujuh lima) persen. Faktor yang memengaruhi penurunan angka kemiskinan salah satunya dengan adanya Program nasional Program Keluarga Harapan ataupun Program daerah seperti bantuan pangan dan sebagainya. Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara

penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 2. 28 Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks kedalaman kemiskinan daerah cenderung mengalami perubahan secara fluktuatif, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 1,23 (satu koma dua tiga) yang berarti bahwa terjadi penurunan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan yaitu mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 yaitu menjadi sebesar 0,29 (nol koma dua sembilan) yang dapat mencerminkan adanya tantangan ekonomi atau ketimpangan dalam penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2. 29 Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan dalam beberapa langkah-langkah strategis meliputi penguatan Program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dengan proporsi penduduk usia produktif (15–59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun) yang mencapai 63,43 (enam puluh tiga koma empat tiga) persen, dimana terdapat potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penciptaan lapangan kerja dan pelatihan

keterampilan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, mencakup intervensi di berbagai sektor serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan kemiskinan dapat terus ditekan dan kesejahteraan masyarakat Pangandaran dapat meningkat secara berkelanjutan.

C. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, Kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Produk Domestik Regional Bruto per kapita Atas Dasar Harga Berlaku untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran Produk Domestik Regional Bruto per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk tahun 2019-2024.

Tabel 2. 52 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tahun 2020–2023

Uraian	Capaian Tahun Dalam (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024*
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	27,19	28,50	30,71	33,04	35,65

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan tren fluktuatif namun secara keseluruhan meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto per kapita tercatat sebesar 27,19 (dua puluh tujuh koma satu sembilan) juta rupiah. Nilai ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 yang memukul sektor-sektor utama seperti pariwisata, perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi, angka ini kembali meningkat menjadi 28,50 (dua puluh delapan koma lima nol) juta rupiah pada tahun 2021 dan terus mengalami kenaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 30,71 (tiga puluh koma tujuh satu) juta rupiah pada tahun 2022, 33,51 (tiga puluh tiga koma lima satu) juta rupiah pada tahun 2023, dan diproyeksikan mencapai 35,29 (tiga puluh lima koma dua sembilan) juta rupiah pada tahun 2024.

Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto per kapita daerah mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang didorong oleh sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor-sektor ini mulai menunjukkan kebangkitan setelah terpukul oleh pandemi, menandakan bahwa pondasi ekonomi lokal kembali menguat. Namun, untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ini,

diperlukan penguatan ekosistem ekonomi lokal agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga inklusif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Meskipun angka Produk Domestik Regional Bruto per kapita mengalami peningkatan, hal ini belum tentu dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok rentan yang cenderung tertinggal dalam proses pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu diarahkan untuk menjangkau kelompok-kelompok ini melalui Program peningkatan daya saing tenaga kerja, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses terhadap pembiayaan serta peluang usaha. Di sisi lain, peningkatan pendapatan per kapita juga memberikan peluang strategis untuk mendorong investasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu mengarahkan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, tren positif ini turut memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja pembangunan. Namun, alokasi anggaran tersebut harus dikelola secara strategis untuk mendorong pertumbuhan yang merata dan inklusif. Fokus pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur pedesaan, penguatan konektivitas antar wilayah, serta akselerasi digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar ekonomi lokal semakin tangguh, adaptif, dan berdaya saing.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka mengukur persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Berdasarkan data dalam tabel, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 4,52 (empat koma lima dua) persen, kemudian meningkat menjadi 5,08 (lima koma nol delapan) persen pada tahun 2020, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan. Namun, pada tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun cukup signifikan menjadi 3,25 (tiga koma dua lima) persen, dan terus mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 1,56 (satu koma lima enam) persen. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan, yang mungkin dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka sedikit menurun menjadi 1,52 (satu koma lima dua) persen, tetapi pada tahun 2024 kembali naik tipis menjadi 1,58 (satu koma lima delapan) persen. Kenaikan ini dapat mencerminkan tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang stabil. Secara keseluruhan, tren data ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tingkat pengangguran setelah puncaknya pada tahun 2020, meskipun terdapat

sedikit fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 53 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024

Jenis Indikator	Angka Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat pengangguran Terbuka	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka dalam bentuk grafik setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 30 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Data Tingkat Pengangguran Terbuka daerah dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah di daerah ini. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 5,08 (lima koma nol delapan) persen pada tahun 2020, angka ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang sangat dirasakan terutama di wilayah pesisir seperti Kecamatan Pangandaran, Kalipucang, dan Cijulang—yang bergantung pada sektor pariwisata dan jasa. Aktivitas wisata yang terhenti memicu hilangnya banyak pekerjaan informal dan musiman.

Namun, sejak tahun 2021, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan hingga mencapai 1,52 (satu koma lima dua) persen pada tahun 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 1,58 (satu koma lima delapan) persen pada 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemulihan ekonomi, yang ditunjang oleh penguatan sektor pertanian di wilayah pedalaman seperti Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya, serta revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kecamatan Cimerak dan Parigi. Program padat karya tunai desa, pelatihan vokasi, serta dorongan terhadap wirausaha muda turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam konteks pengembangan wilayah, data ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja berjalan relatif baik di beberapa wilayah, namun tetap dibutuhkan strategi perencanaan yang lebih merata. Pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu dikembangkan di wilayah selatan dan barat seperti Kecamatan Cigugur dan Langkaplancar, yang selama ini relatif tertinggal. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar wilayah, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta pengembangan sektor unggulan lokal—seperti agrowisata di Langkaplancar dan perikanan tangkap di Kalipucang—perlu diperkuat untuk memastikan bahwa penurunan angka

pengangguran tidak hanya terjadi di wilayah pusat, tetapi juga menyebar ke seluruh pelosok daerah.

Dengan pendekatan spasial yang terencana dan berbasis potensi lokal, tren positif penurunan pengangguran ini dapat dijadikan fondasi untuk mempercepat transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten.

E. Indeks Gini

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merencanakan pencapaian pembangunan inklusif yaitu pembangunan dengan pemerataan dan manfaat pembangunan mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Salah satu manfaat pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan pendapatan dan kecilnya kesenjangan tingkat pendapatan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan di masyarakat adalah Gini Ratio. Perhitungan Gini Ratio didasarkan pada variabel persentase kumulatif pengeluaran dan penduduk setiap kelompok pengeluaran. Indeks Gini memiliki kisaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 (satu) menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Adapun Gini Ratio daerah pada tahun 2019 -2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 54 Nilai Indeks Gini Ratio Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Gini
2020	0,335
2021	0,320
2022	0,294
2023	0,323
2024	0,286

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Indeks Gini periode 2019–2024, terlihat adanya fluktuasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk. Pada tahun 2019, Indeks Gini berada di angka 0,310 (nol koma tiga satu nol) dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0,335 (nol koma tiga tiga lima), yang mengindikasikan terjadinya pelebaran kesenjangan ekonomi saat itu. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan, yaitu ke angka 0,320 (nol koma tiga dua nol) pada tahun 2021 dan kemudian turun lebih signifikan menjadi 0,294 (nol koma dua sembilan empat) pada tahun 2022. Meskipun pada tahun 2023 kembali meningkat sedikit menjadi 0,323 (nol koma tiga dua tiga), capaian tahun 2024 menunjukkan perbaikan dengan nilai terendah selama periode tersebut, yakni sebesar 0,286 (nol koma dua delapan enam).

Pemerintah daerah perlu menjadikan Indeks Gini sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan Program pembangunan yang adil, misalnya melalui pemerataan infrastruktur antar wilayah, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Ketimpangan yang tinggi juga dapat menghambat efektivitas Program pengentasan kemiskinan karena kelompok miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Lebih jauh, kesenjangan ini juga bisa memicu ketidakstabilan sosial jika tidak segera ditangani. Dengan demikian, menjaga indeks Gini tetap rendah bukan hanya tentang menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berkualitas,

berkeadilan, dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dalam perkembangannya terjadi beberapa kali perubahan metodologi perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, dengan alasan beberapa indikator dianggap sudah tidak tepat untuk digunakan. Sebagai catatan bahwa peringkat Indeks Pembangunan Manusia antara kedua metode tidak dapat dibandingkan karena kedua metode tidak sama. Konsep pembangunan manusia memenuhi dimensi yang sangat luas dengan banyak pilihan, hanya mungkin tercapai jika penduduk tersebut memiliki peluang angka harapan hidup yang tinggi atau umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian serta mempunyai peluang atau kesempatan untuk merealisasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan yang produktif, sehingga penduduk memiliki tingkat daya beli yang tinggi, yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi dalam pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang akan menjadi Target Kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat, yang didukung oleh seluruh anggota DPRD, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Tinjauan capaian di setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 55 Tabel Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	IPM
2020	69,24
2021	69,46
2022	70,21
2023	70,51
2024	71,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia periode 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 69,24 (enam puluh sembilan koma dua empat) dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 69,46 (enam puluh sembilan koma empat enam) pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 70,21 (tujuh puluh koma dua satu) pada 2022, lalu meningkat menjadi 70,51 (tujuh puluh koma lima satu) pada 2023, dan akhirnya mencapai 71,03 (tujuh puluh satu koma nol tiga) pada tahun 2024. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, data Indeks Pembangunan Manusia ini menjadi dasar penting untuk menetapkan prioritas pembangunan berbasis kewilayahan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak bisa hanya berfokus pada aspek kuantitatif seperti pembangunan gedung sekolah atau puskesmas, tetapi harus menyentuh kualitas pelayanan dan keberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, strategi pembangunan wilayah ke depan harus diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di desa-desa

terpencil, penguatan pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah yang jauh dari pusat layanan, serta penciptaan lapangan kerja produktif yang berbasis potensi lokal agar pendapatan masyarakat meningkat. Dengan menjadikan Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator utama dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa pengembangan wilayah dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya mencerminkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

Berdasarkan indikator aspek kesejahteraan ekonomi yang telah diuraikan diatas terdapat korelasi antar indikator aspek tersebut, nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi turun maka hampir semua indikator kesejahteraan juga memburuk seperti kemiskinan naik, pengangguran naik, ketimpangan meningkat. Dalam uraian indikator kesejahteraan ekonomi diatas terdapat pemulihan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang diikuti dengan perbaikan kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Gini Ratio, akan tetapi laju perbaikannya tidak merata.

Korelasi antarindikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya inklusif. Dengan demikian, kebijakan ekonomi ke depan perlu menitikberatkan pada pertumbuhan yang berkualitas, di mana peningkatan output ekonomi harus diikuti oleh penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan ketimpangan, penciptaan lapangan kerja layak, serta peningkatan kualitas modal manusia. selain itu pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hasil pembangunan.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

Prinsip Kesehatan untuk Semua harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan Pembangunan Daerah. Kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek kesehatan harus diintegrasikan dalam perencanaan strategis daerah guna memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau. Adapun untuk menggambarkan prinsip kesehatan untuk semua dapat ditunjukan dengan beberapa indikator yang akan dijelaskan berikut ini.

A. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup atau Angka harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Sejak Tahun 2020 Angka Usia Harapan Hidup daerah sudah mengacu kepada perhitungan baru yaitu hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Usia harapan hidup menunjukkan tren positif selama periode 2020 hingga 2024, dengan peningkatan dari 71,12 (tujuh puluh satu koma satu dua) tahun pada 2019 menjadi 72,41 (tujuh puluh dua koma empat satu) tahun pada tahun 2024. Tinjauan capaian angka usia harapan hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 56 Harapan Hidup Tahun 2020-2024

Jenis Indikator	Angka Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (tahun)	71,40	71,60	71,89	72,17	72,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan, gizi, dan lingkungan hidup yang lebih baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan semakin membaik dan efektivitas Program kesehatan dasar seperti imunisasi, perawatan ibu dan anak, penanganan penyakit menular, serta promosi gaya hidup sehat telah memberi dampak nyata. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, peningkatan usia harapan hidup menjadi indikator penting untuk mengarahkan pembangunan yang lebih inklusif dan merata.

B. Prevalensi balita Stunting

Angka prevalensi balita yang mengalami stunting didapatkan berdasarkan perhitungan banyaknya balita yang mengalami stunting dibagi jumlah seluruh balita. Terdapat dua metode penghitungan stunting yakni Survei Status Gizi Indonesia dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Melalui Intervensi Gizi Terintegrasi. Data stunting ini memiliki perbedaan penting dalam cakupan dan tujuan pengumpulan datanya. Target indikator prevalensi stunting setiap tahunnya menggunakan data Survei Status Gizi Indonesia melalui survei nasional yang dilakukan secara periodik untuk memberikan gambaran umum tentang status gizi masyarakat, termasuk prevalensi stunting, dengan cakupan yang luas dan representatif secara nasional maupun regional. Data dari Survei Status Gizi Indonesia bersifat *cross-sectional* dan digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan kesehatan dan gizi di tingkat nasional maupun daerah. Tinjauan prevalensi balita yang mengalami stunting berdasarkan kedua metoda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 57 Prevalensi Balita Stunting Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi balita gizi kurang / stunting - EPPGBM	3,94	3,94	2,21	1,93	2,23
2	Prevalensi balita gizi kurang / stunting - SSGI	-	22,7	20,0	23,9	17,2

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Angka stunting telah menunjukkan penurunan signifikan berkat Program konvergensi lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial. Salah satu inisiatif unggulan adalah Program Pangandaran Tanpa Stunting, yang menyediakan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi kurang atau anemia. Selain itu, pemerintah juga menggerakkan lebih dari 900 (sembilan ratus) pendamping stunting, seperti tenaga kesehatan dan kader posyandu, untuk memberikan edukasi dan pemantauan gizi secara langsung ke keluarga berisiko. Meski masih terdapat tantangan dengan angka stunting yang perlu ditekan lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

C. Cakupan Desa Siaga Aktif

Persentase cakupan desa siaga aktif didapatkan berdasarkan perhitungan jumlah desa siaga aktif dibagi seluruh jumlah desa siaga aktif yang dibentuk. Persentase cakupan desa siaga aktif pada tahun 2020 sampai 2024 yaitu 100 (seratus) persen. Seluruh desa telah ditetapkan sebagai desa siaga aktif. Tinjauan persentase cakupan desa siaga aktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 58 Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Secara definisi, desa siaga aktif adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan secara mandiri. Terdapat beberapa indikator terkait dengan desa siaga aktif diantaranya, ketersediaan pelayanan kesehatan dasar, adanya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, Penduduk dapat memahami cara penanggulangan bencana, dan adanya penerapan perilaku hidup bersih sehat. Desa siaga aktif ini menjadi modal untuk terus meningkatkan kualitas taraf kesehatan masyarakat.

D. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi per 1000 (seribu) kelahiran hidup didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun pada tahun tertentu, kemudian dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut. Berdasarkan data Angka Kematian Bayi per 1000 (seribu) kelahiran hidup selama periode 2020–2024, terlihat tren yang meningkatkan meskipun kemudian menurun kembali. Peningkatan angka kematian bayi bermakna negatif dalam kondisi ini. Kenaikan ini menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi peningkatan angka kematian bayi, seperti pandemi, akses pelayanan kesehatan, atau faktor lingkungan dan sosial. Pada tahun 2024, Angka Kematian Bayi menurun menjadi 6,2 (enam koma dua), menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan atau intervensi kebijakan untuk mengurangi kematian bayi. Meskipun ada sedikit perbaikan di 2024, angka kematian bayi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019-2021. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab kenaikan pada 2022-2023 dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka ini ke tingkat yang lebih rendah. Angka Kematian Bayi per 1000 (seribu) kelahiran hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Angka Kematian Bayi Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	5,43	5,43	6,25	7,08	6,2

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Fenomena kenaikan Angka Kematian Bayi per 1000 (seribu) kelahiran hidup ini kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan di wilayah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur dasar seperti jalan dan transportasi yang mendukung akses ke pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam perencanaan wilayah ke depan, perlu ada penguatan integrasi antar-sektor melalui penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung mobilitas menuju fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih, serta penguatan Program kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas. Angka Kematian Bayi harus menjadi salah satu indikator kunci dalam arah kebijakan pembangunan manusia, sehingga perencanaan wilayah dapat secara nyata mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

E. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu per 100.000 (seratus ribu) kelahiran hidup didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama satu tahun. Kemudian dibagi jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama. Data Angka Kematian Ibu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Angka Kematian Ibu Hidup Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	49,39	49,39	71,42	18,62	96,86

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Data dalam tabel menunjukkan Angka Kematian Ibu dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 hingga 2021, Angka Kematian Ibu relatif stabil pada nilai 49,39 (empat puluh sembilan koma tiga sembilan), yang menunjukkan bahwa tingkat kematian ibu tidak mengalami perubahan signifikan selama tiga tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 71,42 (tujuh puluh satu koma empat dua), yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pandemi, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, atau komplikasi kehamilan yang meningkat. Tahun 2023 menunjukkan penurunan drastis menjadi 18,62 (delapan belas koma enam dua), yang mungkin merupakan hasil dari peningkatan pelayanan kesehatan maternal, intervensi kebijakan, atau Program kesehatan ibu yang lebih efektif. Namun, tren ini berubah kembali pada tahun 2024, di mana Angka Kematian Ibu melonjak tajam ke 96,86 (sembilan puluh enam koma delapan enam), angka tertinggi dalam periode yang diamati. Lonjakan ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pelayanan kesehatan ibu, seperti kurangnya fasilitas medis, meningkatnya faktor risiko kehamilan, atau dampak dari kondisi sosial dan ekonomi tertentu.

Salah satu cara untuk mencegah kematian ibu termasuk akses ke pelayanan kesehatan berkualitas, perawatan prenatal, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan terampil, dan pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan melalui kontrasepsi. Selain itu, faktor sosial, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan norma gender yang merugikan, seringkali menghambat akses perempuan ke perawatan kesehatan yang memadai. Dengan pendekatan yang holistik dan strategis, angka kematian ibu dapat ditekan secara signifikan dan kesejahteraan ibu serta bayi dapat ditingkatkan.

F. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita per 1000 (seribu) kelahiran hidup didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun pada tahun tertentu, kemudian dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tersebut. Angka kematian balita setiap tahunnya cenderung menurun. Data angka kematian balita dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 61 Angka Kematian Balita 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun (kelahiran)	5,6	5,6	0,54	7,64	6,4

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Data ini menggambarkan bagaimana angka kematian balita mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dari 2019 hingga 2021, angkanya cukup stabil di kisaran 6,55 (enam koma lima lima) hingga 5,6 (lima koma enam) , menunjukkan bahwa kondisi kesehatan balita relatif terjaga dalam periode ini. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis hingga 0,54 (nol koma lima empat). Bisa jadi, ini bukan hanya karena perbaikan layanan kesehatan, tetapi juga akibat perubahan dalam pencatatan data atau faktor lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Di 2023, angka kematian balita melonjak tajam menjadi 7,64 (tujuh koma enam empat), angka tertinggi dalam enam tahun terakhir. Ini bisa jadi pertanda adanya permasalahan baru, seperti gangguan akses kesehatan, meningkatnya kasus penyakit menular, atau dampak dari kondisi sosial-ekonomi. Pada 2024, angkanya kembali turun ke 6,4 (enam koma empat).

Strategi yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kematian balita diantaranya melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pelayanan persalinan, hingga pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat. Kunci keberhasilan adalah kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat.

G. Rasio Posyandu Per Seratus Balita

Rasio Posyandu per 100 (seratus) Balita merupakan indikator yang menunjukkan ketersediaan layanan kesehatan dasar bagi anak usia balita dalam suatu wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah Posyandu yang tersedia dengan jumlah balita di suatu daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin baik akses pelayanan kesehatan bagi balita, karena menunjukkan bahwa lebih banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi, pemberian makanan tambahan, serta penyuluhan kesehatan bagi ibu dan anak.

Namun, kualitas pelayanan terhadap balita ini tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah Posyandu, tetapi juga oleh distribusinya, kualitas pelayanan, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebuah daerah mungkin memiliki rasio Posyandu yang tinggi, tetapi jika tenaga kesehatan atau kader yang bertugas kurang memadai, layanan yang diberikan bisa menjadi kurang efektif. Selain itu, aksesibilitas Posyandu juga menjadi faktor penting, terutama di daerah terpencil atau dengan infrastruktur yang terbatas, di mana jarak dan transportasi bisa menjadi kendala bagi ibu dan balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin. Rasio posyandu per seratus balita dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 62 Rasio Posyandu Per Seratus Balita Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Posyandu Per Seratus Balita	1,88	1,88	1,85	2,10	1,89

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Dari data pada tabel di atas, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 1,85 (satu koma delapan lima) yang mungkin disebabkan oleh faktor seperti pengurangan jumlah Posyandu aktif, perubahan jumlah balita yang terdaftar, atau kendala dalam operasional Posyandu. Pada 2023, rasio ini mengalami lonjakan signifikan menjadi 2,10 (dua koma satu kosong) yang bisa menunjukkan adanya peningkatan jumlah Posyandu aktif atau pengurangan jumlah balita dalam perhitungan rasio. Namun, tren ini tidak bertahan lama, karena pada 2024, rasio kembali turun menjadi 1,89 (satu koma delapan sembilan) mendekati angka di tahun-tahun sebelumnya. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam penyediaan layanan Posyandu, baik dari sisi jumlah fasilitas, tingkat partisipasi masyarakat, maupun dukungan dari pemerintah daerah. Untuk memastikan layanan

kesehatan balita tetap optimal, penting untuk tidak hanya meningkatkan jumlah Posyandu, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keberlanjutan Program, serta kemudahan akses bagi masyarakat.

H. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu kemudian dibagi jumlah penduduk, semakin tinggi rasio, semakin baik akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per satuan penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 63 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio puskesmas per satuan penduduk	1:28.432	1:28.432	1:29.116	1: 29.480	1:29.818
Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	1:12.544	1:12.544	1:12.845	1:13.400	1:12.544
Rasio poliklinik per satuan penduduk	1:20.309	1:20.309	1:39.704	1:17.008	1:20.309

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pangandaran 2025

Rasio fasilitas kesehatan per satuan penduduk selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan stagnan. Menurunnya rasio ini menunjukkan jumlah fasilitas tidak bertambah secara proporsional terhadap pertumbuhan penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan belum optimal dan masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk maupun kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar dalam pemerataan pelayanan dasar, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran. Dengan demikian kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pengembangan spasial yang berorientasi pada distribusi adil fasilitas kesehatan, melalui perencanaan lokasi puskesmas dan puskesmas pembantu yang strategis dan berbasis kebutuhan.

I. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah rumah sakit yang ada kemudian dibagi jumlah penduduk. Rumah sakit umum daerah Pandega baru ada dan disahkan pada tahun 2020. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah indikator yang menunjukkan jumlah rumah sakit yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa baik akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Jika rasio rumah sakit per satuan penduduk tinggi, itu berarti masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan medis, termasuk rawat inap, tindakan bedah, dan perawatan spesialis. Sebaliknya, jika rasionya rendah, masyarakat mungkin kesulitan mendapatkan perawatan di rumah sakit, yang dapat menyebabkan antrian panjang, keterbatasan layanan, atau bahkan keharusan bepergian jauh untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 64 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	1:426.483	1:426.483	1:436.748	1: 442.205	1:447.272

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Rasio rumah sakit per satuan penduduk masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yakni minimal satu rumah sakit per 100.000 (seratus ribu) penduduk. Dalam konteks perencanaan wilayah, pengembangan rumah sakit harus diarahkan secara strategis berdasarkan sebaran penduduk, tren penyakit, serta tingkat keterjangkauan masyarakat. Selain pembangunan fisik, dukungan terhadap konektivitas transportasi dan digitalisasi layanan kesehatan juga perlu dimasukkan dalam rencana pembangunan untuk menjembatani kesenjangan akses. Upaya ini selaras dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik yang adil dan merata, serta mendorong terwujudnya wilayah yang sehat dan tangguh.

J. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah indikator yang menunjukkan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk mengukur kapasitas layanan kesehatan dalam menangani kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau lonjakan pasien akibat wabah atau bencana.

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah total tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk di wilayah tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik akses masyarakat terhadap fasilitas rawat inap di rumah sakit. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan keterbatasan kapasitas rumah sakit dalam menampung pasien, yang dapat menyebabkan antrian panjang, keterbatasan layanan, atau bahkan penolakan pasien akibat keterisian penuh. Rasio daya tampung rumah sakit per jumlah penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 65 Rasio daya tampung rumah sakit terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio daya tampung rumah sakit terhadap Jumlah Penduduk	N/A	1:2.143	1:2.228	1:2.256	1:1.903

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Data rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dalam kapasitas layanan kesehatan. Pada tahun 2020, data mengenai rasio ini tidak tersedia. Pada tahun 2021, setiap satu tempat tidur rumah sakit harus melayani sekitar 2.143 (dua ribu seratus empat puluh tiga) penduduk. Kondisi ini sedikit memburuk pada tahun 2022 dan 2023, di mana rasio meningkat menjadi 1:2.228 (satu banding dua ribu dua ratus dua puluh delapan) dan 1:2.256 (satu banding dua ribu dua ratus lima puluh enam), yang berarti jumlah penduduk yang harus dilayani oleh satu tempat tidur rumah sakit semakin bertambah. Namun, pada tahun 2024, rasio ini mengalami perbaikan menjadi 1:1.903 (satu banding seribu sembilan ratus tiga), menunjukkan peningkatan kapasitas tempat tidur rumah sakit atau adanya langkah strategis dalam pelayanan kesehatan. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2024, rasio ini masih menunjukkan bahwa kapasitas daya

tampung rumah sakit relatif terbatas sebagaimana standar *World Health Organization* bahwa satu tempat tidur rumah sakit setidaknya melayani 1000 (seribu) penduduk. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan atau menambah kapasitas tempat tidur pada rumah sakit eksisting guna memastikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat.

K. Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk

Rasio dokter per seratus ribu penduduk didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah dokter yang ada kemudian dibagi jumlah penduduk. Rasio Dokter per 100.000 (seratus ribu) Penduduk adalah indikator yang menunjukkan jumlah dokter yang tersedia untuk setiap 100.000 (seratus ribu) penduduk di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk menilai ketersediaan tenaga medis dan sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai. Jika rasio ini tinggi, artinya ada lebih banyak dokter yang dapat menangani kebutuhan kesehatan masyarakat, yang berpotensi meningkatkan kualitas layanan medis, mempercepat waktu penanganan pasien, dan mengurangi beban kerja tenaga medis. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, maka jumlah dokter mungkin tidak mencukupi untuk melayani seluruh penduduk, yang dapat menyebabkan antrian panjang, keterbatasan pelayanan kesehatan, dan berkurangnya kualitas pelayanan medis. Rasio dokter per seratus ribu penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 66 Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Dokter Per Seratus Ribu Penduduk	12,42	12,42	19	18,63	12,97

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pada tahun 2020 dan 2021 dengan rasio 12,42 (dua belas koma empat dua), menunjukkan adanya penambahan jumlah dokter atau penyesuaian dalam distribusi tenaga medis. Pada 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam rasio dokter menjadi 19 (sembilan belas), yang bisa menunjukkan peningkatan jumlah tenaga medis secara substansial. Namun, pada 2023, rasio mengalami sedikit penurunan menjadi 18,63 (delapan belas koma enam tiga) meskipun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang cukup menarik, pada 2024, rasio dokter turun drastis menjadi 12,97 (dua belas koma sembilan tujuh).

Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berkurangnya jumlah dokter yang bertugas, peningkatan jumlah penduduk tanpa adanya penambahan tenaga medis yang seimbang, serta migrasi tenaga medis ke daerah lain. Secara keseluruhan, meskipun ada peningkatan signifikan dalam beberapa tahun, fluktuasi rasio dokter ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih stabil dalam penyebaran tenaga medis. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan strategi seperti peningkatan insentif bagi dokter yang bertugas di daerah, pelatihan dan rekrutmen tenaga medis baru, serta peningkatan fasilitas kesehatan guna meningkatkan rasio dokter per 100.000 (seratus ribu) penduduk setidaknya mencapai 50 (lima puluh) dokter per 100.000 (seratus ribu) penduduk sesuai target Rasio Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2025.

L. Rasio Bidan Per Seratus Ribu Penduduk Dan Rasio Perawat Per Seratus Ribu Penduduk

Rasio bidan per seratus ribu penduduk dan rasio perawat per seratus ribu penduduk didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah bidan

dan perawat yang ada, kemudian dibagi jumlah penduduk. Data rasio tenaga kesehatan menunjukkan dinamika ketersediaan bidan dan perawat per 100.000 (seratus ribu) penduduk dari tahun 2020 hingga 2024. Rasio bidan terus meningkat hingga 104,4 (seratus empat koma empat) pada tahun 2022, menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah bidan. Namun, setelah itu terjadi penurunan menjadi 99,28 (sembilan puluh sembilan koma dua delapan) pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 94,57 (sembilan puluh empat koma lima tujuh) pada tahun 2024.

Sementara itu, rasio perawat per 100.000 (seratus ribu) penduduk mengalami tren peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan bidan. Dari angka 104,58 (seratus empat koma lima delapan) pada tahun 2020 dan 2021 meningkat menjadi 130,28 (seratus tiga puluh koma dua delapan) pada tahun 2022 sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 120,41 (seratus dua puluh koma empat satu) pada tahun 2023 dan 116,04 (seratus enam belas koma nol empat) pada tahun 2024. Rasio bidan per seratus ribu penduduk dan rasio perawat per seratus ribu penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 67 Rasio Bidan Per Seratus Ribu Penduduk Dan Rasio Perawat Per Seratus Ribu Penduduk 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio bidan per seratus ribu penduduk	100,35	100,35	104,4	99,28	94,57
Rasio perawat per seratus ribu penduduk	104,58	104,58	130,28	120,41	116,04

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan relatif meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan masih di bawah standar rasio bidan dan perawat menurut Kementerian Kesehatan maupun *World Health Organization*. Penurunan jumlah bidan dan perawat dalam dua tahun terakhir mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan jumlah tenaga kesehatan, baik karena distribusi yang tidak merata, perubahan kebijakan, atau faktor lain yang mempengaruhi jumlah tenaga medis yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengawasi dan menyesuaikan kebijakan guna memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai untuk masyarakat.

M. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Cakupan desa *Universal Child Immunization* didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah desa/kelurahan *Universal Child Immunization* kemudian dibagi jumlah seluruh desa yang ada. Data cakupan desa/kelurahan yang mencapai *Universal Child Immunization* menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam periode 2020 hingga 2024. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2022, di mana cakupan UCI turun menjadi 82,8 (delapan puluh dua koma delapan) persen. Namun, pada tahun 2023, cakupan imunisasi meningkat kembali secara signifikan hingga mencapai 90,3 (sembilan puluh koma tiga) persen menandakan keberhasilan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi. Akan tetapi, data tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis menjadi 52,69 (lima puluh dua koma enam sembilan) persen yang mungkin mengindikasikan adanya kendala besar dalam pelaksanaan Program imunisasi, seperti keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, atau tantangan lain seperti pandemi, bencana alam, atau penurunan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dan strategi

yang lebih efektif untuk menjaga cakupan imunisasi tetap tinggi, guna memastikan perlindungan kesehatan anak-anak. Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 68 Cakupan Desa *Universal Child Immunization* Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) (%)	87,1	87,1	82,8	90,3	52,69

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

N. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu keluarga berdasarkan 12 (dua belas) indikator kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Indeks Keluarga kesehatan dapat dijelasakan sebagai berikut:

Tabel 2. 69 Indeks Keluarga Sehat Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat	N/A	0,083	0,11	0,139	0,144

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Indeks Keluarga Sehat Daerah menunjukkan tren peningkatan dari 0,083 pada 2021 menjadi 0,144 pada 2024, meskipun nilainya masih tergolong rendah. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan layanan kesehatan, peningkatan kesadaran hidup sehat, dan perbaikan akses sanitasi. Namun, capaian yang masih rendah mengindikasikan perlunya penguatan infrastruktur kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta program kesehatan keluarga yang lebih merata di seluruh wilayah.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan yang berkualitas dan merata adalah prinsip yang menjamin setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkecuali berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau budaya. Tujuan utama dari konsep ini adalah menciptakan keadilan dalam akses terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas, beberapa aspek penting perlu diperhatikan, seperti kesempatan belajar yang sama bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berasal dari wilayah terpencil atau kelompok rentan. Selain itu, mutu pengajaran menjadi elemen kunci dengan memastikan adanya tenaga pendidik yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta metode pembelajaran yang efektif. Tidak kalah penting, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, seperti sekolah yang layak, perpustakaan, serta akses terhadap teknologi, menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun beberapa data yang menggambarkan pendidikan yang merata adalah sebagai berikut.

A. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah adalah indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan peluang akses pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah serta menjadi salah satu ukuran kualitas dan pemerataan pendidikan. Konsep Angka Harapan Lama

Sekolah memperhitungkan kondisi pendidikan saat ini dan memperkirakan berapa lama seorang anak dapat mengenyam pendidikan berdasarkan tingkat partisipasi sekolah yang ada. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, semakin baik akses dan kesempatan belajar yang tersedia bagi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Lama Sekolah antara lain ketersediaan fasilitas pendidikan, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesejahteraan ekonomi keluarga, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 70 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah

Jenis Indikator	Angka Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,07	12,08	12,11	12,30	12,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025

Angka Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya, dimulai dari 12,07 (dua belas koma kosong tujuh) tahun pada 2020 hingga mencapai 12,31 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah memiliki peluang yang semakin besar untuk mengenyam pendidikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Meskipun kenaikannya relatif kecil setiap tahunnya, tren ini mengindikasikan adanya upaya dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut. Faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah meliputi peningkatan infrastruktur pendidikan, kebijakan pemerintah dalam mendorong wajib belajar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Dengan tren positif ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkat di masa depan.

B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Angka Rata-Rata Lama Sekolah menunjukan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka Rata-Rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Berikut data rata-rata lama sekolah.

Tabel 2. 71 Perkembangan Angka Rata – Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024

Jenis Indikator	Angka Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,74	7,85	8,03	8,04	8,1

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Data dalam tabel menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2020 hingga 2024. Rata-Rata Lama Sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat, yang berarti rata-rata masyarakat mengenyam pendidikan lebih lama dari tahun ke tahun. Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan akses serta kesadaran akan pentingnya pendidikan. Faktor-faktor yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain Program wajib belajar, peningkatan fasilitas pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan formal. Dengan tren positif ini, diharapkan lebih banyak penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, sehingga kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut semakin baik.

Sebagai upaya peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah, perlu adanya perhatian khusus sehingga Rata-Rata Lama Sekolah dapat meningkat setidaknya hingga tingkat pendidikan dasar atau bahkan hingga pendidikan lanjutan awal yakni 12 (dua belas) tahun. Untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah diperlukan upaya yang menyeluruh dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Strategi utama dimulai dengan memperluas akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan transportasi sekolah gratis atau bersubsidi, serta pengembangan sistem pendidikan jarak jauh berbasis teknologi. Di sisi lain, kualitas dan daya tarik sekolah juga harus ditingkatkan dengan memperkuat kompetensi guru, menyediakan fasilitas belajar yang modern dan layak, serta mengembangkan Program ekstrakurikuler yang relevan dengan kebutuhan siswa.

Selain itu, dukungan sosial dan ekonomi bagi peserta didik sangat penting, terutama melalui pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu, serta upaya aktif menekan angka putus sekolah melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat dan sekolah. Pendidikan nonformal juga harus diperkuat, terutama melalui revitalisasi Program kejar paket dan penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, agar dapat menjadi alternatif pendidikan yang setara dengan sekolah formal. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci, antara lain melalui penetapan target peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dalam dokumen perencanaan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh Program yang dijalankan. Seluruh upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat Pangandaran secara signifikan.

C. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

indeks pembangunan literasi masyarakat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi suatu masyarakat secara menyeluruh. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tidak hanya mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga akses, kebiasaan, dan budaya literasi yang berkembang dalam suatu komunitas. Indeks ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui bahan bacaan cetak maupun digital. Adapun indeks pembangunan literasi masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 72 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024

Jenis Indikator	Angka Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	N/A	44,85	77,16

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 77,16(tujuh puluh tujuh koma satu enam) pada tahun 2024 dapat diinterpretasikan bahwa tingkat literasi masyarakat berada pada kategori tinggi, namun masih belum mencapai kondisi ideal atau maksimal. Nilai ini mencerminkan bahwa secara umum, masyarakat Pangandaran sudah memiliki akses yang cukup baik terhadap sumber-sumber literasi, seperti perpustakaan, taman bacaan, serta sarana pendidikan formal dan

nonformal. Hal ini juga menunjukkan bahwa minat baca dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi sudah mulai tumbuh.

Namun demikian, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga menandakan bahwa masih terdapat tantangan dan kesenjangan dalam pengembangan literasi. Beberapa kemungkinan penyebabnya antara lain adalah belum meratanya distribusi fasilitas literasi di seluruh kecamatan atau desa, terbatasnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan yang relevan, serta minimnya kegiatan literasi yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan, terutama di komunitas-komunitas terpencil. Di sisi lain, kemampuan literasi digital masyarakat, yang kini semakin penting, juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan informasi secara bijak di era teknologi.

Oleh karena itu, nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menjadi dasar penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat ekosistem literasi melalui strategi peningkatan akses, kualitas pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penguatan peran perpustakaan desa dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, peningkatan kapasitas tenaga literasi, serta pengembangan Program literasi berbasis komunitas dan kearifan lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pangandaran dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat secara berkelanjutan hingga mencapai kategori “sangat tinggi,” dan pada akhirnya membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap perubahan.

D. Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase pendidikan anak usia dini didapatkan berdasarkan perhitungan jumlah siswa pada jenjang Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Penitipan anak dibagi jumlah anak usia 4-6 (empat sampai enam) tahun. Persentase pendidikan anak usia dini cenderung meningkat. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Siswa PAUD	8.005	8.005	8.257	8.587	8.521
3	Jumlah penduduk Usia 5 -6 tahun	12.032	12.032	12.296	12.482	12.904
2	Persentase Jumlah Siswa Paud (%)	67	67	67	69	77

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Berdasarkan data dalam tabel, jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah 8.257 (delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh anak, 8.587 (delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh) anak pada tahun 2023, dan mencapai 8.521 (delapan ribu lima ratus dua puluh satu) anak pada tahun 2024. Seiring dengan bertambahnya jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini, jumlah penduduk usia 5-6 (lima sampai enam) tahun juga mengalami fluktuasi. Persentase jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 5-6 (lima sampai enam) tahun menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 69 (enam puluh sembilan) persen, dan akhirnya mencapai 77 (tujuh puluh tujuh) persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan usia dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi perkembangan anak.

E. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Kriteria Angka Partisipasi Kasar adalah makin tinggi Angka Partisipasi Kasar berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

a) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/Paket A

Angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A cukup fluktuatif pada tahun 2020 sebesar 96 (sembilan puluh enam) persen naik pada tahun 2021 sebesar 103,54 (seratus tiga koma lima empat) persen akan tetapi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan secara berurutan yaitu 101,7 (seratus satu koma tujuh) persen dan 99,72 (sembilan puluh sembilan koma tujuh dua) persen. Adapun jumlah penduduk usia 7-12 (tujuh sampai dua belas) tahun padat tahun 2019 sebesar 40.211 (empat puluh ribu dua ratus sebelas) jiwa dan menurun pada tahun 2023 menjadi 38.847 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tujuh) jiwa. Angka partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/Paket A Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 74 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun	39.991	39.991	39.572	38.847	38.521
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	96	103,54	101,7	99,72	100,83

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar telah berjalan sangat baik. Capaian APK yang mendekati 100 (seratus) persen pada tahun 2023 menandakan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 (tujuh sampai dua belas) tahun telah memperoleh layanan pendidikan. Penurunan APK dari tahun sebelumnya bukan merupakan indikasi penurunan partisipasi, melainkan mencerminkan penyesuaian menuju struktur usia yang lebih tepat sasaran. Ke depan, Pemerintah Daerah perlu tetap menjaga capaian ini sambil mengantisipasi penurunan jumlah penduduk usia sekolah dalam perencanaan pendidikan yang berkelanjutan.

b) Angka Partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B

Angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B pada pada tahun 2020 yaitu sebesar 98 (sembilan puluh delapan) persen dan menurun pada tahun 2021 menjadi 94,59 (sembilan puluh empat koma lima sembilan) persen, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 104 (seratus empat) persen dan menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 102,82 (seratus dua koma delapan dua) persen. Angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Siswa SMP / MTs / Paket B	19.498	19.498	18.564	18.772	19.265
Jumlah Anak Usia 13 - 15 tahun	19.984	19.984	20.181	20.480	20.362

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	98	94,59	104	102,82	103,21

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Data Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan tingkat partisipasi yang tinggi di jenjang pendidikan menengah pertama, meskipun sempat terdampak pandemi. Capaian Angka Partisipasi Kasar yang melampaui 100 (seratus) persen pada dua tahun terakhir merupakan indikasi positif bahwa akses terhadap pendidikan bersifat inklusif dan menjangkau lebih banyak kelompok usia. Ke depan, penting untuk menjaga keberlanjutan partisipasi ini, sembari terus meningkatkan kualitas pendidikan agar siswa tidak hanya bersekolah, tetapi juga memperoleh pembelajaran yang bermakna.

A. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah di tingkat pendidikan pada tahun tertentu, kemudian dibagi total jumlah penduduk pada tahun tersebut.

a) Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/Paket A lima tahun terakhir mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 95,19 (sembilan puluh lima koma satu sembilan) dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan) akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 97,87 (sembilan puluh tujuh koma delapan tujuh). Angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/Paket A dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Siswa SD/MI/Paket A Usia 7 - 12 tahun	38.498	38.498	37.459	37.379	37.030
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	95,76	95,84	96	94,6	94,75

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Data Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiah/Paket A mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil menjaga akses dan pemerataan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah, dengan sebagian besar anak mengikuti pendidikan tepat waktu sesuai kelompok usianya. Capaian Angka Partisipasi Murni yang konsisten tinggi menunjukkan efektivitas kebijakan pendidikan dasar yang inklusif dan merata. Ke depan, upaya perlu difokuskan pada pemeliharaan capaian ini serta penguatan kualitas pendidikan, khususnya bagi kelompok yang masih belum terjangkau layanan pendidikan formal.

b) Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B

Angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B pada tahun 2020 sebesar 84,62 (delapan puluh empat koma enam dua) dan meningkat pada 2021 sebesar 84,97 (delapan puluh empat koma sembilan tujuh) akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 84,63 (delapan puluh empat koma enam tiga) dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 88,6 (delapan

puluh delapan koma enam). Angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 77 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	82,19	84,62	84,97	84,63	84,41	94,75

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Kenaikan Angka Partisipasi Murni ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa usia sekolah yang mengakses pendidikan sesuai kelompok umur, yang mencerminkan perbaikan dalam hal pemerataan akses pendidikan menengah. Meski demikian, angka Angka Partisipasi Murni yang masih berada di bawah 90 (sembilan puluh) persen juga menunjukkan bahwa masih ada sebagian anak usia 13–15 (tiga belas sampai lima belas) tahun yang belum mengenyam pendidikan secara tepat waktu, atau tidak terdaftar di jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B.

Secara keseluruhan, tren positif ini menjadi sinyal baik bahwa Pemerintah Daerah berhasil meningkatkan partisipasi murni di jenjang pendidikan menengah, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Ke depan, perlu dilakukan intervensi yang lebih menyasar kelompok usia rentan atau daerah dengan akses pendidikan yang terbatas agar Angka Partisipasi Murni dapat terus meningkat menuju kondisi ideal, yaitu mendekati 100 (seratus) persen.

B. Angka Kelulusan

Angka kelulusan didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu, kemudian dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tersebut pada tahun sebelumnya. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan angka kelulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2020 sampai 2024 yaitu 100 (seratus) persen. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 78 Angka Kelulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

Angka kelulusan yang telah mencapai 100 (seratus) persen merupakan capaian yang sangat positif, karena menunjukkan bahwa seluruh peserta didik berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang diikutinya. Dalam konteks perencanaan pembangunan pendidikan daerah, capaian ini menjadi indikator bahwa aspek akses dan ketuntasan belajar di Pangandaran telah berjalan dengan baik. Namun, angka kelulusan 100 (seratus) persen bukanlah akhir dari upaya pembangunan pendidikan, melainkan menjadi titik tolak untuk mengalihkan fokus dari kuantitas ke kualitas. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan capaian ini untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas proses pembelajaran, penguatan kapasitas tenaga pendidik, dan relevansi kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa capaian kelulusan 100 (seratus) persen tidak sekadar bersifat administratif, melainkan didasarkan pada penguasaan kompetensi yang memadai. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat layanan pasca-kelulusan, seperti bimbingan karier, fasilitasi transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta pelatihan keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Di sisi lain, pengawasan mutu penilaian oleh satuan pendidikan harus terus ditingkatkan untuk menghindari inflasi nilai dan menjaga kredibilitas sistem pendidikan. Dengan demikian, angka kelulusan 100 (seratus) persen dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian Pembangunan Daerah secara menyeluruh.

C. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan didapatkan berdasarkan hasil perhitungan jumlah siswa baru tingkat 1 (satu) lulusan pada jenjang pendidikan tertentu, kemudian dibagi jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tahun ajaran sebelumnya. Angka melanjutkan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah di dapat dari data jumlah siswa baru tingkat 1 (satu) lulusan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dengan jumlah lulusan pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tahun ajaran sebelumnya. Dari hasil perhitungan angka melanjutkan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 menunjukkan angka 105 (seratus lima) persen; di tahun berikutnya naik menjadi 105 (seratus lima) persen; kemudian tahun 2021 menjadi 100 (seratus) persen dan turun pada tahun 2023 turun menjadi 98 persen; lalu pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 101 (seratus satu) persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 79 Angka Melanjutkan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	105%	100%	98%	101%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

D. Fasilitas Pendidikan

a) Gedung Sekolah

Gedung sekolah merupakan sarana pendidikan yang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Jumlah gedung Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) bangunan dan tahun 2023 meningkat menjadi 348 (tiga ratus empat puluh delapan) bangunan. Sedangkan untuk bangunan gedung Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah lima tahun terakhir mengalami kenaikan juga tahun 2019 sebanyak 86 (delapan puluh enam) bangunan dan tahun 2023 menjadi 89 (delapan puluh sembilan) bangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 80 Jumlah Gedung Sekolah

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung SD/MI	344	344	347	348	348
Jumlah Gedung SMP/MTs	85	85	88	89	89
Total	429	429	435	437	437

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

b) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 pelayanannya yaitu dalam setiap 10.000 (sepuluh ribu) penduduk adalah 71,01 (tujuh puluh satu koma kosong satu) dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 73,88 (tujuh puluh tiga koma delapan delapan). Rasio sekolah/ penduduk usia 13-15 (tiga belas sampai lima belas) tahun pada tahun 2020 sebesar 0.017 (kosong koma kosong satu tujuh). sedangkan untuk rasio sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ penduduk usia 7-12/13-15 (tujuh sampai dua belas atau tiga belas sampai lima belas) pada tahun 2020 sebesar 0,13819 (kosong koma satu tiga delapan satu sembilan) dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,1375 (kosong koma satu tiga tujuh lima). Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 81 Ketersediaan Sekolah per Penduduk

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Sekolah/ penduduk usia 13-15 tahun	0,017	0,017	0,017	0,017	N/A
Rasio Sekolah SD/MI/SMP/MTS / penduduk usia 7-12/13-15	0,13819	0,13819	72,79	0,1375	N/A
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	71,01	71,51	87,68	73,88	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

c) Rasio guru per murid sekolah pendidikan dasar

Rasio guru/murid sekolah dasar didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang kemudian dibagi jumlah murid pada jenjang tersebut. Rasio guru/murid sekolah dasar cenderung fluktuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 82 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Guru SD/MI	1.584	1.584	2.972	2.979	N/A
Jumlah Murid SD/MI	38.498	38.498	37.459	37.379	N/A
Rasio perbandingan jumlah guru dan jumlah murid SD/MI	0,00098	0,00098	0,00084	0,00084	0,08166
Jumlah Guru SMP/MTs	680	680	1.631	1.599	N/A
Jumlah Murid SMP/MTs	19.498	19.498	18.564	18.772	N/A
Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid SMP/MTs	0,00103	0,00103	0,00083	0,00083	0,08518
Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)	4.531	4.661	4.603	4.578	N/A
Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	57.996	57.996	56.023	56.151	N/A
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar + SMP/MTs	1 : 25,61	1 : 25,61	1 : 12,17	1 : 12,26	1 : 12,07

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

d) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah guru berijazah kualifikasi pada jenjang S1/D-

IV, kemudian dibagi jumlah guru pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun ke tahun fluktuatif. Angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang memiliki angka tertinggi terdapat pada tahun 2020 sebesar 95,98 (sembilan puluh lima koma sembilan delapan) persen. Data yang digunakan tidak menggunakan data jumlah guru sma/smk karena data tersebut kewenangan provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 83 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1⁄D–IV	4.349	4.349	4.171	4.188	N/A
Jumlah Guru SD⁄MI,SMP⁄MTs, SMA⁄ SMK⁄ MA	4.531	4.531	4.603	4.627	N/A
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	95,98	93,31	90,61	91	N/A

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Adaptif

A. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial menggambarkan Kinerja pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Terdapat data Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial, dan data Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang seharusnya memperoleh bantuan sosial. Untuk lebih jelasnya data terkait bantuan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 84 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	116.458	46.516	39.134	40.729	42.606
2	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	116.458	52.224	53.268	45.167	45.890

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

B. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mandiri

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Mandiri adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mandiri menggambarkan Kinerja pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tertangani. Data lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 85 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Mandiri

Mandiri Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang mandiri	27	39,52	40,63	112,14	N/A

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

C. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial mengalami perubahan setiap tahunnya. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 86 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	100	91	73	90	92

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

D. Jumlah Panti Sosial

Panti Sosial adalah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Jumlah panti sosial pada tahun 2020 sebanyak 22 (dua puluh dua) panti dan pada tahun 2023 bertambah menjadi 31 (tiga puluh satu) panti. Jumlah panti sosial yang ada dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 87 Jumlah panti sosial Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah panti sosial	22	23	31	31	31

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

E. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun, kemudian dibagi jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2020 yaitu 98,03 (sembilan puluh delapan koma nol tiga) persen dan meningkat hingga 100 (seratus) persen pada tahun 2021 sampai dengan 2024. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 88 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	98,03	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

F. Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun, kemudian dibagi jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam tahun yang sama. Dari hasil analisis persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 terdapat 6,71 (enam koma tujuh satu) persen penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, di tahun berikutnya meningkat hingga tahun 2024 mencapai 8,20 (delapan koma dua nol) persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 89 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	6,71	6	6,27	7,1	8,20
2	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	1.427	1.531	2.006	1.986	2.166

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 tercatat 8 (delapan) kegiatan, meningkat signifikan menjadi 40 kegiatan pada 2021. Namun, jumlahnya menurun pada 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 14 (empat belas) dan 10 (sepuluh) kegiatan. Data tahun 2024 belum tersedia. Meskipun jumlah kegiatan bervariasi, penyelenggaraan festival tetap menjadi salah satu upaya penting dalam pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 90 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

No	Uraian	Penyelenggaraan festival seni dan budaya				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah festival seni dan budaya	8	40	14	10	N/A

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Upaya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 terdapat 30 (tiga puluh) objek yang dilestarikan, meningkat menjadi 35 tiga puluh lima) pada 2021. Meski sempat mengalami sedikit penurunan menjadi 32 pada 2022, jumlahnya kembali meningkat signifikan pada 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 40 (empat puluh) dan 46 (empat puluh enam) objek. Hal ini mencerminkan komitmen yang terus meningkat dalam menjaga warisan budaya daerah secara berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 91 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

No	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	30	35	32	40	46

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

C. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 belum terdapat data yang tercatat. Tahun 2021 mulai dilakukan inventarisasi terhadap 3 (tiga) karya budaya, meningkat signifikan menjadi 11 (sebelas) pada 2022. Namun, pada 2023 mengalami penurunan menjadi 4 (empat) karya budaya. Tahun 2024 kembali menunjukkan peningkatan tajam dengan 23 (dua puluh tiga) karya budaya yang berhasil direvitalisasi dan diinventarisasi. Capaian ini mencerminkan komitmen yang terus tumbuh dalam pelestarian kekayaan budaya daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 92 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	N/A	3	11	4	23

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

D. Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu mengalami perkembangan positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlahnya tetap stabil sebanyak 30 (tiga puluh) cagar budaya. Namun, terjadi penurunan menjadi 26 (dua puluh enam) pada tahun 2021. Meskipun demikian, pengelolaan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 40 (empat puluh), dan terus bertambah menjadi 46 (empat puluh enam) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam pengelolaan cagar budaya secara terintegrasi dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 93 Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	30	30	26	40	46

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusi

Konsep Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusi berkaitan erat dengan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ketiga aspek ini saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan inklusif bagi semua individu. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung tumbuh kembang anak, serta berperan aktif dalam masyarakat. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, peluang, dan akses yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan ekonomi. Sedangkan, Masyarakat inklusi adalah masyarakat yang menghargai keberagaman dan memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, memiliki akses yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks perlindungan anak adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi dalam suatu wilayah. Pemerintah Daerah telah menunjukkan komitmen kuat dalam perlindungan anak. Pada tahun 2023, Pangandaran berhasil meraih kategori Nindya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan perkembangan anak di Pangandaran telah dinilai baik. Berikut data yang menggambarkan Indeks Perlindungan Anak tahun 2020-2024:

Tabel 2. 94 Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan anak	N/A	N/A	64,68	N/A	N/A

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2025

b. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender mengukur ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Nilai Indeks Ketimpangan Gender berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu); semakin rendah nilainya, semakin kecil ketimpangan gender di wilayah tersebut. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender mencerminkan upaya yang efektif dalam mengurangi ketimpangan gender. Faktor-faktor seperti peningkatan akses perempuan ke pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan partisipasi dalam angkatan kerja kemungkinan berkontribusi terhadap tren positif ini. Ketimpangan gender mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Indeks ketimpangan gender meningkat dari 0,435 (nol koma empat tiga lima) pada tahun 2020 menjadi 0,478 (nol koma empat tujuh delapan) pada tahun 2021, lalu mengalami penurunan menjadi 0,463 (nol koma empat enam tiga) pada tahun 2022 dan menjadi 0,415 (nol koma empat satu lima) pada tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan kesetaraan gender. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 95 Indeks ketimpangan Gender Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender	0,435	0,478	0,463	0,416	0,415

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2025

Dalam konteks perencanaan wilayah, fluktuasi Indeks Ketimpangan Gender selama periode 2020–2024 mencerminkan tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender sejak tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi perempuan terhadap sumber daya, layanan publik, serta pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hal ini menjadi indikator penting bagi perencana wilayah, karena ketimpangan gender yang rendah mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam dimensi sosial.

Perencanaan wilayah ke depan perlu mengintegrasikan perspektif gender secara lebih sistematis, misalnya dengan memastikan ketersediaan layanan dasar yang responsif gender, penguatan peran perempuan dalam ekonomi lokal, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, penurunan Indeks Ketimpangan Gender bukan hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga landasan strategis untuk menciptakan wilayah yang adil, tangguh, dan inklusif bagi seluruh penduduknya.

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Data partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, partisipasi tercatat sebesar 24,7 (dua puluh empat koma tujuh) persen, kemudian meningkat menjadi 25,42 (dua puluh lima koma empat dua) persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 24,89 (dua puluh empat koma delapan sembilan) persen. Secara signifikan, pada tahun 2023 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hingga mencapai 70,98 (tujuh puluh koma sembilan delapan) persen dan tahun 2024 mencapai 71,82 (tujuh puluh satu koma delapan dua) persen. Fluktuasi pada periode 2020–2022 diduga dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja, terutama bagi perempuan di sektor informal dan pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi lokal. Selain itu, terbatasnya akses pelatihan kerja dan dukungan terhadap perempuan pekerja juga menjadi faktor pembatas partisipasi.

Sementara itu, lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi, serta meningkatnya Program pemberdayaan perempuan oleh pemerintah daerah, termasuk pelatihan keterampilan, dukungan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro perempuan, dan perluasan akses kerja di sektor-sektor produktif seperti pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Adanya kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga turut mendorong peningkatan partisipasi ini. Partisipasi angkatan kerja perempuan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. 96 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak partisipasi angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	24,7	25,42	24,89	70,98	69,11

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2025

Dari perspektif perencanaan wilayah, data ini menjadi indikator penting bahwa potensi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah semakin diakui dan dimanfaatkan. Untuk mendukung keberlanjutan tren ini, kebijakan perencanaan wilayah ke depan perlu memperhatikan penyediaan infrastruktur penunjang partisipasi perempuan dalam dunia

kerja, seperti fasilitas penitipan anak, pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal, serta penciptaan lapangan kerja yang ramah gender. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

d. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Korban kekerasan wanita yang terlayani didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani, kemudian dibagi jumlah korban kekerasan terhadap perempuan. Selama tahun 2020 hingga 2024, cakupan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100 (seratus) persen. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh.

Capaian ini mencerminkan koordinasi yang baik antar lembaga layanan. Meski demikian, penting untuk terus mendorong pelaporan kasus dan meningkatkan kesadaran korban agar layanan ini dapat menjangkau lebih banyak yang membutuhkan. Data dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 97 Korban Kekerasan Wanita Yang Terlayani Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

e. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate*

Contraceptive Prevalence Rate merupakan perbandingan antara Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta Keluarga Berencana aktif atau peserta Keluarga Berencana yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi dengan jumlah Pasangan Usia Subur keseluruhan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Akseptor Keluarga Berencana aktif adalah peserta Program Keluarga Berencana yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi (alat, obat, atau metode) untuk mencegah kehamilan. Adanya Akseptor Keluarga Berencana aktif sebagai bukti keberhasilan Program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan Program Keluarga Berencana salah satunya adalah *Contraceptive Prevalence Rate*, dengan angka *Contraceptive Prevalence Rate*. Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, *Contraceptive Prevalence Rate* tercatat sebesar 60,25 (enam puluh koma dua lima) persen dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 73,37 tujuh puluh tiga koma tiga tujuh) persen pada tahun 2021. Meskipun sempat menurun pada tahun 2022 menjadi 69,81 (enam puluh sembilan koma delapan satu) persen, angka ini kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 71,89 (tujuh puluh satu koma delapan sembilan) persen dan mencapai 73,12 (tujuh puluh tiga koma satu dua) persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran dan akses terhadap penggunaan kontrasepsi dalam masyarakat.

Tabel 2. 98 Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau *Contraceptive Prevalence Rate*

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	60,25	73,37	69,81	71,89	73,12

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2024

f. Angka Kelahiran Remaja atau *Age Specific Fertility Rate*

Angka kelahiran remaja usia 10-14 (sepuluh sampai empat belas) tahun atau 15-19 tahun adalah banyaknya kelahiran pada perempuan kelompok umur 10-14 (sepuluh sampai empat belas) tahun atau 15-19 (lima belas sampai sembilan belas) tahun pada suatu periode per 1.000 (seribu) perempuan pada kelompok umur yang sama pada pertengahan periode. Angka ini diperlukan untuk memantau besarnya masalah kelahiran remaja. Semakin tinggi angka kelahiran remaja maka akan semakin tinggi risiko kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. *Age Specific Fertility Rate* mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020, *Age Specific Fertility Rate* tercatat sebesar 18,01 (delapan belas koma nol satu) dan meningkat menjadi 19,81 (sembilan belas koma delapan satu) pada tahun 2021. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan angka mencapai 27 (dua puluh tujuh). Data untuk tahun 2023 dan 2024 belum tersedia.

Tabel 2. 99 Angka Kelahiran Remaja atau *Age Specific Fertility Rate*

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	18,01	19,81	27	N/A	N/A

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2025

g. Rasio Akseptor Keluarga Berencana

Rasio Akseptor Keluarga Berencana merujuk pada perbandingan antara jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi atau metode Keluarga Berencana dengan jumlah pasangan usia subur dalam suatu populasi. Akseptor adalah peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur dimana salah seorang menggunakan salah satu cara alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan baik melalui Program atau non Program. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana serta efektivitas dari Program tersebut. Berdasarkan tabel rasio akseptor Keluarga Berencana cenderung fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio akseptor tercatat sebesar 60,25 (enam puluh koma dua lima) persen, kemudian mengalami kenaikan signifikan menjadi 73,37 (tujuh puluh tiga koma tiga tujuh) persen pada tahun 2021. Meskipun sedikit menurun menjadi 70,31 (tujuh puluh koma tiga satu) persen pada tahun 2022, rasio ini kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 72,74 (tujuh puluh dua koma tujuh empat) persen, dan mencapai 74,32 (tujuh puluh empat koma tiga dua) persen pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana secara konsisten.

Tabel 2. 100 Rasio Akseptor Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Akseptor Keluarga Berencana	60,25	73,37	70,31	72,74	74,32

Sumber : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, 2025

Kecenderungan meningkatnya rasio akseptor Keluarga Berencana ini mencerminkan efektivitas Program keluarga berencana yang dijalankan pemerintah daerah, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga. Dalam konteks perencanaan wilayah, pencapaian ini menjadi indikator positif bagi pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yang merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, terutama dalam penyediaan layanan dasar, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan kebutuhan infrastruktur publik.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Rasio lulusan S1/S2/S3 didapatkan berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah lulusan S1/S2/S3, kemudian dibagi jumlah penduduk. Rasio lulusan S3 tidak tersedia maka rasio lulusan S3 tidak ikut dalam perhitungan. Rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rasio lulusan S1/S2/S3 yang paling tinggi terdapat pada tahun 2024 dengan angka 0,029 (nol koma nol dua sembilan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lulusan S1	9.547	10.136	10.838	11.517	12.046
2	Lulusan S2	595	631	666	697	719
3	Lulusan S3	31	30	31	38	35
4	Jumlah Penduduk	422.411	425.587	428.596	431.464	434.104
Rasio lulusan S1/S2/S3		0,024	0,025	0,026	0,028	0,029

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

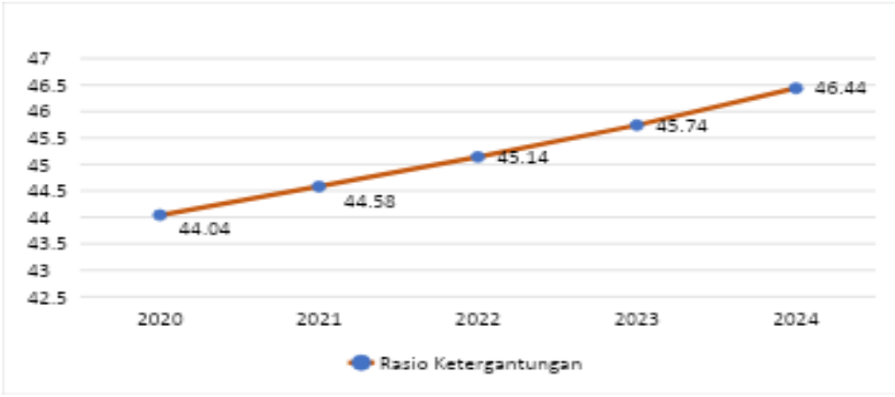
B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Tingkat beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan didasarkan pada perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 (kosong sampai empat belas) tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 (lima belas sampai enam puluh empat) tahun angkatan kerja.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap

penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio Ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Gambar 2. 31 Rasio Ketergantungan 2020-2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2020 rasio ketergantungan sebesar 44,04 (empat puluh empat koma nol empat) yang artinya setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung sekitar 44 (empat puluh empat) orang usia tidak produktif, tahun 2021 menjadi 44,58 (empat puluh empat koma lima delapan) dan mengalami kenaikan kecil, menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif. Tahun 2022 dengan rasio 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya pertumbuhan usia produktif yang lebih baik, tahun 2023 dengan rasio 45,74 (empat puluh lima koma tujuh empat) kembali mengalami kenaikan cukup signifikan, menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia tidak produktif dan tahun 2024 dengan rasio 46,44 (empat puluh enam koma empat empat) merupakan rasio ketergantungan tertinggi dalam lima tahun terakhir, menandakan semakin beratnya beban penduduk usia produktif. Peningkatan Rasio ketergantungan menunjukan adanya pertumbuhan jumlah penduduk usia tidak produktif baik dari kelompok anak-anak maupun lansia.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan sejauh mana industri berperan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor industri, terutama industri pengolahan, biasanya menjadi salah satu sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu juga terdapat sektor industri yang berkembang, meskipun dominasi ekonominya lebih banyak berasal dari sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan tren yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, sektor ini menyumbang 19,52 (sembilan belas koma lima dua) persen, sedikit meningkat menjadi 19,53 (sembilan belas

koma lima tiga) persen pada 2021. Tahun 2022 mencatat peningkatan lebih lanjut menjadi 19,79 (sembilan belas koma tujuh sembilan) persen, namun kembali menjadi 19,53 (sembilan belas koma lima tiga) persen pada 2023. Data tahun 2024 masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 102 Kontribusi Sektor Industri Terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto	19,52	19,53	19,79	19,53	N/A

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2025

b. Rasio Produk Domestik Regional Bruto Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama karena daerah ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan sejauh mana aktivitas pariwisata dan layanan terkait berkontribusi pada perekonomian lokal. Sektor akomodasi, makan, dan minum menunjukkan pertumbuhan positif dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Pada tahun 2020, rasio sektor ini tercatat sebesar 9,49 (sembilan koma empat sembilan) persen, meningkat menjadi 9,59 (sembilan koma lima sembilan) persen di 2021. Tren pertumbuhan berlanjut pada 2022 dengan 10,07 (sepuluh koma nol tujuh) persen, dan mencapai 10,17 (sepuluh koma satu tujuh) persen pada 2023. Data untuk tahun 2024 masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 103 Rasio Produk Domestik Regional Bruto Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Produk Domestik Regional Bruto Akomodasi Makan dan Minum	9,49	9,59	10,07	10,17	N/A

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2025

c. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor pariwisata dan kewirausahaan. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni pertunjukan, kerajinan tangan, kuliner khas, desain, hingga digitalisasi usaha. Dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan, event ekonomi kreatif, serta promosi digital diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini. Pelatihan ekonomi kreatif di daerah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pelaku usaha lokal dalam mengembangkan produk dan jasa berbasis kreativitas serta inovasi. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelaku ekonomi kreatif terus meningkat, menunjukkan pertumbuhan sektor ini. Pada tahun 2022, terdapat 350 (tiga ratus lima puluh) pelaku ekonomi kreatif, dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) diantaranya mengikuti pelatihan ekonomi kreatif, mencakup 65 (enam puluh lima) persen dari total pelaku. Tahun 2023, jumlah pelaku meningkat menjadi 474 (empat ratus tujuh puluh empat), dengan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) mengikuti pelatihan, meskipun persentasenya

menurun menjadi 58 (lima puluh delapan) persen.Untuk tahun 2024, jumlah pelaku ekonomi kreatif bertambah menjadi 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh), tetapi data mengenai pelatihan dan persentasenya masih belum tersedia.

Tabel 2. 104 Ekonomi Kreatif Tahun 2022-2024

No	Tahun	Total Ekonomi Kreatif	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Persentase
1	2022	350	229	65
2	2023	474	273	58
3	2024	497	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

d. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan mengukur perbandingan jumlah wirausaha dengan total penduduk usia kerja dalam suatu wilayah. Pentingnya kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal telah diakui secara luas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan rasio kewirausahaan melalui berbagai Program pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Rasio kewirausahaan mengalami perubahan signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 4,63 (empat koma enam tiga) persen, meningkat sedikit menjadi 4,70 (empat koma tujuh nol) persen di 2021. Namun, lonjakan drastis terjadi pada 2022 dengan rasio mencapai 22,73 (dua puluh dua koma tujuh tiga) persen, sebelum sedikit menurun ke 22,49 (dua puluh dua koma empat sembilan) persen pada 2023. Tahun 2024, rasio kewirausahaan turun cukup signifikan ke 14,27 (empat belas koma dua tujuh) persen, dikarenakan sinkronisasi data Tahun 2023 masih pakai data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dari Bantuan Produktif Usaha Mikro, sedangkan 2024 data Usaha Mikro Kecil dan Menengah diambil dari Nomor Induk Berusaha *Online Single Submission*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 105 Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kewirausahaan	4,63%	4,70%	22,73%	22,49%	14,27%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2025

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Data terbaru menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Daerah merupakan tertinggi di Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 80,12 (delapan puluh koma satu dua) persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka partisipasi tercatat sebesar 76,79 (tujuh puluh enam koma tujuh sembilan) persen, namun mengalami penurunan menjadi 74,75 (tujuh puluh empat koma tujuh lima) persen di tahun 2021. Tren positif terjadi pada 2022, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat signifikan menjadi 79,92 (tujuh puluh sembilan koma sembilan dua) persen, dan terus naik menjadi 80,15 (delapan puluh koma satu lima) persen pada 2023. Tahun 2024 mencatat sedikit penurunan ke 80,12 (delapan puluh koma satu dua) persen, tetapi angka ini masih menunjukkan stabilitas yang relatif tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 106 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	76,79	74,75	79,92	80,15	80,12

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2025

f. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Kinerja dan pelayanan publik. Pemerintah Daerah telah menunjukkan prestasi signifikan dalam bidang ini. Pada Tahun 2020 telah diraih predikat "Sangat Inovatif" dengan skor Indeks Inovasi Daerah mencapai 2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima), menempatkannya di antara kabupaten/kota dengan skor tinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Kabupaten dengan Kategori Kurang inovatif, Permasalahannya adalah inovasi yang telah dilakukan tidak terlaporkan dengan baik karena para inovator kesulitan dalam menyediakan *evidence* untuk penilaian dan Kementerian Dalam Negeri salah satu contohnya banyak inovasi tidak memiliki anggaran dalam pelaksanaanya. Sehingga pada tahun yang sama Pemerintah Pangandaran mengadakan Lomba Inovasi tingkat daerah untuk mendorong inovasi dengan Badan Pendapatan Daerah sebagai Juara 1 dalam Lomba Inovasi Daerah tingkat kabupaten dengan inovasi "*API Virtual Account*".

Pada tahun 2024 diraih dua penghargaan bergengsi, yaitu Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (AJEG) Jawa Barat 2024 untuk kategori Inovasi Digitalisasi Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten dan Juara II Apresiasi PINUNJUL Award 2024 kategori Kabupaten/Kota Non-Indeks Harga Konsumen. Berikut data yang menggambarkan Indeks Inovasi Daerah tahun 2020-2024:

Tabel 2. 107 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Inovasi Daerah	Kategori
1	2020	2.435	Sangat Inovatif
2	2021	55,84	Sangat Inovatif
3	2022	17,60	Kurang Inovatif
4	2023	43,03	Inovatif
5	2024	48,03	Inovatif

Sumber : Kementerian Dalam Negeri atau Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, 2025

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Penerapan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau (*green economy*) adalah model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, serta mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Salah satu langkah konkret dalam penerapan ekonomi hijau adalah pengembangan *Eco Green Tourism* di destinasi wisata unggulan seperti *Green Canyon* Pangandaran. PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah meresmikan Program ini pada Tahun 2024, dengan tujuan mendukung transisi energi dan mencapai *Net Zero Emissions* pada tahun 2060. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan listrik yang andal tetapi juga mendukung sektor pariwisata dan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang bebas polusi dan ramah lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara Institut Teknologi Bandung dan

Bank Sampah setempat bertujuan menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata bersih dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat. Adapun capaian beberapa indikator utama dalam ekonomi hijau yang ada yaitu nilai indeks kualitas lingkungan hidup dan indeks tutupan lahan.

B. Penerapan Ekonomi Biru

Ekonomi biru adalah model pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan, produktif, dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, dan pelestarian ekosistem laut. Dalam konteks ekonomi biru, Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan Program yang mendukung keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan. Pada Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program yang mendorong nelayan tradisional di Pantai Timur Pangandaran untuk menggunakan jaring *ered* sepanjang 600 (enam ratus) meter. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Program ekonomi biru yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan praktik perikanan. Adapun capaian beberapa indikator utama dalam ekonomi biru, meliputi:

Tabel 2. 108 Indikator pembentuk Ekonomi Biru Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (miliar)	71,12	63,07	52,33	71,2	86,49
2	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	239,96	323,19	324,087	326,06	347,86
3	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1.282,55	1.624,98	1.414,71	2.579,60	1.909,82

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, 2025

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital dalam pemerintahan adalah proses penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui inovasi teknologi dan perubahan sistem kerja. Berikut adalah beberapa elemen penting yang membentuk transformasi digital di Pangandaran:

1. Persentase aplikasi *e-government*

Persentase aplikasi *e-government* menggambarkan tingkat pencapaian persentase aplikasi *e-government* yang terintegrasi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menghubungkan berbagai sistem aplikasi pelayanan publik secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi. Pada tabel di bawah ini persentase aplikasi yang terintegrasi selalu mengalami kenaikkan hal ini dikarenakan pembangunan *website* organisasi Perangkat Daerah sudah difasilitasi oleh Perangkat Daerah dengan yang memiliki urusan di bidang informasi dan komunikasi sehingga sudah langsung diinteroperabilitaskan.

Tabel 2. 109 Persentase aplikasi e-government Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase aplikasi *e-government* yang terintegrasi	40	45	48	50	60

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2025

2. Jumlah Sistem Informasi yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi

Indikator ini penting untuk mengukur tingkat perlindungan terhadap data, sistem, dan layanan dari ancaman siber, pelanggaran privasi, atau kebocoran informasi. Secara umum, jumlah sistem informasi yang menerapkan Sistem Keamanan Informasi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Lonjakan yang signifikan terjadi pada tahun 2023, merupakan hasil dari intervensi kebijakan besar atau peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi. Peningkatan lebih kecil pada tahun 2024 mengindikasikan fokus pada stabilitas dan penyempurnaan sistem yang sudah ada.

Tabel 2. 110 Jumlah Sistem Informasi yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Sistem Informasi yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi	20	21	25	59	63

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2025

3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi

Data ini menunjukkan tingkat penerapan sandi komunikasi oleh Perangkat Daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Penggunaan sandi bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dan kerahasiaan dalam komunikasi antar perangkat. Penerapan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah baru dimulai pada tahun 2024 dengan capaian 3,8 (tiga koma delapan) persen Perangkat Daerah. Langkah ini menunjukkan komitmen awal untuk meningkatkan keamanan informasi di sektor pemerintahan, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai cakupan yang lebih luas. Strategi yang terencana dan dukungan kebijakan akan menjadi kunci keberhasilan implementasi di masa depan.

Tabel 2. 111 Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	0	0	3,8

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2025

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global pada tingkat kabupaten mengacu pada upaya untuk menghubungkan kegiatan ekonomi lokal dengan pasar nasional dan internasional, sehingga kabupaten dapat berperan aktif dalam rantai nilai global. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat mempresentasikan tersebut:

A. Ekspor Barang dan Jasa

Tabel 2. 112 Ekspor Barang dan Jasa Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Berlaku	Juta	981,39	1.525,02	1.671,30	1.844,42	2.373,23
2	Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Konstan	Juta	561,51	1.027,57	1.133,29	1.299,49	1.542,56

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel ini menggambarkan pencapaian ekspor barang dan jasa dalam dua kategori: Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, dari tahun 2020 hingga 2024, dalam satuan juta Rupiah. Berikut adalah deskripsinya:

Data Atas Dasar Harga Berlaku mencerminkan nilai ekspor berdasarkan harga yang berlaku saat transaksi terjadi, termasuk dampak inflasi dan fluktuasi harga:

a) 2020; 981,39 (sembilan ratus delapan puluh satu koma tiga sembilan) juta : Nilai ekspor barang dan jasa Pangandaran dimulai dari angka yang relatif rendah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19.
b) 2021; 1.525,02 (seribu lima ratus dua puluh lima koma nol dua) juta : Terjadi peningkatan signifikan, hampir mencapai 1,5 kali lipat, menunjukkan pemulihan perekonomian dan penguatan sektor ekspor.
c) 2022; 1.671,30 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga nol) juta : Ekspor terus bertumbuh, mencerminkan stabilitas dan peningkatan permintaan pasar terhadap produk dan jasa dari Pangandaran.
d) 2023; 1.844,42 (seribu delapan ratus empat puluh empat koma empat dua) juta : Peningkatan berkelanjutan dengan nilai yang semakin tinggi, menunjukkan keberhasilan pengembangan perdagangan internasional.
e) 2024; 2.373,23 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga koma dua tiga) juta : menunjukkan peningkatan yang signifikan, mengindikasikan pertumbuhan yang pesat dan ekspansi sektor ekspor.

Data Atas Dasar Harga Konstan menggambarkan nilai ekspor berdasarkan harga konstan, yang mencerminkan perubahan volume ekspor tanpa pengaruh inflasi:

a) 2020; 561,51 (lima ratus enam puluh satu koma lima satu) juta : Nilai ekspor barang dan jasa cukup rendah, mencerminkan terbatasnya aktivitas perdagangan akibat pandemi.
b) 2021; 1.027,57 (seribu dua puluh tujuh koma lima tujuh) juta : Lonjakan lebih dari dua kali lipat menunjukkan pemulihan besar pada volume ekspor.
c) 2022; 1.133,29 (seribu seratus tiga puluh tiga koma dua sembilan) juta : Ekspor terus meningkat, mencerminkan penguatan sektor ekonomi yang lebih stabil.

d) 2023; 1.299,49 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat sembilan) juta : Pertumbuhan ekspor semakin baik dengan nilai yang terus bertambah.
e) 2024; 1.542,56 (seribu lima ratus empat puluh dua koma lima enam) juta : Proyeksi mencatat peningkatan signifikan, terhentinya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Pangandaran.

Data ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dari dampak pandemi, serta keberhasilan Pangandaran dalam meningkatkan integrasi ekonomi domestik dan global. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pangandaran memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional, dengan strategi yang berkelanjutan untuk mengembangkan sektor ekspor.

B. Modal tetap bruto

Tabel 2. 113 Modal Tetap Bruto Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Modal tetap bruto Atas Dasar Harga Berlaku	Juta	2.531,37	2.785,86	2.902,81	3.161,08	3.429,79
2	Modal tetap bruto Atas Dasar Harga Konstan	Juta	1.684,38	1.780,82	1.764,57	1.852,05	1.986,64

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel di atas menunjukkan pencapaian modal tetap bruto dalam dua kategori: Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan, dari tahun 2020 hingga 2024, dalam juta Rupiah. Atas Dasar Harga Berlaku Mengalami peningkatan secara konsisten dari 2.531,37 (dua ribu lima ratus tiga puluh satu koma tiga tujuh) juta pada tahun 2020 hingga proyeksi 3.429,79 (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan koma tujuh sembilan) juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan ekspansi investasi pada infrastruktur dan aset tetap. Atas Dasar Harga Konstan Meningkat dari 1.684,38 (seribu enam ratus delapan puluh empat koma tiga delapan) juta pada tahun 2020 menjadi 1.986,64 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam koma enam empat) juta pada tahun 2024, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022. Peningkatan ini menggambarkan pertumbuhan investasi riil. Pangandaran menunjukkan tren positif dalam pembangunan aset tetap, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Fungsi pasar dalam Integrasi Ekonomi Domestik dan Global di Pangandaran sangat penting karena pasar menjadi penghubung utama antara kegiatan ekonomi lokal dan global.

C. Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Tabel 2. 114 Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto	%	4,78	4,88	5,04	4,88	N/A

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, 2025

Tabel di atas menunjukkan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri mencapai 4,78 persen, kemudian meningkat

menjadi 4,88 (empat koma delapan delapan) persen pada 2021 dan 5,04 (lima koma nol empat) persen pada tahun 2022, mencerminkan pertumbuhan sektor industri sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Namun, pada tahun 2023, kontribusi kembali turun ke angka 4,88 (empat koma delapan delapan) persen, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga pertumbuhan sektor ini. Data untuk tahun 2024 belum tersedia. Sektor industri memberikan kontribusi yang cukup stabil terhadap Produk Domestik Regional Bruto, meskipun ada fluktuasi kecil yang menunjukkan perlunya strategi keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan peran industri dalam perekonomian daerah.

D. Pasar

Pasar berfungsi sebagai jembatan bagi Pangandaran untuk mengintegrasikan ekonominya ke tingkat domestik dan global. Dengan memaksimalkan potensi pasar, Pangandaran dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperluas akses ke perdagangan internasional.

Tabel 2. 115 Jumlah Pasar Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasar	Unit	3	3	3	3	3
2	Toko	Unit	25	25	25	25	25
3	Warung	Unit	3.152	3.152	3.152	3.152	3.152
4	Emprakan	Unit	994	1.006	1.006	1.006	1.006

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian fasilitas ekonomi periode 2020-2024. Jumlah pasar tetap stabil di angka 3 (tiga) unit sepanjang lima tahun, sementara jumlah toko juga tidak mengalami perubahan, yaitu 25 (dua puluh lima) unit setiap tahun. Warung sebagai salah satu usaha mikro di Pangandaran tetap berada di angka 3.152 (tiga ribu seratus lima puluh dua) unit tanpa ada pertumbuhan selama periode tersebut. Sementara itu, emprakan mengalami peningkatan kecil dari 994 (sembilan ratus sembilan puluh empat) unit pada tahun 2020 menjadi 1.006 (seribu enam) unit sejak 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, fasilitas ekonomi di Pangandaran cenderung stagnan, dengan hanya sedikit pertumbuhan pada jumlah emprakan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut untuk mendukung aktivitas ekonomi.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Baik perkotaan maupun perdesaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kabupaten. Perkotaan menjadi pusat inovasi, investasi, dan distribusi, sedangkan perdesaan menjadi penghasil sumber daya alam dan produk primer. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah kabupaten.

1. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas, ketersediaan, dan aksesibilitas layanan infrastruktur di suatu wilayah. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana infrastruktur mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks Kepuasan

Layanan Infrastruktur menunjukkan peningkatan yang stabil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 85,5 (delapan puluh lima koma lima) poin, menjadi awal pengukuran dalam data yang tersedia. Selanjutnya, indeks terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai indeks meningkat menjadi 85,65 (delapan puluh lima koma enam lima) poin, diikuti oleh kenaikan kecil menjadi 85,68 (delapan puluh lima koma enam delapan) poin pada tahun 2023. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana indeks mencapai 85,7 (delapan lima koma tujuh) poin, mencerminkan adanya upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur.

Tabel 2. 116 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Point	NA	85,5	85,65	85,68	85,7

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025

2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni

Data menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tercatat sebesar 62,95 (enam puluh dua koma sembilan lima) persen, menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan hingga mencapai 51,98 (lima puluh satu koma sembilan delapan) persen , yang mengindikasikan adanya tantangan besar dalam penyediaan rumah layak huni. Pada tahun 2022, persentase kembali mengalami kenaikan menjadi 56,13 (lima puluh enam koma satu tiga) persen, namun tren ini tidak berlanjut pada tahun 2023, dimana persentase turun kembali ke angka 54,98 (lima puluh empat koma sembilan delapan) persen. Meski demikian, pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan persentase mencapai 61,91 (enam puluh satu koma sembilan satu) persen, mendekati pencapaian pada tahun 2020.

Tabel 2. 117 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

No	Urusan/ Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni	%	62,95	51,98	56,13	54,98	61,91

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

3. Persentase Desa Maju dan Mandiri

Pemerintah Daerah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan status desa maju dan mandiri. Pada tahun 2020, capaian awal sebesar 40 (empat puluh) persen terus meningkat hingga 70,36 (tujuh puluh koma tiga enam) persen pada tahun 2021. Meski sempat turun menjadi 66 (enam puluh enam) persen pada tahun 2022, upaya maksimal membawa Pangandaran mencapai 100 (seratus) persen pada tahun 2023. Keberhasilan ini berhasil mencapai kelangsungan pada tahun 2024, menunjukkan konsistensi pembangunan desa yang berkelanjutan. Untuk lebih jelas terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 118 Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan status desa maju dan mandiri	%	40	70,36	66	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025

Persentase desa dalam kategori swasembada mengalami peningkatan signifikan selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, capaian awal berada di angka 9 (sembilan) persen, kemudian naik menjadi 18 (delapan belas) persen pada tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Pangandaran berhasil mencapai target 100 (seratus) persen, yang menunjukkan bahwa seluruh desa telah masuk dalam kategori swasembada. Keberhasilan ini terus dipertahankan pada tahun 2024, mencerminkan tidak adanya Program pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 119 Persentase Desa Kategori Swasembada Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Desa Kategori Swasembada	%	9	18	39	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

4. Sumber Daya Alam dan Pertanian

Tabel 2. 120 Produksi sektor pertanian Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi sektor pertanian	Ton	234.213,90	236.035,49	227.840,27	224.914,15	224.330,21

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Tercatat penurunan produksi sektor pertanian selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, produksi mencapai 234.213,90 (dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga belas koma sembilan kosong) ton, diikuti peningkatan kecil menjadi 236.035,49 (dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh lima koma empat sembilan) ton pada tahun 2021. Namun, produksi mulai menurun pada tahun 2022 hingga 2024 yakni 224.330,21 (dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh koma dua satu) ton. Penurunan ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah strategi untuk mengatasi tantangan dalam sektor pertanian dan menjaga kemiskinan produksi.

Tabel 2. 121 Produksi sektor perkebunan Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi sektor perkebunan	Ton	86.624,89	86.618,45	87.260,45	87.845,16	51.708,39

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Produksi sektor perkebunan menunjukkan tren yang stabil pada awalnya, kemudian menurun tajam pada tahun 2024. Pada tahun 2020, produksi mencapai 86.624,89 (delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat koma delapan sembilan) ton dan sedikit menurun menjadi 86.618,45 (delapan puluh enam ribu enam ratus delapan belas koma empat lima) ton pada tahun 2021. Tahun 2022 dan 2023 mencatat peningkatan secara bertahap hingga mencapai puncak 87.845,16 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima koma satu enam) ton. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan hingga 51.708,39 (lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan koma tiga sembilan) ton, yang menunjukkan perlunya evaluasi dan tindakan untuk memulihkan produksi di sektor ini.

Tabel 2. 122 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Ton	N/A	21,00	17,00	13,00	N/A

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan tren menurun selama periode yang tercatat. Pada tahun 2021, kontribusi mencapai 21,00 (dua puluh satu koma nol nol) ton, kemudian menurun menjadi 17,00 (tujuh belas koma nol nol) ton pada tahun 2022, dan kembali menurun hingga 13,00 (tiga belas koma nol nol) ton pada tahun 2023. Data untuk tahun 2020 dan 2024 tidak tersedia. Tren ini menunjukkan adanya penurunan signifikan yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto di masa mendatang.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas Perekonomian Makro adalah kondisi dimana perekonomian daerah mampu menjaga keseimbangan dalam aspek pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, dan neraca perdagangan. Stabilitas ini menjadi kunci untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun laju Inflasi tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 123 Laju Inflasi Tahun 2020-2024

No	Urusan/Indikator	Satuan	Capian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Inflasi (Berdasarkan kota Tasikmalaya)	%	1,61	1,17	6,65	2,84	5,92

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel ini menggambarkan laju inflasi berdasarkan data Kota Tasikmalaya dalam bentuk persentase dari tahun 2019 hingga 2024. Tahun 2019 yakni inflasi sebesar 1,72 (satu koma tujuh dua) persen, menunjukkan nilai yang cukup terkendali dan stabil hal ini sesuai dengan kestabilan harga barang dan jasa di pasar lokal. Tahun 2020 dengan nilai 1,61 (satu koma enam satu) persen, Inflasi sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi *Covid-19*. Tahun 2021 nilai 1,17 (satu koma satu tujuh) persen, inflasi terus menurun, mencapai angka terendah dalam

periode ini. Penurunan ini bisa jadi akibat tidak berfungsinya aktivitas ekonomi dan pemulihan ekonomi yang belum maksimal. Tahun 2022 dengan nilai inflasi 6,65 (enam koma enam lima) persen, menunjukan terjadinya inflasi yang signifikan. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor eksternal, seperti kenaikan harga bahan bakar atau gangguan pada rantai pasokan, serta peningkatan permintaan akibat pemulihan ekonomi. Tahun 2023 inflasi kembali menurun cukup drastis setelah ditayangkan pada tahun sebelumnya, menunjukkan upaya pengendalian inflasi mulai berhasil. Tahun 2024 inflasi kembali meningkat, meskipun tidak mencapai tertinggi pada tahun 2022. Hal ini dapat mencerminkan adanya tekanan inflasi baru, seperti kenaikan harga komoditas tertentu atau peningkatan konsumsi masyarakat.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negara. Aspek pelayanan umum mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif adalah prinsip dalam pemerintahan dan manajemen yang menekankan pada penerapan kebijakan yang transparan, akuntabel, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan. Kebijakan peraturan yang dibuat harus jujur, adil dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah Daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi agar tetap relevan dan efektif.

1) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berKinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Reformasi birokrasi diukur menggunakan Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 2. 124 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori
1	2020	52,05	CC (Cukup)
2	2021	53,64	CC (Cukup)
3	2022	56,48	CC (Cukup)
4	2023	73,72	BB (Baik)
5	2024	76,46	BB (Baik)

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga 2024, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan dalam capaian indeks ini, tahun 2019 hingga 2022, skor Indeks Reformasi Birokrasi meningkat secara bertahap dari 51,60 (lima puluh satu koma enam) menjadi 56,48 (lima puluh enam koma empat delapan), dengan kategori CC (Cukup). Kategori ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan namun masih pada tingkat dasar dan perlu banyak penguatan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai IRB melonjak ke 73,72 (tujuh puluh tiga koma

tujuh dua) dan masuk ke kategori BB (Baik), hal ini mencerminkan adanya percepatan reformasi kelembagaan, seperti penyederhanaan birokrasi, digitalisasi layanan, peningkatan Kinerja aparatur, serta penguatan sistem pengawasan internal. Tahun 2024, tren peningkatan berlanjut dengan skor 76,46 (tujuh puluh enam koma empat enam), mempertahankan kategori BB (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berhasil mengkonsolidasikan inisiatif reformasi birokrasi dan mulai memasuki fase maturitas sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

2) Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil. Pelayanan publik mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, transportasi serta perizinan usaha. Kinerja pelayanan publik diukur dengan menggunakan Indikator Indeks Pelayanan berdasarkan aspek pelayanan, aspek profesionalisme sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 125 Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	3,14	3,42	4,07	4,44

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas indeks pelayanan publik tiap tahun mengalami peningkatan, tahun 2022 mengalami peningkatan relatif kecil menunjukan adanya perbaikan awal dalam sistem pelayanan publik tetapi belum signifikan, tahun 2023 peningkatan lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang artinya perubahan kebijakan lebih berdampak terhadap kualitas pelayanan dan tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik semakin meningkat menunjukan peningkatan kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah.

3) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas layanan publik serta tata kelola pemerintah. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 126 Indeks SPBE Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	3,02	3,42	2,82	3,53	3,52

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, 2025

Tahun 2021 indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengalami kenaikan menjadi 3,42 (tiga koma empat dua) hal ini menunjukan adanya peningkatan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, akan tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,82 (dua koma delapan dua) karena adanya perubahan indikator penilaian dari tahun sebelumnya, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 3,53 (tiga koma lima tiga) menandakan adanya perbaikan sistem dan kebijakan

terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 3,52 (tiga koma lima dua) yang berarti ada perbaikan berkelanjutan tetapi masih belum optimal.

4) Indeks Kualitas Kebijakan

Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, implementasi dan proses evaluasi. Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Pada Indeks Kualitas Kebijakan terdapat dua dimensi yang dinilai, yakni Dimensi Perencanaan Kebijakan dan Dimensi Evaluasi Kebijakan. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dilakukan terhadap seluruh kebijakan Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang implementasinya telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun. Pengukuran dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran. Pemerintah Daerah pada Tahun 2024 mengikuti penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan capaian nilai 67,73 (enam puluh tujuh koma tujuh tiga) dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan yang diterapkan telah memiliki kualitas yang cukup baik dalam aspek perencanaan, implementasi dan dampaknya terhadap masyarakat, akan tetapi diperlukan peningkatan dalam efektivitas implementasi dan evaluasi kebijakan agar mencapai kategori lebih tinggi.

5) Indeks Integritas Nasional

Indeks integritas nasional mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam suatu negara. Semakin tinggi indeksnya, semakin baik tata kelola pemerintahan dan integritas dalam berbagai sektor. Indeks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penegakan hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Indeks integritas nasional didapatkan dari survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun indeks integritas nasional tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 127 Indeks Integritas Nasional Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Integritas Nasional	71,90	71,77	71,84	65,66

Sumber: Inspektorat, 2025

Berdasarkan tabel diatas tahun 2021 indeks integritas nasional yaitu 71,90 (tujuh puluh satu koma sembilan nol) pada kategori rentan dan tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 71,77 (tujuh puluh satu koma tujuh tujuh) tetapi masih dalam batas stabil tidak ada perubahan signifikan dalam tata kelola, tahun 2023 kembali naik sedikit yang artinya menunjukan adanya usaha pemulihan terkait integritas. Tahun 2024 mengalami penurunan cukup drastis menjadi 65,66 (enam puluh lima koma enam enam) menandakan adanya kemunduran dalam aspek integritas. Penurunan indeks ini akan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan tata kelola pemerintahan yang bersih tetap terjaga dengan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan pemerintah, mengevaluasi kebijakan yang mungkin berdampak pada penurunan integritas dan melakukan perbaikan secara

sistematis, serta meningkatkan budaya integritas di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

6) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas Kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 128 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	IPKD	58,048	58,87	57,644	57,664*

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2025
Ket: * angka sementara

Berdasarkan tabel diatas Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2021-2024 masuk kedalam kategori sedang. Secara keseluruhan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukan fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Penurunan pada tahun 2023 menunjukan bahwa masih ada tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan masih banyak yang harus diperbaiki dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran.

7) Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara atau wilayah berhasil melakukan perubahan dan perbaikan dalam sistem hukum dan regulasinya. Indeks ini mencerminkan efektivitas kebijakan hukum, transparansi, akuntabilitas, serta seberapa baik hukum ditegakkan dalam masyarakat. Indeks reformasi hukum tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 129 Indeks Reformasi Hukum Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	NA	56,85	57,80	97,34

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas perkembangan indeks reformasi hukum tahun 2022 sebesar 56,85 (lima puluh enam koma delapan lima) dengan kategori cukup yg menunjukan masih banyak tantangan dalam reformasi hukum, tahun 2023 meningkat menjadi 57,80 (lima puluh tujuh koma delapan nol) menunjukan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan perbaikan terkait reformasi hukum walaupun hasilnya belum signifikan. Tahun 2024 menjadi 97,34 (sembilan puluh tujuh koma tiga empat) mengalami lonjakan cukup tinggi menunjukan bahwa Pemerintah Daerah berkomitmen dalam percepatan reformasi hukum.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi

Hukum berkeadilan mengacu pada sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Penerapan hukum berkeadilan di daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif baik dalam kasus perdata maupun pidana, perlindungan hak hak masyarakat terutama terkait hukum agraria, perizinan usaha dan hak-hak buruh, akses terhadap keadilan, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah yang sering diterapkan dalam konflik tanah atau masalah sosial. Melihat pada kondisi tersebut diatas, maka hukum berkeadilan perlu diperkuat dengan memastikan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Keamanan nasional yang tangguh merupakan bagian dari sistem keamanan yang lebih luas, aspek keamanan nasional yang tangguh mencakup keamanan wilayah perbatasan dan laut, mengingat potensi garis pantai yang panjang dan rentan terhadap penyelundupan atau ancaman lainnya. Kesiapsiagaan terhadap bencana alam, terutama tsunami dan gempa sesuai dengan karakteristik kebencanaan yakni sebagai Daerah rawan bencana dan berada dengan potensi gempa megathrust.

Demokrasi tidak hanya berarti adanya pemilu, tetapi juga menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan kesejahteraan sosial, demokrasi substansial dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat daerah dalam pemilu dan musyawarah Pembangunan Daerah, keterbukaan dalam kebijakan publik, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, pemberdayaan desa dan komunitas lokal. Salah satu sasaran Pemerintah Daerah dalam kontek keterkaitan dengan hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi adalah meningkatnya penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat secara menyeluruh dengan indikator angka ketertiban, ketentraman dan keindahan yang tertangani dan persentase tingkat pemahaman kesatuan bangsa. Indikator angka ketertiban, ketentraman, dan keindahan yang tertangani mengukur sejauh mana permasalahan terkait ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta aspek keindahan lingkungan telah ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak permasalahan ketertiban, ketentraman, dan keindahan yang berhasil ditangani oleh pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 130 Angka ketertiban, ketentraman, dan keindahan yang tertangani Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Angka ketertiban , ketentraman dan keindahan yang tertangani	0,6481	0,554	0,497	0,402

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tren angka ketertiban, ketentraman dan keindahan yang tertangani dari 2021-2024 mengalami penurunan, hal ini menunjukan bahwa tantangan dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keindahan lingkungan semakin meningkat yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi, kurangnya sumber daya untuk penegakan aturan, kesadaran masyarakat masih kurang dan tantangan dalam pengelolaan lingkungan karena faktor keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan fasilitas publik. Persentase

tingkat pemahaman kesatuan bangsa adalah indikator yang mengukur sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan nilai nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi persentase pemahaman ini, semakin kuat komitmen masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 131 Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tingkat pemahaman kesatuan bangsa (Persen)	78	80,19	59,70	85,00

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Berdasarkan tabel diatas, indikator tingkat pemahaman kesatuan bangsa menunjukan tren fluktuatif dengan penurunan pada tahun 2023 menjadi 59,7 (lima puluh sembilan koma tujuh) persen karena beberapa faktor yaitu adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena efisiensi anggaran dan perlu peningkatan metode dalam penyampaian materi kebangsaan, namun pada tahun 2024 dapat dipulihkan dengan signifikan menjadi 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) persen hal ini menunjukan adanya perbaikan dalam sosialisasi dan pendidikan kebangsaan. Selain indikator di atas, salah satu sasaran Pemerintah Daerah juga memiliki sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dengan indikator Indeks Desa Membangun, hal ini berkorelasi pada demokrasi karena pemberdayaan masyarakat desa adalah salah satu kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang substansial. Ketika masyarakat desa aktif, kritis, dan memiliki akses terhadap sumber daya serta kebijakan, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial-politik.

Tabel 2. 132 Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun	0,73	0,75	0,84	0,84

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Desa Membangun mengalami pertumbuhan signifikan mulai tahun 2021 hingga tahun 2024, yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,73 (nol koma tujuh tiga) hingga tahun 2024 menjadi 0,84 (nol koma delapan empat). Hal ini menunjukan keberhasilan Program pembangunan desa. Sedangkan pada tahun 2023-2024 Desa sudah 100 (seratus) persen mandiri.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Sebagai wilayah pesisir di Jawa Barat, Daerah memiliki peran strategis dalam konteks diplomasi dan pertahanan, terutama dalam aspek keamanan maritim, ketahanan wilayah, dan kedaulatan nasional. Konsep ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan menekankan pada kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas dan mempertahankan kepentingan nasional melalui pendekatan diplomasi serta kesiapsiagaan pertahanan.Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar kawasan memiliki hubungan erat dengan indeks daya saing, terutama dalam aspek keamanan, ekonomi, investasi, dan stabilitas wilayah. Semakin kuat

ketahanan diplomasi dan pertahanan, semakin baik daya saing daerah dalam menarik investasi, meningkatkan sektor ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang stabil bagi pembangunan. Adapun Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 133 Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,55	2,45	NA	3,01	3,36

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas perhitungan Indeks Daya Saing Daerah baru dimulai pada tahun 2019 dengan menunjukkan angka 3,55 (tiga koma lima lima). Pada tahun 2020 Indeks Daya Saing Daerah mengalami penurunan cukup signifikan hingga menunjukkan angka 2,45 (dua koma empat lima) hal ini mencerminkan dampak besar pandemi *Covid-19* yang melemahkan sektor ekonomi, infrastruktur, dan daya saing tenaga kerja. Hal ini juga berlangsung hingga tahun 2021 sehingga pada tahun tersebut tidak dilakukan perhitungan Indeks Daya Saing Daerah dan Pemerintah lebih fokus pada pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) menunjukan pemulihan mulai terjadi setelah pandemi dan menunjukan peningkatan daya saing. Pada tahun 2023, Indeks Daya Saing Daerah mulai naik menjadi 3,36 (tiga koma tiga enam) yang menunjukan adanya pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur dan peningkatan investasi.

2.1.5 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Menjelaskan Kinerja urusan pemerintahan daerah berupa Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Kunci untuk 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2. 134 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2020-2024

No	Indikator Makro	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,05	3,67	5,03	5,26	5,12
2	Indeks Gini	Poin	0,335	0,320	0,294	0,323	0,286
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
4	Laju Inflasi	Persen	N/A	1,17	6,65	2,84	0,43
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
6	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/ Perkapita	N/A	N/A	N/A	N/A	35,65
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,08	60,24	62,87	64,44	58,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel 2. 135 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta Rupiah	11.498.281,70	12.129.790,95	13.163.695,66	14.256.419,23	15.474.580,00
	PDRB atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	7.738.968,24	8.022.780,77	8.426.401,39	8.869.862,10	9.324.310,00
	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	Juta Rupiah	18,30	18,76	19,49	20,56	21,48
	PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku	Juta Rupiah	27,20	28,37	30,71	33,04	35,65
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,05	3,67	5,03	5,26	5,12
	Laju inflasi	Persen	NA	1,17	6,65	2,84	5,92
	Jumlah penduduk	Jiwa	422.411	425.587	428.596	431.464	434.104
	Laju pertumbuhan penduduk	Persen	0,96	0,75	0,71	0,67	0,61
	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
	Indeks Pendidikan	Poin	59,33	59,72	60,41	60,97	61,19
	Rata-rata lama sekolah	Angka	12,07	12,08	12,11	12,30	12,31
	Harapan Lama sekolah	Angka	7,74	7,85	8,03	8,04	8,10
	Indeks Kesehatan	Poin	83,26	83,57	84,00	84,43	84,78
	Angka Harapan Hidup	Angka	74,12	74,32	74,6	74,88	75,11
	Indeks Pengeluaran	Poin	67,20	67,14	68,21	68,26	69,06
	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	Rupiah	9.084.000	9.065.000	9.389.000	9.406.000	9.654.000
	Jumlah Penduduk Miskin	Persen	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
	Tingkat Kedalaman Kemiskinan	Angka	1,32	1,25	1,24	1,28	1,23
	Tingkat Keparahan Kemiskinan	Angka	0,28	0,27	0,26	0,27	0,29
	Gini Ratio	Angka	0,335	0,320	0,294	0,323	0,286
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Angka	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	76,79	74,75	79,92	80,15	80,12
	Tingkat Kesempatan Kerja	Angka	94,92	96,75	98,44	98,48	98,42
2	ASPEK DAYA SAING						
2.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
	Pengeluaran Konsumsi per Kapita	Rupiah	635.968	648.636	689.789	720.756	809.992
	Persentase Konsumsi	Persen	56,20	54,98	57,62	55,72	59,22
	Pengeluaran Non-Makanan per Kapita	Rupiah	495.710	531.095	507.252	572.884	557.738

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rupiah	1.395.046.653.495	1.473.090.741.881	1.282.067.392.061	983.514.549.013	1.971.668.227.721,74
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rupiah	79.728.538.874	20.000.000.000	21.000.000.000	26.775.224.160	-11.753.337.174,26
2.2	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur						
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	N/A	85,50	85,65	85,68	85,70
	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	N/A	1,635	1,731	1,731	1,731
	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur	Persen	N/A	46,48	50,76	59,52	58,50
	Indeks Risiko Bencana	Poin	N/A	129,21	137,36	147,85	133.13
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	N/A	60,24	62,87	64,44	58,99
2.3	Fokus Iklim Investasi						
	Jumlah Investor Penanaman Modal Dalam Negeri	Individu / Badan Usaha	2.124	1.050	6.120	67.564	31.100
	Penanaman Modal Asing	Rp	-	-	31.010.000.000	-	50.580.000.000
	Penanaman Modal Dalam Negeri	Rp	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491	1.539.208.559.642	1.485.964.762.333
	Jumlah investasi	Rp	349,9 M	795,7 M	1.781,4 M	1.539,2 M	1.536,36 M
2.4	Fokus Sumber Daya Manusia						
	Lulusan S1	Orang	224	100	N/A	N/A	12.046
	Lulusan S2	Orang	-	1	N/A	N/A	719
	Lulusan S3	Orang	-	-	N/A	N/A	35
2.5	Fokus Daya Saing Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisatawan se– Kabupaten (yang terdata baik Pemda dan Non Pemda)	Orang	2.930.506	3.604.129	4.288.185	3.898.577	3.297.362
	Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata	Rupiah	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000	27.973.717.000
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	N/A	40	14	10	N/A
	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	N/A	3	11	4	23
	Jumlah Cagar budaya yang Dikelola Secara Terpadu (yang diduga)	Cagar Budaya	30	30	26	40	46
2.3	PELAYANAN UMUM						

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.1	Pelayanan Umum Wajib Dasar						
2.3.1.1	Pendidikan						
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,74	7,85	8,03	8,04	8,10
	Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	8.005	8.005	8.257	8.587	8.521
	Persentase Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	67	67	67	69	77
	Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A	Persen	96	103,54	101,70	99,72	98,0
	Angka Partisipasi kasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B	Persen	98	94,59	104	102,82	100
	Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A	Persen	95,76	95,84	99,99	97,87	96,70
	Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ Paket B	Persen	84,62	84,97	84,63	88,60	87,80
	Angka Kelulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah ke Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Persen	105	100	98	101	100
	Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun	Orang	12.032	12.032	12.296	12.482	12.904
	Jumlah gedung sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Unit	344	344	347	348	348
	Rasio Sekolah / penduduk Usia 13-15	Rasio	0,005059028	0,005059028	09:17	0,08	0,017090659
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	39.991	39.991	39.572	38.847	38.521

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah gedung sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Unit	85	85	88	89	89
	Persentase Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kondisi bangunan baik	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	87
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	19.984	19.984	20.181	20.480	20.362
	Rasio Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ penduduk Usia 7-12/3-15	Rasio	0,138194	0,138194	72,79	73,65954793	74,21
	Jumlah Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah + Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Unit	429	429	435	437	437
	Jumlah Penduduk Usia (7-12) + (13-15) tahun	Orang	59.975	59.975	59.753	59.327	58.883
	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	Rasio	71,01	71,51	87,68	73,87957886	90
	Jumlah Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Orang	1.584	1.584	2.972	2.979	3.023
	Jumlah Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Orang	38.498	38.498	37.459	37.379	37.030
	Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	Rasio	0,000975694	0,000975694	0,000840278	0,000839699	0,081636511
	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Orang	680	680	1.631	1.599	1.599
	Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Orang	19.498	19.498	18.564	18.772	18.772
	Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Rasio	0,001026273	0,001026273	0,000826157	0,000830324	0,085180055

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Guru (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah + Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)	Orang	4.531	4.661	4.603	4.578	4.622
	Jumlah Murid (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah + Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)	Orang	57.996	57.996	56.023	56.151	55.802
	Rasio Perbandingan Jumlah Guru dengan Murid Sekolah Pendidikan Dasar + Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Rasio	1 : 25,61	1 : 25,61	1 : 12,17	1 : 12,26	1 : 12,07
	Jumlah guru berijazah kualifikasi Strata 1/Diploma 4	Orang	4.349	4.349	4.171	4.188	4.247
	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi Strata 1/Diploma 4	Persen	95,98	93,31	90,61	91	92
	Jumlah Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah	Orang	4.531	4.531	4.603	4.578	5.540
2	Kesehatan						
	Angka Usia Harapan hidup	Tahun	74,12	74,32	74,60	74,88	75,11
	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,23	0,11	0,17	0,04	0,06
	Prevalensi Balita Gizi Stunting	Persen	5	3,9	2,21	1,93	2,23
	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	100	100	100	100	100
	Angka Balita Gizi Buruk	Orang	59	25	41	10	15
	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	per 1000 Kelahiran Hidup	5,43	5,43	6,25	7,08	6,2
	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 Kelahiran Hidup	49,39	49,39	71,42	18,62	96,86
	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun	per 1000 Kelahiran Hidup	5,6	5,6	0,54	7,64	6,4
	Rasio Posyandu Per Seratus Balita	Rasio	1,88	1,88	1,85	2,10	1,89
	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	1:28.432	1:28.432	1:29.116	1:29.480	1:29.818

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	Rasio	1:12.544	1:12.544	1:12.845	1:13.400	1:13.554
	Rasio poliklinik per satuan penduduk	Rasio	1:20.309	1:20.309	1:39.704	1:17.008	1:14.428
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	3,94	3,94	2,21	1,93	2,23
	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization*	Persen	87,1	87,1	82,8	90,3	52,69
	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	Persen	N/A	N/A	99,61	96,78	N/A
	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah *Dengue*	Persen	100	100	100	100	100
	Penderita Diare Yang Ditangani	Persen	66,2	66,2	30,4	62,6	N/A
	Angka Kejadian Malaria	Persen	0,02	0,02	0	0	0
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	Persen	100	100	100	100	N/A
	Persentase ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	88,6	100	92,19
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	96,13
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	95,68
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	85,95
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	23,37	98	98,98

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	74,77	58	70,85
	Persentase warga negara usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	74,85	100	100
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	65,6	105	96,97
	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	89,39	113	97,40
	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	93,81
	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100	79	100
	Persentase Balita Gizi Buruk/Stunting yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100	100	100	N/A
	Nilai rata rata Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas	Angka	100	100	88,51	92,4	92,89
	Persentase puskesmas akreditasi minimal madya	Persen	93,3	93,3	93,3	100	100
	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Rasio	1:426.483	1:426.483	1:436.748	1: 442.205	1:447.272
	Rasio tenaga dokter per 100.000 penduduk	Rasio	12,42	12,42	19	18,63	12,97
	Rasio Bidan Per Seratus Ribu Penduduk	Rasio	100,35	100,35	104,4	99,28	94,57

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rasio Perawat Per Seratus Ribu Penduduk	Rasio	104,58	104,58	130,28	120,41	116,04
	Jumlah Perawat	Orang	446	446	569	530	519
	Jumlah Bidan	Orang	377	377	456	437	423
	Jumlah Farmasi	Orang	136	136	108	114	92
	Jumlah Ahli Gizi	Orang	20	20	46	31	45
	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	12	16	20	23	25
	Jumlah Dokter Gigi	Orang	12	12	20	23	18
	Jumlah Dokter Umum	Orang	56	56	63	59	58
	Bayi Berat Badan Lahir Rendah	Bayi	268	268	299	333	316
	Ibu Hamil Kurang Energi Kronis	Persen	8,55	5,14	4,6	7,8	7,3
	Kasus HIV	Orang	16	16	39	54	55
	Angka kesakitan DBD	Orang	194	194	502	253	205
	Angka kesakitan Diare	Orang	4.765	4.765	3.698	4.175	8.003
	Angka kesakitan ISPA	Orang	227	227	134	308	308
	Angka kesakitan Tuberculosis	Orang	387	387	683	755	1.009
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Jumlah kasus per 100.000 penduduk	90,74	90,74	156,38	170,74	226
	Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Persen	100	100	100	100	100
	Tingkat Kematian akibat malaria	Angka kematian per 100.000 penduduk	0	0	0	0	100
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	N/A	1:2.143	1:2.228	1:2.256	1:1.903
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi	Rasio	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Panjang Jalan Kondisi Baik	Km	429	445,8	470	508,232	515,110
	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	504,31	504,31	504,31	632,54	632,54
	Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	Km	504,31	504,31	504,31	632,54	632,54
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Rasio	0,85	0,88	0,93	0,80	0,81

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,0012	0,0012	0,0012	0,0014	0,0014
	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	N/A	65	72	72,13	72,13
	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	67,57	69,50	72	72,13	72,59
	Luas Areal Irigasi	Ha	16.785,38	16.785,38	17.889,20	17.889,20	17.889,20
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	65,9	61,86	60,32	86,47	86,46
	Panjang Jalan yang Terbangun	Km	5,94	0,838	6	20	0
	Jumlah Jembatan yang Terbangun	Unit	6	1	5	1	0
	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap		85,12	88,40	93,28	80,35	81,44
	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	35	35	36,19	42,54	45,04
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	Persentase Sarana dan Prasarana Pusat Pemerintahan yang Terpenuhi	Persen	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
	Indeks Risiko Sanitasi	Poin	32,39	32	32	N/A	N/A
	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	75,46	87,49	88,09	88,26	88,28
	Persentase Luasan Permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	N/A	N/A	N/A	0,5332	0,5332
	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	65,9	61,86	60,32	86,47	86,46
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						
	Tingkat Penurunan Pelanggaran Perda	Persen	60	24	14	-242	78
	Tingkat Penurunan Gangguan Ketertiban Umum	Persen	-270	27	-67	-82	72
	Persentase peningkatan Kasus Kebakaran Yang Direspons Kurang 15 (lima belas) menit	Persen	33	63	75	72,97	70,9
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	Persen	20,57	20,92	20,74	20,73	N/A

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100	100
	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persen	26,07	22,05	27,75	65,673	N/A
	Kejadian Kebakaran	Kasus	79	35	37	90	31
	Jumlah Pelanggaran K3 yang Dilaporkan Masyarakat dan Teridentifikasi	Kasus	37	28	24	82	18
6	Sosial						
	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang memperoleh bantuan sosial	Jiwa	116.458	46.516	39.134	40.729	42.606
	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	116.458	52.224	53.268	45.167	45.890
	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yang tertangani	Jiwa	116.458	50.210	39.134	40.729	42.606
	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada	Jiwa	116.458	52.224	53.268	45.167	45.890
	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan	Jiwa	116.458	46.516	39.134	40.729	42.606
	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	116.458	52.224	53.268	45.167	45.783
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	Persen	100	91	73	90	92
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	6,71	6	6,27	7,10	8,20

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah anak jalanan, anak terlantar, anak penyandang cacat dan jompo yang dibina	Jiwa	1.427	1.531	2.006	1.986	2.166
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif sosialisasi/penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mandiri	Persen	21,4	8	3,63	7,15	N/A
	Jumlah Panti Sosial	Unit	22	23	31	31	31
	Jumlah fakir miskin mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	117.471	47.516	39.134	40.729	N/A
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial	Jiwa	117.471	45.417	644	1.331	1.026
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	98,03	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja						
	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	245.619	241.542	260.761	274.550	276.503
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	76,79	74,75	79,92	80,15	80,12
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	57,97	87,95	78,67	73,38	80,12
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas	Rasio	94,92	96,75	98,44	98,48	95,37
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	N/A	58,96	76,43	79,25	35,21
	Rasio penduduk yang bekerja	Rasio	72	46,26	15,13	50	80,12
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	7,88

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Orang	0	1.095	458	100	130
	Angka Sengketa Pengusaha-pekerja per tahun	Angka	0	0	1	1	1
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Persen	35,41	58,96	76,43	83,45	0
	Keselamatan dan perlindungan	Persen	N/A	10,78	12,49	15,86	0
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	Persen	N/A	12,46	18,43	38,2	51,3
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	85	75	80	100	0
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,78	89,92	90,2	90,04	91,22
	Indeks Pemberdayaan Gender)	Poin	74,57	75,98	76,09	76,53	73,89
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	24,7	25,42	24,89	70,98	69,11
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	Persen	22,5	25	25	25	20
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Persen	0,003	0,002	0,002	0,005	N/A
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	24,7	25,42	24,89	70,98	69,11
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan	Persen	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100	100
	Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani/Didampingi	Orang	21	13	15	19	10
3	Pangan						
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	Skor	94,5	93,4	93,3	94,9	94,93
	Stok Cadangan pangan	Ton	N/A	N/A	N/A	30,67	26,416
	Persentase Penanganan daerah rawan pangan	Persen	0	0	6,45	1,08	4,3
	Angka kecukupan protein perkapita	Gram/Kap.Hari	70,6	70,6	64,8	68,5	68,5
	Jumlah desa rawan pangan	Desa	8	6	16	1	0
	Total desa pangan lestari	Desa	3	17	21	N/A	N/A
	Ketersedian pangan utama (*food availability*)	Ton/Tahun	38.727,46	141.806	171.154,06	162.754,03	87.807,77
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	94,5	93,4	93,3	94,9	94,93
	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	N/A	N/A	N/A	2.151	2.773
	Angka Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	N/A	N/A	N/A	55,38	70
	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Skor	N/A	N/A	N/A	75,11	76,08
	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	81,99	80,64	81,12	83,57	83,86
4	Pertanahan						
	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	N/A	N/A	N/A	32,78	N/A
5	Lingkungan Hidup						
	Volume sampah yang ditangani	m3	30.848	35.564	54.162	59.155	93.723
	Volume produksi sampah	m3	183.136,82	184.242,03	188.985,16	192.099	194.251
	Persentase Penanganan Sampah	Persen	16,84	19,30	28,66	30,79	46,73
	Indeks Kualitas Air	Poin	51,67	50	50	50	34
	Indeks Kualitas Udara	Poin	77,79	88,66	88,18	90,96	93,18

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indeks Kualitas Vegetasi	Poin	65,25	65,25	66,4	39,069	38,67
	Jumlah Daya Tampung Tempat Pengolahan Sampah	m3	210	210	222	138	138
	Jumlah Daya Tampung Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*	m3	144	162	180	198	198
	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Pelaku Usaha	6	3	6	8	3
	Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	16	3	22	11	12
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup	Individu / Kelompok	N/A	N/A	N/A	5	5
	Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Kasus	4	3	3	1	4
	Total pengaduan masyarakat yang teregister	Kasus	4	3	3	1	4
	Total timbunan sampah	ton/tahun	62.266,52	62.523,33	62.365,10	64.265,84	64.143
	Jumlah Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*	ton/tahun	2.573,25	7.493,50	2,19	17.886	2.726,27
	Total Jumlah Timbunan Sampah Kabupaten	Ton	62.266,52	62.523,33	62.365,10	64.265,84	64.102
	Luas area Kabupaten yang dilayani	km2	170,25	195,12	289,75	311,29	311,29
	Luas area Kabupaten keseluruhan	km2	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00	1.011,00
	Persentase Timbulan Sampah yang ditangani	Persen	18,65	30,49	40,28	47,59	46,73

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	16,84	19,30	28,66	30,79	30,79
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik	Persen	97,06	99,17	99,49	99,71	98,08
	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	Persen	96,5	98,2	93,85	99,61	99,75
	Cakupan Perekaman Maturitas Elektronik	Persen	99,87	99,2	97,96	97,29	98,08
	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	Persen	45,26	56,26	53,12	57,29	57,52
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Persen	74,61	73,58	71,64	72,13	57,52
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Perkawinan	Persen	59,54	100	63,86	68,03	60,51
	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Persen	67,25	78,87	99,68	245,42	175
	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	39,13	60,87	100	100	113,96
	Rasio penduduk ber-Kartu Tanda Penduduk per satuan penduduk	Persen	97,06	97,38	97,46	97	N/A
	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	N/A	N/A	93,56	94	N/A
	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	100	100	N/A	100	100
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Persentase Desa Kategori Swasembada	Persen	8,60	18,28	38,70	100,00	100,00
	Jumlah Desa Kategori Swasembada	Desa	8	17	36	93	93
	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Lembaga	87	87	87	93	93
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kategori Baik	Persen	59,14	58,06	65,59	100	100
	Jumlah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif	PKK	104	104	104	104	104

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Aktif	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif dalam Pembangunan Desa	Persen	100	100	100	100	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	Total Fertility Rate	jumlah anak per perempuan	2,29	2,51	2,22	1,7	1,41
	Contraceptive Prevalence Rate	Persen	60,25	73,37	69,81	71,89	73,12
	Unmet Need	Persen	24,84	18,1	19,7	14,69	13,378
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,96	1,24	1,17	0,67	N/A
	Ratio Akseptor Keluarga Berencana (KB)	Persen	60,25	73,37	70,31	72,74	74,32
	Age Specific Fertility Rate	Kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu	18,01	19,81	27	N/A	N/A
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	Persen	20,16	19,84	19,44	20,86	20,76
	Rasio petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (KB) Desa setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100
9	Perhubungan						
	Rasio Sarana Prasarana Perhubungan yang Ada dalam Kondisi Baik	Persen	76,9	78	96	96,5	90
	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Orang	474.383	482.441	487.356	437.882	442.361
	Persentase Kecamatan yang Terlayani Angkutan Umum	Persen	60	50	50	50	60
	Rasio Ijin Trayek	Persen	0,0028	0,0002	0,0002	0,0036	0,0042
	Persentase kepemilikan Kir Angkutan Umum	Persen	23,63	12,82	27,06	29,66	32,11
	Persentase pemasangan rambu-rabu	Persen	60,51	67,90	84,64	84,64	84,64

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	0,0018
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	48.150	52.341	50.531	47.189	45.906
	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Izin	12	11	1	13	9
	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	45	62	1.347	873	48
	Jumlah Angkutan Darat	Unit Kendaraan	2.405	2.570	2.665	2.405	2.753
	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki Kir	Unit	132	194	2.665	N/A	157
	Jumlah angkutan umum	Unit	165	195	133	133	127
	Jumlah pemasangan rambu-rambu	Unit	835	937	1.168	1.168	1.168
	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia	Unit	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang / Ton / Kg	473.231	491.411	483.573	N/A	447.130
	Jumlah orang/barang melalui dermaga	Orang per hari/bulan/tahun atau ton per hari/bulan/tahun atau kontainer (TEU) per hari/bulan/tahun	33.657	33.656	25.122	29.384	27.593
	Jumlah orang/barang melalui terminal	Orang / Ton / Kg	473.231	535.112	483.573	467.587	421.798
	Jumlah orang/barang melalui bandara	Orang / Kg	1.576	2.135	2.574	3.042	2.943
	Jumlah Uji Kir Angkutan Barang	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2.156
10	Komunikasi dan Informatika						
	Persentase aplikasi e-government yang terintegrasi	Persen	40	45	48	50	60
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,02	3,42	2,82	3,53	3,52
	Indeks Kepuasan Masyarakat Diskominfo	Poin	76,81	89,13	89,25	89,275	89,275
	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	1	1	1	4	4

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Persen	10	10	10	40	40
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah						
	Persentase koperasi aktif	Persen	89,02	89,02	91,56	91,00	79,82
	Persentase Usaha Kecil Menengah non Bank Perkreditan Rakyat/Lembaga Keuangan Mikro aktif	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang naik klasifikasi	Persen	14,29	16,66	8,4	22,00	19,30
	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	11.360	11.360	98.290	98.290	39.447
	Persentase wirausaha muda	Persen	79,91	42,34	4,45	6,61	24,25
	Rasio Wirausaha	Persen	4,63	4,70	22,73	22,49	14,27
12	Penanaman Modal						
	Jumlah investor penanaman modal dalam negeri	Orang / Perusahaan	2.124	1.050	6.120	67.564	2.124
	Penanaman Modal Asing	Rp	0	0	31.010.000.000	37.570.000.000	0
	Penanaman Modal Dalam Negeri	RP	349.898.121.679	219.437.739.336	1.750.354.863.491	1.501.638.559.642	349.898.121,679
	Jumlah Investasi	Rp	349,9 M	219,44 M	1.781,4 M	1.539,2 M	349,9 M
13	Kepemudaan dan Olahraga						
	Jumlah organisasi olahraga/klub olahraga	Organisasi/Klub	2	2	2	3	4
	Jumlah Gedung Olahraga per 1.000 Penduduk	Unit	N/A	N/A	117	121	121
	Jumlah Klub Olahraga	Klub	146	146	146	146	146
	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	117	117	117	121	121
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan pembina olahraga	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Persen	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah atlet berprestasi	Orang	0	2	8	11	37
	Jumlah Prestasi Olahraga	Prestasi	0	2	13	3	17
14	Statistik						
	Jumlah Publikasi	Publikasi	0	0	2	3	3
15	Persandian						
	Jumlah Sistem Informasi yang Menerapkan Sistem Keamanan Informasi	Sistem	20	21	25	59	63
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	0	0	0	0	3.8
16	Kebudayaan						
	Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan	Cagar Budaya	30	35	32	40	46
	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Festival Seni dan Budaya	8	40	14	10	N/A
	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	Karya Budaya	0	3	11	4	23
	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Cagar Budaya	30	30	26	40	46
	Kelompok Budaya Aktif	Kelompok	100	100	218	209	N/A
17	Perpustakaan						
	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan Selama 1 (satu) Tahun	Jumlah	3.931	3.104	14.740	26.425	35.116
	Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah	10.794	12.274	23.036	25.031	25.814
	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Jumlah	10.761	11.900	23.036	25.031	25.814
	Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai	Orang	265	265	364	695	623
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Pengunjung	3.931	3.104	14.740	26.425	35.116
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Poin	42,99	87,58	88,92	89,02	91,33
	Jumlah Perpustakaan	Perpustakaan	627	632	695	695	623

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Per Tahun	Jumlah Orang	3.931	3.104	14.740	26.425	35.116
	Jumlah Orang dalam Populasi yang Harus Dilayani	Jumlah Orang	42.958	33.935	30.296	15.195	17.700
	Rasio Perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	1,48	1,48	1,61	1,59	1
18	Kearsipan						
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	18	18	18	18	18
	Persentase arsip yang terjamin keamanannya	Persen	48,03	48,03	48,03	48,03	48,03
	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persen	18	18	18	18	18
	Pengelolaan Kearsipan menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia	Kegiatan	2	0	0	0	1
	URUSAN PILIHAN						
1	Pariwisata						
	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Orang	2.929.992	3.604.114	4.286.894	3.899.645	3.294.139
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	514	15	1.291	3.932	3.223
	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	Rp	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000	27.973.717.000
	Jumlah Penerimaan Sektor Pariwisata	Rp	13.786.568.250	15.126.468.000	29.383.788.500	28.936.290.000	27.973.717.000
	Jumlah Rumah Makan/Restoran	Unit	203	203	211	233	283
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Juta	1.091.410,69	1.162.850	1.289.270	1.449.880	1.574.280
	Jumlah Hotel	Unit	383	405	434	432	674
2	Pertanian						
	Produktivitas Padi	Ton/Ha	6,3	6,3	6,22	6,23	6,08
	Luas Lahan Sawah	Ha	16.564	16.747	16.727	16.727	16.727
	Produktivitas Jagung	Ton/Ha	6,01	6,45	6,24	5,68	5,92

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya per Hektar	Ton/Ha	6,3	6,2	6,24	6,24	6,09
	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton	205.981,12	214.265,66	210.144,68	211.285,68	215.344,84
	Jumlah Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Konstan dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp	1.855.810.000.000	1.898.150.000.000	1.963.550.000.000	1.990.670.000.000	2.057.750.000.000
	Jumlah Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Harga Berlaku dan Sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan	Rp	3.143.790.000.000	3.241.830.000.000	3.485.230.000.000	3.631.920.000.000	3.961.050.000.000
	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelompok	1,348	1,230	1,448	1,454	1,629
3	Perdagangan						
	Nilai ekspor daerah	Rp	108.822.663,83	169.354.600.717,78	124.522.765.710,00	124.681.954.172,00	132.751.401.210,00
	Persentase Pertumbuhan ekspor	Persen	81,88	55,62	-26,47	0,13	6,08
	Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	Persen	81,88	55,62	-26,47	0,13	6,08
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	19,52	19,53	19,79	19,53	19,38
	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp. (Miliar)	2.243,97	2.368,26	2.605,46	2.792,7	2.998,39
4	Perindustrian						
	Jumlah industri baru	Industri	13	40	419	29.806	10.116
	Persentase pertumbuhan industri	Persen	0,004	0,011	1.047,50	7.113,60	33,94
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	0,52	0	6	16,78	33,33
	Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	4,78	4,88	5,04	4,88	4,87
	Nilai Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri	Rp. (Miliar)	549,52	592,38	663,41	710,43	752,85
5	Kelautan dan Perikanan						
	Jumlah Produksi Ikan	Ton	1.522,51	1.948,17	1.738,80	2.905,66	2.257,68
	Target Daerah	Ton	2.947	1.527	1.531,20	1.535,50	1.539,82
	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	23,1	22,1	22,6	21,9	54,69

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	241	243	245	241	241
	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	1.282,55	1.624,98	1.414,71	2.579,60	1.909,82
	Produksi Benih Ikan	Ekor/Tahun	11.519.000	13.058.000	14.341.000	50.438.000	398.905.735
	Penunjang Urusan						
1	Perencanaan Pembangunan						
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unsur Perencanaan	Persen	22,24	22,42	20,1	20,09	20,22
	Persentase Sinergitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Persen	97,75	67,03	62,95	66,96	100
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	A (89,88)	B(65,80)	B(68,00)	BB(70,90)	BB (70,95)
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Tahun 2021-2026 dalam RKPD	Persen	N/A	N/A	N/A	93,64	100
2	Keuangan						
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kinerja Keuangan	Poin	89,9 (B)	66 (B)	67,72 (B)	69,25 (B)	70,90 (BB)
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Poin	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
	Persentase Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persen	0,85	1,19	0,27	2,14	0,016
	Bagi hasil Kabupaten/Desa	Persen	0,21	0,62	0,62	0,62	0,79
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rupiah	1.395.046.653.495	1.473.090.741.881	1.282.067.392.061,00	983.514.549.013,00	1.971.668.227.721,74
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rupiah	79.728.538.874	20.000.000.000	21.000.000.000,00	26.775.224.160,00	-11.753.337.174,26
3	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan						

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	0,57	15,57	41	40,25	56,50
	Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah	Persen	3,30	1,49	10	14,21	14,21
	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Orang	28	26	32	31	23
	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	119	104	129	115	111
	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	2.094	2.047	2.066	3.519	2.406
	Persentase Perangkat Daerah yang Tidak terdapat Hukuman Disiplin	Persen	80	90	1	1	89
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Poin	38,92	53,04	55,84	55,89	79,65
4	Penelitian dan Pengembangan						
	Jumlah Kelitbangan dalam RKPD	Dokumen	8	9	6	6	6
	Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Dokumen	8	9	6	6	6
	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	75	44,44	66,67	66,67	66,66
5	Pengawasan						
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Skor	2	2	2	3	3
	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Skor	3	3	3	3	3
	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	93,98	91,20	88,20	85,31	84,77
	Jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah	24	35	18	11	15
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip Komponen Evaluasi Internal	Poin	N/A	7,39	7,39	17,47	17,38
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat		N/A	89,34	64,5	71,05	71,4

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Manajemen Risiko Indeks	Poin	N/A	1,667	3,050	0	3,397
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Poin	N/A	2,756	1,920	0	2,784
6	Pemerintahan Umum						
	Persentase masyarakat yang memahami Kesatuan Bangsa	Persen	76,8	N/A	N/A	59,7	76,8
	Persentase Informasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang tersampaikan	Persen	N/A	81	83,57	72	100
	Persentase masyarakat yang memahami demokrasi	Persen	N/A	78	77	50	95
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Poin	N/A	89,86	62,7	67,95	63,45
7	Sekretariat Daerah						
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	CC (52,05)	CC (53,64)	CC (56,48)	BB (73,72)	BB (76,46)
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Persen	166,67	166,67	166,67	84,11	90
	Indeks Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	N/A	Sedang (2,84)	Sedang (3,3488)	Sedang (3,0442)	N/A
	Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indeks	B (83,52)	B (84,92)	B (86,48)	B (88,04)	A (89,66)
	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persen	97,3	91,83	93,12	69,66	82,41
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah	Predikat	B (66,73)	B (66,86)	B (67,72)	B (67,99)	B (67,98)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	B (83,52)	B (84,92)	B (86,48)	B (88,04)	A (89,66)
8	Sekretariat Dewan						
	Persentase Kenaikan Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	Persen	83,54	83,35	85,28	86,73	86,78
9	Penanggulangan Bencana						

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persentase desa/kelurahan/ kampung rawan bencana yang mendapat/memperoleh informasi peringatan dini bencana	Persen	68,8	68,8	60,5	100	100
	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	Persen	29	22	22	24	26
	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan penanganan	Persen	2,4	N/A	N/A	99	100
	Persentase rencana pemulihan pasca bencana yang berhasil direalisasikan	Persen	100	100	100	100	Belum Tersedia
	Persentase jumlah kerusakan akibat bencana yang direhabilitasi	Persen	100	100	100	100	Belum Tersedia
	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	N/A	0,76	0,68	0,68	0,70

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.1.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Urusan Pendidikan

Pemenuhan pelayanan dasar pada urusan pendidikan terdapat pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal. Berikut merupakan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan tahun 2024:

Tabel 2. 136 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Tahun 2024		
				Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah)	100%	44.059	44.059	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	887	887	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Pendidikan Anak usia Dini	100%	8.517	8.517	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

B. Urusan Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, penyelenggaraan urusan kesehatan di daerah harus dilakukan dengan memenuhi standar pelayanan minimal yang mencakup indikator kunci pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat. Berikut tabel capaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Kesehatan tahun 2024.

Tabel 2. 137 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Sasaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.657	5.215	92,19%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.375	5.167	96,13%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.372	5.140	95,68%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	24.838	21.349	85,95%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	59.861	55.695	92,83%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	223.228	158.202	70,87%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	70.678	70.678	100,00%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	29.902	28.996	96,97%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	7.312	7.122	97,40%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	614	576	93,81%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.369	16.263	100,00%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.327	8.470	100,00%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.

Tabel 2. 138 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Sasaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari – hari	1.613	1.613	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	509	509	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

Tabel 2. 139 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Sasaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten Korban bencana Yang memperoleh rumah layak huni	20	20	100%
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten.

Tabel 2. 140 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	SKPD	Sasaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten	Persentase Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Satpol PP	26	26	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase Warga Kabupaten yang memperoleh layananan formasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.795	3.795	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400	400	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	437	437	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja	431.464	164.992	38,24%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

F. Bidang Urusan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah.

Tabel 2. 141 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian	Sasaran	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	50	54	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100	103	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	70	96	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	22	24	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah korban bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap Darurat & pasca	125	853	100%

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.1.7 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RPJMD Tahun 2025-2029 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target global, Jumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi kewenangan tingkat Daerah meliputi 15 (lima belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda pembangunan dunia yang menekankan pentingnya menghapus kemiskinan, melindungi lingkungan, dan menjamin kesejahteraan secara berkeadilan bagi semua. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu diwujudkan melalui integrasi dalam kebijakan Daerah, termasuk dalam Program pengentasan kemiskinan, penyediaan pendidikan berkualitas, penguatan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah mengidentifikasi 220 (dua ratus dua puluh) indikator yang relevan untuk dievaluasi. Hasil analisis capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
2. Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target
3. Belum dilaksanakan dan belum mencapai target
4. Tidak ada data

Secara keseluruhan, sekitar 75,45 (tujuh puluh lima koma empat lima) persen dari total 220 (dua ratus dua puluh) indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan telah memiliki data, sementara sekitar 24,55 (dua puluh empat koma lima lima) persen masih belum memiliki data yang tersedia.Rincian pencapaian indikator yang relevan untuk dapat dilihat dalam Tabel bawah ini.

Tabel 2. 142 Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Status	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target	104	47,27
2	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target	52	23,64
3	Belum melaksanakan dan belum mencapai target	8	3,64
4	Tidak ada data	56	25,45
	Total	220	100

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Dari total indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah, sebanyak 104 (seratus empat) indikator atau sekitar 47,27 (empat puluh tujuh koma dua tujuh) persen berhasil memenuhi target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, terdapat 52 (lima puluh dua) indikator atau 23,64 (dua puluh tiga koma enam empat) persen yang telah dijalankan namun belum mencapai target nasional. Sebanyak 8 (delapan) indikator atau 3,64 (tiga koma enam empat) persen lainnya belum dilaksanakan dan juga belum mencapai target. Sementara itu, 56 indikator atau sekitar 25,45 (dua puluh lima koma empat

lima) persen belum memiliki data yang tersedia. Secara keseluruhan, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah memenuhi target lebih banyak daripada yang belum mencapai target, dan jumlah indikator yang telah terisi datanya lebih banyak dibandingkan yang belum terisi. Berikut data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Per Indikator.

Tabel 2. 143 Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Per Indikator

No	Nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target	Belum dilaksanakan	Tidak ada data
1	Tanpa kemiskinan	13	10	0	2
2	Tanpa kelaparan	9	0	0	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	19	11	0	4
4	Pendidikan Berkualitas	5	4	0	4
5	Kesetaraan Gender	8	3	0	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	9	4	0	5
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	9	3	0	7
8	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	5	1	3	4
9	Berkurangnya Kesenjangan	5	1	0	5
10	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	7	5	2	0
11	Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab	1	1	0	3
12	Penanganan perubahan iklim	0	2	1	0
13	Ekosistem daratan	0	2	1	1
14	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	11	4	1	5
15	Kemitraan untuk mencapai tujuan	3	1	0	11
	Total	104	52	8	56

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan kemajuan yang cukup baik, dengan total 104 (seratus empat) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target. Indikator tersebut tersebar di berbagai tujuan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, serta penguatan kelembagaan dan perdamaian. Namun demikian, masih terdapat 52 (lima puluh dua) indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan hasil implementasi di lapangan, yang memerlukan evaluasi dan penguatan Program.

Terdapat juga 8 (delapan) indikator yang belum dilaksanakan sama sekali, sebagian besar berada pada tujuan terkait industri, infrastruktur,

perubahan iklim, dan ekosistem daratan. Ini menunjukkan masih adanya sektor pembangunan yang belum tersentuh secara optimal. Selain itu, terdapat 56 (lima puluh enam) indikator yang tidak memiliki data, sehingga sulit untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan di bidang-bidang tersebut. Kekosongan data ini menjadi tantangan serius dalam pelaporan dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat Daerah.

Secara umum, capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan tren positif, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pelaksanaan, efektivitas kebijakan, dan kelengkapan data. Upaya penguatan tata kelola, integrasi lintas sektor, dan sistem monitoring perlu ditingkatkan agar seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh dan inklusif.

2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang terintegrasi atau tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan Negara, sehingga prinsip yang terkandung di dalam pengelolaan keuangan Daerah masih terintegrasi dengan keberadaan Undang-undang di bidang keuangan Negara, salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut merupakan pengaturan komprehensif yang mampu mengakomodir serta menyinkronkan seluruh pengaturan mengenai aspek pengelolaan keuangan Daerah yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan Daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah Daerah untuk menganalisis capaian serta memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan Daerah juga merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Gambaran pengelolaan keuangan membahas mengenai analisis realisasi Kinerja keuangan Daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selain itu, gambaran pengelolaan keuangan juga menganalisis perkembangan neraca Daerah yang meliputi aset dan utang Daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan Daerah perlu diketahui sebagai dasar mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan Daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Salah satu hal yang menjadi aspek penting dalam Pemerintahan Daerah adalah perihal keuangan Daerah. Keuangan daerah merupakan suatu realisasi kebijakan anggaran yang menjamin adanya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

Perkembangan Kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada pembahasan ini akan menguraikan aspek-aspek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pendapatan asli Daerah merupakan semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan Daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan beberapa potensi pajak lain yang bisa dipungut.
2. Hasil retribusi Daerah, yaitu pungutan Daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh Daerah atau dengan kata lain retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dan hasil retribusi Daerah lainnya.
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan terkait belanja Daerah yang merupakan pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada peraturan perundang- undangan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Sumber pembiayaan pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan diterapkannya kebijakan otonomi Daerah, penyelenggaraan pemerintah di Daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan Daerah yang diimplementasikan dalam bentuk Program kegiatan Perangkat Daerah.

Perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah tahun 2019 sampai tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 144 Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2024

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.572.138.480.714	1.332.348.261.465,00	1.486.480.557.856,50	1.334.214.286.772	1.206.267.385.315	-5,88%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.276.341.355	175.130.968.912,00	256.747.781.795,00	242.766.077.875	233.424.981.367	25,92%
4.1.01.	Pajak Daerah	47.132.600.965	50.029.272.430,00	75.365.829.369,00	76.347.564.838	72.214.323.378	13,17%
4.1.01.06.	Pajak Hotel	8.815.677.797	9.553.890.158,00	20.959.177.181,00	20.150.275.064	19.080.067.037	29,65%
4.1.01.07.	Pajak Restoran	3.723.058.221	3.567.625.589,00	7.029.259.452,00	8.206.282.150	7.538.097.849	25,36%
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	123.484.098	112.001.880,00	236.542.385,00	1.293.047.654	698.010.436	125,63%
4.1.01.09.	Pajak Reklame	1.464.294.720	1.646.362.932,00	1.880.234.357,00	1.794.544.862	1.307.699.420	-1,26%
4.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	-	14.254.759.681,00	16.943.738.589,00	17.140.605.700	15.785.162.867	3,03%
4.1.01.11.	Pajak Parkir	37.862.168	70.263.106,00	99.242.452,00	150.899.019	108.144.500	37,63%
4.1.01.12.	Pajak Air Tanah	119.305.656	160.376.892,00	253.404.720,00	477.344.869	458.737.838	44,23%
4.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	2.590.000,00	6.162.000	3.081.000	21,98%
4.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		100.362.315,00	58.191.845,00	94.114.500	58.178.655	-4,62%
4.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.572.076.534	12.931.518.475,00	17.767.020.252,00	15.564.111.554	15.027.844.513	4,21%
4.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.513.439.432	7.632.111.402,00	10.136.428.136,00	11.470.177.466	12.149.299.263	22,58%
4.1.02.	Retribusi Daerah	30.409.065.567	87.350.918.972,00	38.650.002.713,00	37.950.037.757	29.848.990.322	27,09%
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum		66.312.147.627,00	4.343.105.324,00	4.074.320.264	2.171.012.600	-36,59%
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha		20.576.377.066,00	33.004.272.494,00	33.313.685.867	26.368.461.560	10,12%
4.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu		462.394.279,00	1.302.624.895,00	562.031.626	1.309.516.162	64,46%
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		261.866.550,00	996.924.550,00	602.205.428	525.178.733	57,08%
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha		261.866.550,00	996.924.550,00	602.205.428	525.178.733	57,08%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
	Milik Daerah						
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.630.810.377	37.488.910.960,00	141.735.025.163,00	127.866.269.852	130.836.488.934	76,57%
4.1.04.01.	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan		203.808.500,00	-	83.945.460	4.176.000	-48,76%
4.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan		139.398.000,00	42.300.000,00	80.123.840	32.900.000	-9,79%
4.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah				261.679.420	-	-25,00%
4.1.04.05.	Jasa Giro	3.338.535.615	1.355.999.991,00	1.134.849.569,00	901.227.937	767.186.566	-27,79%
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga		185.342.471,00	-	181.047.499	193.026.387	-23,35%
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	135.194.950	7.075.000,00	5.900.000,00	3.800.000	1.151.000	-54,17%
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	477.759.448,00	63.021.289,00	3.189.698.506	198.302.531	1195,18%
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	174.137.505,00	190.502.706,00	124.120.547	78.110.829	-15,63%
4.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah		-	-	37.923.840		-25,00%
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian		12.344.184.297,00	1.043.114.754,00	2.489.714.145	5.617.824.305	43,19%
4.1.04.16.	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah		-	138.731.004.451,00	120.156.160.734	116.639.935.460	-4,08%
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama		18.815.192.500,00	-	-		-25,00%
4.1.04.21.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		25.980.000,00	-	-		-25,00%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
4.1.04.23.	Pendapatan Lain-lain yang Sah Lainnya		426.363.548,00	524.332.394,00	390.200.903	7.303.875.856	442,31%
4.1.04.25.	Pendapatan Pelayanan Kesehatan- Jaminan Kesehatan Nasional non Kapitasi	17.025.209.200	3.333.669.700,00	-	-		-45,10%
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.394.982.683.359	1.115.727.933.553,00	1.229.732.776.061,50	1.091.448.208.897	971.045.298.948	-8,02%
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	749.516.240.315	970.028.277.016,00	876.779.203.307,50	897.499.391.699	766.738.157.791	1,90%
4.2.01.01.	Dana Perimbangan		835.799.556.016,00	790.304.073.407,50	765.381.362.049	696.125.977.591	-4,41%
4.2.01.02.	Dana Insentif Daerah	71.879.456.000	43.625.156.000,00	-	34.866.264.000	12.378.378.000	-50,95%
4.2.01.05.	Dana Desa		90.603.565.000,00	86.475.129.900,00	97.251.765.650	58.233.802.200	-8,05%
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.930.090.452	145.699.656.537,00	352.953.572.754,00	193.948.817.198	204.307.141.157	81,70%
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	44.930.090.452	45.398.536.989,00	56.245.766.529,00	56.935.650.076	39.006.398.547	-1,33%
4.2.02.02.	Bantuan Keuangan	467.335.624.592	100.301.119.548,00	296.707.806.225,00	137.013.167.122	165.300.742.610	21,03%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		41.489.359.000,00	-	-	1.797.105.000	-25,00%
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		41.489.359.000,00	-	-	1.797.105.000	-25,00%
4.3.03.01.	Lain-lain Pendapatan		41.489.359.000,00	-	-	1.797.105.000	-25,00%
5.	BELANJA DAERAH	1.393.932.389.467	1.349.232.078.108,00	1.447.231.435.714,00	1.343.490.829.836	1.282.359.996.669	-1,92%
5.1.	BELANJA OPERASI	923.798.838.777	824.614.262.855,00	952.283.856.620,00	918.086.702.127	874.939.808.125	-0,89%
5.1.01.	Belanja Pegawai	397.230.404.286	369.586.967.802,00	427.927.654.639,00	428.078.544.757	444.885.792.939	3,20%
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	246.092.522.092	227.755.800.067,00	251.221.048.705,00	259.329.618.866	274.732.801.933	3,00%
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur SIpil Negara	141.256.766.744	45.969.134.032,00	146.517.960.413,00	69.181.975.208	74.588.767.502	26,58%
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan		79.918.720.720,00	12.528.080.269,00	65.124.805.495	68.561.103.284	85,20%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
	berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur SIpil Negara						
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	9.043.885.000					-25,00%
5.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD		15.154.912.763,00	16.393.090.719,00	19.624.259.726	17.348.802.274	4,07%
5.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		186.800.220,00	171.234.398,00	171.257.532	134.651.497	-7,42%
5.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		601.600.000,00	718.440.000,00	801.600.000	701.200.000	4,62%
5.1.01.99.	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah		-	377.800.135,00	13.845.027.930	8.818.466.449	882,08%
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	445.484.380.765	427.189.733.277,00	482.939.817.709,00	456.135.369.459	377.553.821.435	-3,46%
5.1.02.01.	Belanja Barang		139.921.583.885,00	87.868.702.996,00	104.982.480.031	95.025.152.152	-6,80%
5.1.02.02.	Belanja Jasa	27.763.934.424	207.425.331.493,00	212.473.193.033,00	144.872.868.083	128.054.302.807	151,53%
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	28.043.873.093	24.838.813.213,00	29.999.130.508,00	37.252.464.372	24.391.765.071	-0,25%
	Belanja Jasa Konsultasi	15.164.813.636				-	-25,00%
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	15.341.900.179	14.540.926.732,00	25.077.689.197,00	24.204.674.251	14.798.952.561	6,23%
	Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil	420.250.000					-25,00%
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Pegawai Negeri Sipil	2.904.730.300					-25,00%
	Belanja Honorarium Non Pegawai	145.460.000					-25,00%
	Honorarium Pegawai Negeri Sipil	17.129.935.000					-25,00%
	Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil	74.332.555.304					-25,00%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.675.379.779	2.641.423.111,00	4.450.840.071,00	1.274.294.800	1.690.296.000	-15,59%
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah		37.821.654.843,00	36.921.924.846,00	38.172.867.113	19.759.693.769	-11,81%
5.1.02.90.	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas					3.011.034.602	0,00%
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah		-	86.148.337.058,00	105.375.720.809	90.822.624.473	2,13%
5.1.03.	Belanja Bunga	8.332.500.000	14.128.402.776,00	10.171.701.391,00	12.138.715.286	10.654.513.888	12,17%
5.1.03.03.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank		14.128.402.776,00	10.171.701.391,00	12.138.715.286	10.654.513.888	-5,22%
5.1.04.	Belanja Subsidi	670.953.726	-	-	-		-25,00%
5.1.04.01.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara		-	-	-		0,00%
5.1.05.	Belanja Hibah	53.512.600.000	12.986.259.000,00	22.664.282.881,00	18.677.822.625	38.576.127.863	21,93%
5.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat		-	-	500.000.000	29.500.000.000	1450,00%
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		12.466.300.000,00	19.001.208.823,00	14.204.709.825	6.552.468.698	-6,67%
5.1.05.06.	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah		-	2.623.156.058,00	2.933.194.800	1.469.850.000	-9,52%
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		519.959.000,00	1.039.918.000,00	1.039.918.000	1.053.809.165	25,33%
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	18.568.000.000	722.900.000,00	8.580.400.000,00	3.056.250.000	3.269.552.000	233,36%
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		-	5.570.400.000,00	1.716.250.000	3.189.552.000	4,16%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		722.900.000,00	3.010.000.000,00	1.340.000.000	80.000.000	41,72%
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		-	-	-		0,00%
5.2.	BELANJA MODAL	464.677.932.690	375.711.955.154,00	313.558.631.466,00	263.582.863.366	279.934.784.179	-11,36%
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.913.080.498	2.993.281.680,00	80.000.000,00	383.749.500	-	31,41%
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah		2.993.281.680,00	80.000.000,00	383.749.500	-	45,59%
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.513.094.027	119.772.760.262,00	129.646.695.039,00	61.492.156.687	101.011.855.318	-6,85%
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar		132.398.728,00	-	174.059.264	188.290.000	-22,96%
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan		5.450.364.500,00	4.971.132.655,00	8.777.064.000	1.080.750.000	-4,98%
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur		4.919.150.000,00	138.107.520,00	8.729.400		-72,72%
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian		-	6.980.000,00	-	537.413.271	-25,00%
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		6.109.101.037,00	8.528.998.779,00	2.459.572.830	62.974.816.829	607,21%
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		733.192.140,00	289.464.000,00	826.061.126	49.105.000	7,70%
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		47.493.025.730,00	34.918.877.703,00	21.962.696.806	8.564.147.086	-31,15%
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium		2.369.738.050,00	542.393.501,00	852.335.650		-29,99%
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer		47.903.320.187,00	6.643.857.524,00	2.777.147.505	20.707.947.838	125,33%
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi		45.960.000,00	-	-		-25,00%
5.2.02.13.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					-	0,00%
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja		-	-	247.990.000	750.000	-24,92%
5.2.02.16.	Belanja Modal Alat Peraga		1.247.141.000,00	22.514.210.914,00	13.486.844.000	2.201.001.133	395,37%
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu		302.810.200,00	44.846.810.810,00	1.334.737.525	2.109.134.302	3667,80%
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan		-	-	10.000.000	31.646.230	54,12%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
	Olahraga						
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah		3.066.558.690,00	3.103.143.085,00	3.241.591.963	1.233.452.419	-14,07%
5.2.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		-	3.142.718.548,00	5.333.326.618	1.333.401.210	-1,32%
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.648.749.304	62.703.021.476,00	55.649.050.107,00	38.543.753.609	80.302.658.829	8,15%
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung		52.873.100.976,00	46.087.492.647,00	38.119.906.359	79.314.777.429	19,49%
5.2.03.02.	Belanja Modal Monumen		9.722.670.500,00	9.561.557.460,00	416.847.250	916.381.400	5,63%
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti		107.250.000,00	-	7.000.000,00	-	-50,00%
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.105.705.122	189.278.450.786,00	126.344.728.468,00	162.266.209.570	96.340.663.525	-0,54%
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan		187.658.366.286,00	107.007.294.078,00	151.651.595.379	92.289.135.150	-10,10%
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air		1.393.534.500,00	16.525.041.559,00	8.279.514.191	1.487.528.375	238,48%
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi		-	2.812.392.831,00	2.335.100.000	2.564.000.000	-1,79%
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan		226.550.000,00	-	-		-25,00%
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.497.303.739	964.440.950,00	1.748.186.160,00	851.474.000	2.259.626.507	30,73%
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan		19.998.000,00	1.295.496.300,00	-		1569,53%
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		104.004.450,00	-	-	2.214.599.507	-25,00%
5.2.05.05.	Belanja Modal Tanaman		114.482.500,00	104.753.100,00	29.000.000		-45,20%
5.2.05.07.	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		-	171.506.260,00	245.245.000	22.546.000	-11,95%
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-	-	79.254.000		-25,00%
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap		725.956.000,00	176.430.500,00	497.975.000	22.481.000	2,77%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
	Lainnya Bantuan Operasional Sekolah						
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya		-	89.971.692,00	45.520.000	19.980.000	-26,38%
5.2.06.99.	Belanja Modal Aset Lainnya Badan Layanan Umum Daerah		-	89.971.692,00	45.520.000	19.980.000	-26,38%
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.455.618.000	4.618.091.483,00	-	2.587.406.924	3.914.157.345	-16,02%
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.455.618.000	4.618.091.483,00	-	2.587.406.924	3.914.157.345	-16,02%
5.3.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.455.618.000	4.618.091.483,00	-	2.587.406.924	3.914.157.345	-16,02%
5.4.	BELANJA TRANSFER		144.287.768.616,00	181.388.947.628,00	159.233.857.419	123.571.247.020	-2,22%
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	2.055.120.180	632.852.516,00	4.070.784.586,00	1.494.292.217	5.729.021.396	173,53%
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.055.120.180	-	1.500.000.000,00	1.360.752.947	3.492.400.656	11,84%
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa		632.852.516,00	2.570.784.586,00	133.539.270	2.236.620.740	446,57%
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	169.850.962.631	143.654.916.100,00	177.318.163.042,00	157.739.565.202	117.842.225.624	-7,08%
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-		0,00%
5.4.02.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	2.000.000.000	-	-	-		-25,00%
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	167.331.003.631	143.654.916.100,00	177.318.163.042,00	157.739.565.202,00	117.842.225.624	-6,76%
-	SURPLUS/(DEFISIT)	6.300.008.436	(16.883.816.643,00)	39.249.122.142,50	-9.276.543.064	- 76.092.611.354	-25,96%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	16.008.393.830	(177.691.597.733,95)	1.770.241.393,05	41.019.363.536	181.310.783.993	312,05%
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.008.393.830	22.308.402.266,05	169.370.240.623,05	200.019.363.536	181.310.783.993	146,80%
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.008.393.830	22.308.402.266,05	5.370.240.623,05	41.019.363.536	31.310.783.993	150,90%

Kode Rekening	Uraian	2020	2021	2002	2023	2024	Laju Pertumbuhan
6.1.01.02.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer		-	-	-		0,00%
6.1.01.05.	Penghematan Belanja	16.043.940.289	22.308.402.266,05	1.732.227.230,00	2.561.106.401	5.791.254.100	30,20%
6.1.01.08.	Sisa Belanja Lainnya		-	3.638.013.393,05	38.458.257.135	25.519.529.893	230,87%
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000	-	150.000.000.000,00	150.000.000.000	150.000.000.000	-25,00%
6.1.04.03.	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	100.000.000.000	-	150.000.000.000,00	150.000.000.000	150.000.000.000	-25,00%
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	14.000.000.000,00	9.000.000.000		-33,93%
6.1.06.01.	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui Badan Layanan Umum Daerah		-	14.000.000.000,00	9.000.000.000		-33,93%
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000	200.000.000.000,00	167.599.999.230,00	159.000.000.000	-	-5,33%
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah		-	3.599.999.230,00	-		-25,00%
6.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah		-	3.599.999.230,00	-		-25,00%
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000	-	-31,25%
6.2.03.03.	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank		200.000.000.000,00	150.000.000.000,00	150.000.000.000	-	-31,25%
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	14.000.000.000,00	9.000.000.000	-	-33,93%
6.2.05.01.	Pinjaman melalui Badan Layanan Umum Daerah		-	14.000.000.000,00	9.000.000.000	-	-33,93%
	PEMBIAYAAN NETTO	16.008.393.830	(177.691.597.733,95)	1.770.241.393,05	41.019.363.536	181.310.783.993	312,05%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	22.308.402.266	(194.575.414.376,95)	41.019.363.535,55	31.742.820.472	105.218.172.638	-221,11%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2019-2023, Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan terkait kondisi pengelolaan keuangan Daerah pada tahun 2019-2024. Pada pos pendapatan, terjadi fluktuasi setiap tahunnya, secara keseluruhan pendapatan Daerah menurun dari tahun 2019 hingga 2024 terutama pada komponen pendapatan transfer, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, akan tetapi menurun pada tahun 2024. Selain itu besaran pendapatan transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah menandakan masih belum optimalnya pemanfaatan potensi keuangan Daerah.

Hal yang sama juga terjadi pada pos belanja. Pada pos belanja operasi terjadi peningkatan dan juga pos belanja modal. Namun dapat dilihat bahwa besaran belanja modal masih jauh lebih sedikit dibandingkan belanja operasi yang menandakan bahwa belanja Daerah masih berfokus kepada belanja operasional pemerintahan. Pada pos pembiayaan juga hampir setiap tahun muncul komponen penerimaan pembiayaan yang merupakan utang yang muncul setiap tahunnya. Kondisi keuangan Daerah pada lima tahun terakhir yang menyebabkan kondisi yang terjadi saat ini.

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan penjelasan terkait posisi keuangan Daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca akan menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa penyusunan neraca dibuat berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap disesuaikan dengan kondisi atau keadaan di masing-masing pemerintah Daerah.

Neraca Daerah memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya meningkatkan transparansi keuangan dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi finansial Daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta menjadi dasar dalam perencanaan dan evaluasi Kinerja keuangan Daerah. Selain itu, neraca Daerah mempermudah proses audit dan pengawasan keuangan oleh lembaga terkait, seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Di Indonesia, penyusunan neraca Daerah mengacu pada beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya neraca Daerah yang akurat dan transparan, pemerintah Daerah dapat mengambil kebijakan ekonomi yang lebih baik, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.

Nantinya neraca Daerah akan memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Penjelasan dari posisi keuangan ini adalah posisi atas aset, utang, dan ekuitas. Aset Daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai Pemerintah Daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 145 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun					% Rata-Rata Neraca Daerah 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	18.628.825.140	1.722.227.172	2.561.106.401	5.791.254.100	679.129.621	-1,05%
Kas di Bendahara Penerimaan	128.461.000	54.345.000	146.844.500	432.036.479	322.624.263	70,35%
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.648.750	10.000.058	-	-	-	101,63%
Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/ Badan Layanan Umum Daerah	3.230.295.478	3.443.652.028	38.415.829.046	24.965.394.423	5.159.924.047	226,95%
Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah	319.171.899	194.361.366	42.428.089	59.199.153	10.496.894	-40,00%
Dana BOK	-	-		494.936.317	759.067.816	13,34%
Kas Lainnya	-	727.273	196.872.325	-	-	6717,48%
Setara Kas	-	-	-	-	-	0,00%
Piutang Pendapatan	21.497.037.721	19.613.783.232	22.606.782.815	29.457.932.331	50.473.293.141	27,04%
Piutang Lainnya	12.526.000	12.651.000	6.751.000	2.951.000	5.800.000	-1,35%
Penyisihan Piutang	(2.966.504.270)	(4.241.695.805)	(5.376.511.351)	(9.575.653.555)	(9.378.033.136)	36,44%
Beban Dibayar Dimuka	210.737.179	8.729.855.906	2.299.343.372	831.837.046	563.196.556	968,19%
Persediaan	105.338.480.109	129.702.791.986	183.160.749.686	111.889.074.018	118.943.460.393	7,93%
Jumlah Aset Lancar	146.400.679.005	159.242.699.216	244.060.195.882	164.348.961.312	167.220.413.694	7,78%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Jumlah Aset Tetap	2.300.029.350.805	2.268.089.847.894	2.333.585.953.779	2.186.134.901.620	2.212.452.866.403	-0,90%
ASET LAINNYA						

Uraian	Tahun					% Rata-Rata Neraca Daerah 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	0,00%
Aset Tak Berwujud	10.636.917.367	10.934.812.217	13.095.536.307	14.824.571.485	14.925.298.960	9,11%
Aset Lain-Lain	71.806.661.693	71.639.377.795	141.959.436.794	133.886.265.217	202.810.491.999	35,93%
Amortisasi	(4.932.276.684)	(6.722.974.307)	(8.609.752.113)	(10.083.903.142)	(11.761.928.511)	24,53%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	(66.866.255.466)	(60.183.687.094)	(99.893.312.635)	14,00%
Aset lainnya	-	-	7.134.471.409	-	106.080.549.814	-25,00%
Jumlah Aset Lainnya	77.511.302.376	75.851.215.705	86.713.436.930	78.443.246.466		-24,34%
JUMLAH ASET	2.553.072.387.378	2.530.471.322.748	2.692.584.827.885	2.454.256.015.867		-25,83%
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	727.273	196.872.325	-	22.000.762.509	6742,48%
Pendapatan Diterima Dimuka	16.756.694	644.494	317.291	1.000.762.509	317.291	78765,33%
Utang Belanja	269.343.142.829	246.616.754.033	267.398.099.924	305.892.205.114	258.985.458.515	-0,24%
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.509.137.283	59.217.021.913	83.811.167.293	104.788.598.035	95.088.214.662	317,64%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	273.869.036.806	305.835.147.713	351.406.456.834	411.681.882.949	376.074.752.977	8,77%
Kewajiban Jangka Panjang						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	0,00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
Jumlah Kewajiban Jangka						0,00%

Uraian	Tahun					% Rata-Rata Neraca Daerah 2020-2024
	2020	2021	2022	2023	2024	
ASET						
Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	273.869.036.806	305.835.147.713	351.406.456.834	411.681.882.949	376.074.752.977	8,77%
EKUITAS						
Ekuitas						
JUMLAH EKUITAS	2.279.203.350.572	2.224.636.175.035	2.341.178.371.051	2.042.574.132.919	2.167.101.777.606	-0,95%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.553.072.387.378	2.530.471.322.748	2.692.584.827.885	2.454.256.015.867	2.543.176.530.583	0,07%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2019-2023, Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah 2025

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa besaran Neraca Daerah cukup fluktuatif di beberapa pos aset Daerah. Namun beberapa data yang ada masih belum tercatat dengan baik sehingga menjadi dasar perbaikan untuk administrasi pencatatan aset Daerah.

2.2.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu

Sistem pengelolaan keuangan Daerah dilaksanakan secara rapi dan terintegrasi dengan baik melalui siklus rangkaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga pada tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Beberapa fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, yang memiliki maksud anggaran Daerah menjadi patokan untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, yang memiliki maksud bahwa anggaran Daerah akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, yang memiliki maksud anggaran Daerah akan menjadi pedoman dalam kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, yang memiliki maksud anggaran Daerah yang sudah disusun harus diarahkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian, dan hal lain sesuai Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun berjalan.
5. Fungsi Distribusi, yang memiliki maksud penyusunan anggaran Daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, yang memiliki maksud bahwa anggaran Daerah yang telah disusun harus menjadi alat untuk menciptakan dan memelihara keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Ada beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran Daerah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Idealnya, dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2.2.2.1 Proporsi Penganggaran

Sub bab proporsi penggunaan anggaran akan menjelaskan mengenai proporsi dari belanja untuk memenuhi kebutuhan dari Program dan kegiatan yang sudah disusun sebelumnya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 146 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran n-3 (2022)	427.927.654.639,00	1.433.442.487.316,00	29,85%
2	Tahun Anggaran n-2 (2023)	428.078.544.757,00	1.343.256.972.417,00	31,87%
3	Tahun Anggaran n-1 (2024)	444.885.792.939,00	1.282.359.996.669,00	34,69%

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah, 2025

Tabel yang ditampilkan menyajikan data mengenai total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan total pengeluaran (belanja dan pembiayaan pengeluaran) dalam tiga tahun anggaran terakhir. Data ini menunjukkan adanya tren peningkatan dalam persentase alokasi belanja untuk kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam tiga tahun terakhir. Walaupun total pengeluaran menurun dari tahun ke tahun, nominal belanja aparatur cenderung meningkat. Hal ini mencerminkan adanya prioritas yang semakin besar terhadap pemenuhan kebutuhan aparatur, atau bisa juga mencerminkan pengurangan pengeluaran di sektor lain. Persentase yang meningkat juga menunjukkan bahwa belanja aparatur semakin mendominasi struktur pengeluaran, yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan proporsi alokasi anggaran tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang lebih luas.

Pada tabel diatas juga menunjukan bahwa besaran persentase belanja aparatur masih lebih kecil terhadap total pengeluaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2021 persentasenya hanya 23 persen yang menandakan belanja yang ada sudah berfokus ke pos belanja yang lebih produktif dan tidak berpaku kepada belanja operasi, akan tetapi pada tahun 2023 proporsi belanja pegawai meningkat menjadi 31,87 persen begitu juga dengan tahun 2024 yakni sebesar 34,69 persen .

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan sebuah kegiatan transaksi keuangan untuk memenuhi kekurangan biaya yang ada di antara pendapatan dan belanja Daerah. Adapun pembiayaan ini memiliki sumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang Daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman Daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman Daerah. Pembiayaan Daerah, digunakan untuk menutup adanya defisit anggaran. Perkembangan defisit anggaran Daerah dalam kurun tahun dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 147 Defisit Riil Anggaran Daerah

No	Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.486.480.557.856,50	1.334.214.286.772,19	1.206.267.385.314,62
2	Belanja Daerah	1.265.842.488.086,00	1.184.256.972.417,00	1.282.359.996.669
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	167.599.999.230,00	159.000.000.000,00	0
Defisit Riil		53.038.070.540,50	(9.042.685.644,81)	(76.092.611.354,38)

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah, 2025

Tabel menyajikan data mengenai realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah, pengeluaran pembiayaan Daerah, serta defisit riil anggaran dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Defisit Riil menunjukkan selisih antara pendapatan dengan total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang jika bernilai negatif, berarti terjadi defisit. Pada Tahun 2022 mencatat surplus dengan nilai positif sebesar 53,03 (lima puluh tiga koma nol tiga) miliar rupiah. Namun, pada tahun 2023 terjadi defisit sebesar 9.04 (sembilan koma nol empat) miliar rupiah. Defisit semakin memburuk di tahun 2024 dengan nilai defisit sebesar 76.09 (tujuh puluh enam koma nol sembilan) miliar rupiah. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Meskipun belanja Daerah sempat menurun pada tahun 2023, peningkatan belanja pada tahun 2024 yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan menyebabkan defisit anggaran semakin besar. Pengeluaran pembiayaan yang menurun hingga nol pada tahun 2024 turut memperburuk kondisi keuangan Daerah.

Peningkatan defisit dari tahun 2023 ke 2024 yang mencapai defisit sebesar 76,09 (tujuh puluh enam koma nol sembilan) miliar rupiah menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan serta mengoptimalkan pengelolaan belanja agar defisit tidak semakin melebar di masa mendatang. Selain itu, penting untuk mencari solusi pembiayaan atau penyesuaian Program agar anggaran daerah tetap seimbang dan berkelanjutan.

Tabel 2. 148 Komposisi Penutup Riil Defisit Anggaran Daerah

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	5.370.240.623	41.019.363.535	105.218.172.638
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0	0	

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil		
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
5	Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	14.000.000.000	9.000.000.000	

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah, 2025

Tabel menyajikan data mengenai sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit riil anggaran dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya tahun anggaran Sebelumnya merupakan dana sisa dari anggaran tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit. Tahun 2022, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang digunakan sebesar 5,37 (lima koma tiga tujuh) miliar rupiah, tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan menjadi 41,01 (empat puluh satu koma nol satu) miliar rupiah, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 105,21 (seratus lima koma dua satu) miliar rupiah, menunjukkan pemanfaatan sisa anggaran yang lebih besar untuk menutupi defisit. Penerimaan Pinjaman Daerah mencatat nilai yang tetap setiap tahunnya, yaitu sebesar 150 (seratus lima puluh) miliar rupiah dari tahun 2022 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa pinjaman Daerah menjadi sumber pembiayaan utama yang konsisten digunakan untuk menutup defisit, sedangkan pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak menjadi sumber pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai sumber pembiayaan pada tahun 2022 sebesar 14 (empat belas) miliar rupiah, tahun 2023 menurun menjadi 9 (sembilan) miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2024 tidak ada penerimaan pembiayaan lainnya.

Data ini menggambarkan bahwa dalam menutupi defisit anggaran, Pemerintah Daerah paling banyak mengandalkan tiga sumber utama, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, penerimaan pinjaman Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran meningkat signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada 2024, yang mencapai lebih dari 105 (seratus lima) miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sisa anggaran dari tahun sebelumnya semakin dioptimalkan untuk menutup kekurangan anggaran. Sementara itu, penerimaan dari pinjaman Daerah tetap stabil selama tiga tahun berturut-turut di angka 150 (seratus lima puluh) miliar rupiah, menegaskan bahwa pinjaman Daerah menjadi komponen penting dalam pembiayaan defisit. Kondisi ini dapat menunjukkan keterbatasan atau pengetatan dalam memperoleh pembiayaan alternatif yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Ke depan, perlu ada diversifikasi sumber pembiayaan dan optimalisasi aset Daerah agar pengelolaan defisit menjadi lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan pinjaman Daerah.

2.2.2.3 Analisis Munculnya Utang Daerah

Menurunnya berbagai aktivitas pada masa pandemi berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial

dan ekonomi akibat pandemi ini. Kebijakan-kebijakan tersebut telah memberikan dampak bagi perekonomian Nasional. Kinerja keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami tekanan yang hebat akibat pandemi Covid-19. Kebijakan penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah berdampak pada realisasi anggaran Pendapatan Daerah yang tidak memenuhi target.

Selain kejadian pandemi Covid-19, keberadaan letak geografis Daerah yang sebagian besar wilayah pantainya berada pada zona merah rawan bencana tsunami, turut mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama pariwisata. Bagi Kabupaten/Kota yang menjadikan pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah, seperti Bali dan Pangandaran mengalami turbulensi Pendapatan Asli Daerah yang sangat hebat. Kombinasi isu Covid- 19 dan isu bencana tsunami tersebut berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisata secara signifikan.

Berawal dari peristiwa bencana tsunami yang melanda wilayah Pantai Anyer pada akhir 2019, diperkirakan lebih dari 95 (sembilan puluh lima) persen jadwal kunjungan wisata ke Pangandaran mengalami pembatalan pada momen natal dan tahun baru. Tahun 2019 juga dihadapkan pada kondisi tahapan awal Pilkada serentak tahun 2020, sehingga kebutuhan pendanaan Hibah Pilkada untuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tidak dapat dihindari untuk dimulai pada akhir tahun. Akibat penurunan pendapatan dan kebutuhan belanja tahun 2019, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019 mencatatkan munculnya utang Daerah. Pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun setelahnya terdapat berbagai fenomena yang menyebabkan munculnya utang lain, seperti refocusing akibat pandemi covid-19, percepatan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 dan lain sebagainya. Kondisi ini memberikan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perencanaan 5 (lima) tahun ke depan untuk menyelesaikan utang dimaksud.

Kondisi ini menimbulkan munculnya utang daerah atau defisit pada keuangan Daerah. Hingga tahun 2024 tercatat defisit yang terjadi mencapai lebih dari 300 (tiga ratus) miliar rupiah, sehingga diperlukan strategi untuk menyelesaikan utang tersebut.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Fungsi dari kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas total dari keuangan Daerah. Selain itu kerangka pendanaan juga berguna untuk mengetahui besaran anggaran untuk diatur mendanai belanja atau pengeluaran rutin wajib dan mengikat serta RPJMD Tahun 2025-2029. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengkalkulasi seluruh penerimaan Daerah. Perhitungan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan utang daerah yang ada hingga tahun 2024.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah adalah perkiraan jumlah penerimaan serta pengeluaran yang akan terjadi dalam satu periode anggaran berdasarkan data historis, tren ekonomi, serta kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah, serta pendapatan lainnya yang sah, sedangkan dana transfer meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil.

Di sisi lain, belanja Daerah mencakup pengeluaran yang digunakan untuk membiayai Program dan kegiatan pemerintahan Daerah guna

mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Belanja ini terbagi menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Belanja operasional digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, seperti gaji pegawai dan pemeliharaan aset, sementara belanja modal dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur dan aset jangka panjang. Proyeksi pendapatan dan belanja Daerah sangat penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena menentukan keseimbangan fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan proyeksi yang akurat, pemerintah Daerah dapat menghindari defisit anggaran yang berlebihan serta memastikan bahwa alokasi dana dilakukan secara efisien untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan proyeksi anggaran pendapatan belanja Daerah tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 149 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025-2030

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN DAERAH	1.468.742.704.000	1.575.975.986.000	1.607.083.906.000	1.641.779.765.000	1.677.432.634.000	1.714.617.969.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	396.662.601.000	418.713.138.000	438.968.430.000	461.255.933.000	485.103.564.000	510.365.609.000
4.1.01	Pajak Daerah	110.349.559.000	119.333.944.000	129.882.748.000	138.974.541.000	148.702.761.000	158.903.598.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000	1.507.301.000	1.543.088.000	1.622.475.000	1.736.050.000	1.857.571.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	525.000.000	653.141.000	659.141.000	665.230.000	701.097.000	750.173.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000	9.331.000	9.351.000	9.361.000	10.016.000	10.717.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	75.000.000	93.306.000	93.426.000	93.605.000	100.157.000	107.168.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.050.000.000	24.541.910.000	28.719.308.000	30.729.660.000	33.075.461.000	35.182.390.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11.970.000.000	13.991.609.000	14.011.910.000	15.111.230.000	15.984.991.000	17.103.941.000
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	54.403.750.000	57.182.484.000	61.496.998.000	65.758.988.000	70.362.117.000	75.287.465.000
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	13.811.467.000	14.233.069.000	16.109.813.000	17.237.499.000	18.444.124.000	19.735.213.000
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.206.842.000	7.121.793.000	7.239.713.000	7.746.493.000	8.288.748.000	8.868.960.000
4.1.02	Retribusi Daerah	162.982.521.000	176.021.123.000	185.554.567.000	198.543.387.000	212.441.423.000	227.312.323.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	123.590.521.000	133.477.763.000	140.498.551.000	150.333.450.000	160.856.791.000	172.116.766.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	39.392.000.000	42.543.360.000	45.056.016.000	48.209.937.000	51.584.632.000	55.195.557.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	820.000.000	828.200.000	830.528.000	888.665.000	950.871.000	970.871.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada badan Usaha Milik Daerah	820.000.000	828.200.000	830.528.000	888.665.000	950.871.000	970.871.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.510.521.000	122.529.871.000	122.700.587.000	122.849.340.000	123.008.509.000	123.178.817.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan	100.000.000	101.000.000	109.823.000	117.510.000	125.736.000	134.537.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000	50.500.000	54.912.000	58.755.000	62.868.000	67.269.000
4.1.04.05	Jasa Giro	1.100.000.000	1.111.000.000	1.208.047.000	1.292.610.000	1.383.093.000	1.479.909.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	150.000.000	151.500.000	164.734.000	176.265.000	188.604.000	201.806.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	35.000.000	35.350.000	38.438.000	41.129.000	44.008.000	47.089.000
4.1.04.16	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	120.575.521.000	120.575.521.000	120.575.521.000	120.575.521.000	120.575.521.000	120.575.521.000
4.1.04.23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	500.000.000	505.000.000	549.112.000	587.550.000	628.679.000	672.686.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.072.080.103.000	1.157.262.848.000	1.168.115.476.000	1.180.523.832.000	1.192.329.070.000	1.204.252.360.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	973.208.327.000	980.161.151.000	988.599.600.000	999.524.128.000	1.009.861.014.000	1.019.959.623.000
4.2.01.05	Dana Desa	98.830.876.000	99.819.185.000	100.017.377.000	101.825.551.000	102.843.806.000	103.872.244.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	60.937.516.000	61.546.892.000	62.162.361.000	62.783.984.000	63.411.824.000	64.045.942.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum	574.627.152.000	580.373.424.000	586.177.158.000	592.038.930.000	597.959.319.000	603.938.912.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	238.812.783.000	238.421.650.000	240.242.704.000	242.875.663.000	245.646.065.000	248.102.525.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.871.776.000	177.101.697.000	179.515.876.000	180.999.704.000	182.468.056.000	184.292.737.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	43.579.021.000	44.014.811.000	45.098.121.000	45.237.771.000	45.348.504.000	45.801.989.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	55.292.755.000	133.086.886.000	134.417.755.000	135.761.933.000	137.119.552.000	138.490.748.000
5	BELANJA DAERAH	1.898.742.704.000	1.522.047.414.000	1.542.123.893.000	1.565.261.070.000	1.638.045.877.000	1.668.652.463.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.297.695.288.000	1.202.640.048.000	1.203.580.443.000	1.208.991.177.000	1.215.182.913.000	1.218.779.128.000
5.1.01	Belanja Pegawai	603.616.776.000	594.860.554.000	596.476.242.000	598.585.682.000	602.070.207.000	606.609.392.000
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara	343.301.597.000	338.131.246.000	339.140.801.000	340.386.582.000	342.444.454.000	345.125.178.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara	216.863.409.000	213.597.290.000	214.149.375.000	214.936.021.000	216.235.459.000	217.928.201.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.086.409.000	19.783.894.000	19.835.029.000	19.907.890.000	20.028.247.000	20.185.033.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	272.853.000	268.744.000	269.438.000	270.428.000	272.063.000	274.193.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	871.638.000	858.510.000	860.729.000	863.891.000	869.114.000	875.917.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.01.99	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah	22.220.870.000	22.220.870.000	22.220.870.000	22.220.870.000	22.220.870.000	22.220.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.525.189.000	551.773.516.000	556.796.770.000	566.385.694.000	571.591.438.000	573.330.506.000
5.1.02.01	Belanja Barang	159.284.872.000	131.849.408.000	133.498.751.000	136.300.902.000	137.741.861.000	138.725.089.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	259.622.560.000	214.893.017.000	217.581.178.000	222.148.226.000	224.496.753.000	222.327.132.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29.600.684.000	24.500.877.000	24.807.366.000	25.328.074.000	25.595.840.000	25.778.548.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.753.877.000	22.991.920.000	23.259.617.000	23.747.838.000	23.998.898.000	24.170.207.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.276.502.000	1.077.666.000	1.091.147.000	1.105.554.000	1.114.451.000	1.155.419.000
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	46.521.323.000	32.793.713.000	32.875.187.000	33.868.984.000	34.607.058.000	36.709.034.000
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas	9.483.651.000	6.685.195.000	6.701.804.000	6.904.396.000	7.054.857.000	7.483.357.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah	116.981.720.000	116.981.720.000	116.981.720.000	116.981.720.000	116.981.720.000	116.981.720.000
5.1.03	Belanja Bunga	12.250.000.000	33.846.429.000	28.000.028.000	21.113.345.000	17.568.537.000	13.431.642.000
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	12.250.000.000	33.846.429.000	28.000.028.000	21.113.345.000	17.568.537.000	13.431.642.000
5.1.05	Belanja Hibah	28.410.824.000	20.110.299.000	20.242.789.000	20.790.012.000	21.739.617.000	23.060.052.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.377.874.000	10.187.179.000	10.263.553.000	10.521.210.000	11.001.778.000	11.670.010.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah	3.306.979.000	2.343.099.000	2.360.665.000	2.419.927.000	2.530.459.000	2.684.156.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.320.598.000	916.016.000	938.010.000	966.365.000	1.010.505.000	1.071.882.000
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	9.405.373.000	6.664.005.000	6.680.561.000	6.882.510.000	7.196.875.000	7.634.004.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.892.499.000	2.049.250.000	2.064.614.000	2.116.444.000	2.213.114.000	2.347.536.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.662.041.000	1.177.507.000	1.186.335.000	1.216.117.000	1.271.664.000	1.348.903.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.230.458.000	871.743.000	878.279.000	900.327.000	941.450.000	998.633.000
5.2	BELANJA MODAL	385.764.614.000	225.179.022.000	242.899.356.000	259.087.732.000	317.386.328.000	314.585.125.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.363.735.000	769.460.000	968.558.000	997.837.000	9.954.195.000	10.463.198.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.363.735.000	769.460.000	968.558.000	997.837.000	9.954.195.000	10.463.198.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.286.100.000	140.212.415.000	149.394.568.000	151.383.761.000	154.593.480.000	145.778.200.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.756.272.000	1.092.770.000	1.167.202.000	1.182.613.000	1.207.520.000	1.134.552.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.152.576.000	1.961.564.000	2.095.173.000	2.122.836.000	2.167.546.000	2.036.564.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	152.012.000	94.584.000	101.026.000	102.360.000	104.516.000	98.200.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	147.912.794.000	92.032.771.000	98.301.448.000	99.599.369.000	101.697.061.000	95.551.657.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	871.998.000	542.566.000	579.378.000	587.028.000	599.392.000	563.171.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.245.065.000	10.107.837.000	10.793.641.000	10.936.155.000	11.166.485.000	10.491.710.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	623.482.000	387.936.000	414.257.000	419.727.000	428.567.000	402.669.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.057.667.000	23.057.639.000	24.622.072.000	24.947.169.000	25.472.589.000	23.933.317.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	356.528.000	221.835.000	236.866.000	239.993.000	245.048.000	230.240.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	3.247.039.000	2.020.339.000	2.157.227.000	2.185.710.000	2.231.744.000	2.096.883.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	5.373.641.000	3.343.531.000	3.570.071.000	3.617.209.000	3.693.392.000	3.470.206.000
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	4.071.550.000	2.883.567.000	2.890.731.000	2.978.116.000	3.114.144.000	3.303.555.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah	2.465.476.000	2.465.476.000	2.465.476.000	2.465.476.000	2.465.476.000	2.465.476.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.481.766.000	42.177.039.000	46.190.034.000	57.614.780.000	71.371.789.000	75.398.721.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	95.919.299.000	41.444.212.000	45.080.748.000	56.471.961.000	70.176.770.000	74.083.324.000
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	1.562.467.000	732.827.000	1.109.286.000	1.142.819.000	1.195.019.000	1.315.397.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.958.686.000	36.409.834.000	40.741.960.000	43.481.937.000	75.849.384.000	77.318.280.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	30.554.668.000	20.286.457.000	24.087.416.000	26.084.663.000	49.612.454.000	49.950.579.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	12.041.769.000	6.812.991.000	7.027.104.000	7.401.862.000	12.596.257.000	13.202.122.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	11.684.843.000	6.576.014.000	6.888.131.000	7.255.477.000	10.894.539.000	11.418.553.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	949.832.000	6.798.000	11.735.000	12.360.000	18.560.000	19.452.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Badan Layanan Umum Daerah	2.727.574.000	2.727.574.000	2.727.574.000	2.727.575.000	2.727.574.000	2.727.574.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	241.452.000	177.399.000	171.361.000	176.542.000	184.605.000	193.851.000
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	17.838.000	19.091.000	12.660.000	13.043.000	13.638.000	14.468.000
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	223.614.000	158.308.000	158.701.000	163.499.000	170.967.000	179.383.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya Badan	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000	5.432.875.000

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Layanan Umum Daerah						
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.392.279.000	10.116.199.000	10.674.375.000	11.265.976.000	15.615.164.000	16.490.102.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.392.279.000	10.116.199.000	10.674.375.000	11.265.976.000	15.615.164.000	16.490.102.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	19.392.279.000	10.116.199.000	10.674.375.000	11.265.976.000	15.615.164.000	16.490.102.000
5.4	BELANJA TRANSFER	195.890.523.000	84.112.145.000	84.969.719.000	85.916.185.000	89.861.472.000	118.798.108.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.015.792.000	13.897.179.000	13.946.818.000	14.026.766.000	14.299.042.000	19.208.193.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	11.569.621.000	10.039.155.000	10.078.601.000	10.117.884.000	10.309.882.000	13.600.618.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.446.171.000	3.858.024.000	3.868.217.000	3.908.882.000	3.989.160.000	5.607.575.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	179.874.731.000	70.214.966.000	71.022.901.000	71.889.419.000	75.562.430.000	99.589.915.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	179.874.731.000	70.214.966.000	71.022.901.000	71.889.419.000	75.562.430.000	99.589.915.000
	Total Surplus/(Defisit)	-430.000.000.000	53.928.572.000	64.960.013.000	76.518.695.000	39.386.757.000	45.965.506.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.000.000.000	0	0	0	0	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan	0	0	0	0	0	0

KODE	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Anggaran Tahun Sebelumnya						
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya		0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	440.000.000.000	0	0	0	0	0
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	440.000.000.000	0	0	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	53.928.572.000	64.960.013.000	76.518.695.000	39.386.757.000	45.965.506.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.000.000.000	53.928.572.000	64.960.013.000	76.518.695.000	39.386.757.000	45.965.506.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	10.000.000.000	53.928.572.000	64.960.013.000	76.518.695.000	39.386.757.000	45.965.506.000
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
6.2.05.01	Pinjaman melalui Badan Layanan Umum Daerah		0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	430.000.000.000	-53.928.572.000	-64.960.013.000	-76.518.695.000	-39.386.757.000	-45.965.506.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel di atas menunjukkan potensi dan proyeksi keuangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025-2029. Perhitungan pada tabel diatas dilakukan dengan mempertimbangkan beban pengeluaran pembiayaan setiap tahunnya. Sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan pada tahun 2025-2029 dalam tabel proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di atas menggunakan sumber pendapatan yang biasa ada dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik itu Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, maupun pendapatan lain-lain yang sah. Mengingat beban defisit yang harus ditutup setiap tahunnya, maka pembiayaan inovatif menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam Pembangunan Daerah. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang menggunakan sumber pembiayaan inovatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, *Corporate Social Responsibility*, pinjaman infrastruktur, produk ekonomi syariah, dan sebagainya direncanakan secara terpisah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan arah kebijakan Pembangunan Daerah.

2.2.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Makna Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam hal ini bisa memiliki makna ganda yaitu antara positif atau negatif. Bermakna positif Jika Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga terjadi *over target* dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran bermakna negatif bila berasal dari tertundanya belanja langsung Program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kapasitas riil kemampuan keuangan Daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan Daerah yang digunakan untuk pembangunan.

Tabel 2. 150 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.468.742.704.000	1.575.975.986.000	1.607.083.906.000	1.641.779.765.000	1.677.432.634.000	1.714.617.969.000
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0	0	0		0	0
	Total penerimaan	1.468.742.704.000	1.575.975.986.000	1.607.083.906.000	1.641.779.765.000	1.677.432.634.000	1.714.617.969.000
	Dikurangi:						
4	Belanja Pegawai	603.616.776.000	594.860.554.000	596.476.242.000	598.585.682.000	602.070.207.000	606.609.392.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	53.928.572.000,00	64.960.013.000,00	76.518.695.000,00	39.386.757.000,00	45.965.506.000,00
6	Belanja Bunga	12.250.000.000,00	33.846.429.000,00	28.000.028.000,00	21.113.345.000,00	17.568.537.000,00	13.431.642.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	842.875.928.000	893.340.431.000	917.647.623.000	945.562.043.000	1.018.407.133.000	1.048.611.429.000

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah, 2025

Kapasitas riil keuangan Daerah merupakan acuan dasar bagi pemerintah Daerah untuk memperlihatkan anggaran yang ada yang bisa dimanfaatkan dalam belanja Daerah setelah dikurangi dengan kewajiban. Perhitungan kapasitas riil adalah menjumlah pendapatan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan pencairan dana cadangan yang selanjutnya dikurangi pos pengeluaran yang terdiri dari belanja operasi dan pengeluaran pembiayaan Daerah. Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa kapasitas riil Daerah Tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 mengalami peningkatan yang cukup konstan meskipun dengan nilai yang tidak begitu besar. Semakin besar kapasitas riil keuangan suatu Daerah menunjukkan semakin besar pula kemampuan Daerah dalam melaksanakan Program dan kegiatan.

Salah satu faktor pengurang dari kapasitas riil keuangan daerah adalah belanja pegawai yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, secara ideal maksimal belanja pegawai dialokasikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total belanja. Pada kerangka pendanaan daerah tahun 2025-2029 alokasi belanja pegawai melebihi batas ideal, hal ini terjadi karena jumlah pegawai yang cenderung tetap, tetapi pendapatan daerah perlu dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan yakni untuk menutupi defisit fiskal yang ada. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini yakni melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya termasuk melalui pembiayaan inovatif untuk pembangunan. Dengan demikian dalam hitungan real persentase belanja pegawai akan terkurangi dari tambahan pendapatan daerah. Selain itu penguatan peran tim anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pengendalian belanja pegawai mulai dari proses perencanaan, pembangunan, hingga evaluasi menjadi salah satu cara untuk memastikan alokasi yang ada digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu dalam pengendalian belanja pegawai dalam pelaksanaan pengadaan pegawai harus difokuskan hanya pada formasi yang benar-benar strategis dan dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta mengutamakan redistribusi dan optimalisasi penempatan ASN sesuai kompetensi agar mengurangi kebutuhan rekrutmen baru yang tidak mendesak.

Kapasitas riil keuangan pemerintah Daerah secara umum digunakan untuk pendanaan prioritas pembangunan. Prioritas tersebut akan mendukung dan mewujudkan Visi, Misi, dan janji politik bupati terpilih. Sehingga perwujudan Visi dan keadaan ideal Daerah dapat terwujud di akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029 yang akan berakhir pada tahun 2029.

Tabel 2. 151 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	842.875.928.000	893.340.431.000	917.647.623.000	945.562.043.000	1.018.407.133.000	1.048.611.429.000
Prioritas I (60%)		505.725.556.800	536.004.258.600	550.588.573.800	567.337.225.800	611.044.279.800	629.166.857.400
Prioritas II (40%)		337.150.371.200	357.336.172.400	367.059.049.200	378.224.817.200	407.362.853.200	419.444.571.600

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah, diolah, 2025

Kapasitas riil Daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 2 (dua) kelompok prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur di dalam peraturan Perundang-undangan, antara lain:
   a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 (sepuluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
   c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur Daerah minimal 25 (dua puluh lima) persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan;
   d. Belanja Moda Transportasi, besarannya 10 (sepuluh) persen dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 (tujuh puluh) persen untuk bagi hasil Kabupaten/Kota, 30 (tiga puluh) persen hak provinsi dengan komposisi : 50 (lima puluh) persen specific grant dan 50 (lima puluh) persen block grant, dari yang 50 (lima puluh) persen specific grant, 75 (tujuh puluh lima) persen untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok. Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Sedangkan Belanja Mengikat atau *Mandatory Expenditure*, digunakan untuk sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

   Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;

2) Belanja jaminan kesehatan nasional, yang bersumber dari pajak rokok;
3) Belanja dana alokasi khusus Biaya Operasional Sekolah;
4) Belanja operasional kantor; dan
5) Belanja Fungsional.

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil juga digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2025–2029

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara Kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan dilakukan melalui proses identifikasi berdasarkan data dan capaian terhadap target, serta penjaringan yang dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Tujuan dari perumusan permasalahan Pembangunan Daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan Kinerja Pembangunan Daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Permasalahan Pembangunan Daerah dikatagorikan berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.3.1.1 Permasalahan Aspek Geografis dan Demografi

Permasalahan aspek geografis dan demografi yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung, belum tercapainya kemandirian pangan, penurunan kualitas lingkungan hidup, daerah rawan bencana bencana dan perubahan iklim serta ancaman kesenjangan sosial dan ekonomi akibat bonus demografi.

A. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung

Penurunan kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah mencakup aspek ketersediaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air, lahan, serta pangan. Sebagai Daerah yang memiliki aktivitas pertanian dan pariwisata yang tinggi, pengelolaan sumber daya air menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas ekosistem serta menjamin pasokan bagi sektor pertanian, industri, dan rumah tangga.

Dari segi daya dukung pangan secara keseluruhan, Daerah masih berada dalam status "Belum Terlampaui," artinya ketersediaan pangan masih mencukupi kebutuhan. Namun, terdapat ketimpangan antar-kecamatan, seperti di Kecamatan Cimerak dan Padaherang, di mana kebutuhan pangan telah melampaui ketersediaan, sehingga berpotensi menghadapi defisit pangan. Jika tidak ada langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan, ketimpangan ini dapat meluas ke wilayah lain, terutama dengan meningkatnya kebutuhan pangan setiap tahun.

Daya dukung dan daya tampung lahan penyedia air menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan air masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, terdapat ketimpangan distribusi air di tingkat kecamatan. Dari sepuluh kecamatan yang ada, delapan kecamatan masih dalam kategori "Belum Terlampaui," sedangkan dua kecamatan dalam kategori "Terlampaui." Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi krisis air di kedua kecamatan tersebut jika tidak dilakukan pengelolaan yang lebih baik.

B. Belum Tercapainya Kemandirian Pangan

Permasalahan utama yang dihadapi dalam kemandirian pangan meliputi ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan keberlanjutan sumber daya pangan. Dari segi ketersediaan pangan, produksi pangan lokal masih belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga masih bergantung pada pasokan dari luar Daerah. Faktor seperti perubahan iklim, banjir, dan kekeringan juga mempengaruhi hasil pertanian dan perikanan, yang menjadi sektor utama penyedia pangan di wilayah ini. Dalam aspek akses pangan, kendala utama adalah daya beli masyarakat yang masih rendah, serta infrastruktur distribusi yang belum optimal.

Permasalahan pemanfaatan pangan juga menjadi perhatian, dengan masih adanya kasus stunting akibat pola konsumsi yang kurang beragam serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang. Konsumsi pangan masih didominasi oleh beras, sementara asupan protein dan sayuran masih terbatas.

C. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada 5 (lima) tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan yang mengindikasikan adanya permasalahan serius terhadap lingkungan hidup. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari beberapa faktor utama yaitu peningkatan degradasi lingkungan hal ini dapat dilihat pada Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 dengan nilai 34 (tiga puluh empat) yang menunjukan adanya pencemaran serius pada sumberdaya air. Adanya penurunan Indeks Tutupan Lahan walaupun tidak secara signifikan akan tetapi mengindikasikan bahwa adanya alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun.

Selain permasalahan diatas, aspek lingkungan hidup menghadapi permasalahan terkait pengelolaan persampahan. Produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya sedangkan persentase sampah yang tertangani masih di bawah 50 (lima puluh) persen yang artinya masih banyak sampah yg belum bisa tertangani, hal ini berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, meningkatnya risiko penyakit, dan menurunnya daya tarik wisata. Cakupan area pelayanan sampah masih rendah hanya bisa melayani 30,94 (tiga puluh koma sembilan empat) persen dari luas area pelayanan pengelolaan sampah. Hal-hal diatas disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur persampahan yang masih belum optimal sepertinya Tempat Pembuangan Akhir yang dimiliki belum memenuhi standar karena masih open dumping, masih kurangnya armada pengangkut sampah.

Permasalahan dari aspek sanitasi permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya sarana prasarana pengolahan limbah terpadu, sehingga limbah domestik dan industri masih banyak yang langsung dibuang ke sungai, hal ini juga berkontribusi pada nilai Indeks Kualitas Air yang semakin menurun karena pencemaran air semakin meningkat.

D. Daerah Rawan Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana Daerah berada dalam kategori risiko tinggi, yang diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Peningkatan ancaman bahaya, posisi geografis Daerah berada pada zona *megathrust* Lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang terus bergerak dan memiliki potensi gempa bumi besar serta tsunami dan

ancaman perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan.

2. Peningkatan kerentanan, pertumbuhan penduduk di wilayah rawan bencana meningkatkan risiko karena akan lebih banyak masyarakat terdampak dan perkembangan permukiman di wilayah rawan, termasuk di pesisir yang rentan terhadap tsunami dan Daerah perbukitan yang rentan longsor.
3. Kapasitas mitigasi dan respons yang belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur mitigasi bencana, sumber daya manusia terkait penanggulangan bencana masih terbatas dan masih kurangnya edukasi serta pelatihan kebencanaan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. selain itu masih kurang optimalnya upaya dalam menurunkan efek Gas Rumah Kaca.

E. Ancaman Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Akibat Bonus Demografi

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2025-2029 akan adanya bonus demografi karena usia produktif yakni penduduk usia 15 (lima belas) - 64 (enam puluh empat) tahun mendominasi yang dapat menjadi keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi jika terserap ke dalam lapangan kerja. Bonus demografi dan peningkatan penduduk ini perlu diimbangi dengan perencanaan yang baik dalam berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, jika tidak dikelola dengan baik maka dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang diantaranya:

1. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja, mayoritas penduduk berada pada usia produktif tetapi jika peluang kerja tidak tersedia maka angka pengangguran akan meningkat.
2. Potensi ledakan pengangguran, jika pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan jumlah tenaga kerja maka akan terjadi surplus tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar. Hal ini berisiko meningkatkan angka kemiskinan dan kriminalitas
3. Kesenjangan keterampilan yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Pergeseran ke arah digitalisasi dan otomatisasi juga menuntut keterampilan baru yang belum dimiliki sebagian besar tenaga kerja
4. Peningkatan beban sosial dan infrastruktur, dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, kebutuhan akan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga meningkat. Jika infrastruktur tidak berkembang dengan baik, dapat terjadi kesenjangan akses dan pelayanan publik.
5. Ancaman terhadap sumber daya alam dan lingkungan, peningkatan penduduk dan bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik dapat mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan permasalahan lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan krisis air bersih.
6. Meningkatnya ketimpangan ekonomi, jika hanya kelompok tertentu yang mendapatkan manfaat dari bonus demografi, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat semakin lebar. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang.

2.3.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan aspek kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kesejahteraan masih rendah, belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pemerataan pendidikan belum optimal, akses

layanan sosial belum optimal, literasi keagamaan dan pemajuan kebudayaan belum optimal, dan ketimpangan gender.

A. Tingkat Kesejahteraan Masih Rendah

Tingkat kesejahteraan Daerah masih rendah diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat kemiskinan masih tinggi, terbatasnya diverifikasi ekonomi, kontribusi sektor ekonomi belum belum memberikan kontribusi optimal terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia belum merata dan Tingkat Pengangguran Terbuka kecil akan tetapi berbanding terbalik dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah. Adapun permasalahan tersebut berdasarkan pada indikator di bawah ini.

1. Tingkat Kemiskinan
   Permasalahan utama belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 secara inklusif. Berdasarkan data tingkat kemiskinan tahun 2024 yaitu 8,75 (delapan koma tujuh puluh lima) persen, meskipun angka kemiskinan mulai menurun sejak 2022, tingkat kemiskinan pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan. Ketimpangan akses terhadap pekerjaan yang layak serta dominasi sektor informal dengan pendapatan tidak stabil menjadi faktor utama yang menghambat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Selain itu, efektivitas Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas dan merata.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
   Laju pertumbuhan ekonomi Daerah dalam periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Penurunan drastis pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 mengindikasikan tingginya kerentanan struktur ekonomi Daerah terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan pada sektor pariwisata dan terbatasnya diversifikasi ekonomi menjadikan kondisi ekonomi yang sangat rentan ketika terjadi krisis global atau nasional. Pemulihan ekonomi Daerah sebagian besar masih ditopang oleh sektor pariwisata dan stimulus dari pemerintah pusat dan Daerah. Hal ini menunjukkan kurangnya diversifikasi sektor ekonomi, sehingga jika salah satu sektor terganggu, maka dampaknya sangat besar terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024 perlambatan kembali terjadi dipicu oleh naiknya inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta tekanan ekonomi global yang berimbas pada daya beli masyarakat dan stabilitas harga.

3. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
   Permasalahan utama Produk Domestik Regional Bruto per kapita adalah masih rendahnya nilai rata-rata pendapatan per individu dibandingkan dengan Daerah lain di Jawa Barat. Hal ini mencerminkan produktivitas ekonomi yang belum optimal, terutama di sektor-sektor unggulan. Rendahnya Produk Domestik Regional Bruto per kapita mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas.

4. Indeks Pembangunan Manusia
   Permasalahan utama Indeks Pembangunan Manusia adalah masih rendahnya kualitas dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat dari tahun ke tahun, nilainya masih berada di kategori sedang dan

tertinggal dibandingkan rata-rata provinsi dan kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga medis dan pengajar berkualitas serta tingginya tingkat kemiskinan, yang berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan akses terhadap layanan dasar.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah rendah, yang secara umum mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja telah terserap dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan data tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,58 (satu koma lima puluh delapan) persen dan Pengeluaran Per Kapita sebesar Rp9.654.000 (sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat masih rendah jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat bekerja, banyak yang terserap di sektor informal atau pekerjaan berproduktivitas rendah, seperti buruh tani, pedagang kecil, nelayan tradisional, atau pelaku usaha mikro tanpa akses permodalan. Jenis pekerjaan ini tidak menjamin kestabilan pendapatan, upah yang layak, atau perlindungan sosial Dengan demikian, rendahnya tingkat pengangguran belum mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan daerah bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas dan produktivitas pekerjaan, serta memperluas akses terhadap sektor ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

B. Belum Optimalnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Permasalahan kesehatan mencakup beberapa aspek utama, seperti belum optimalnya akses terhadap pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang belum merata, serta kualitas fasilitas kesehatan yang belum optimal. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam infrastruktur kesehatan, masih terdapat permasalahan dalam pemerataan layanan, terutama di Daerah yang jauh dari pusat kegiatan. Selain itu, angka stunting dan gizi buruk masih menjadi perhatian, yang disebabkan oleh pola makan yang kurang seimbang serta akses terbatas terhadap pangan bergizi. Penyakit menular dan tidak menular juga menjadi tantangan, dengan meningkatnya kasus penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes akibat pola hidup yang kurang sehat. Di sisi lain, cakupan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ada kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan medis.

C. Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Belum Optimal

Permasalahan pendidikan mencakup kualitas dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah sekolah dan fasilitas pendidikan, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses, kualitas guru, serta sarana dan prasarana pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di Daerah terpencil yang sering mengalami kekurangan guru. Selain itu, tingkat partisipasi sekolah masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, di mana anak- anak dari keluarga

kurang mampu lebih rentan putus sekolah atau mengalami keterlambatan dalam pendidikan. Kualitas pembelajaran juga menjadi perhatian, dengan masih rendahnya tingkat literasi dan numerasi di beberapa wilayah. Kurangnya akses terhadap teknologi pendidikan dan sumber belajar yang memadai juga menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan melalui berbagai Program bantuan, seperti beasiswa dan peningkatan infrastruktur sekolah

D. Akses Layanan Sosial Belum Optimal

Permasalahan sosial mencakup berbagai tantangan dalam menciptakan masyarakat yang tangguh dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. Ketimpangan sosial masih menjadi isu utama, terutama dalam akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi menyebabkan sebagian masyarakat masih bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Selain itu, posisi geografis dengan wilayah pesisir menghadapi risiko bencana alam dan perubahan iklim yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi membawa perubahan dalam pola kehidupan dan nilai-nilai budaya lokal. Modernisasi yang cepat menuntut masyarakat untuk menyesuaikan diri, tetapi juga dapat menyebabkan pergeseran budaya dan solidaritas sosial. Pemerintah Daerah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program sosial dan pemberdayaan ekonomi. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa Program tersebut dapat berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin

E. Literasi Keagamaan dan Pemajuan Kebudayaan Belum Optimal

Daerah memiliki potensi dalam aspek keagamaan dan kebudayaan, namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan di atas dari aspek keagamaan masih diperlukan peningkatan literasi keagamaan yang inklusif untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, beberapa rumah ibadah masih mengalami keterbatasan dalam hal renovasi dan fasilitas pendukungnya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan cukup aktif akan tetap partisipasi generasi muda dalam kegiatan keagamaan masih kurang optimal sehingga perlu adanya inovasi dalam pendekataan dakwah agar lebih menarik dan relevan bagi anak muda.

Dari aspek kebudayaan untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami ketidakstabilan jumlah kegiatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pendanaan, partisipasi masyarakat, atau kebijakan Pemerintah Daerah yang belum konsisten dalam mendukung keberlangsungan festival. Ketidakkonsistenan ini dapat berdampak pada efektivitas promosi budaya serta pengembangan sektor pariwisata. Selain permasalahan diatas terkait kebudayaan dihadapkan pada kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya, modernisasi menyebabkan banyak generasi muda kurang tertarik dengan budaya Daerah mereka sendiri, serta potensi budaya belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata utama dan masih kurangnya event budaya yang bisa dikembangkan sebagai bagian dari strategi promosi pariwisata berkelanjutan.

F. Ketimpangan Gender

Permasalahan dalam ketimpangan gender dapat dilihat berdasarkan Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2024 sebesar 0.415 (kosong koma empat satu lima), ketimpangan gender masih cukup tinggi hal ini dapat disebabkan oleh akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan masih rendah. Berdasarkan partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2022, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sangat rendah yakni kurang dari 30 (tiga puluh) persen, yang mencerminkan adanya hambatan struktural seperti tanggung jawab domestik, akses ke pekerjaan yang layak, dan diskriminasi gender dalam dunia kerja. Lonjakan signifikan di tahun 2023 sebesar 70,98 (tujuh puluh koma sembilan delapan) persen yang bisa disebabkan oleh perubahan kebijakan, meningkatnya peluang kerja bagi perempuan, atau pergeseran sosial-ekonomi akan tetapi lonjakan tersebut apakah bersifat berkelanjutan atau hanya fenomena sementara akibat kondisi tertentu, jika hanya fenomena sementara maka permasalahan utama seperti kesenjangan upah, akses ke sektor formal, dan perlindungan tenaga kerja perempuan tetap menjadi tantangan besar.

2.3.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah lima tahun terakhir daya saing Daerah masih dalam kategori menengah yang mencerminkan belum optimalnya kemampuan daerah dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing Daerah ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sumber daya manusia, dan aspek infrastruktur. Permasalahan aspek daya saing Daerah yang dihadapi saat ini diuraikan pada sub bab dibawah ini.

A. Permasalahan Daya Saing Ekonomi

Permasalahan daya saing ekonomi Daerah yaitu meliputi masih rendahnya pendapatan perkapita, masih rendahnya pendapatan daerah, dan produktivitas ekonomi belum optimal.

1. Rendahnya Pendapatan Perkapita

   Pendapatan per kapita Daerah pada tahun terakhir tercatat sebesar Rp 35,65 juta per kapita per tahun. Angka ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat serta rata-rata nasional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa produktivitas perekonomian Daerah masih relatif rendah dan berdampak pada daya beli masyarakat yang cenderung rendah, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kerentanan terhadap kemiskinan

2. Kontribusi Sektor Ekonomi Belum Optimal

   Berdasarkan kontribusi Sektor industri masih memiliki kontribusi yang relatif stagnan terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri, terutama industri pengolahan, belum berkembang secara optimal. Daerah masih sangat bergantung pada sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan. Keterbatasan infrastruktur, minimnya investasi, serta kurangnya inovasi dalam industri pengolahan menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan sektor ini.
   Sebagai Daerah wisata, sektor akomodasi, makan, dan minum berperan

penting dalam perekonomian wilayah. Kontribusi sektor ini dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan akan tetapi pertumbuhannya masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pariwisata, pandemi, dan daya beli wisatawan.
Sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren pertumbuhan dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha kreatif akan tetapi permasalahan utama yang dihadapi dalam sektor ini adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan, permodalan, serta pemasaran yang efektif. Jika tidak ditangani dengan baik, pertumbuhan sektor ini dapat terhambat dan tidak berkontribusi optimal terhadap perekonomian Daerah.

3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Belum Optimal

Penerapan ekonomi hijau menghadapi berbagai tantangan meskipun telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi ekonomi hijau diantaranya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami penurunan signifikan yang mengindikasikan adanya degradasi lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya aktivitas wisata, pengelolaan limbah yang belum optimal, serta eksploitasi sumber daya alam yang kurang memperhatikan prinsip keberlanjutan. Selain itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan juga menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis yang mengindikasikan adanya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, termasuk konversi lahan hijau menjadi kawasan pemukiman. Selain aspek lingkungan, tantangan lain dalam penerapan ekonomi hijau adalah minimnya infrastruktur ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan. Partisipasi masyarakat dalam Program ekonomi hijau juga masih terbatas, karena kesadaran akan pentingnya keberlanjutan belum sepenuhnya merata, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.
sedangkan untuk penerapan ekonomi biru menghadapi beberapa tantangan yang menghambat pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan utama pencemaran air laut akibat sampah dan limbah dari aktivitas wisata dan aktivitas perumahan dan permukiman masyarakat di wilayah pesisir pantai yang turut mengancam kelestarian lingkungan pesisir.
Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan akses terhadap teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan membuat pelaku usaha perikanan dan wisata bahari sulit menerapkan praktik berkelanjutan serta kurangnya akses permodalan bagi nelayan dan pelaku ekonomi berbasis kelautan sehingga membatasi inovasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek konservasi dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

B. Permasalahan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia Daerah tergolong masih rendah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Rendah

Daya saing sumber daya manusia masih rendah dilihat dari beberapa indikator salah satunya rasio lulusan S1/S2/S3 yang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, meskipun tren lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah minimnya lulusan S3, kesenjangan antara lulusan S1

dan S2/S3, serta tantangan dalam ketidakmerataan akses dan keterjangkauan pendidikan tinggi. Hal tersebut dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang mendapatkan kemudahan akses pendidikan dengan yang tidak mendapatkan.

2. Angka Ketergantungan Masih Tinggi
   Permasalahan daya saing Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari angka ketergantungan. Angka ketergantungan menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, rasio ketergantungan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022, sebelum sedikit menurun pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia tidak produktif masih cukup besar. Peningkatan rasio ketergantungan dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk usia tidak produktif, baik dari kelompok anak-anak maupun lansia, yang berdampak pada tingginya kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Selain itu, jika tren ini terus berlanjut, maka potensi bonus demografi dapat terancam karena penduduk usia produktif harus menanggung beban ekonomi yang lebih besar.
3. Kurangnya Literasi Masyarakat
   Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kurangnya literasi masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akses yang terbatas terhadap sumber daya pendidikan yang berkualitas, kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai, dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang dapat mempengaruhi dukungan terhadap pembelajaran anak-anak. Faktor-faktor ini diperburuk dengan ketidakmerataan distribusi pendidikan antara wilayah pusat kota dan pedesaan, serta kurangnya program literasi yang efektif dan terintegrasi dalam kebijakan pendidikan. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses dan dukungan yang memadai mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan literasi yang penting, menghambat kemampuan untuk memahami informasi, berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, dan memanfaatkan peluang ekonomi.

C. Permasalahan Daya Saing Infrastruktur

Permasalahan daya saing infrastruktur Daerah yaitu terkait aksesibilitas wilayah dan konektivitas wilayah yang masih belum optimal serta masih rendahnya pemenuhan infrastruktur perumahan dan permukiman.

1. Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah Belum Optimal

   Aksesibilitas wilayah masih belum optimal hal ini dilihat dari sarana prasarana transportasi yang belum memadai dan masih terbatasnya pilihan moda transportasi masal yang bisa menjangkau semua wilayah dan akses dari Kabupaten Kota lain menuju Daerah juga masih sangat terbatas.

   Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Aksesibilitas wilayah yang sulit sering menimbulkan berbagai tantangan yang mempengaruhi pengembangan sosial dan ekonomi. Salah satu dampak utama adalah terbatasnya peluang ekonomi, karena kesulitan akses menghambat pergerakan barang dan jasa, serta memperlambat pertumbuhan bisnis dan investasi di wilayah tersebut. Ini juga

berdampak pada ketidakmampuan akses ke layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum, yang dapat memperburuk kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, aksesibilitas yang buruk dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, dengan daerah terpencil seringkali tertinggal dibandingkan dengan kawasan yang lebih berkembang. Hal ini juga meningkatkan biaya logistik untuk distribusi barang dan bahan baku, yang berdampak pada harga barang dan efisiensi pasar.

2. Terbatasnya Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman masih terbatas salah satunya infrastruktur persampahan sampai saat Tempat Pembuangan Akhir Sampah masih *open dumping*, belum tersedianya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah, belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal maupun kawasan, serta masih terbatasnya Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan pariwisata.

D. Permasalahan Daya Saing Iklim Investasi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah permasalahan daya saing iklim investasi Daerah meliputi realisasi investasi dan ketentraman ketertiban. Belum optimalnya realisasi investasi, hal ini disebabkan oleh pengembangan iklim investasi yang kurang kondusif, promosi investasi yang belum optimal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal yang kurang optimal, dan belum adanya sistem informasi terintegrasi. Belum optimalnya realisasi investasi dapat mengakibatkan berbagai masalah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Seperti halnya menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang tidak optimal berarti kurangnya modal untuk proyek-proyek penting yang dapat mendorong ekspansi industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, penurunan daya saing dapat terjadi karena kurangnya investasi dalam inovasi dan teknologi, yang dapat membuat suatu wilayah atau negara tertinggal dibandingkan dengan pesaing global.

Belum optimalnya kerjasama pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, hal ini dapat menyebabkan dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang mempengaruhi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, peningkatan tingkat kejahatan dan gangguan keamanan dapat terjadi akibat koordinasi yang kurang antara lembaga-lembaga penegak hukum dan instansi terkait, yang mengakibatkan respons yang lambat dan kurang efektif terhadap insiden. Selain itu, kurangnya koordinasi dapat menghambat implementasi kebijakan keamanan yang menyeluruh, membuat upaya pencegahan kejahatan dan penanganan situasi darurat menjadi kurang terkoordinasi. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan keamanan, karena masyarakat akan merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atau tidak melihat tindakan nyata dalam mengatasi masalah keamanan.

2.3.1.4 Permaslahan Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan aspek pelayanan umum meliputi belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, belum optimalnya inovasi

daerah, penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal, dan defisit fiskla Daerah.

A. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Berintegritas

Pada aspek ini permasalahan yang dihadapi dalam beberapa tahun kebelakang adalah pada aspek integritas, berdasarkan Indek Integritas Nasional Daerah masih dalam kategori rentan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya belum optimalnya pengawasan internal, belum optimalnya transparansi dan partisipasi publik mengenai kebijakan pemerintah, penerapan regulasi pencegahan korupsi yang belum maksimal, serta budaya integritas yang belum kuat.

Berdasarkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah masih dalam kategori sedang, beberapa faktor penyebabnya adalah ketidaksesuaian dalam perencanaan penganggaran, efektivitas penyerapan anggaran yang kurang optimal, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah, evaluasi pengawasan yang belum optimal, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Daerah. Selain hal tersebut diatas, telah terjadi defisit anggaran yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, defisit anggaran yang sebagian besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang mengurangi Pendapatan Asli Daerah serta perencanaan anggaran yang kurang optimal selama beberapa tahun terakhir, di mana anggaran belanja tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.

B. Belum Optimalnya Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah sempat mengalami penurunan pada 2022, sehingga dikategorikan sebagai Daerah "Kurang Inovatif". Indeks inovasi meningkat menjadi kategori "Inovatif" pada 2023 dan 2024, akan tetapi pelaksanaan inovasi Daerah belum optimal karena tidak terlalu berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu ditingkatkan kembali dari segi kebermanfaatan untuk masyarakat maupun untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

C. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Belum Optimal

Permasalahan Implementasi *e-Government* yaitu masih kurangnya pemahaman sumber daya manusia serta belum meratanya penerapan standar keamanan siber yang berpotensi menghambat efisiensi pelayanan publik. Selain itu, penerapan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah masih rendah menunjukkan rendahnya kesadaran akan perlindungan data. Permasalahan lainnya terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sarana prasarana yang belum memadai sera serta dukungan Sumber Daya yang masih rendah.

D. Defisit Fiskal Daerah

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah saat ini mengalami defisit anggaran dimana belanja daerah melebihi pendapatan daerah yang tersedia. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tata kelola keuangan daerah belum optimal, kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan Daerah masih rendah terutama karena ketergantungan pada sektor pariwisata yang fluktuatif. Potensi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset belum sepenuhnya optimal. Perubahan kebijakan pusat seperti penyesuaian alokasi transfer atau refocusing anggaran sangat mempengaruhi ruang fiskal Daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 152 Identifikasi Permasalahan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
A. Pendidikan			
1	Masih rendahnya indeks pendidikan	1. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan; 2. Angka Harapan lama Sekolah masih rendah; dan 3. Angka Rata-rata lama Sekolah masih rendah.	1. Kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan belum maksimal; dan 2. Minat masyarakat untuk belajar belum maksimal.
2	Masih rendahnya angka harapan sekolah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan; 2. Tingginya angka kemiskinan; dan 3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan.	1. Banyaknya pelajar yang memilih bekerja daripada bersekolah; 2. Pendapatan masyarakat belum tinggi; 3. Ketersediaan sarana pendidikan belum maksimal; 4. Jarak sekolah ada yang relatif masih jauh; 5. Minat masyarakat untuk belajar belum tinggi; 6. Minimnya pendidikan non formal yang bermutu; dan 7. Minimnya informasi tentang beasiswa di masyarakat.
3	Masih rendahnya angka rata- rata lama sekolah	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan; 2. Tingginya angka kemiskinan; 3. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan; dan 4. belum optimalnya pendidikan kesetaraan.	1. Banyaknya pelajar yang memilih bekerja daripada bersekolah; 2. Pendapatan masyarakat belum tinggi; 3. Ketersediaan sarana pendidikan belum maksimal; 4. Jarak sekolah ada yang relatif masih jauh; 5. Minat masyarakat untuk belajar belum tinggi; 6. Minimnya pendidikan non formal yang bermutu; dan 7. Minimnya informasi tentang beasiswa di masyarakat.

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
4	Masih rendahnya persentase jumlah siswa Pendidikan Anak Usia Dini	1. Minimnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak ke Pendidikan Anak Usia Dini; dan 2. Kualitas dan Kuantitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini belum optimal.	1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang penting menyekolahkan ke Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Minimnya pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu; 3. Masih sedikitnya jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang ada; 4. Jarak antara Pendidikan Anak Usia Dini relatif jauh; dan 5. Masih banyaknya tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan belum S1/D4.
5	Masih rendahnya angka partisipasi kasar Sekolah Dasar	1. Akses ke sekolah masih ada sebagian anak yang cukup kesulitan; dan 2. Pelayanan pendidikan sekolah dasar belum optimal.	1. Ada sekolah yang memiliki jarak relatif jauh antara sekolah dan pemukiman; dan 2. Kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya belum optimal.
7	Masih rendahnya angka partisipasi Murni Sekolah Dasar	1. Akses ke sekolah masih ada sebagian anak yang cukup kesulitan; dan 2. Pelayanan pendidikan sekolah dasar belum optimal.	1. Ada sekolah yang memiliki jarak relatif jauh antara sekolah dan pemukiman; 2. Pemetaan dan Pendistribusian tenaga pendidik yang belum merata; dan 3. Kemampuan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya belum optimal.
8	Rasio sebaran sekolah belum optimal	Sebaran bangunan sekolah tidak merata	Sebaran bangunan sekolah tidak merata
9	Rasio Perbandingan Jumlah Guru dan Jumlah Murid Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah	1. Penyebaran guru tidak merata; dan 2. Kualifikasi guru belum sesuai.	Penyebaran guru dan kualifikasi guru belum sesuai dan merata

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	Pertama/Madrasah Tsanawiyah belum optimal		
10	Kekurangan Ketersediaan Alat Peraga Edukatif	Minimnya sarana prasarana Alat Peraga Edukatif	Ketersediaan alat pendukung kegiatan pembelajaran merupakan salah satu aspek kualitas yang dipantau dalam akreditasi
11	Pelayanan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini belum maksimal	kekurangan Tenaga Pendidik dengan kualifikasi S1/D4	Belum maksimalnya kebijakan dari Pemerintah Daerah berupa regulasi yang diperlukan untuk memitigasi berbagai faktor penyebab rendahnya kepemilikan kualifikasi pada pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, serta minimnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program studi guru Pendidikan Anak Usia Dini
12	kemampuan literasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih rendah	Tenaga pendidik di satuan pendidikan belum terpenuhi sesuai kebutuhan yang diharuskan	belum terpenuhinya kecukupan formasi guru Aparatur Sipil Negara untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru
13	Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih rendah	Tenaga pendidik di satuan pendidikan belum terpenuhi sesuai kebutuhan yang diharuskan	belum terpenuhinya kecukupan formasi guru Aparatur Sipil Negara untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru
14	Angka Partisipasi Sekolah masih belum optimal	Pendataan anak usia 5 (lima) - 6 (enam) tahun dan jumlah satuan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi syarat untuk tercapainya Angka Partisipasi Sekolah yang meningkat	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun belum tercapai; dan 2. Masih ada satuan pendidikan yang belum berizin operasional.
15	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan masih rendah	Daftar anak usia 7 (tujuh) -18 (delapan belas) tahun yang tidak berpartisipasi di satuan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			(enam) tahun belum tercapai; dan 2. Masih ada satuan pendidikan yang belum berizin operasional.
B. Kesehatan			
1	Masih adanya balita yang bergizi buruk	1. Kurangnya tenaga dokter untuk mengakomodasi, dimana rasio dokter 19 (sembilan belas) per 100.000 (seratus ribu) penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 (dua puluh empat) per 100.000 (seratus ribu) penduduk dan 96 dokter umum per 100.000 (seratus ribu) penduduk; 2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat; dan 3. Tingginya angka kemiskinan.	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat; 3. Masih kurangnya Program promotif dan preventif mengenai perilaku sehat; 4. Pendapatan masyarakat relatif rendah; 5. Kurangnya Sumber Daya Manusia kesehatan; 6. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal; 7. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun; dan 8. Kuota penerimaan tenaga kesehatan sedikit.
2	Belum optimalnya penanganan diare	Masih terjadi kasus diare	1. Belum optimalnya sosialisasi terkait menjaga kebersihan dan memilah makan sehat; dan 2. Masyarakat masih menganggap diare sebagai penyakit yang biasa terjadi sehingga penanganannya tidak optimal.
3		Masih kurangnya pelaksanaan surveilans migrasi	Belum optimal sosialisasi terkait dengan pekerja dari luar Daerah endemis untuk melakukan screening malaria
4	Masih rendahnya Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk	Rumah sakit hanya terdapat di pusat kegiatan saja dan rasio pelayanan minimal belum terpenuhi	1. Ketersediaan sarana prasarana kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat belum optimal; dan 2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
5	Masih minimnya kuantitas tenaga kesehatan (Dokter)	Kurangnya dokter untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dimana rasio dokter 19 (sembilan belas) per 100.000 (seratus ribu) penduduk sedangkan standar yang harus dipenuhi untuk dokter spesialis adalah 24 (dua puluh empat) per 100.000 (seratus ribu) penduduk dan 96 (sembilan puluh enam)0 dokter umum per 100.000 (seratus ribu) penduduk	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia kesehatan; 2. Pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kesehatan belum optimal; 3. Banyaknya tenaga kesehatan yang sudah dan akan pensiun; dan 4. Kuota penerimaan tenaga kesehatan sedikit.
6	Terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah *Dengue* dari tahun ke tahun	Terjadi peningkatan kasus Demam Berdarah *Dengue* dari tahun ke tahun	1. Belum optimalnya penanganan sumber perkembangbiakan nyamuk penyebab Demam Berdarah *Dengue*; dan 2. belum optimalnya upaya sosialisasi mengenai penanganan Demam Berdarah *Dengue.*
C. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
1	Belum optimalnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	1. Penambahan ruas Jalan Baru Kabupaten; dan 2. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak/belum dibangun.	1. Terdapat perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Jalan Kabupaten sehingga menambah panjang jalan kabupaten; 2. Belum adanya peraturan terkait penyelenggaraan jalan; 3. Belum seluruhnya Jalan Kabupaten dilengkapi dengan Bangunan Pelengkap Jalan; dan 4. Pemeliharaan Jalan Belum seluruhnya tertangani.
2	Jalan kabupaten belum memiliki trotoar dan drainase	1. Belum optimalnya sinergitas berbagai pihak; dan 2. Belum adanya data terkait ini.	1. Mayoritas jalan kabupaten kekurangan ruang milik jalan (ketersediaan lahan); 2. Ketidaktersediaan data terkait trotoar dan drainase; dan 3. Pembangunan drainase dan trotoar belum menjadi prioritas sedangkan hal tersebut.merupakan kebutuhan dasar

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			infrastruktur
3	Belum adanya data sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Kurangnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah tentang sempadan	1. Alokasi anggaran tentang pendataan tidak ada; dan 2. Dokumen perencanaan sektoral belum ada.
4	Masih terdapat sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan permanen	Masih terdapat sempadan sungai yang digunakan untuk bangunan permanen	1. Pengendalian dan penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai yang belum optimal; dan 2. Ketidaktersediaan data terkait trotoar dan drainase.
5	Tidak adanya data ideal panjang irigasi	Tidak adanya data ideal panjang irigasi	1. Tidak adanya data ideal panjang irigasi yang dibutuhkan untuk mengairi luasan daerah pertanian; dan 2. Koordinasi antar pemangku kewenangan sarana irigasi yang ditangani kurang baik.
6	Penurunan proporsi jalan dalam kondisi baik	1. Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak/belum dibangun; dan 2. Terdapat jalan dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.	1. Terdapat perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Jalan Kabupaten jalan sehingga menambah panjang jalan kabupaten; dan 2. Belum adanya peraturan terkait penyelenggaraan jalan.
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN			
1	Penanganan kumuh yang belum optimal	Kesiapan *readiness criteria* yang belum tersedia	Terdapat pembaruan Surat Keputusan Bupati tentang kumuh pada tahun 2021 sehingga mempengaruhi perhitungan Penanganan kawasan kumuh belum menjadi prioritas pembangunan pada bidang perumahan dan permukiman

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
2	Belum optimalnya penduduk berakses air minum	Akses air minum perpipaan belum merata ke seluruh wilayah	Belum optimalnya penduduk berakses air minum
E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Masih adanya kejadian kebakaran yang ditangani lebih dari 15 (lima belas) Menit	1. Belum tersedianya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran yang memadai (satu Unit Pelaksana Teknis Daerah membawahi dua Kecamatan) 2. Jangkauan terlalu jauh	1. Kurangnya armada pemadam kebakaran 2. Rendahnya biaya operasional
2	Masih rendahnya cakupan petugas Linmas	Kurangnya Sumber Daya Manusia Petugas Perlindungan Masyarakat	1. Alokasi anggaran terbatas 2. Belum meratanya anggota linmas 3. Kurangnya insentif bagi petugas linmas baik dalam bentuk finansial maupun finansial 4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban
3	Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran	1. Belum tersedianya Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran yang memadai (satu Unit Pelaksana Teknis Daerah membawahi dua Kecamatan); dan 2. Jangkauan terlalu jauh.	1. Kurangnya armada pemadam kebakaran; dan 2. Rendahnya biaya operasional.
F. SOSIAL			
1	masih terdapat data tidak valid untuk Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Masih terdapat data tidak valid	belum maksimalnya sinergitas berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
2	belum optimalnya Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan dan perlindungan sosial	1. Masih terdapat data tidak valid; dan 2. Terdapat penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili datanya tidak terupdate.	belum maksimalnya sinergitas berbagai pihak baik Pemerintah Daerah, desa dan masyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan serta evaluasi kegiatan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Tabel 2. 153 Identifikasi Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
A. TENAGA KERJA			
1	masih rendahnya rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebesar 73,38 (tujuh puluh tiga koma tiga delapan)	masih terbatasnya lapangan pekerjaan	1. calon tenaga kerja kurang terampil; 2. Pengembangan Wirausaha belum optimal; dan 3. belum optimalnya link and match antara dunia pelatihan dengan dunia industri.
2	masih rendahnya persentase pencari kerja yang ditempatkan	masih terbatasnya lapangan pekerjaan	1. calon tenaga kerja kurang terampil; dan 2. belum optimalnya *link* and *match* antara dunia pelatihan dengan dunia industri.
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih rendah	1. masih belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki; 2. pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal; dan 3. belum optimalnya peningkatan kompetensi kerja perempuan.	1. masih belum optimalnya kesetaraan upah antara perempuan dan laki-laki; 2. pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal; dan 3. belum optimalnya peningkatan kompetensi kerja perempuan.
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD belum tercapai	1. masih rendahnya partisipasi calon legislatif wanita; dan 2. pemilih cenderung memilih calon	1. masih rendahnya partisipasi calon legislatif wanita; dan 2. pemilih cenderung memilih calon legislatif

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		legislatif dengan gender laki-laki.	dengan gender laki-laki.
C. PANGAN			
1	kurangnya pengetahuan masyarakat akan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Masih tingginya konsumsi karbohidrat yang bersumber dari beras dan tepung terigu, sementara konsumsi karbohidrat dari bahan pangan lainnya seperti jagung, dan kelompok umbi-umbian meliputi singkong, ubi jalar, kentang, dan ubi lainnya masih rendah	masih minimnya sosialisasi dan promosi menu makan
2	Belum terpenuhinya kebutuhan cadangan pangan Daerah	Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah belum menjadi Prioritas Daerah	Terjadinya perubahan harga yang fluktuatif setiap tahunnya yang ke ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah
3	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan	Masih terdapat daerah yang masuk kategori rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan	ketersediaan, akses pangan, pemanfaatan pangan yang belum memenuhi kebutuhan
4	Ketersedian pangan utama	Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi	Data ekspor-impor Daerah belum tersedia
5	Angka ketersedian Protein belum tercapai	Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari Daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi	Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih perlu mendatangkan komoditas pangan dari Daerah luar agar ketersediaan pangan tercukupi
D. PERTANAHAN			
1	Masih rendahnya Persentase luas lahan bersertifikat	1. Tingkat sosialisasi yang rendah/tidak maksimal mengenai pertanahan; dan 2. Masyarakat masih belum Memiliki kelengkapan administrasi pertanahan.	Masih rendahnya sosialisasi mengenai pertanahan dari pemerintah

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
2	Proses administrasi untuk penyelesaian sengketa tanah sering kali panjang dan rumit, melibatkan berbagai instansi pemerintah.	1. kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu; 2. ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah; dan 3. meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah.	Tumpang tindih kepentingan
E. LINGKUNGAN HIDUP			
1	Masih rendahnya penanganan sampah	Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah	1. Sedikitnya armada pengangkutan sampah; 2. Belum terdapatnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; 3. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir sampah belum bisa melayani seluruh area; dan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat.
2	Masih rendahnya kualitas air	belum tersedianya sarana prasarana pengelolaan limbah secara terpadu	1. Belum adanya regulasi terkait Rencana Pengamanan Air Minum; 2. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah disungai; dan 3. Sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi belum optimal.
3	Peningkatan Jumlah sumber pencemar bergerak pada waktu2 tertentu dan Pengendalian sumber pencemar tidak bergerak di industri yang minim perawatan dan pengawasan internal	Fluktuasi mutu udara ambien di masa tertentu menghasilkan nilai indeks yang berbeda2 tiap waktu	1. Industri terkait yang menghasilkan output buangan emisi kurang memperhatikan perawatan sarana pengendalian udara dan monitoring Baku mutu Emisi yang dihasilkan; 2. Pemilik kendaraan pribadi kurang memperhatikan perawatan mesin sehingga mengurangi efisiensi pembakaran mesin yang mengakibatkan penambahan jumlah emisi; dan 3. Belum dilakukanya wajib uji emisi kendaraan untuk pengendalian emisi.

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	masih terdapat lahan kritis	rehabilitas dan penghijauan kembali pada lahan kritis belum optimal	Terdapat perubahan fungsi lahan akibat pertambahan penduduk,dan peningkatan industri serta pertambangan
4	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup dan izin yang diterbitkan belum optimal	Banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki kelengkapan perizinan dan melaporkan laporan semesteran operasional kegiatan	Kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
5	masih rendahnya penghargaan di bidang lingkungan hidup yang didapat	1. Masih rendahnya jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat; 2. Rendahnya Rasio Ruang Terbuka Hijau; 3. Pengembangan dan perizinan tidak memperhatikan Ruang Terbuka Hijau yang 30 (tiga puluh) persen; 4. Perlu peningkatan pada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan sebagai upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Pemdes; 5. Masih rendahnya pendataan untuk penetapan hutan kota pada tiap kecamatan dan penetapan taman; dan 6. Masih rendahnya pendataan Program kampung iklim;	1. Minimnya sosialisasi ramah lingkungan pada masyarakat; 2. Penegakan kebijakan terkait lingkungan belum optimal; dan 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia.
6	Masih rendahnya penanganan sampah	Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah	1. Sedikitnya armada pengangkutan sampah; 2. Belum terdapatnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; 3. Daya tampung Tempat Pemrosesan

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			Akhir sampah belum bisa melayani seluruh area; dan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat.
7	masih rendahnya timbulan sampah yang ditangani	Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan timbulan sampah serta terbatasnya Sumber Daya Manusia	1. masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi *Reduce, Reuse, Recycle;* 2. belum tersedianya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah; 3. sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah masih terbatas; dan 4. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara mandiri.
8	Masih rendahnya penanganan sampah	Masih rendahnya cakupan area penanganan sampah	1. Sedikitnya armada pengangkutan sampah; 2. Belum terdapatnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; 3. Daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir sampah belum bisa melayani seluruh area; dan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat.
	F. KEPENDUDUKAN		
1	penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik belum optimal	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi database; 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia; dan 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.	1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan; dan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas.
2	penerbitan Kartu Keluarga belum optimal	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database; 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia; dan 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.	1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi mengenai pentingnya dokumen kependudukan; dan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas.

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
3	masih rendahnya penerbitan Kartu Identitas Anak	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database; 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia; dan 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.	1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak; dan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas.
4	masih rendahnya kepemilikan kutipan akta kelahiran	1. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database; 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia; 3. Kesadaran masyarakat mengenai tertib; dan 4. administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan.	1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi mengenai pentingnya akta kelahiran; dan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas.
5	masih rendahnya cakupan kepemilikan akta perkawinan	Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk sosialisasi mengenai pentingnya akta perkawinan; dan 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas.
G. PEMERINTAH DESA			
1	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif masih sedikit	Kemampuan Sumber Daya Manusia Pengurus Badan Usaha Milik Desa kurang memahami manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sehingga banyak Badan Usaha Milik Desa yang tidak aktif	Kemampuan Sumber Daya Manusia Pengurus Badan Usaha Milik Desa kurang memahami manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sehingga banyak Badan Usaha Milik Desa yang tidak aktif
I. PERHUBUNGAN			
1	Kurangnya alokasi anggaran pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum	Belum menjadi Prioritas Daerah	1. Biaya pemeliharaan tidak sebanding dengan jumlah sarana prasarana perhubungan khususnya Penerangan Jalan Umum;

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			2. Kurangnya Sumber Daya Manusia; dan 3. Sarana pendukung penunjang pemeliharaan kurang memadai.
2	Masih rendahnya persentase Kecamatan yang melayani angkutan umum	Kurangnya minat masyarakat terhadap angkutan umum tidak seimbangnya rasio antara biaya operasional dan pendapatan	1. Keterbatasan Jangkauan Layanan; 2. frekuensi dan konsistensi layanan angkutan umum sangat rendah; dan 3. Ketidakseimbangan antara permintaan angkutan umum dengan operasional angkutan umum.
3	Ketidakcukupan fasilitas angkutan umum	Keterbatasan akses transportasi dan kualitas layanan angkutan umum yang belum optimal	Kurangnya permintaan angkutan umum di wilayah tertentu (biaya operasional kendaraan tidak sebanding dengan jumlah penumpang)
4	Masih rendahnya jumlah uji Kir angkutan umum	Kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan berlalu lintas	1. Kurangnya informasi tentang pentingnya uji kir kepada pengemudi atau pemilik kendaraan; 2. Kondisi teknis kendaraan yang tidak terjaga dengan baik; dan 3. Kurangnya kesadaran masyarakat.
5	Kurangnya permintaan penumpang dan beralih ke kendaraan pribadi karena kenyamanan yang belum optimal	Fasilitas Kurang memadai. Ketersediaan dan frekuensi layanan masih rendah. Kenyamanan belum memadai. Lebih menggunakan kendaraan pribadi	Kenyamanan belum optimal
6	Permintaan izin trayek yang masih minim	Kurangnya permintaan izin trayek dikarenakan persaingan usaha dan menurunnya penumpang	Kurangnya permintaan penumpang
7	Infrastruktur terminal belum memadai	Permasalahan yang ditemukan yaitu jumlah penumpang dan barang yang menurun dikarenakan kondisi ekonomi yang menurunnya orang orang bepergian. Tersedianya banyak alternatif kendaraan	Kurangnya fasilitas terminal seperti speaker audio, kursi tunggu penumpang

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		diantaranya menggunakan sepeda motor. Fasilitas dan infrastruktur terminal yang belum memadai juga jadi permasalahan yang timbul.	
J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Belum semua aplikasi *e-government* terintegrasi	Aplikasi di masing-masing Perangkat Daerah belum seragam sehingga belum sama dalam standar teknis aplikasi	1. Sarana dan prasarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum memadai; 2. Belum menjadi skala prioritas utama Pemerintah Daerah; 3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang; 4. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang masih lemah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 5. Kebijakan Standar aplikasi tidak seragam.
2	SPBE belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan	Domain Tata Kelola dan Manajemen belum berjalan optimal	1. Sarana dan prasarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum memadai; 2. Belum menjadi skala prioritas utama Pemerintah Daerah; dan 3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia masih kurang koordinasi dan kerjasama antar instansi yang masih lemah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3	Masih sedikitnya jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	1. Masih banyak Desa yang belum membentuk Komunitas Informasi Masyarakat; 2. pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan belum berjalan secara optimal; 3. Rendahnya partisipasi masyarakat; dan 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan alokasi anggaran untuk	1. Masyarakat belum mengerti manfaat dan kegunaan Komunitas Informasi Masyarakat; 2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi dan internet di tingkat kecamatan; dan 3. belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai Komunitas

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		mendukung pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat.	Informasi Masyarakat;
4	Masih rendahnya cakupan Komunitas Informasi Masyarakat	1. Masih banyak Desa yang belum membentuk Komunitas Informasi Masyarakat; 2. pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan belum berjalan secara optimal; 3. Rendahnya partisipasi masyarakat; dan 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan alokasi anggaran untuk mendukung pengembangan Komunitas Informasi Masyarakat.	1. Masyarakat belum mengerti manfaat dan kegunaan Komunitas Informasi Masyarakat; 2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti pusat informasi dan internet di tingkat kecamatan; dan 3. belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai Komunitas Informasi Masyarakat.
K. STATISTIK			
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia Produsen Data yang terbatas	Perangkat Daerah sebagai produsen data belum melakukan publikasi data secara lengkap dan berkala	Sumber daya dan infrastruktur belum memadai
L. PERSANDIAN			
1	Masih rendahnya sistem informasi yang menerapkan keamanan sistem informasi	Belum menjadi prioritas pembangunan terkait keamanan data	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 2. Keterbatasan infrastruktur; 3. kesadaran akan keamanan data; dan 4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan sandi.
2	Belum diterapkannya sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Belum menjadi prioritas pembangunan terkait keamanan data	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 2. Keterbatasan infrastruktur; 3. kesadaran akan keamanan data; dan 4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung penggunaan sandi.
M. KOPERASI, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah			
1	1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi anggota	1. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;	1. Kesadaran anggota; 2. Kaderisasi koperasi; dan

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	2. Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas 3. Kurangnya inovasi dan adaptasi	2. Masih rendahnya kaderisasi generasi muda sebagai pengurus koperasi; dan 3. Masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil.	3. Kurangnya Sumber Daya Manusia profesional.
2	1. Database akses informasi	belum pembaruan database pelaku usaha yang terbaru	
3	pembaruan aturan baru yang mewajibkan koperasi mempunyai modal minimal 500 (lima ratus) juta rupiah	Koperasi Simpan Pinjam diusahakan untuk tidak ada	1. Kesadaran anggota; 2. Kaderisasi koperasi; dan 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia profesional.
4	database Jumlah Usaha Mikro dan akses informasi	1. Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan; 2. Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar; 3. Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil; 4. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk; 5. Belum tersedianya ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan; dan 6. Masih rendahnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia usaha mikro dan kecil.	1. Potensi usaha mikro dan kecil sebagai muatan lokal belum terpetakan; 2. Minimnya usaha mikro dan kecil yang memiliki hak izin dan edar; 3. Terhambatnya promosi produk usaha mikro & kecil; 4. Belum ada formulasi untuk menghitung jumlah peningkatan presentasi kewirausahaan mikro dibagi jumlah penduduk; 5. Belum tersedianya ruang promosi untuk ajang promosi usaha mikro dan kecil bagi wisatawan; dan 6. Masih rendahnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia usaha mikro dan kecil.
5	Rendahnya kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia wirausaha muda	1. Modal yang terbatas; dan 2. Masih rendahnya kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia wirausaha muda.	

No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
N. PENANAMAN MODAL			
1	Realisasi investasi Daerah menurun	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	1. Tidak adanya regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif yang dapat memberikan kemudahan dan menarik para investor untuk berinvestasi di Daerah; dan 2. Belum adanya peta potensi yang dapat membantu investor untuk menentukan lokasi dan sektor usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka; 3. Kurangnya partisipasi promosi di berbagai *event* Daerah maupun nasional; 4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memadai; dan 5. Kurangnya sosialisasi dalam berbagai platform digital.
O. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1		Tiga Induk Organisasi, 146 (seratus empat puluh enam) klub olahraga (belum banyaknya cabang olahraga yang bisa mendapatkan penghargaan/prestasi, karena belum ditunjang oleh besaran anggaran, sarpras dan fasilitas lainnya yang representatif)	
2		fungsi Gelanggang Olahraga yang bisa dipakai oleh banyak cabang olahraga, sehingga lebih cepat rusak sementara dalam pemeliharaannya memerlukan biaya cukup besar	Jumlah Gelanggang Olahraga yang masih kurang merata

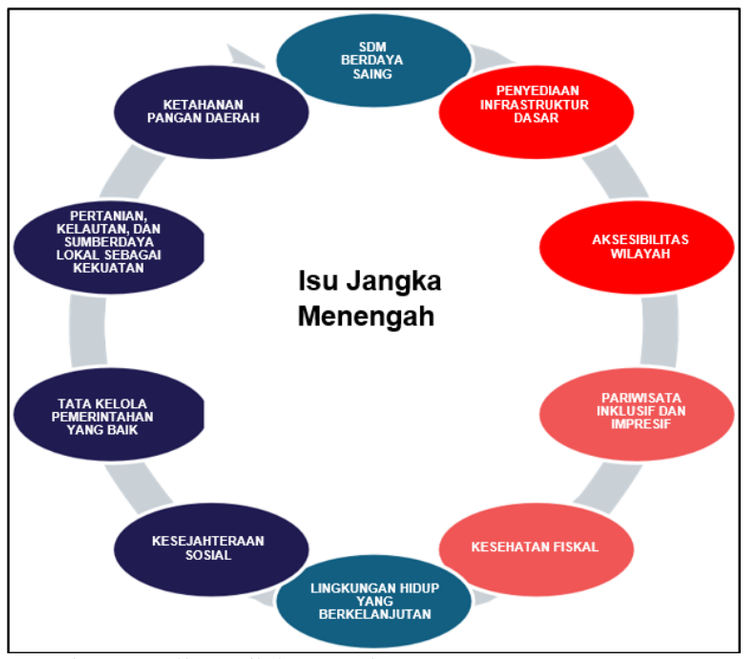
No	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
3	Data organisasi yang tercatat belum sesuai dengan ada yang di lapangan	Dengan banyaknya organisasi menjadi banyak pula organisasi yang membutuhkan anggaran operasional	

Sumber: Hasil analisis, 2025

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu Daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah Daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang Daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang 20 (dua puluh) tahun jangka menengah 5 (lima) tahun maupun jangka pendek 1 (satu) tahun. Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke dalam dokumen. Berikut ini identifikasi isu strategis Daerah dapat

Gambar 2. 32 Identifikasi Isu Strategis Daerah



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Isu strategis di atas merupakan hasil identifikasi berdasarkan data, kondisi eksisting, permasalahan Daerah, serta isu strategis pada level yang lebih tinggi yang relevan dengan kondisi Daerah hingga lima tahun ke depan. Inventarisir isu pada level internasional, nasional, dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut

2.3.2.1 Risiko Global dan Isu Pembangunan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 Risiko jangka menengah dan Isu Pembangunan Jangka Menengah meliputi:

A. Risiko Global

1. Cuaca Ekstrem;
2. Perubahan kritikal terhadap ekosistem;
3. *Biodiversity Loss* dan gangguan ekosistem;
4. Krisis sumber daya alam;
5. Misinformasi dan disinformasi;
6. Dampak buruk teknologi kecerdasan buatan (*artificial inteligent)*;

7. *Involuntary migration*;
8. *Cyber insecurity*;
9. Polarisasi sosial; dan
10. Polusi.

B. Isu Pembangunan

1. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian indonesia.
2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral
3. Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global
4. Transisi energi untuk mendorong pemerataan
5. *Aging population* negara maju

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu nasional merupakan permasalahan atau tantangan utama yang bersifat lintas sektoral dan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa isu nasional pada RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 antara lain:

A. Isu Strategis Transformasi Sosial

1. Kesehatan untuk semua
   Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah.

2. Pendidikan Berkualitas yang Merata
   Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
   Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

B. Isu Strategis Transformasi Ekonomi

1. Industri;
2. Produktivitas Tenaga Kerja. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia menjadi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi ekonomi untuk memperluas *middle income class* menuju Indonesia Emas 2045;
3. Pertanian;
4. Ekonomi Biru;
5. Ekonomi Kreatif;
6. UMKM dan Koperasi;
7. Pekerjaan Hijau. Belum memadainya ekosistem pengembangan sumber daya manusia menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan peluang penciptaan pekerjaan hijau (*green jobs*) untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan;
8. Pengelolaan hutan lestari;
9. Percepatan transisi energi;
10. Digitalisasi;
11. Pariwisata;
12. Integrasi Ekonomi domestik dan global; dan

13. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

C. Isu Strategis Transformasi Tata kelola

1. Integritas partai politik;
2. Transformasi dan digitalisasi pelayanan publik;
3. Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan;
4. Sistem penggajian tunggal;
5. Manajemen talenta;
6. Kualitas regulasi; dan
7. Integrasi proses bisnis.

D. Isu strategis supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan indonesia

1. Stabilitas makro;
2. Demokrasi;
3. Hukum;
4. Keamanan; dan
5. Pertahanan.

E. Isu strategis ketahanan sosial, budaya dan ekologi

1. Isu agama;
2. Isu budaya;
3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif;
4. Pangan;
5. Kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;
6. Energi; dan
7. Bencana dan perubahan iklim.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Barat

Penyusunan isu strategis Daerah dalam 20 tahun kedepan harus mengacu pada isu strategis provinsi Jawa Barat. Isu strategis Provinsi Jawa Barat dalam RPJPD 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut:

1. *Green* dan blue *economy* serta pembangunan inklusif
   Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor- sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi
2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
   Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat.
3. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar
   Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan pedesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses pelayanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah pedesaan.

4. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan
   Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.
5. Keberlanjutan Penataan Ruang
   Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.
6. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
   Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan Daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam pengelolaan Daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

2.3.2.4 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis dalam KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 adalah permasalahan utama yang berdampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, serta berpotensi mempengaruhi pencapaian pembangunan berkelanjutan (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*) jika tidak ditangani secara tepat dalam kebijakan, rencana, dan Program pembangunan. Isu strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 beserta Rekomendasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 154 Isu Strategis dan Rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Isu Strategis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Skenario Alternatif	Rekomendasi KLHS RPJMD	
		Sasaran	Strategi
Isu 1: Belum optimalnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan	1. Meningkatkan manajemen dan kapasitas sekolah; 2. Mengoptimalisasi perkuatan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini; 3. Meningkatkan akses dan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui peningkatan manajemen sekolah, optimalisasi akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini , penguatan literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi remaja dan dewasa,	1. Mengadakan pelatihan manajemen sekolah dan peningkatan kapasitas tenaga pendidikan secara berkelanjutan; 2. Menyediakan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini

Isu Strategis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Skenario Alternatif	Rekomendasi KLHS RPJMD	
		Sasaran	Strategi
	remaja dan dewasa secara merata; dan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan	serta pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	berkualitas dan pelatihan pendidik di seluruh wilayah; 3. Menyediakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi terjangkau dan akses perangkat digital bagi remaja dan dewasa; dan 4. Mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Isu 2: Belum meratanya aksesibilitas pelayanan dan edukasi kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak; 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu hamil; dan 3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan untuk orang dengan HIV/AIDS.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, ibu hamil, serta orang dengan HIV/AIDS untuk mendukung kesejahteraan dan kesehatan yang inklusif	1. Meningkatkan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan dan pelatihan berkelanjutan untuk tenaga medis; 2. Meningkatkan penyediaan alat kesehatan yang memadai dan membuat dukungan Program kesehatan ibu anak yang terpadu; dan 3. Menyediakan layanan informasi, konseling, dan tes HIV gratis di fasilitas kesehatan terdekat.
Isu 3: Minimnya penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan merata dan berkualitas	Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar yang merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi circular dalam setiap tahapan	Mewujudkan infrastruktur dasar yang merata, berkelanjutan, dan ramah lingkungan melalui integrasi prinsip ekonomi sirkular dalam perencanaan pembangunan untuk memenuhi	Mengembangkan sistem perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang berbasis pada pemetaan kebutuhan dan prioritas daerah, dengan menggunakan data yang akurat serta menerapkan

Isu Strategis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Skenario Alternatif	Rekomendasi KLHS RPJMD	
		Sasaran	Strategi
	pemetaan dan perencanaan pembangunan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien	kebutuhan masyarakat secara adil dan efisien	teknologi dan prinsip ekonomi sirkular untuk memastikan keberlanjutan sumber daya dan efisiensi dalam penggunaan infrastruktur
Isu 4: Kurangnya perhatian terhadap resiliensi bencana dan perubahan iklim	1. Meningkatkan kualitas ketahanan bencana melalui perencanaan yang optimal; 2. Meningkatkan masyarakat tangguh bencana melalui edukasi; 3. Mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur pasca bencana; dan 4. Mempercepat pengembangan *early warning system* untuk masyarakat yang tangguh bencana.	Mewujudkan masyarakat tangguh bencana melalui perencanaan optimal, edukasi, percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana, dan pengembangan sistem peringatan dini yang efektif.	1. Melakukan kajian kebencanaan secara menyeluruh untuk memperkuat landasan dokumen penanggulangan bencana; 2. Melakukan kampanye edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman bencana; 3. Melakukan kajian dan perencanaan infrastruktur tahan bencana serta sistem pemulihan pasca-bencana; dan 4. Meningkatkan kolaborasi antara lembaga untuk riset dan pengembangan sistem peringatan dini.
Isu 5: Belum optimalnya konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, terutama pengawasan dan *law enforcement* dalam mendukung perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	1. rehabilitasi kerusakan ekosistem melalui regulasi pengelolaan hutan dan lahan, kawasan hutan diproyeksikan mengalami pemulihan fungsi ekologis secara signifikan dengan pengendalian pemanfaatan lahan yang lebih ketat dan terencana; dan 2. Percepatan rehabilitasi kerusakan	Mewujudkan pengelolaan hutan, lahan, dan ekosistem yang berkelanjutan serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati melalui penguatan regulasi dan	1. Memperkuat regulasi dan infrastruktur untuk pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; dan 2. Memperkuat regulasi dan sistem pengelolaan ekosistem yang mendukung keanekaragaman hayati.

Isu Strategis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Skenario Alternatif	Rekomendasi KLHS RPJMD	
		Sasaran	Strategi
	ekosistem melalui regulasi pengelolaan keanekaragaman hayati, populasi spesies lokal dan ekosistem alami diproyeksikan meningkat melalui penguatan regulasi konservasi dan perlindungan habitat.		
Isu 6: Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi lokal dan kepariwisataan daerah hingga mampu mengentaskan kemiskinan	1. Peningkatan perlindungan sosial, angka kemiskinan diproyeksikan menurun secara signifikan melalui perluasan jangkauan Program perlindungan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran; 2. Optimalisasi ekonomi lokal, kapasitas usaha kecil dan menengah diproyeksikan meningkat melalui penguatan dukungan pemerintah dan pemanfaatan potensi Daerah berbasis keberlanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi; dan 3. Pengembangan kepariwisataan , sektor pariwisata diproyeksikan berkembang secara inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal untuk	1. Mewujudkan pengurangan signifikan angka kemiskinan, peningkatan jangkauan perlindungan sosial; 2. Mewujudkan optimalisasi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemanfaatan potensi daerah yang berbasis keberlanjutan; dan 3. Mewujudkan pengembangan sektor kepariwisataan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan daya tarik wisata berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	1. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan akses terhadap modal usaha bagi keluarga miskin untuk menciptakan kemandirian ekonomi; 2. Mengembangk an sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu dan teknologi untuk memastikan bantuan sosial lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mengurangi risiko kerentanan masyarakat; 3. Mendorong inovasi usaha lokal berbasis potensi unggulan melalui pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar digital yang inklusif; dan 4. Mengoptimalkan promosi wisata melalui integrasi teknologi digital, pengembangan destinasi

Isu Strategis terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Skenario Alternatif	Rekomendasi KLHS RPJMD	
		Sasaran	Strategi
	meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		unggulan, dan peningkatan kualitas layanan pariwisata berbasis standar global untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Sumber: KLHS RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

2.3.2.5 Isu Strategis Tahun 2025-2029

Isu strategis RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah dan peluang dalam 5 (lima) tahun kedepan yang telah disandingkan dengan isu strategis Nasional maupun Isu Strategis Provinsi Jawa Barat. Isu strategis jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Kesehatan Fiskal

   Kondisi fiskal Pemerintah Daerah dihadapkan pada kemandirian fiskal Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk melaksanakan Pembangunan Daerah.
   a. belum optimalnya pengelolaan keuangan Daerah (anggaran dan utang Daerah);
   b. belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli Daerah; dan
   c. belum optimalnya pemanfaatan alternatif pembiayaan Pembangunan Daerah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

   Pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan, kesehatan, kompetensi tenaga kerja, serta meningkatkan cakupan sarana dan prasarana pendukung

   a. Daya saing kualitas pendidikan masih rendah, Indeks Pendidikan Tahun 2023 sebesar 60,97 (enam puluh koma sembilan tujuh) menjadi yang terendah ke 10 (sepuluh) di Jawa Barat;
   b. Cakupan dan kualitas layanan pendidikan masih rendah;
   c. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas;
   d. Cakupan dan kualitas layanan kesehatan masih rendah;
   e. Masih adanya kasus stunting, prevalensi stunting 1,93 (satu koma sembilan tiga) persen;
   f. Potensi pandemi ke depan; dan
   g. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja.

3. Pariwisata Inklusif dan Impresif

   Pariwisata inklusif dan impresif dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata bersifat terbuka terhadap perubahan sehingga mampu mempengaruhi, memukau, atau membuat kesan kuat atas pariwisata lokal dengan tidak meninggalkan karakter budaya
   a. Kurangnya keterampilan dan sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia pariwisata;

b. Belum terpenuhinya indikator standar pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
c. Perubahan motivasi wisatawan terhadap pariwisata massal menjadi pariwisata minat khusus (segmentasi destinasi wisata, desa wisata);
d. Belum optimalnya promosi pariwisata pada berbagai media baik itu level nasional maupun internasional;
e. Belum diterapkannya kebudayaan lokal sebagai identitas daerah untuk pemanfaatan pada sektor pariwisata; dan
f. Pengelolaan dan kualitas layanan pariwisata belum optimal.

4. Penyediaan Infrastruktur Dasar

Penyediaan infrastruktur dasar dihadapkan pada tantangan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat meliputi air minum, sanitasi, persampahan, drainase, dan perumahan.

a. Masih rendahnya akses air minum Perpipaan. Tahun 2023 akses air minum layak 86,47 (delapan puluh enam koma empat tujuh) persen, akses air minum perpipaan 13 (tiga belas) persen, dan akses air minum aman 0 (nol) persen;
b. Masih rendahnya akses sanitasi. Tahun 2023 akses sanitasi layak 70,82 (tujuh puluh koma delapan dua) persen, akses sanitasi aman 0 (nol) persen, serta belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja;
c. Rendahnya cakupan pelayanan persampahan. Tahun 2023 akses persampahan sebesar 29,13 (dua puluh sembilan koma satu tiga) persen, serta belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
d. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh, pengurangan kawasan kumuh tahun 2021-2023 masih 28,4 (dua puluh delapan koma empat) persen;
e. Masih terdapat rumah tidak layak huni yakni 11,74 (sebelas koma tujuh empat) persen pada tahun 2023; dan
f. Masih terdapat kawasan permukiman di wilayah rawan bencana.

5. Pertanian, Kelautan Dan Sumberdaya Lokal Sebagai Kekuatan Perekonomian

Pembangunan perekonomian Daerah dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan *Blue economy, Green Economy*, tata kelola sumber daya air, peningkatan derajat kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri.

a. Belum optimalnya produktivitas ekonomi pada sektor perairan (ekonomi biru);
b. Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan dilihat dari Nilai Tukar Petani tahun 2022 sebesar 103,84 (seratus tiga koma delapan empat);
c. Belum optimalnya daya saing produk, kelembagaan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. Belum optimalnya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Pembangunan Daerah; dan
e. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian (distribusi pupuk, tata guna air , teknologi tepat guna, Rumah Potong Hewan).

6. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang

menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan, yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

a. Masih tingginya angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 8,89 (delapan koma delapan sembilan) persen;
b. Belum optimalnya perlindungan sosial, akurasi bantuan sosial, jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat;
c. tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah;
d. belum optimalnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan; dan
e. Masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.

7. Tata kelola pemerintah yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik dihadapkan pada tantangan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran

a. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal;
b. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia) belum optimal;
c. Belum terwujudnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara yang adil, layak dan kompetitif;
d. Belum terintegrasinya sinergitas dan konsistensi perencanaan, penganggaran, akuntabilitas Kinerja, pengendalian dan evaluasi; daan
e. Cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik belum optimal.

8. Aksesibilitas Wilayah

Peningkatan aksesibilitas wilayah ditujukan untuk mengatasi hambatan konektivitas antar pusat kegiatan dan aksesibilitas wilayah

a. Terdapat pusat kegiatan yang belum terhubung dengan pusat kegiatan lainnya;
b. Belum optimalnya sarana prasarana transportasi;
c. Rendahnya cakupan layanan transportasi publik;
d. Jalur alternatif dari dan menuju Pangandaran belum memadai; dan
e. Belum adanya integrasi antar moda (Terminal, Bandara, Pelabuhan, dan Kereta Api).

9. Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan Daerah dihadapkan pada tantangan untuk pemenuhan ketersediaan, distribusi, dan stabilitas harga pangan

a. Belum tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang baik; dan
b. Fluktuasi harga pangan utama.

10. Lingkungan Hidup yang berkelanjutan

Lingkungan hidup yang berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, dan pelaksanaan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

a. penurunan kualitas lingkungan hidup (aktivitas pariwisata massal yang tidak terkendali, masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup);
b. belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekologis, pemberdayaan masyarakat;
b. lokaluntuk pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan energi baru terbarukan, perubahan iklim);

c. belum optimalnya implementasi manajemen bencana;
d. belum optimalnya pengendalian penataan ruang; dan
e. Gas Rumah Kaca.

Perumusan isu strategis ini tidak terlepas dari hasil identifikasi isu strategis Daerah di sekitar yang berbatasan secara langsung. Terdapat tiga Kabupaten yang berbatasan langsung yakni Kabupaten Cilacap, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan dokumen perencanaan ketiga Kabupaten dimaksud, didapatkan isu strategis yang berpotensi mempengaruhi kondisi dan isu Daerah apabila dilihat sebagai satu kesatuan konstelasi regional. Berikut isu strategis Kabupaten sekitar.

Tabel 2. 155 Isu Strategis Kabupaten Sekitar

Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Cilacap
1. Aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan dasar yang berkualitas; 2. Reformasi birokrasi untuk pemerintahan yang baik dan efektif berbasis teknologi informasi; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur Daerah; 4. Meningkatkan derajat kesehatan; 5. Peningkatan daya saing kepariwisataan dan ekonomi kreatif berbasis komunitas; 6. Memperluas jejaring kerjasama dan investasi di bidang pertanian dan kepariwisataan; 7. Peningkatan daya saing produk pertanian di pasar lokal, nasional, regional, dan global; 8. Penanganan masalah kemiskinan; 9. Penanganan pengangguran; 10. Penurunan angka stunting, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; 11. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya; dan 12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; 3. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; 4. Peningkatan dan kualitas optimalisasi pemanfaatan infrastruktur; 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan 6. Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa.	1. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan: bersih, transparan, kolaboratif, demokratis, dan akuntabel; 2. Belum optimalnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berinovasi; 3. Belum terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat; 4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap belum optimal; dan 5. Belum terpenuhinya infrastruktur yang memadai; pengembangan kawasan strategis dan kualitas lingkungan hidup Pengelolaan dan penanganan bencana yang belum optimal.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi RPJM adalah kondisi Daerah sebagai hasil pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi ini dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan Pembangunan Daerah serta isu strategis yang dapat diselesaikan dalam jangka menengah, sekaligus memastikan keselarasan dengan Visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Dalam perumusannya, Visi ini mempertimbangkan kondisi Daerah, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Visi Tahun 2025-2029 adalah:

”Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia dengan Menitikberatkan pada Pendidikan Agama dan Karakter”

Visi mencerminkan Pembangunan Daerah yang berfokus pada keberlanjutan, daya saing global dalam sektor pariwisata, serta penguatan nilai agama dan karakter masyarakat. Penjabaran makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan yang berkelanjutan, bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi. Pembangunan ini mengedepankan prinsip pembangunan yang tidak hanya memberi manfaat jangka pendek tetapi memastikan kesejahteraan generasi mendatang, mengutamakan pelestarian alam, budaya serta kesejahteraan masyarakat dalam setiap Program Pembangunan;
2. Mewujudkan wisata yang mendunia, bermakna mewujudkan destinasi wisata unggulan yang berstandar internasional dan berdaya saing dengan tetap menjaga kearifan lokal, kelestarian lingkungan serta memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, berkesan dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat; dan
3. Menitikberatkan pada pendidikan agama dan karakter, bermakna bahwa pembangunan akan berlandaskan pada penguatan nilai-nilai moral, etika, dan agama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pendidikan agama akan menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang berakhlak, toleran, dan memiliki integritas, sementara pendidikan karakter akan menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta semangat kebersamaan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Berdasarkan Visi pembangunan diatas, dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka dirumuskan Misi pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, Misi tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Misi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan;

3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan penataan pariwisata yang aman, nyaman dan berkesinambungan;
5. Meningkatkan kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan;
6. Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan;
7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani; dan
8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, Serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa.

Penjabaran dari 8 (delapan) Misi diatas adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
   Misi ini mencerminkan komitmen Daerah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada peningkatan mutu layanan serta penguatan sistem kesehatan yang responsif.
2. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan
   Salah satu aspek utama dalam menciptakan pembangunan manusia yang berkualitas adalah peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang bermutu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral, keterampilan hidup, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing, guna mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan
   Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur berarti memastikan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik harus mampu memperlancar mobilitas, meningkatkan konektivitas, serta mendorong perkembangan sektor-sektor strategis. Selain itu, infrastruktur juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan fasilitas yang layak, aman, dan nyaman.
   Dalam penerapannya, prinsip keberlanjutan harus diperhatikan dengan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta dapat bertahan dalam jangka panjang untuk kemanfaatan generasi mendatang.
4. Mewujudkan penataan pariwisata yang aman, nyaman dan berkesinambungan
   Sektor pariwisata merupakan lokomotif pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing Daerah. Pariwisata yang aman memastikan perlindungan bagi wisatawan, pelaku usaha, dan masyarakat melalui standar keselamatan serta pengelolaan risiko yang baik. Kenyamanan diwujudkan dengan penyediaan fasilitas yang memadai, layanan berkualitas, serta lingkungan yang bersih dan

tertata. Sementara itu, keberlanjutan dalam pariwisata menekankan pengelolaan yang ramah lingkungan, pelestarian budaya, serta pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

5. Meningkatkan kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan
   Misi ini mencerminkan upaya menciptakan karakter masyarakat yang religius dan cinta tanah air, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, serta semangat persatuan dan kesatuan. Melalui penguatan pendidikan agama, masyarakat diharapkan dapat mengamalkan ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, sementara peningkatan wawasan kebangsaan bertujuan menanamkan rasa nasionalisme, toleransi, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keberagaman dan persatuan. Dengan demikian, Misi ini berperan dalam membangun masyarakat yang berintegritas, berdaya saing, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa.
6. Mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan
   Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan bermakna memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh masyarakat. Kemandirian dalam ketahanan pangan mengacu pada kemampuan Daerah dalam memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan pangan secara optimal tanpa ketergantungan berlebihan pada pasokan dari luar. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan pangan. Selain itu, Misi ini juga menekankan pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat dan beragam, serta upaya pelestarian sumber daya alam guna mendukung keberlanjutan produksi pangan bagi generasi mendatang.
7. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Melayani
   Misi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Birokrasi yang bersih mengacu pada sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan menerapkan prinsip integritas serta pengelolaan sumber daya yang efisien. Sementara itu, birokrasi yang melayani menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, inovatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Misi ini juga mencakup penguatan kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi Kinerja pemerintah guna menciptakan Pemerintah Daerah yang yang profesional, efektif, dan terpercaya.
8. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, Serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa
   Pada Misi ini menekankan upaya menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pembangunan sosial dan ekonomi yang merata serta berkelanjutan. Dalam aspek kesejahteraan sosial, berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan sosial, serta pemberdayaan kelompok rentan. Dari sisi perekonomian, yaitu memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, koperasi, dan pemanfaatan potensi Daerah guna meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, penguatan dan pemberdayaan desa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa, optimalisasi dana desa, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dengan Misi ini,

diharapkan tercipta kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyelarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Penyelarasan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Tahun 2025-2029

RPJPD Tahun 2025-2045	RPJMD Tahun 2025-2029
Visi: Kabupaten Pangandaran Impresif, Inklusif, Maju dan Berkelanjutan	Visi: Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia Dengan Menitikberatkan Pada Pendidikan Agama Dan Karakter
Misi	Misi
Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Unggul	Misi 1: Mempermudah Akses Dan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan
Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Sejahtera dengan Penguatan Pariwisata	Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, Serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, Dan Berkesinambungan
Misi 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien serta Berbasis Teknologi	Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani
Misi 4: Mewujudkan Stabilitas Wilayah	Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan	Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan
Misi 6: Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terkoneksi	Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan
Misi 7: Mengembangkan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Tangguh Bencana	Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan
Misi 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029 menunjukkan keselarasan dalam arah Pembangunan Daerah dengan fokus pada keberlanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, penguatan sektor unggulan seperti pariwisata serta pembangunan infrastruktur dan ketahanan ekonomi.

Sedangkan penyelarasan dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penyelarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

Daerah	Provinsi Jawa Barat	Nasional (Asta Cita)
Misi 1: Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	Misi 3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Daerah	Provinsi Jawa Barat	Nasional (Asta Cita)
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan	Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan	Misi 2: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan	Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan

Daerah	Provinsi Jawa Barat	Nasional (Asta Cita)
Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa	dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif Misi 4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*	keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan langkah yang dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi suatu Daerah dalam periode perencanaan. Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan utama yang memiliki dampak signifikan terhadap Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, setiap Misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 harus selaras dengan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Adapun keselarasan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Keterkaitan Misi dan Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMD Tahun 2025-2029	Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029
M1	Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
M2	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
M3	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	- Penyediaan Infrastruktur Dasar - Aksesibilitas Wilayah - Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
M4	Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan	Pariwisata Inklusif dan Impresif
M5	Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing
M6	Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan Daerah
M7	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	- Kesehatan Fiskal - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
M8	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa	- Kesejahteraan Sosial - Pertanian, Kelautan, dan Sumberdaya Lokal sebagai Kekuatan Perekonomian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.1.2 Tujuan dan Sasaran RPMJD Tahun 2025-2029

Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahapan strategis dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran ini berperan sebagai penjabaran konkret dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Tujuan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 harus mampu mencerminkan kondisi ideal yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, Sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029 harus bersifat lebih spesifik, terukur, dan dapat diimplementasikan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk mewujudkan Tujuan pembangunan. Agar RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berjalan secara efektif, Tujuan dan Sasaran ini menjadi dasar dalam penyusunan berbagai Program, kegiatan, dan Indikator Kinerja bagi Perangkat Daerah. Dengan demikian, seluruh sektor pembangunan dapat bergerak selaras dan berkontribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, berikut disajikan Tujuan Pembangunan tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan;

5. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif;
6. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif; dan
8. Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa.

Berdasarkan rumusan Tujuan di atas maka berikut disajikan hasil rumusan Sasaran Pembangunan tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah;
3. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;
4. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau;
5. meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
6. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana;
7. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata melalui tata kelola yang berkelanjutan;
8. Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian Daerah;
9. Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan Daerah;
10. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama; dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat;
11. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
12. Meningkatnya tingkat ketahanan pangan Daerah;
13. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas;
14. meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan Daerah;
15. meningkatnya sistem inovasi Daerah dan kolaborasi lintas sektor;
16. Meningkatnya perekonomian wilayah;
17. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
18. Masyarakat desa yang berdaya saing.

Pemahaman terhadap linearitas Misi, Tujuan hingga Sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian RPJMD Tahun 2025-2029 pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 4 Matriks Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1: Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Kesehatan	1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	2.1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Capaian Standar Pelayanan Minimal pendidikan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan	3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	3.1 meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	persentase cakupan layanan infrastruktur
			3.2 Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Indeks Konektivitas Wilayah
			3.3 meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			3.4 Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	indeks risiko bencana
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan	4. Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata	4.1 Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Wisatawan
			4.2 Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian Daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto
			4.3 Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan	5. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta	Indeks Kesalehan Sosial	5.1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	kehidupan berkebangsaan yang partisipatif		kehidupan sosial dan bermasyaraka t	
			5.2 Terwujudnya kehidupan bermasyaraka t yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan	6. Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkaua n, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	6.1 Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupa n Konsumsi Pangan
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	7.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
			7.2 meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional
			7.3 meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			7.4 meningkatnya sistem inovasi Daerah dan kolaborasi lintas sektor	Indeks Daya Saing Daerah
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan	8. Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat,	Laju Pertumbuhan Ekonomi	8.1 Meningkatnya	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa	dan kemandirian desa		perekonomian wilayah	Produk Domestik Regional Bruto
			8.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
			8.3 Masyarakat Desa yang berdaya saing	Indeks Desa Membangun

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Dalam mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 maka dibutuhkan konsistensi dari penjabaran Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran sebagai tolak ukur yang menentukan efektivitas Pembangunan Daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Di bawah ini dijabarkan konsistensi penurunan Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan serta capaian target.

Tabel 3. 5 Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Indikator RPJMD Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	1	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Kesehatan	Poin	84,78	85,14	85,49	85,85	86,20	86,55	86,91
	1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,34	75,57	75,80	76,03	76,26	76,49
Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan	2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pendidikan	Poin	61,19	61,62	62,06	62,5	62,94	63,39	63,84
	2.1	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Capaian SPM pendidikan	Nilai	80	82	84	86	88	90	92
Misi 3. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas	3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,70	85,88	85,96	86,04	86,12	86,20	86,28

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Infrastruktur yang Berkelanjutan		berkualitas dan berkelanjutan									
	3.1	meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	persentase cakupan layanan infrastruktur	Persen	NA	38,10	40,47	42,80	47,64	49,98	52,14
	3.2	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	1,73	1,75	1,77	1,79	1,81	1,83	1,85
	3.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,99	66,01	66,26	66,51	67,77	67,02	67,27
	3.4	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Indeks risiko bencana	Poin	133,13	133,00	131,35	129,7	128,05	126,4	124,75
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan	4	Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	N/A	0,2	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		dan berkelanjutan									
	4.1	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Wisatawan	Poin	NA	70	72	74	77	80	82
	4.2	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	10,13	10,36	10,43	10,69	11,34	11,40	11,47
	4.3	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	52	53	55	57	59	61
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama	5	Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,14	82,34	82,54	82,74	82,94	83

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dan Wawasan Kebangsaan		kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif									
	5.1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	73,09	73,78	74,47	75,16	75,85	76
	5.2	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	NA	63,7	67,7	71,7	75,7	79,7	83,7
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan	6	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	83,86	83,96	84,06	84,16	84,26	84,36	84,46

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		merata serta berkelanjutan									
	6.1	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,22	4,11	3,96	3,78	3,57	3,34	3,12
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	76,46	76,50	76,80	77,00	78,00	79,00	80,00
	7.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Poin	67,98	70,39	72,79	75,20	77,60	80,01	80,01
	7.2	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	Indeks Integritas Nasional	Poin	65,66	71,85	72,37	72,90	73,42	73,94	74,46
	7.3	meningkatnya Kinerja tata	Indeks Pengelolaan	Poin	N/A	58,8	59,69	60,51	61,34	62,16	62,98

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		kelola keuangan daerah	Keuangan Daerah								
	7.4	meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	indeks daya saing daerah	Poin	3,65	3,87	3,90	3,93	3,95	3,98	4,01
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa	8	Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,2	5,62	5,65	5,78	6,03	5,59
	8.1	Meningkatnya perekonomian wilayah	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	NA	35,51	35,55	35,65	35,83	35,88	35,98
	8.2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,75	8,20	7,78	6,98	6,02	4,99	4,6

MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	8.3	Masyarakat Desa yang berdaya saing	Indeks Desa Membangun	Poin	0,84	0,8613	0,8713	0,8813	0,8913	0,9013	1,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2 Arah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah secara bertahap. Sebagai bentuk konkrit dari Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan yang lebih optimal guna mencapai Tujuan pembangunan secara efektif. Selain itu, Arah Kebijakan juga berfungsi sebagai panduan dalam menentukan tahapan pembangunan selama periode perencanaan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih agar Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dapat tercapai secara bertahap. Arah Kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran atas Arah Kebijakan RPJPD 2025-2045 tahap I dengan tema "Perkuat Pondasi" diantaranya yakni:

1) Peningkatan Pemenuhan pelayanan dan aksesibilitas Masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial;
2) Penyiapan tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan pasar dan Pengembangan destinasi sarana dan prasarana pariwisata;
3) Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Peningkatan Pendapatan Daerah untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan sumber pembiayaan inovatif.
4) Peningkatan Keamanan Daerah yang bersih dari konflik sosial, politik, dan agama;
5) Pelestarian Budaya dan Tradisi serta Peningkatan Kepedulian terhadap lingkungan;
6) Peningkatan Pemerataan dan kualitas Infrastruktur serta pengembangan transportasi massal;
7) Penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar yang merata; dan
8) Peningkatan pembangunan berkelanjutan pada pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan.

Penetapan Arah Kebijakan harus selaras dengan Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Dalam penyusunannya, Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan berbagai aspek, termasuk potensi yang dimiliki, peluang yang tersedia, kendala yang mungkin dihadapi, serta ancaman yang berpotensi muncul selama periode pemerintahan. Oleh karena itu, antisipasi terhadap berbagai kemungkinan, baik positif maupun negatif, sangat diperlukan agar Pembangunan Daerah dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sebagai hasil keputusan dari berbagai pemangku kepentingan, Arah Kebijakan menjadi pedoman utama dalam merumuskan Strategi yang tepat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan tetap selaras dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah pada setiap tahapan selama periode perencanaan.

Tabel 3. 6 Tema/Pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029

2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyehatan Fiskal	Penyehatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintah Daerah Melalui Digitalisasi Terintegrasi	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata	Peningkatan SDM Unggul dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1. Tema Pembangunan Tahun 2025

   Pada awal tahun perencanaan tema Pembangunan Daerah adalah Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Penyehatan Fiskal yang merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan meningkatkan daya saing wilayah dengan memastikan kondisi keuangan daerah yang sehat, stabil, dan berkelanjutan. Penyehatan fiskal mencakup berbagai langkah strategis, seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, efisiensi dalam belanja Daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta pengelolaan Utang Daerah. Dengan fiskal yang sehat, Daerah memiliki kemampuan lebih besar untuk berinvestasi dalam infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, serta mendukung sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, stabilitas fiskal menciptakan iklim investasi yang kondusif, menarik investor, dan mendorong inovasi serta kewirausahaan, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Daerah dalam skala nasional maupun global.

2. Tema Pembangunan Tahun 2026

   Penyehatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Digitalisasi Terintegrasi adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta administrasi Pemerintahan Daerah dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi. Penyehatan fiskal bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja Daerah melalui optimalisasi penerimaan Daerah, efisiensi pengeluaran, serta pengelolaan aset dan utang secara berkelanjutan. Sementara itu, tata kelola pemerintahan yang baik diwujudkan melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi terintegrasi memungkinkan penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan layanan publik berbasis teknologi, serta pemantauan dan evaluasi keuangan Daerah secara langsung. Dengan penerapan sistem digital yang terhubung antar instansi, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan anggaran, mempercepat proses administrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih efektif dan inovatif.

3. Tema Pembangunan Tahun 2027

   Tema pembangunan Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata mengacu pada upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan dan optimalisasi sektor pariwisata. Tema ini menekankan pada pemanfaatan potensi pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi dengan mendorong investasi, inovasi, dan kolaborasi antar sektor untuk menciptakan dampak ekonomi yang luas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

4. Tema Pembangunan Tahun 2028

   Tema pembangunan Peningkatan sumber daya manusia Unggul dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memastikan distribusi kesejahteraan yang adil dan merata. Pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penguatan inovasi dan daya saing tenaga kerja. Di sisi lain, pemerataan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan Strategi yang terintegrasi, tema ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengurangi kesenjangan sosial, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

5. Tema Pembangunan Tahun 2029

Tema pembangunan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah menekankan pada upaya pengembangan dan perbaikan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik menjadi pondasi utama dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat mobilitas penduduk dan barang, serta mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan ini mencakup transportasi yang lebih efisien, penyediaan layanan dasar yang memadai, serta pemanfaatan teknologi dalam infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing wilayah. Selain itu, aspek keberlanjutan dan ketahanan terhadap bencana juga menjadi perhatian utama agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Tema pembangunan yang ditetapkan setiap tahunnya tidak membatasi Program dan kegiatan di luar tema pada masing-masing tahun, akan tetapi tema pembangunan menjadi arahan bahwa Pemerintah Daerah memiliki fokus pada tema dimaksud. Perwujudan atas Tematik Pembangunan Daerah tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini salah satunya diwujudkan dengan anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk tema setiap tahunnya. Secara detail Arah Kebijakan untuk tema pembangunan setiap tahunnya dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 7 Arah Kebijakan Sesuai Tema Pada Setiap Tahun Perencanaan RPJMD Tahun 2025-2029

TAHUN	TEMATIK/ PENTAHAPAN	ARAH KEBIJAKAN TEMATIK/PENTAHAPAN	MISI
2025	Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Penyehatan Fiskal	- Fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah - Penyiapan dokumen perencanaan untuk pembangunan tahun berikutnya; dan - Mengendalikan utang Daerah agar tidak membebani keuangan Daerah di masa depan.	Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani
2026	Penyehatan Fiskal dan Tata Kelola Pemerintah Daerah Melalui Digitalisasi Terintegrasi	- Efisiensi belanja Daerah dengan memprioritaskan Program yang berdampak langsung pada masyarakat; dan - Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta efisien.	

TAHUN	TEMATIK/ PENTAHAPAN	ARAH KEBIJAKAN TEMATIK/PENTAHAPAN	MISI
2027	Akselerasi Perekonomian Berbasis Pariwisata	- Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata; - Meningkatkan promosi digital dan branding melalui event dan kolaborasi dengan platform; - Mengembangkan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata; - Menarik investor melalui promosi dan mempermudah prosedur investasi; dan - Mendorong peningkatan produksi sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah produk.	Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan
2028	Peningkatan SDM Unggul dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; dan - Mendorong perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.	Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
		- Menerapkan pendidikan karakter untuk memperkuat kualitas pendidikan; dan - Meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan promosi satuan pendidikan dan mewujudkan satuan pendidikan unggulan.	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan
		- Peningkatan kemandirian desa; dan - Pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, serta Penguatan dan Pemberdayaan Desa
2029	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah	- Optimalisasi infrastruktur dasar; - Penguatan Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas - Mendorong dan mengusahakan pembiayaan inovatif untuk peningkatan kualitas infrastruktur wilayah; - Percepatan pengentasan kemiskinan.	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Keselarasan antara Misi, Strategi, dan Arah Kebijakan pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan memiliki arah yang jelas dan terintegrasi. Misi pembangunan mencerminkan Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, sementara Arah Kebijakan kemudian berperan sebagai panduan operasional, selanjutnya Strategi menjadi langkah-langkah utama yang harus dilakukan untuk mencapai Arah Kebijakan tersebut. Arah kebijakan untuk setiap misi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
VISI: Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia Dengan Menitikberatkan Pada Pendidikan Agama Dan Karakter		
Misi 1: Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan		
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit; - Peningkatan jangkauan pelayanan satuan kesehatan tingkat masyarakat (puskesmas dan puskesmas pembantu); - Penguatan sumber daya manusia bidang kesehatan; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan; dan - Pencegahan dan penanggulangan stunting.
Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan		
Mewujudkan SDM Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	- Peningkatan akses dan kesempatan pendidikan; - Penguatan pendidikan paket dan pendidikan non formal; - Pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik; - Penguatan mutu dan daya saing pendidikan; dan - Penerapan pendidikan karakter.
Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan		
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	- Mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif; - Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan; - Peningkatan sistem pengelolaan air limbah dan kualitas air; - Optimalisasi pengelolaan air minum dan regulasi air tanah; - Optimalisasi kelembagaan terkait perumahan dan permukiman; dan - Mengoptimalkan rehabilitasi daerah aliran sungai, pengendalian pemanfaatan lahan, dan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir.
	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	- Penyediaan layanan transportasi yang efisien; - peningkatan infrastruktur transportasi; - manajemen lalu lintas pada pusat-pusat kegiatan; - mendorong reaktivasi moda kereta api melalui koordinasi lintas sektor; - mendorong optimalisasi sarana dan prasarana moda transportasi udara melalui koordinasi lintas sektor; dan - mendorong optimalisasi sarana dan prasarana moda transportasi laut dan angkutan sungai dan

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		penyebrangan melalui koordinasi lintas sektor;
	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan; - Penguatan regulasi persampahan; - optimalisasi konservasi wilayah untuk mendukung ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan; - optimalisasi infrastruktur persampahan; dan - mendorong upaya konservasi lingkungan hidup melalui perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, serta pelibatan akfit masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	- Penguatan kelembagaan, kolaborasi, dan manajemen penanggulangan bencana - Pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan data spasial - Integrasi kebijakan kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang; dan - Peningkatan kapasitas masyarakat dan edukasi kebencanaan
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan		
Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	- Pengelolaan destinasi wisata berbasis ekowisata dan pengurangan risiko bencana; - Diversifikasi produk dan atraksi wisata berbasis potensi lokal - Penguatan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Infrastruktur Ramah Lingkungan; - Segmentasi destinasi wisata mulai dari wisata masal hingga wisata minat khusus; dan - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata
	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	- Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan produk ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata; - Peningkatan promosi digital dan promosi wisata; - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi - Peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan; dan - Penyediaan insentif dan kemudahan investasi di sektor pariwisata.
	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah	- Pelestarian budaya lokal sebagai identitas wisata; - Revitalisasi budaya lokal dan tradisi masyarakat - Penguatan peran komunitas budaya dan lembaga adat; dan - Pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan		
Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan	- Pemberdayaan, masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; - Penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama; dan

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif	dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat	- Penguatan peran lembaga keagamaan dalam masyarakat;
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	- Memperkuat penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; - Penegakan hukum yang adil dan menjunjung hak asasi manusia; dan - Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan.
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan		
Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	- Penerapan teknologi pertanian modern dan tepat guna; - Diversifikasi pangan; - Perbaikan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan daerah; - Optimalisasi distribusi pangan; - Peningkatan kapasitas petani dan nelayan; dan - Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Melayani		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan publik yang baik dan profesional	- Penguatan sistem merit; - Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik & Pusat Data); - Meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan; dan - Optimalisasi reformasi agraria melalui sinergi penataan aset dan penataan akses, pemberdayaan akses ekonomi, penguatan regulasi, penyelesaian konflik, serta kolaborasi lintas sektor.
	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	- Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Penguatan Integritas dan Transparansi Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik; - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintah
	meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan Daerah	- Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja - Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah; - Meningkatkan Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; - Penguatan peran jasa keuangan syariah dan dana umat dalam ekosistem syariah;
	meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	- Penerapan Inovasi dan Hasil Penelitian dalam Pembangunan Daerah; - Optimalisasi Kolaborasi *Pentahelix* untuk Inovasi Pembangunan Daerah;

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		- Peningkatan integrasi inovasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah; dan - Pendampingan dan monitoring dan evaluasi kinerja inovasi secara berkala.
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, Serta Penguatan Dan Pemberdayaan Desa		
Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian Desa	Meningkatnya perekonomian wilayah	- Peningkatan keterampilan kerja penduduk usia kerja; - Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM; - Mendukung peningkatan sarana dan prasarana layanan keuangan; dan - Mengoptimalkan fungsi tempat pelelangan ikan serta meningkatkan koordinasi untuk optimalisasi pelabuhan pendaratan ikan.
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	- Percepatan pengentasan kemiskinan; - Pelibatan dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor; - Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat - Penguatan peran keluarga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat;
	Masyarakat Desa yang berdaya saing	- Optimalisasi ekonomi berbasis desa melalui inovasi digital serta tata kelola yang baik; - Peningkatan kolaborasi antar desa dan kemitraan dengan pihak ketiga; - Optimalisasi peran desa dalam mewujudkan desa tangguh bencana, mandiri pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Hasil analisis, 2025

3.2.2 Strategi Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tahun 2025-2029 serta menciptakan pembangunan yang lebih terarah dalam lima tahun ke depan, diperlukan perumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang efektif. Visi dan Misi pembangunan yang telah ditetapkan harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuan dan Sasaran yang kemudian diterjemahkan ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan yang konkret. Strategi dan Arah Kebijakan ini merupakan perencanaan yang memungkinkan pencapaian Tujuan pembangunan secara lebih efisien dan efektif. Dalam proses penyusunan Strategi, menggunakan pendekatan analisis SWOT *(Strength-Weakness-Opportunity-Threat)* serta mempertimbangkan integrasi dengan perencanaan kewilayahan. Dengan metode ini, berbagai potensi dan tantangan baik dari faktor internal maupun eksternal diidentifikasi sebagai dasar dalam menentukan Strategi pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang holistik serta mampu menjawab tantangan Pembangunan Daerah di masa mendatang. Lebih lengkapnya keselarasan mulai dari Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 9 Keselarasan Misi, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
VISI: Pembangunan Yang Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Wisata Pangandaran Mendunia Dengan Menitikberatkan Pada Pendidikan Agama Dan Karakter				
Misi 1: Mempermudah Akses dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan				
Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit; - Peningkatan jangkauan pelayanan satuan kesehatan tingkat masyarakat (puskesmas dan puskesmas pembantu); - Penguatan sumber daya manusia bidang kesehatan; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan; dan - Pencegahan dan penanggulangan stunting.	- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; - Memberikan Program beasiswa dokter spesialis; - Menerapkan pola-pola pendekatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang mendorong perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; - Mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata (khususnya Daerah bagian utara); dan - Memberikan makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk penanganan Stunting.	- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Misi 2: Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan				
Mewujudkan SDM Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	- Peningkatan akses dan kesempatan pendidikan; - Penguatan pendidikan paket dan pendidikan non formal; - Pemerataan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik; - Penguatan mutu dan daya saing pendidikan; dan - Penerapan pendidikan karakter. -	- Memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu yang berprestasi; - Mendorong pelaksanaan pendidikan non formal yang lebih baik; - Melakukan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara cermat; - Meningkatkan kualitas pendidikan dalam Daerah serta meningkatkan promosi satuan pendidikan dan mewujudkan satuan pendidikan unggulan; dan - Menerapkan pendidikan karakter untuk memperkuat kualitas pendidikan. -	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Pengembangan Bahasa dan Sastra - Program Pembinaan Perpustakaan - Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Misi 3: Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur yang Berkelanjutan				
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan	meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	- Mendorong pembangunan infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif; - Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan; - Peningkatan sistem pengelolaan air limbah dan kualitas air; - Optimalisasi pengelolaan air minum dan regulasi air tanah; - Optimalisasi kelembagaan terkait perumahan dan permukiman; dan - Mengoptimalkan rehabilitasi daerah aliran sungai, pengendalian pemanfaatan lahan, dan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam penanganan banjir.	- Melakukan Pembangunan Infrastruktur melalui skema pembiayaan alternatif; - Membangun dan meningkatkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* di seluruh Daerah; - Membangun dan meningkatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah kawasan; - Meningkatkan upaya penanganan banjir terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor; - Melakukan Optimalisasi pengelolaan air minum, penyusunan perda air tanah, dan peningkatan kesadaran penggunaan air minum aman	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Penataan Bangunan Gedung

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
			perpipaan kepada masyarakat; dan - Melakukan Optimalisasi kelembagaan terkait perumahan dan permukiman untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Kawasan Permukiman - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Pengembangan Perumahan - Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	- Penyediaan layanan transportasi yang efisien; - Peningkatan infrastruktur transportasi; - Manajemen lalu lintas pada pusat-pusat kegiatan; - Mendorong reaktivasi moda kereta api melalui koordinasi lintas sektor; - Mendorong optimalisasi sarana dan prasarana moda transportasi udara melalui koordinasi lintas sektor; dan - Mendorong optimalisasi sarana dan prasarana moda transportasi laut dan angkutan sungai dan penyebrangan melalui koordinasi lintas sektor;	- Menyediakan layanan transportasi antar destinasi wisata; - Mendorong peningkatan aksesibilitas wilayah termasuk dari dan menuju Kabupaten/Kota sekitar baik itu moda angkutan darat, laut, udara, sungai, dan penyebrangan; - Meningkatkan akses antar pusat kegiatan; dan - Melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi pada wilayah perkotaan dan pariwisata serta optimalisasi retribusi parkir.	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Program Pengelolaan Pelayaran
	meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan; - Penguatan regulasi persampahan; - Optimalisasi konservasi wilayah untuk mendukung ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan; - Optimalisasi infrastruktur persampahan; dan - Mendorong upaya konservasi lingkungan hidup melalui perlindungan ekosistem, pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan kritis, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam	- Memfasilitasi dan mendukung Bank Sampah untuk bekerjasama dengan pemangku kepentingan guna mengolah sampah organik; - Melakukan Upaya pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya melalui peningkatan kesadaran masyarakat; - Meningkatkan kualitas dan Penegakkan hukum lingkungan hidup serta optimalisasi pengaturan konservasi wilayah; dan - Meningkatkan upaya konservasi lingkungan.	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Program Pengelolaan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Program Pengelolaan Persampahan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan dan

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	- Penguatan kelembagaan, kolaborasi, dan manajemen penanggulangan bencana - Pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan data spasial - Integrasi kebijakan kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang; dan - Peningkatan kapasitas masyarakat dan edukasi kebencanaan	- Melakukan optimalisasi sistem peringatan dini bencana (*early warning system*); - Meningkatkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan peringatan dini terpadu berbasis masyarakat; dan - Menyelaraskan penataan ruang dan pengembangan informasi *geospasial* berbasis risiko bencana untuk pembangunan wilayah.	- Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Misi 4: Mewujudkan Penataan Pariwisata yang Aman, Nyaman, dan Berkesinambungan				
Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan	- Pengelolaan destinasi wisata berbasis ekowisata dan pengurangan risiko bencana; - Diversifikasi produk dan atraksi wisata berbasis potensi lokal - Penguatan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan dan Infrastruktur Ramah Lingkungan; - Segmentasi destinasi wisata mulai dari wisata masal hingga wisata minat khusus; dan - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata	- Meningkatkan pemanfaatan potensi daya tarik wisata untuk mengimplementasikan sistem mitigasi bencana yang terintegrasi dengan pengelolaan destinasi ramah lingkungan; - Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia kepariwisataan dan *eco-friendly infrastructure* yang aksesibel; - Menerapkan teknologi inovasi dalam layanan dan fasilitas pariwisata; dan - Mengembangkan atraksi wisata yang unik dan autentik berbasis potensi daya tarik dan karakteristik wilayah.	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata - Program Pemasaran Pariwisata
	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah	- Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan produk ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata; - Peningkatan promosi digital dan promosi wisata; - Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas destinasi - Peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan; dan - Penyediaan insentif dan kemudahan investasi di sektor pariwisata.	- Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata berbasis ekowisata untuk mengurangi degradasi lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim; - Meningkatkan promosi digital dan promosi melalui *event* dan kolaborasi dengan *platform* teknologi untuk menarik lebih banyak wisatawan; dan - Mengembangkan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata.	- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah	- Pelestarian budaya lokal sebagai identitas wisata; - Revitalisasi budaya lokal dan tradisi masyarakat - Penguatan peran komunitas budaya dan lembaga adat; dan - Pengembangan budaya lokal sebagai daya tarik wisata -	- Memanfaatkan komunitas seni untuk memperkenalkan budaya lokal ke kancah internasional ; - Mengintegrasikan tradisi lokal dalam produk wisata untuk melawan pergeseran budaya; - Mengadakan festival budaya secara rutin yang melibatkan masyarakat lokal dan wisatawan; - Menginisiasi kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur seni dan budaya; dan - Mengembangkan sistem pendokumentasian budaya lokal yang berkelanjutan dan berbasis teknologi digital untuk memperkuat identitas daerah	- Program Pengembangan kebudayaan - Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Misi 5: Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama dan Wawasan Kebangsaan				
Mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat	- Pemberdayaan, masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban; - Penguatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama; dan - Penguatan peran lembaga keagamaan dalam masyarakat; -	- Memberdayakan masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; - Mengorganisir kegiatan sosial lintas agama, seperti bakti sosial, gotong-royong, dan acara budaya bersama yang dapat mempererat hubungan antar umat beragama; - Menguatkan peran lembaga keagamaan (tempat peribadatan) terdekat dengan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan -	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	- Memperkuat penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; - Penegakan hukum yang adil dan menjunjung hak asasi manusia; dan - Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan.	- Memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; dan - Meningkatkan peran organisasi masyarakat dalam pembangunan.	- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Misi 6: Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan				
Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah	- Penerapan teknologi pertanian modern dan tepat guna; - Diversifikasi pangan; - Perbaikan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan daerah; - Optimalisasi distribusi pangan; - Peningkatan kapasitas petani dan nelayan; dan - Penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.	- Menerapkan sistem pertanian presisi untuk pertanian berkelanjutan; - Peningkatan diversifikasi pangan dan inovasi teknologi pasca panen untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan; - Membangun dan revitalisasi sarana dan prasarana pertanian, serta memperpendek rantai distribusi; - Meningkatkan Penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan Daerah; - Menyediakan pupuk yang lebih stabil dan mendorong penggunaan pupuk organik; dan - Mendorong regenerasi petani dan nelayan melalui edukasi dan insentif.	- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Pengawasan Keamanan Pangan - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Perizinan Usaha Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian - Program Penanganan Kerawanan Pangan
Misi 7: Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih dan Melayani				
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan	- Penguatan sistem merit; - Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Digital (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik & Pusat Data); - Meningkatkan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan; dan	- Meningkatkan kompetensi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara melalui sistem meritokrasi; - Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
	publik yang baik dan profesional	- Optimalisasi reformasi agraria melalui sinergi penataan aset dan penataan akses, pemberdayaan akses ekonomi, penguatan regulasi, penyelesaian konflik, serta kolaborasi lintas sektor.	penyelenggaraan pelayanan publik; - Mengoptimalisasi penerapan Reformasi Birokrasi; - Mengoptimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pembangunan pusat data; - Mengoptimalisasi kolaborasi *pentahelix*; dan - Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi agraria.	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Program Kepegawaian Daerah - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Program Pendaftaran Penduduk - Program Pencatatan Sipil - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Program Pengelolaan Profil - Program Pengelolaan Arsip - Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan - Program Penatagunaan Tanah

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				- Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas	- Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Penguatan Integritas dan Transparansi Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik; - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemerintah	- Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Daerah; - Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik; dan - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi secara terbuka melalui *website* atau aplikasi.	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
	meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan Daerah	- Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja - Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah; - Meningkatkan Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; - Penguatan peran jasa keuangan syariah dan dana umat dalam ekosistem syariah;	- Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal; - Meningkatkan pembiayaan inovatif dan kolaboratif untuk pemerataan infrastruktur Daerah; - Meningkatkan digitalisasi tata kelola keuangan Daerah; - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset Daerah; - Optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan; dan - Mengoptimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah dalam pembangunan.	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Pengelolaan pendapatan Daerah - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	meningkatnya sistem inovasi daerah dan kolaborasi lintas sektor	- Penerapan Inovasi dan Hasil Penelitian dalam Pembangunan Daerah; - Optimalisasi Kolaborasi *Pentahelix* untuk Inovasi Pembangunan Daerah; - Peningkatan integrasi inovasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah; dan - Pendampingan dan monitoring dan evaluasi kinerja inovasi secara berkala.	- Meningkatkan akurasi data untuk pembangunan presisi melalui pemanfaatan forum satu data; - Meningkatkan Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan solusi inovatif; dan - Menerapkan inovasi dan hasil kelitbangan dalam Pembangunan Daerah.	- Program Riset dan Inovasi Daerah - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Misi 8: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian, Serta Penguatan Dan Pemberdayaan Desa				

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian Desa	Meningkatnya perekonomian wilayah	- Peningkatan keterampilan kerja penduduk usia kerja; - Peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM; - Mendukung peningkatan sarana dan prasarana layanan keuangan; dan - Mengoptimalkan fungsi tempat pelelangan ikan serta meningkatkan koordinasi untuk optimalisasi pelabuhan pendaratan ikan.	- Meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausaha baru; - Meningkatkan Literasi Digital dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah; - Menerapkan digitalisasi Produk dan Layanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; - Menarik investor melalui promosi dan mempermudah prosedur investasi; - Mendorong peningkatan produksi sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah produk; - Revitalisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan; - Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan produk keuangan; dan - Mendorong optimalisasi fungsi pelabuhan pendaratan ikan.	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro - Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Pengembangan Ekspor - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Program Promosi Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengelolaan Data

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	- Percepatan pengentasan kemiskinan; - Pelibatan dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor; - Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat - Penguatan peran keluarga dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat;	- Mengentaskan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi serta akurasi data antar pemangku kepentingan pengampu; - Meningkatkan Pelibatan dan pemberdayaan perempuan pada sektor-sektor perekonomian; - Memberikan pelatihan keterampilan vokasi dan keahlian kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan lapangan pekerjaan; - Meningkatkan Pemberdayaan dan peningkatan peran keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera; dan - Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Sosial serta kualitas dan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan - Program Rehabilitasi Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Program Hubungan Industrial - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM
				- Program Pemenuhan Hak Anak - Program Perlindungan Khusus Anak - Program Pengendalian Penduduk - Program Pembinaan Keluarga Berencana - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
	Masyarakat Desa yang berdaya saing	- Optimalisasi ekonomi berbasis desa melalui inovasi digital serta tata kelola yang baik; - Peningkatan kolaborasi antar desa dan kemitraan dengan pihak ketiga; - Optimalisasi peran desa dalam mewujudkan desa tangguh bencana, mandiri pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.	- Mendorong Program Satu Desa Satu Produk; - Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa melalui pemanfaatan akses teknologi digital dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa; dan - Meningkatkan kualitas Kinerja dan tata kelola pemerintah desa.	- Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Penataan Desa - Program Peningkatan Kerjasama Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut yang memuat pernyataan Visi dan Misi beserta Tujuan, Sasaran, dan *Outcome*, Program Pembangunan Daerah, beserta indikatornya selama periode tahun 2025–2029. Sebagaimana dijelaskan pada awal bab, Visi dan Misi disusun sebagai bentuk komitmen strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan Sasaran dirumuskan untuk memastikan keterukuran capaian pembangunan, dan Program pembangunan merupakan instrumen operasional yang menggambarkan upaya nyata Pemerintah Daerah dalam menjawab isu-isu strategis. Setiap Program pembangunan merupakan pengejawantahan dari outcome dengan Indikator Kinerja untuk setiap *outcome* atau Program pembangunan.

Tabel 3. 10 Visi Misi Tujuan Sasaran Program RPJMD Tahun 2025-2029

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH			INDIKATOR KINERJA
VISI			
1	MISI	MEMPERMUDAH AKSES DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN	
1.1	TUJUAN	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Indeks Kesehatan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
1. 1. 1	SASARAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar
				Persentase Penerapan PHBS
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial
		Meningkatnya penanganan izin sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani
		Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya
2	MISI	MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN		
2.1	TUJUAN	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pendidikan
2.1.1	SASARAN	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya Nilai Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya kualitas pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kelulusan siswa
		Meningkatnya capaian Rasio guru dan peserta didik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Meningkatnya pembiasaan siswa pada penggunaan bahasa ibu dengan benar	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatnya pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
3	MISI	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN		
3.1	TUJUAN	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
3. 1. 1	SASARAN	meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		persentase cakupan layanan infrastruktur
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
		Meningkatkan akses air minum aman Kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (persen)
		Meningkatkan akses sanitasi lingkungan aman bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya sarana persampahan
		Terselenggaranya bangunan Gedung yang optimal dan sesuai regulasi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Regulasi
		Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik
		Meningkatnya pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani
		Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen))
		Terpenuhinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
3. 1. 2	SASARAN	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Indeks Konektivitas Wilayah
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
		Meningkatnya perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi angkutan sungai, danau, dan pelabuhan	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan yang Layak Fungsi
3. 1. 3	SASARAN	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola (taman, hutan kota)
		Meningkatnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Program Pengelolaan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola
		Meningkatnya pengolahan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		Meningkatnya ketaatan terhadap perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
				yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
		Terselesaikannya kasus pengaduan lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani oleh Pemerintah Daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Program Penghargaan yang diikuti
3. 1. 4	SASARAN	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		indeks risiko bencana
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana
				Persentase penanganan pasca bencana
		Meningkatnya waktu tanggap terhadap kejadian kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Response Time Rate*
		Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan
4	MISI	MEWUJUDKAN PENATAAN PARIWISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERKESINAMBUNGAN		
4.1	TUJUAN	Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan		Indeks Daya Saing Pariwisata
4.1.1	SASARAN	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan		Indeks Kepuasan Wisatawan
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan
4.1.2	SASARAN	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daerah		Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya
		Meningkatnya daya saing ekonomi kreatif berbasis produk lokal	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual
4.1.3	SASARAN	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan
	OUTCOME/ PROGRAM	Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang dilindungi
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola
5	MISI	MENINGKATKAN KUALITAS KEIMANAN, KETAQWAAN, DAN NASIONALISME MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
5.1	TUJUAN	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif		Indeks Kesalehan Sosial
5.1.1	SASARAN	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5.1.2	SASARAN	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya penerapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan
		Meningkatkan Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri
		Meningkatnya organisasi masyarakat yang memahami	Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Persentase Masyarakat yang memahami tentang

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		tentang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan	pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
		Terwujudnya stabilitas dan keamanan Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan Daerah
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi
		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan
		Meningkatnya kapasitas pemuda dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan
6	MISI	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN		
6.1	TUJUAN	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan
6.1.1	SASARAN	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya konsumsi masyarakat akan pangan sehat dan bergizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
		Tersedianya jumlah stok pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah desa yang memiliki cadangan pangan pemerintah desa
		Meningkatnya Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan
		Meningkatnya produktivitas Pangan daerah sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya Produksi Peternakan Daerah	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produksi Daging
				Jumlah Produksi Telur
		Terkendali dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Usaha Pertanian yang Berizin	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan
		Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani
		Berkurangnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan
7	MISI	MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI		
7.1	TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi
7.1.1	SASARAN	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat
		Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Meningkatnya tata kelola layanan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik
		Meningkatnya penyelenggaraan pengamanan sistem informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral
		Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara
				Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan lanjutan
				Persentase layanan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara
				Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unsur Pengukuran Kinerja
		Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pencapaian Program Legislasi Daerah yang terfasilitasi
				Persentase pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan
		Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
		Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama
		meningkatnya Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	Program Pengelolaan Profil	Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik
		Meningkatnya pengelolaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal
		Meningkatknya perlindungan dan penyelamatan arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengendalian perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah
				Indeks Tata Kelola Pengadaan
				Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian Daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi
				Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik
				Cakupan layanan kepegawaian
				Persentase Perencanaan dan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
				evaluasi Kinerja yang berkualitas
				Persentase pelayanan keuangan dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlayani
				Indeks Pelayanan Publik
				Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
				Tingkat Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah
		Menurunnya konflik, sengketa pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan
		Meningkatnya pelaksanaan penatagunaan tanah	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penggunaan Tanah dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya redistribusi bidang tanah	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah
7.1.2	SASARAN	meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas		Indeks Integritas Nasional
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan
				Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen evaluasi akuntabilitas Kinerja internal
				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
				Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
				Manajemen Risiko Indeks
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
				Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
7.1.3	SASARAN	meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian kualitas pengelolaan kas daerah
			Program Pengelolaan Keuangan	Cakupan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan penatausahaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dengan Implementasi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki keselarasan Program RPJMD dan RKPD
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
				Tanah dan Bangunan
				Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya
				Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
		Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel
7.1.4	SASARAN	meningkatnya sistem inovasi Daerah dan kolaborasi lintas sektor		Indeks Daya Saing Daerah
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah
8	MISI	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN, SERTA PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN DESA		
8.1	TUJUAN	Meningkatnya perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa		Laju Pertumbuhan Ekonomi
8.1.1	SASARAN	Meningkatnya perekonomian wilayah		Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan & Sektor Pariwisata)
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya jumlah pelaku usaha di dalam sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra
		Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang tertib legalitas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri kecil dan menengah yang berizin
		Optimalnya ketersediaan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
		Meningkatnya jumlah koperasi yang patuh	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya jumlah pengelola koperasi yang berkualitas	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang bersertifikat
		Meningkatnya volume usaha koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha
		Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat omsetnya	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib legalitas	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
		Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
		Meningkatnya kestabilan harga barang kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
		Meningkatnya nilai ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor barang dan jasa (persentase Produk Domestik Regional Bruto)
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tertib ukur	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku
		Meningkatnya penggunaan produk lokal	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk lokal oleh Pemerintah Daerah
		Meningkatnya iklim penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
		Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatnya Produksi Sektor Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
		Meningkatnya Jumlah Penanganan Laporan Tindak Penanganan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan
8.1.2	SASARAN	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Persentase Penduduk Miskin
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya Perekonomian Keluarga Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik
		Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup
		Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang dikelola
		Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
		Meningkatnya Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial lembaga dalam	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase meningkatnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		penanganan kemiskinan		penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Diselesaikan
		Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan yang kompeten
		Menurunnya angka pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diserap
		Meningkatnya Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi
		Menurunnya kasus ketenagakerjaan pada perusahaan	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani
		Meningkatnya laju kemandirian transmigran	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Laju Kemandirian Transmigran
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah
		Menurunnya Persentase perempuan korban kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
		Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan & pengembangan
		Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid
		Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak
		Menurunnya kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
		Terwujudnya keluarga berkualitas	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun

VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PERANGKAT DAERAH				INDIKATOR KINERJA
		Meningkatnya peserta Keluarga Berencana aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
		Menurunnya keluarga berisiko stunting	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga
8.1.3	SASARAN	Masyarakat Desa yang berdaya saing		Indeks Desa Membangun
	OUTCOME/ PROGRAM	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib
		Meningkatnya Penataan Desa	Program Penataan Desa	Persentase penataan desa
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
		Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.3 Program Prioritas Daerah

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, penetapan Program Prioritas pembangunan memiliki peran strategis sebagai arah utama pembangunan Daerah selama periode lima tahun. Program Prioritas menjadi bentuk konkret dari Visi, Misi, dan Tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dirumuskan, serta merupakan jawaban terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi Daerah secara aktual. Program Prioritas disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, analisis capaian pembangunan sebelumnya, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Dengan adanya Program Prioritas, Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang jelas dalam mengarahkan sumber daya yang terbatas agar digunakan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan dampak pembangunan yang maksimal.

Penetapan Program Prioritas menjadi semakin penting mengingat kebutuhan mendesak terhadap penyehatan fiskal, penguatan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Melalui Program Prioritas ini, Pemerintah Daerah dapat memfokuskan intervensi pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi, sekaligus memastikan tercapainya tujuan

pembangunan jangka menengah secara terukur. Program Prioritas ini menjadi pertimbangan dalam memilih Program Perangkat Daerah mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu dan Program yang dapat dilaksanakan kemudian.

Lebih dari itu, Program Prioritas juga menjadi instrumen dalam mengarahkan Perangkat Daerah, memperjelas target pembangunan lintas sektor, serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, Program Prioritas tidak hanya menjadi daftar kegiatan strategis, tetapi juga fondasi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam menjalankan mandat pembangunan Daerah.

Tabel 3. 11 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
VISI: PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN UNTUK MEWUJUDKAN WISATA PANGANDARAN MENDUNIA DENGAN MENITIKBERATKAN PADA PENDIDIKAN AGAMA DAN KARAKTER				
1	Program Prioritas	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan penataan belanja Daerah yang efisien dan produktif		
	Misi	MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI		
	Tujuan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, bersih dan inovatif		
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat
		Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Meningkatnya tata kelola layanan informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik
		Meningkatnya penyelenggaraan pengamanan sistem informasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman
		Meningkatnya kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral
		Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan Aparatur

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome	Nomenklatur Program	Indikator
			Sipil Negara
			Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan lanjutan
			Persentase layanan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara
			Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unsur Pengukuran Kinerja
	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pencapaian Program Legislasi Daerah yang terfasilitasi
			Persentase pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan
	Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
	Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang telah	Program Pengelolaan Informasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome	Nomenklatur Program	Indikator
	memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	Administrasi Kependudukan	kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama
	meningkatnya Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	Program Pengelolaan Profil	Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik
	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima		Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal
	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Mampu Memberikan Pelayanan Publik yang Prima	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengendalian perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah
			Indeks Tata Kelola Pengadaan
			Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian Daerah
	Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi
			Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik
			Cakupan layanan kepegawaian
			Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas
			Persentase pelayanan keuangan dan administrasi

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
				Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terlayani
				Indeks Pelayanan Publik
				Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
				Tingkat Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah
		Menurunnya konflik, sengketa pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan
		Meningkatnya pelaksanaan penatagunaan tanah	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penggunaan Tanah dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
		Terlaksananya redistribusi bidang tanah	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah
	Sasaran	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan
				Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen evaluasi akuntabilitas Kinerja internal
				Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum
		Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan,	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
				Manajemen Risiko Indeks

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		pendampingan, dan asistensi		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
				Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas
	Sasaran	Meningkatnya Kinerja tata kelola keuangan daerah		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
				Persentase Capaian kualitas pengelolaan kas daerah
				Cakupan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan penatausahaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dengan Implementasi	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki keselarasan Program RPJMD dan RKPD
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Program Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
				Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya
				Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
		Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
	Sasaran	Meningkatnya sistem inovasi Daerah dan kolaborasi lintas sek		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik
		Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah
2	Program Prioritas	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial		
	Misi	Mempermudah Akses Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan		
	Tujuan	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata		
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Penerapan PHBS
		Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial
		Meningkatnya penanganan izin sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani
		Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya
	Misi	MENINGKATKAN MUTU DAN KUALITAS PENDIDIKAN		
	Tujuan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing		
	Sasaran	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya Nilai Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Harapan Lama Sekolah

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya kualitas pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kelulusan siswa
		Meningkatnya capaian Rasio guru dan peserta didik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
		Meningkatnya pembiasaan siswa pada penggunaan bahasa ibu dengan benar	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Meningkatnya pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan
3	Program Prioritas	Penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berkelanjutan		
	Misi	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN		
	Tujuan	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan		
	Sasaran	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik
		Meningkatkan akses air minum aman Kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
		Meningkatkan akses sanitasi lingkungan aman bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya sarana persampahan
		Terselenggaranya bangunan Gedung yang optimal dan sesuai regulasi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Regulasi

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik
		Meningkatnya pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi
		Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani
		Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen)
		Terpenuhinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani
		Meningkatnya Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
	Sasaran	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya kondisi jalan mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
		Meningkatnya perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten
		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi angkutan sungai, danau, dan pelabuhan	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan yang Layak Fungsi
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
			Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola (taman, hutan kota)
		Meningkatnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Program Pengelolaan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola
		Meningkatnya pengolahan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
		Meningkatnya ketaatan terhadap perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
		Terselesaikannya kasus pengaduan lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase kasus lingkungan hidup yang ditangani oleh Pemerintah Daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Program Penghargaan yang diikuti
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
				Persentase penanganan pasca bencana
		Meningkatnya waktu tanggap terhadap kejadian kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Response Time Rate
		Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan
4	Program Prioritas	Penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial		
	Misi	MEWUJUDKAN PENATAAN PARIWISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERKESINAMBUNGAN		
	Tujuan	Mewujudkan daya saing pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan		
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata melalui Tata Kelola yang Berkelanjutan		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan
	Sasaran	Meningkatnya manfaat pariwisata terhadap perekonomian daera		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya
		Meningkatnya daya saing ekonomi kreatif berbasis produk lokal	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual
	Sasaran	Meningkatnya penguatan identitas budaya dan warisan daerah		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang dilindungi

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola
	Misi	MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KETAHANAN PANGAN		
	Tujuan	Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan secara merata serta berkelanjutan		
	Sasaran	Meningkatnya tingkat Ketahanan Pangan Daerah		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya konsumsi masyarakat akan pangan sehat dan bergizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
		Tersedianya jumlah stok pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah desa yang memiliki cadangan pangan pemerintah desa
		Meningkatnya Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan
		Meningkatnya produktivitas Pangan daerah sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pertanian Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura
				Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan
		Meningkatnya Produksi Peternakan Daerah	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produksi Daging
				Jumlah Produksi Telur
		Terkendali dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
		Usaha Pertanian yang Berizin	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani
		Berkurangnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan
	Misi	MENINGKATKAN KUALITAS KEIMANAN, KETAQWAAN, DAN NASIONALISME MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
	Tujuan	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman sosial dalam rangka menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama serta kehidupan berkebangsaan yang partisipatif		
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dan kebangsaan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Sasaran	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya penerapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan
		Meningkatkan Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri
		Meningkatnya organisasi masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
		Terwujudnya stabilitas dan keamanan Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan Daerah

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi
		Meningkatnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan
		Meningkatnya kapasitas pemuda dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan
	Misi	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEREKONOMIAN, SERTA PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN DESA		
	Tujuan	Meningkatnya perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian desa		
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian wilayah		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya jumlah pelaku usaha di dalam sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra
		Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang tertib legalitas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri kecil dan menengah yang berizin
		Optimalnya ketersediaan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
		Meningkatnya jumlah koperasi yang patuh	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya jumlah pengelola koperasi yang berkualitas	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang bersertifikat
		Meningkatnya volume usaha koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha
		Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat omsetnya	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib legalitas	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
		Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
		Meningkatnya kestabilan harga barang kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
		Meningkatnya nilai ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor barang dan jasa (persentase Produk Domestik Regional Bruto)
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tertib ukur	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku
		Meningkatnya penggunaan produk lokal	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk lokal oleh Pemerintah Daerah
		Meningkatnya iklim penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal
		Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal
		Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap
		Meningkatnya Produksi Sektor Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan
		Meningkatnya Jumlah Penanganan Laporan Tindak Penanganan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya Perekonomian Keluarga Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik
		Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup
		Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang dikelola
		Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
		Meningkatnya Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial lembaga dalam penanganan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase meningkatnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Diselesaikan
		Meningkatnya Kualitas dan	Program Pelatihan Kerja dan	Persentase peserta pelatihan yang kompeten

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome	Nomenklatur Program	Indikator
	Produktivitas tenaga kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	
	Menurunnya angka pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diserap
	Meningkatnya Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi
	Menurunnya kasus ketenagakerjaan pada perusahaan	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani
	Meningkatnya laju kemandirian transmigran	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Laju Kemandirian Transmigran
	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah
	Menurunnya Persentase perempuan korban kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
	Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan
	Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid
	Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
	Terwujudnya keluarga berkualitas	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun
	Meningkatnya peserta Keluarga Berencana aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)
	Menurunnya keluarga berisiko stunting	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga

No	Program Prioritas/ VISI/ MISI / Tujuan /Sasaran / Outcome		Nomenklatur Program	Indikator
			Keluarga Sejahtera	
	Sasaran	Masyarakat Desa yang berdaya saing		
	Outcome/Nomenklatur Program/Indikator	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib
		Meningkatnya Penataan Desa	Program Penataan Desa	Persentase penataan desa
		Meningkatnya Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa
		Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Program Prioritas Daerah menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pembangunan, akan tetapi hal ini tidak menjadi pembatas bagi Program lain yang bukan prioritas untuk dapat dilaksanakan. Dalam mewujudkan keselarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, perlu disandingkan Program Prioritas keduanya dengan Strategi yang ada dalam RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mendukung tercapainya Program tersebut. Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Provinsi merupakan bagian penting dalam memastikan sinergi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan antar wilayah. Selain memperkuat sinergi wilayah, kesesuaian Program ini juga berpengaruh terhadap kemudahan dalam memperoleh dukungan pendanaan, baik melalui bantuan keuangan provinsi, Dana Alokasi Khusus, maupun Program dekonsentrasi. Dengan demikian, keterpaduan antara Program Daerah dan provinsi menjadi kunci dalam mendorong pembangunan yang efisien, berkelanjutan, dan merata. Berikut ditampilkan tabel keselarasan Program Prioritas dengan Program strategis Provinsi Jawa Barat yang diwujudkan dalam *Salapan Lengkah Ngawangun Jabar*.

Tabel 3. 12 Keselarasan Program Prioritas dengan Program Strategis Jawa Barat (9 Lengkah)

No.	Program Prioritas	9 Lengkah Ngawangun Jabar	Strategi Daerah
1	- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan penataan belanja daerah yang efisien dan produktif	- Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lingkungan dan Transformasi Birokrasi	- Mengoptimalisasi penerapan Reformasi Birokrasi; - Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah daerah; - Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang nilai-nilai integritas dalam pelayanan publik; - Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal; - Mendorong pengembangan potensi ekonomi desa melalui pemanfaatan akses teknologi digital dan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa; dan - Meningkatkan kualitas Kinerja dan tata kelola pemerintah desa
2	- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar: pendidikan dan kesehatan	- Pengembangan Pendidikan Berkarakter dan Penambahan Ruang Kelas Baru; - Penyempurnaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan Penambahan Layanan Khusus; dan - Penanganan Stunting dan Gizi Buruk serta pengembangan Industri Pengobatan berbasis kearifan lingkungan.	- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; - Memberikan makanan tambahan berbasis pangan lokal untuk penanganan Stunting; - Memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu yang berprestasi; - Meningkatkan kualitas pendidikan dalam daerah serta meningkatkan promosi satuan pendidikan dan mewujudkan satuan pendidikan unggulan;dan - Menerapkan pendidikan karakter untuk memperkuat kualitas pendidikan.
3	- Penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berkelanjutan	- Pembangunan Infrastruktur Jalan sampai ke Pelosok Desa dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan; - Pembangunan Jaringan Irigasi di Seluruh Wilayah Pertanian; - Pemulihan Kondisi Lingkungan Jawa Barat; dan - Pengembangan Pengelolaan Sampah Mandiri.	- Membangun dan meningkatkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*; - Membangun dan meningkatkan Instalasi Pengolahan Air Limbah kawasan; - Melakukan Optimalisasi pengelolaan air minum, penyusunan perda air tanah, dan peningkatan kesadaran penggunaan air minum aman perpipaan kepada masyarakat;

No.	Program Prioritas	9 Lengkah Ngawangun Jabar	Strategi Daerah
			- Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju dan dari pangandaran; - peningkatan akses antar pusat kegiatan; - Melakukan Upaya pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya melalui peningkatan kesadaran masyarakat; dan - Meningkatkan kualitas dan Penegakkan hukum lingkungan hidup serta optimalisasi pengaturan konservasi wilayah.
4	- Penguatan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan	- Pengembangan Lapangan Kerja Baru	- Meningkatkan promosi digital dan *branding* melalui *event* dan kolaborasi dengan platform teknologi untuk menarik lebih banyak wisatawan; - Mengembangkan ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata; - Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia kepariwisataan dan *eco-friendly infrastructure* yang mudah dijangkau; - Membangun dan merevitalisasi sarana dan prasarana pertanian, serta memperpendek rantai distribusi; - Meningkatkan Penguatan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah; - Mendorong regenerasi petani dan nelayan melalui edukasi dan insentif; - Meningkatkan kuantitas dan kualitas wirausaha baru; - Mendorong peningkatan produksi sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah produk; dan - Mengentaskan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan terintegrasi serta akurasi data antar pemangku kepentingan pengampu

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.4 Janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan wujud aspirasi masyarakat yang disampaikan selama masa kampanye dan telah memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan umum. Oleh karena itu, RPJMD Tahun 2025-2029 tidak hanya menjadi instrumen perencanaan administratif, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tanggung jawab politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat. Mengingat peran penting Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka diperlukan sinkronisasi dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih terpilih. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar merefleksikan komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada masyarakat serta sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan.

Sinkronisasi ini juga penting untuk memastikan adanya keselarasan antara Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Perangkat Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan adanya kesinambungan antara janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, maka perencanaan dan implementasi Program dapat lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan, tabel sinkronisasi antara janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD disusun guna memberikan gambaran bagaimana janji politik tersebut diimplementasikan dalam Program dan Kebijakan Daerah. Berikut tabel korelasi Sasaran RPJMD dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tabel 3. 13 Korelasi Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Janji Politik

Misi	Sasaran	Janji Politik
Mempermudah Akses Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Membuat Sistem Aplikasi Pelayanan Kesehatan;
		Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Medis Menuju Jenjang Profesional;
		Mengutamakan Pelayanan Ramah Dan Humanis;
		Memberikan Jemputan Gratis Pasien Darurat, Lansia Dan Penangan Khusus; dan
		Pelayanan Dasar Kesehatan Gratis Melalui Universal Health Coverage.
Meningkatkan Mutu Dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Intelektualitas Dan Karakter Anak Usia Sekolah	Pendidikan Gratis 12 Tahun (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas) Dan Beasiswa Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Baik Biaya, Sarana Dan Seragam, Sampai Jenjang Perguruan Tinggi;
		Memberikan Sarana Pendidikan Yang Memadai Di Sekolah;
		Memberikan Jenjang Pendidikan Yang Profesional Bagi Tenaga Pendidik, Insentif Bagi Guru-Guru Terutama Di Daerah Terpencil; dan

Misi	Sasaran	Janji Politik
		Pelaksanaan Pendidikan Bela Negara, Cinta Tanah Air Dan Kepanduan.
Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Memperluas Cakupan Infrastruktur Yang Berkualitas;
	Terwujudnya Layanan Transportasi Yang Nyaman, Aman Dan Terjangkau	Membangun Jalan-Jalan Yang Terkonektivitas Baik Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa; dan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan
Mewujudkan Penataan Pariwisata Yang Aman, Nyaman Dan Berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata Melalui Tata Kelola Yang Berkelanjutan	Menata Kawasan-Kawasan Wisata Sampai Kepada Wisata Desa; dan
		Membentuk Satuan-Satuan Pencegahan Dan Penyelamatan Wisata.
	Meningkatnya Manfaat Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah	Menata Kawasan-Kawasan Wisata Sampai Kepada Wisata Desa.
Meningkatkan Kualitas Keimanan, Ketaqwaan, Dan Nasionalisme Melalui Penguatan Pendidikan Agama Dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama Dan Kebangsaan Dalam Kehidupan Sosial Dan Bermasyarakat	Memberikan Fasilitasi Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Baik Itu Pesantren, Pendidikan Anak Usia Dini Dan Satuan Pendidikan Lainnya;
		Menambah Pendidikan Agama Di Sekolah-Sekolah Umum Yang Bekerjasama Dengan Para Tokoh Agama;
		Pemberantasan Buta Baca Dan Tulis Al-Quran; dan
		Insentif Bagi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Pada Masjid Jami Dan Guru Ngaji.
Mewujudkan Kemandirian Ketahanan Pangan	Meningkatnya Tingkat Ketahanan Pangan Daerah	Membangun Sarana Dan Prasarana Untuk Meningkatkan Produksi;
		Memberi Bantuan Subsidi Pupuk Dan Benih Terutama Bagi Mereka Yang Gagal Panen Akibat Musim; dan
		Membuat Lumbung Padi Dan Bank Pangan Untuk Melindungi Harga Jual Petani.

Misi	Sasaran	Janji Politik
Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Baik Dan Profesional	Memberikan Insentif Dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Yang Memadai Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
		Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara; dan
		Membuat Sistem Peningkatan Karir Yang Berbasis Profesionalisme.
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dan Perekonomian, Serta Penguatan Dan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Perekonomian Wilayah	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemberdayaan Wirausaha Muda.
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Membangun Infrastruktur Pedesaan Dengan Pola Imbal Swadaya Di Luar Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa; dan
		Penguatan Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial Dan Budaya Yang Berbasis Desa.
	Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing	Revitalisasi Pasar Sampai Ke Pasar Desa;
		Satu Desa, Satu Produk; dan
		Membangun Infrastruktur Pedesaan Dengan Pola Imbal Swadaya Di Luar Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Untuk menggambarkan keterkaitan Program dalam mencapai sasaran pembangunan, Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 disusun melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Dalam merumuskan Program pembangunan Daerah tersebut dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Program pembangunan yang dimaksud yaitu Program yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tingkat kebijakan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih, dirumuskan dalam Program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan prioritas yang disertai dengan pendanaan/pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Indikasi rencana Program Prioritas Pemerintah Daerah berisi Program baik untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah. Sebagai wujud kebutuhan pendanaan, adapun pagu indikatif yang mana merupakan jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan Program dan kegiatan tahunan. Program Prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas serta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target Kinerja Program (*outcome*) di masing-masing urusan tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, serta sumber-sumber pendanaan lainnya). Perumusan indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah. Dalam Tabel Indikasi Program ditampilkan target dan rencana penganggaran untuk tahun 2025-2030, penentuan tahun yang melebihi tahun perencanaan RPJMD dari tahun 2025-2029 ini merupakan salah satu bentuk keberlanjutan perencanaan pembangunan. Dengan demikian pada tahun 2030 sebagai tahun peralihan, RPJMD menjadi dasar untuk perencanaan tahun berjalan sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya, sehingga seluruh dokumen perencanaan baik itu Renstra dan RKPD harus menyesuaikan dengan dokumen RPJMD. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 1 Indikasi Rencana Program Pembangunan Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
Urusan Pendidikan																
Meningkatnya Nilai Harapan Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai Harapan Lama Sekolah	12,31	12,31	88.524.483.280	12,55	160.900.314.000	12,65	162.253.192.000	12,75	164.551.148.000	12,85	166.139.672.000	12,95	166.548.070.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meningkatnya kualitas pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase kelulusan siswa	100%	100%	119.194.000	100%	1.375.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.375.000.000	100%	1.375.000.000	
Meningkatnya capaian Rasio guru dan peserta didik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	N/A	1:12	558.000.000	1:12	2.150.000.000	1:12	2.150.000.000	1:12	2.150.000.000	1:12	2.150.000.000	1:12	2.150.000.000	
Meningkatnya pembiasaan siswa pada penggunaan bahasa ibu dengan benar	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar	N/A	88%	100.000.000	89 %	800.000.000	90 %	800.000.000	91 %	800.000.000	92 %	800.000.000	94 %	800.000.000	
Urusan Kesehatan																
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	N/A	85%	146.728.204.629	87%	102.541.237.900	89%	66.534.262.487	91%	66.969.550.852	93%	67.997.832.800	95%	68.311.280.260	Dinas Kesehatan

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Kesehatan Masyarakat															
Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	628.771.788	100%	312.608.600	100%	343.869.460	100%	1.078.256.406	100%	416.082.046	100%	545.536.250	
Meningkatnya penanganan izin sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani	100%	100%	250.967.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	100%	100%	192.958.600	100%	220.152.000	100%	231.119.538	100%	342.683.148	100%	254.912.610	100%	221.953.740	
		Persentase penerapan PHBS	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Meningkatnya kondisi jalan mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten dalam	N/A	81,44%	18.484.347.370	83.04%	29.704.518.452	84,64%	30.259.664.781	86,24%	30.544.060.697	87,84%	30.834.051.691	90,00%	28.773.803.153	Dinas Pekerjaan Umum,

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kondisi Mantap														Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	60%	60%	10.530.721.580	66%	9.098.789.236	69%	9.197.767.968	72%	9.329.929.347	75%	9.456.387.083	78%	9.595.967.468	
Meningkatkan akses air minum aman Kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (persen)	60%	65,00%	9.011.645.450	66,30%	4.612.884.000	67,63%	4.627.158.000	68,98%	4.634.162.000	70,36%	4.641.390.000	71,77%	4.900.787.000	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana persampahan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya sarana persampahan	N/A	0,00%	-	10%	1.000.000.000	11%	1.000.000.000	13%	1.000.000.000	44%	1.000.000.000	46%	-	
Meningkatkan akses sanitasi lingkungan aman bagi masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)	N/A	6,54%	1.290.723.900	11,92%	2.197.547.000	17,29%	2.222.527.000	22,67%	2.234.784.000	28,04%	2.247.433.000	33,42%	2.186.047.000	
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	N/A	10%	24.191.700	10,50%	661.041.893	11%	740.111.766	13%	893.740.407	15%	1.055.831.183	17%	1.009.312.843	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Terselenggaranya bangunan Gedung yang optimal dan sesuai regulasi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Sesuai Regulasi	N/A	50,00%	27.233.821.050	51,00%	1.483.878.871	52,02%	1.413.428.266	53,06%	1.471.764.246	54,12%	1.543.688.734	55,00%	1.667.198.000	
Meningkatnya pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	N/A	0%	-	76,50%	50.000.000	78,03%	50.000.000	79,59%	50.000.000	81,18%	50.000.000	82,81%	50.000.000	
Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	45,04%	47,54%	289.232.600	48,04%	450.000.000	53,04%	450.000.000	58,04%	450.000.000	63,04%	450.000.000	68,04%	450.000.000	
Sosial																
Meningkatnya Perekonomian Keluarga Miskin	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	15%	15,00%	2.043.425.000	15,00%	540.000.000	15,00%	550.000.000	15,00%	700.000.000	15,00%	550.000.000	15,00%	550.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Penanganan Korban Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga	100%	100,00%	528.790.000	100,00%	5.940.000	100,00%	13.101.688	100,00%	270.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	90.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		mampu Bertahan Hidup														
Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100,00%	33.248.880	100,00%	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	25.000.000	
Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosia yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	100%	90,00%	1.118.853.500	91,00%	1.411.738.000	92,00%	1.445.356.000	93,00%	1.587.239.000	94,00%	1.514.392.000	95,00%	1.708.540.688	
Meningkatnya Peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial lembaga dalam penanganan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase meningkatnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	90,00%	86.000.000	92,00%	20.000.000	94,00%	20.000.000	96,00%	26.974.000	98,00%	27.105.000	100,00%	40.000.000	
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenterama	N/A	100%	5.751.334.093	100%	2.190.555.500	100%	3.593.817.500	100%	2.364.056.500	100%	2.341.209.500	100%	5.292.251.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Ketertiban Umum	n, Keindahan														
Meningkatnya waktu tanggap terhadap kejadian kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Response Time Rate*	N/A	100%	222.685.000	100%	2.344.779.500	100%	873.356.000	100%	2.280.000.000	100%	2.251.634.500	100%	1.884.815.000	
Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	N/A	16%	623.610.201	20%	641.103.000	22%	660.087.000	24%	660.451.000	28%	660.771.000	32%	1.939.879.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	N/A	80		90		95		100		100		100		
		Persentase penanganan pasca bencana	N/A	100		100		100		100		100		100		
Perumahan dan Kawasan Permukiman																
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani	N/A	0,00	-	44,12%	3.105.834.000	46,32%	3.114.646.000	48,53%	3.116.406.000	50,73%	3.118.142.000	52,94%	2.392.103.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (persen)	N/A	0,00	-	56,98%	1.526.458.000	57,03%	1.528.661.000	57,08%	1.529.101.000	57,18%	1.529.535.000	61,18%	1.043.567.000	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	N/A	100%	1.161.388.890	100%	297.584.000	100%	183.932.000	100%	192.216.000	100%	194.746.000	100%	387.892.000	
Meningkatnya Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	N/A	50%	515.736.888	52,50%	5.000.000	55,13%	5.000.000	57,88%	5.000.000	60,78%	5.000.000	63,81%	5.000.000	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
Tenaga Kerja																
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Diselesaikan	80%	100%	116.461.540	0%	-	100%	41.058.000	100%	41.058.000	0%	-	100%	100.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivita	Persentase peserta pelatihan	70%	100%	245.289.000	100%	31.485.000.000	100%	1.198.356.000	100%	1.498.356.000	100%	1.224.362.000	100%	1.338.356.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	s Tenaga Kerja	yang kompeten														
Menurunnya angka pengangguran	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	70%	50%	60.139.600	55%	64.835.000	60%	495.000.000	65%	393.779.000	70%	385.000.000	75%	450.000.000	
Menurunnya kasus ketenagakerjaan pada perusahaan	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	90%	100%	264.745.050	100%	1.276.748.000	100%	1.670.000.000	100%	1.265.740.000	100%	1.298.036.000	100%	1.351.459.000	
Transmigrasi																
Meningkatnya Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	0%	0%	-	80%	5.000.000	85%	13.000.000	90%	13.000.000	95%	13.000.000	100%	30.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
Meningkatnya laju kemandirian transmigran	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	0%	0%	-	0%	-	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.762.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	N/A	0	168.811.502	501	993.107.400	601	1.259.140.200	601	1.115.795.800	701	1.143.105.400	701	1.476.463.250	Dinas Keluarga Berencana,Pemberdayaan

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Menurunnya Persentase perempuan korban kekerasan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	25.204.789	100%	652.777.000	100%	890.060.000	100%	890.060.000	100%	890.060.000	100%	723.389.682	Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kesejahteraan Hidup Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan penguatan & Pengembangan	N/A	30%	135.000.000	40%	150.000.000	50%	150.000.000	60%	150.000.000	70%	150.000.000	80%	150.000.000	
Tersedianya Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	N/A	100%	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
Tercapainya Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak	696,71	710	54.114.800	725	43.900.000	740	493.900.000	755	493.900.000	780	493.900.000	810	578.881.620	
Menurunnya kekerasan terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatka n layanan komprehensi f	100%	100%	59.401.322	100%	38.060.000	100%	267.655.000	100%	238.060.000	100%	238.060.000	100%	311.736.548	
Pangan																
Meningkatnya konsumsi masyarakat akan pangan	Program Peningkatan Diversifikasi	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	94,93	95,00	218.273.888	95,05	1.718.000.000	95,10	1.979.745.737	95,15	1.761.723.024	95,20	1.783.854.175	95,40	1.839.158.322	Dinas Kelautan, Perikan

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
sehat dan bergizi	dan Ketahanan Pangan Masyarakat															an Dan Ketahanan Pangan
Tersedianya jumlah stok pangan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah desa yang memiliki cadangan pangan pemerintah desa	N/A	2 Desa	21.365.000	10 Desa	960.000.000	10 Desa	970.000.000	10 Desa	980.000.000	10 Desa	990.000.000	12 Desa	1.000.000.000	
Berkurangnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	0%	10%	14.694.000	8%	15.614.988	6%	16.300.000	4%	16.900.000	2%	17.500.000	1%	36.000.000	
Meningkatnya Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	89,6%	89,60%	4.171.100	89,65%	5.000.000	89,70%	5.500.000	89,75%	6.000.000	89,80%	6.500.000	89,85%	25.000.000	
Urusan Pemerintahan bidang pertanahan																
Menurunnya konflik, sengketa pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	100	10	-	20	90.000.000	30	90.000.000	40	90.000.000	50	90.000.000	60	90.000.000	Sekretariat Daerah
Meningkatnya pelaksanaan penatagunaan tanah	Program Penatagunaan Tanah	Cakupan Penggunaan Tanah dalam Satu Daerah	N/A	100	38.950.000	100	30.295.000	100	50.703.850	100	54.207.369	100	73.220.968	100	82.231.828	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kabupaten/ Kota														
Terlaksananya redistribusi bidang tanah	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah	100	100	-	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	
Lingkungan Hidup																
Meningkatnya ketaatan terhadap perencanaan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20,00%	21,43%	15.544.150	35,71%	275.000.000	50,00%	275.000.000	64,28%	725.000.000	78,57%	275.000.000	100%	1.075.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	30,10%	30,50%	98.231.227	31,50%	55.000.000	32,50%	55.000.000	33,50%	55.000.000	34,50%	55.000.000	35,50%	55.000.000	
Meningkatnya pengolahan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (persen)	26%	27,62%	3.240.299.845	31,30%	8.212.812.561	35,47%	8.090.712.551	40,20%	7.887.050.551	45,56%	9.087.394.990	48,09%	9.766.590.551	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Program Pengelolaan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola	0	5%	8.400.000	10%	280.184.429	15%	130.184.439	20%	130.184.439	25%	35.000.000	30%	310.184.439	
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	72%	80%	6.547.250	85%	35.000.000	87,50%	70.000.000	88,90%	40.000.000	90%	75.000.000	90,90%	45.000.000	
Terselesaikannya kasus pengaduan	Program Penanganan Pengaduan	Persentase kasus lingkungan hidup yang	100%	100%	5.780.150	100,00	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	ditangani Pemerintah Daerah														
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Program Penghargaan yang diikuti	0	0%	-	50%	3.000.000	75%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	100%	3.000.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	0,80%	2,87%	893.041.075	3,25%	875.000.000	3,25%	875.000.000	3,25%	875.000.000	3,25%	875.000.000	3,25%	1.375.000.000	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	N/A	100%	103.760.000	100%	175.000.000	100%	182.000.000	100%	237.628.000	100%	190.000.000	100%	567.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	N/A	100%	77.301.500	100%	182.500.000	100%	140.332.000	100%	135.000.000	100%	175.889.000	100%	492.123.000	
Meningkatnya Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	N/A	100%	57.685.000	100%	164.379.000	100%	155.000.000	100%	180.000.000	100%	175.000.000	100%	255.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Perjanjian kerja sama														
Meningkatnya Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	Program Pengelolaan Profil	Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	N/A	100%	-	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat Desa																
Meningkatnya Penataan Desa	Program Penataan Desa	Persentase penataan desa	N/A		-	2%	10.000.000	2%	10.000.000	2%	10.000.000	2%	10.000.000	2%	20.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	N/A		-	4,00%	5.000.000	4,00%	10.000.000	4,00%	10.000.000	4,00%	10.000.000	4,00%	10.000.000	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	65%	65,00%	161.873.732	65,00%	50.000.000	65,00%	570.000.000	70,00%	85.000.000	75,00%	95.000.000	80,00%	305.000.000	
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	100%	100,00%	775.743.554	100,00%	1.949.000.000	100,00%	885.000.000	100,00%	2.214.000.000	100,00%	1.974.000.000	100,00%	965.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Terwujudnya keluarga berkualitas	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	N/A	32,6	269.039.068	32,5	514.975.800	32,4	528.066.400	32,3	538.125.600	32,1	600.677.800	32	738.054.100	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya peserta Keluarga Berencana aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	N/A	9,47%	2.705.724.500	9,27%	2.425.150.000	9,07%	2.491.400.000	8,87%	2.798.400.000	8,67%	2.456.600.000	8,47%	2.461.600.000	
Menurunnya keluarga berisiko stunting	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	N/A	35%	2.366.590.000	35,2%	2.701.245.800	35,4%	1.715.326.400	35,6%	1.947.922.600	35,8%	1.779.394.800	36%	2.426.545.800	
Perhubungan																
Meningkatnya perlengkapan jalan pada ruas jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	39%	39,00	19.978.529.250	45,00	63.290.248.000	52,00	14.456.093.000	65,00	14.090.881.000	78,00	15.226.969.000	91,00	15.640.613.000	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi angkutan sungai,	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau, dan	n/a	n/a	-	15,00	14.000.000.000	20,00	15.734.800.000	25,00	15.734.800.000	30,00	15.734.800.000	35,00	18.236.600.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
danau, dan pelabuhan		Pelabuhan yang Layak Fungsi														
Komunikasi dan Informatika																
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,52	3,53	251.330.620	3,58	3.726.780.000	3,63	3.322.065.000	3,68	3.317.903.000	3,73	3.312.903.000	3,78	4.280.031.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Meningkatnya tata kelola layanan informasi publik	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase tata kelola layanan informasi publik	60	60%	328.885.318	61%	285.568.000	62%	251.400.000	63%	288.247.000	64%	276.111.000	65%	567.565.500	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
Meningkatnya jumlah koperasi yang patuh	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	50,60%	51,00%	38.737.600	52,00%	50.000.000	53,00	50.000.000	54,00	50.000.000	55,00	50.000.000	56	120.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
Meningkatnya volume usaha koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	14,56	14,56	67.704.000	14,66	20.000.000	14,76	20.000.000	14,86	20.000.000	14,96	20.000.000	15	60.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya jumlah pengelola koperasi yang berkualitas	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang bersertifikat	2,94	0,00	-	4,90	500.000.000	5,88	600.000.000	6,86	700.000.000	7,84	800.000.000	9	900.000.000	
Meningkatnya jumlah wirausaha baru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	24,00	0,00	-	17,00	20.000.000	14,00	320.000.000	13,00	20.000.000	11,00	27.889.000	10	100.000.000	
Meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro yang meningkat omsetnya	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	0,10	0,10	18.196.800	0,10	50.000.000	0,10	50.000.000	0,10	50.000.000	0,10	50.000.000	0,10	120.000.000	
Urusan Penanaman Modal																
Meningkatnya iklim penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0,0	0	-	1,20	172.611.600	1,30	152.605.200	0	-	1,50	152.866.200	1,60	513.236.606	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya promosi penanaman modal	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	1%	-	-	-	-	-	-	1,40%	152.605.200	-	-	1,60%	160.331.822	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya Pengendalian Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	1,536	Rp0,72	80.000.000	Rp0,72	208.535.400	Rp0,72	231.499.505	Rp0,73	231.699.505	Rp0,73	231.699.505	Rp0,74	745.775.957	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	39.540.600	100%	125.000.800	100%	137.496.095	100%	137.560.095	100%	137.560.095	100%	144.015.415	
Terwujudnya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2,00%	2,00%	-	2,20%	15.731.200	2,30%	15.731.200	2,40%	15.763.200	2,50%	15.763.200	2,60%	15.763.200	
Urusan Kepemudaan dan Olahraga																
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi	22409 Orang	22409 Orang	670.000.000	22509 Orang	1.550.000.000	22609 Orang	1.650.000.000	22709 Orang	1.700.000.000	22809 Orang	1.650.000.000	22909 Orang	1.650.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet olahraga yang mengikuti pembinaan	200 orang	200 orang	793.000.000	205 orang	7.150.000.000	210 orang	7.120.000.000	215 orang	7.170.000.000	220 orang	7.120.000.000	225 orang	7.120.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya kapasitas pemuda dalam kepramukaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan	44792 orang	44792 orang	-	44892 orang	1.100.000.000	44992 orang	1.050.000.000	45000 orang	1.050.000.000	45100 orang	1.050.000.000	45200 orang	1.050.000.000	
Urusan Persandian																
Meningkatnya penyelenggaraan pengamanan sistem informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	30	35%	24.300.000	40%	95.000.000	45%	80.000.000	50%	75.000.000	55%	91.000.000	60%	115.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Urusan Statistik																
Meningkatnya kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral	65	40%	16.634.000	45%	75.000.000	50%	78.500.000	55%	81.788.000	60%	83.250.000	65%	164.338.500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kebudayaan																
Terwujudnya Perlindungan dan Pengembangan Kebudayaan Lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	20,24%	25,00%	778.400.000	29,76%	250.000.000	34,52%	572.500.000	39,29%	325.225.000	44,05%	278.477.250	48,81%	724.040.850	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola		100%	60.915.500	100%	45.000.000	100%	45.450.000	100%	45.904.500	100%	46.363.545	100%	120.545.217	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Cagar Budaya															
Perpustakaan																
Meningkatnya Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	19,95	403.347.619	19,95	259.226.947	20,24	285.149.641	20,53	463.464.605	20,82	345.031.071	21	379.534.179	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A	10%	-	10%	46.961.984	10%	23.126.180	10%	25.438.798	10%	27.982.678	10%	30.780.946	
Kearsipan																
Meningkatnya pengelolaan arsip	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	3.353	3732	48.691.157	4180	64.202.595	4684	70.622.854	5245	77.685.139	5875	85.453.652	6583	93.999.016	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal	N/A	89,29 %	38.187.959	100 %	51.143.959	100 %	56.258.355	100 %	61.884.191	100 %	68.072.610	100 %	74.879.871	
Urusan Pemerintahan Pilihan																
Kelautan dan Perikanan																

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	2403 ton	1900 Ton	24.634.067.135	1905 Ton	27.334.067.135	1910 Ton	29.478.620.492	1915 Ton	29.348.401.516	1920 Ton	29.469.421.592	1925 Ton	29.686.704.110	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Jumlah Penanganan Laporan Tindak Penanganan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan	N/A	-	-	40%	77.000.000	45%	7.000.000	50%	10.000.000	60%	13.000.000	70%	35.000.000	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	312 Ton	320 Ton	5.181.551.513	328 Ton	10.018.045.560	336 Ton	10.468.647.839	344 Ton	10.544.880.232	352 Ton	10.848.249.245	360 Ton	12.561.423.145	
Meningkatnya Produksi Sektor Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	900 Ton	920 Ton	442.263.260	940 Ton	2.534.000.000	960 Ton	2.536.000.000	980 Ton	2.537.500.000	1000 Ton	2.539.500.000	1020 Ton	2.562.000.000	
Pariwisata																
Meningkatnya Daya tarik Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.297.362	4.200.000,00	25.440.042.888	4.400.000,00	44.929.412.000	4.600.000,00	40.368.051.140	4.800.000,00	39.607.889.846	5.000.000,00	39.651.413.384	5.000.000,00	41.713.479.363	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	1,84 Hari	1,85 Hari	461.143.346	1,95 Hari	350.690.000	2,05 Hari	849.169.940	2,15 hari	363.136.738	2,25 Hari	377.662.207	2,35 Hari	981.921.738	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya daya saing ekonomi kreatif berbasis produk lokal	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual	N/A	1,29%	58.612.750	2,58%	11.792.000	3,86%	63.859.920	5,15%	16.714.317	6,44%	16.881.460	7,73%	41.366.796	
Meningkatnya pengembangan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan Kapasitasnya	11,83%	12,87%	267.628.120	13,92%	118.000.000	14,96%	269.180.000	16,01%	122.371.800	17,05%	123.595.518	18,10%	321.348.347	
Pertanian																
Meningkatnya Produksi Pertanian Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	215564,17 Ton	218797,63 Ton	1.781.153.756	222079,59 Ton	7.830.000.000	225410,79 Ton	7.814.400.000	228791,95 Ton	7.895.388.000	232223,83 Ton	7.977.995.760	235707,18 Ton	8.062.255.675	Dinas Pertanian
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	8766,04 Ton	8897,53 Ton	-	9030,99 Ton		9166,46 Ton		9303,96 Ton		9443,51 Ton		9585,17 Ton		
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	51708,39 Ton	52225,47 Ton	-	52747,73 Ton		53275,21 Ton		53807,96 Ton		54346,04 Ton		54889,5 Ton		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya produktivitas Pangan Daerah sektor pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	80%	81,00%	4.517.514.922	83,00%	9.015.000.000	100,00%	5.595.000.000	100,00%	5.265.000.000	100,00%	4.755.000.000	100,00%	4.615.000.000	
Meningkatnya Produksi Peternakan Daerah	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Produksi Daging	4596 Ton	5286 Ton	37.278.300	5312 Ton	95.626.333	5338,9 Ton	278.144.896	5365,57 Ton	299.194.908	5392,38 Ton	300.665.922	5419 Ton	326.922.102	
		Jumlah Produksi Telur	3503 Ton	1196 Ton	-	1202 Ton		1208,05 Ton		1214,09 Ton		1220,16 Ton		1226 Ton		
Terkendali dan Tertanggulanginya Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	486 Ha	400 Ha	5.657.200	1255 Ha	1.441.063.698	1435 Ha	1.604.199.600	1875 Ha	1.759.288.400	1670 Ha	1.889.366.700	2150 Ha	2.247.736.898	
Usaha Pertanian yang Berizin	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	N/A	0,00	-	30,00	9.562.633	40,00	13.244.400	50,00	13.254.266	60,00	13.262.966	65	38.637.433	
Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	9,94	10,00	466.386.777	10,00	669.066.336	10,00	846.044.000	10,00	984.302.667	10,00	1.480.879.667	10	1.338.454.336	
Perdagangan																

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya jumlah pelaku usaha perdagangan yang tertib legalitas	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	0,00	0,00	-	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	27.628.000	100,00	20.000.000	100	59.123.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	19,23	19,23	41.403.900	19,23	330.000.000	19,23	37.332.000	19,23	30.000.000	19,23	30.000.000	23	250.000.000	
Meningkatnya kestabilan harga barang kebutuhan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	76,19	80,95	44.184.950	85,71	70.000.000	90,48	70.000.000	95,24	70.000.000	100,00	70.000.000	100	160.000.000	
Meningkatnya nilai ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Ekspor barang dan jasa (persentase Produk Domestik Regional Bruto)	15,34	0,00	-	17,74	20.000.000	20,14	20.000.000	22,54	20.000.000	24,94	20.000.000	27	60.000.000	
Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang tertib ukur	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya bertanda	23,39	35,00	9.436.688	40,00	25.000.000	45,00	30.000.000	50,00	30.000.000	55,00	30.000.000	100	100.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		tera sah yang berlaku														
Meningkatnya penggunaan produk lokal	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk lokal oleh Pemerintah Daerah	77,00	78,00	15.730.500	80,00	80.000.000	82,00	80.000.000	84,00	80.000.000	86,00	80.000.000	88	150.000.000	
Perindustrian																
Meningkatnya jumlah pelaku usaha di dalam sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra	0,00	5,00	2.998.281.400	5,00	2.771.738.000	5,00	1.110.000.000	5,00	1.110.000.000	5,00	1.110.000.000	5	1.340.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
Meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang tertib legalitas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri kecil dan menengah yang berizin	100,00	100,00	2.980.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100	40.000.000	
Optimalnya ketersediaan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0,00	0,00	-	100,00	6.879.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100	20.000.000	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
Urusan Perencanaan																
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan	Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A	80%	962.581.212	82	837.815.000	84	862.624.000	86	863.099.000	88	863.518.000	90	2.421.537.341	Badan Perencanaan Pemba

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Evaluasi Pembangunan Daerah															ngunan Daerah
Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan dengan Implementasi	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki keselarasan Program RPJMD dan RKPD	100%	100%	1.783.871.600	100,00 %	1.521.827.000	100,00 %	1.566.887.000	100,00%	1.567.748.000	100,00 %	1.568.505.000	100,00 %	4.420.326.958	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	N/A	100%		100,00 %		100,00 %		100,00%		100,00 %		100,00 %		
Urusan Keuangan																
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Rendah (0,94)	Rendah (1)	229.526.742.079	Rendah (1,05)	190.411.363.000	Sedang (1,141)	191.113.597.750	Sedang (1,2)	193.608.078.500	Sedang (1,3)	195.543.051.500	Tinggi (1,378	202.066.475.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Capaian kualitas pengelolaan kas daerah	N/A	25,00		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		
		Cakupan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi	90,00	90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Pemerintahan penatausahaan Keuangan Daerah														
Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	N/A	100	3.128.979.814	100	1.089.871.000	100	1.122.143.250	100	1.122.762.500	100,00	1.123.306.500	100	3.297.781.000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	76,00	100,00	3.073.255.240	100,00	2.612.266.954	100	2.638.389.624	100,00	2.664.512.293	100,00	2.690.634.963	100,00	5.093.920.560	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya	87,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	83,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Urusan Kepegawaian																

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara	N/A	40%	1.315.507.750	42%	1.166.974.500	44%	1.286.265.000	46%	1.315.300.000	48%	1.320.376.500	50%	1.964.430.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan lanjutan	N/A	0,81%		0,82%		0,83%		0,84%		0,85%		0,86%		
		Persentase layanan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara	N/A	75%		78%		80%		82%		84%		86%		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unsur Pengukuran Kinerja	19,81	20,51		21,21		21,91		22,61		23,32		23,32		
Urusan Pendidikan dan Pelatihan																
Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi	1%	1%	336.760.500	2%	336.760.500	3%	336.760.500	4%	1.038.444.303	5%	340.136.524	6%	450.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Penelitian dan Pengembangan																
Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	48,03	48	251.525.375	49	98.924.000	49	105.406.000	50	105.531.000	50	105.640.000	51	396.759.775	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	50%	100%	-	100%	450.825.000	100%	151.741.000	100%	151.762.000	100%	151.780.000	100%	303.302.000	
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																
Inspektorat Daerah																

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan	N/A	100,00	5.828.089.800	100,00	2.924.464.500	100,00	2.697.939.148	100,00	2.699.203.000	100,00	2.700.491.000	100,00	6.949.300.000	Inspektorat
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	17,36	17,97		18,59		19,20		19,82		20,43		20,43		
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	84,94	85,04		85,14		85,24		85,34		85,44		85,54		
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	3,09	3,19	3.933.520.000	3,29	1.159.152.500	3,39	1.197.714.852	3,49	1.198.600.000	3,59	1.199.200.000	3,69	4.499.338.000	
		Manajemen Risiko Indeks	3,397	3,447		3,497		3,547		3,597		3,647		3,697		
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,784	2,834		3,010		3,030		3,05		3,070		3,090		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	3,85	4,85		5,85		6,85		7,85		8,85		9,85		
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																
Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase pencapaian Program Legislasi Daerah yang terfasilitasi	100	100%	6.688.505.900	100%	6.753.112.400	100%	6.810.848.600	100%	7.127.319.500	100%	7.629.909.000	100%	15.079.801.300	Sekretariat DPRD
		Persentase pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan	60	70%		73%		76%		80%		85%		88%		
Sekretariat Daerah																
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,45	3,5	17.647.953.670	3,55	8.808.836.870	3,6	9.058.101.976	3,65	9.100.892.486	3,7	9.333.116.583	3,75	12.085.887.276	Sekretariat Daerah
		Cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat	80	85		90		95		100		100		100		
		Indeks Reformasi Hukum	97,34	70		73		76		79		82		85		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengendalian perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah	90	90	1.341.892.921	90	1.052.492.000	90	1.083.463.180	90	1.088.880.495	100	1.118.280.268	100	1.441.463.268	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,83	84,85		85,9		86,95		88		89,5		90,10		
		Persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian Daerah	80	85		90		95		100		100		100		
Unsur Pemerintahan Umum																
Kesatuan Bangsa dan Politik																
Meningkatnya Ketentraman dan Kerukunan Umat Beragama	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	81	82	54.408.500	82	52.650.000	83	52.650.000	83	52.650.000	84	52.650.000	84	505.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Meningkatnya penerapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	73%	75	692.969.785	75	647.624.200	75	673.984.200	75	695.534.200	75	699.882.200	76	1.450.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatkan Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	75	76	1.108.756.800	76	1.136.756.800	77	1.176.756.800	77	1.181.756.800	78	1.186.756.800	78	1.283.814.000	
Meningkatnya organisasi masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	60	61	18.500.000	62	20.000.000	63	20.000.000	64	170.000.000	65	25.000.000	66	50.000.000	
Terwujudnya stabilitas dan keamanan Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan Daerah	80%	81%	1.560.611.900	82%	889.971.500	83%	890.000.000	84%	890.000.000	85%	920.000.000	86%	2.530.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Unsur Kewilayahan																
Kecamatan																
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	20.974.800	100%	2.030.000	100%	2.592.500	100%	2.664.350	100%	2.737.637	100%	3.812.390	Kec Cijulang
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	292.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	-	-	100%	292.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	32.515.300	100%	26.714.900	100%	27.964.145	100%	27.971.845	100%	28.255.490	100%	29.572.566	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	N/A	-	-	100%	292.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan	100%	100%	20.000.000	100%	2.550.000	100%	2.613.750	100%	2.679.094	100%	2.746.071	100%	3.859.004	Kec Kalipucang

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
dan pelayanan publik	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik														
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	100%	1.500.000	100%	1.537.500	100%	1.575.938	100%	1.615.336	100%	1.655.719	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	-	100%	500.000	100%	512.500	100%	525.313	100%	538.445	100%	551.906	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%	22.647.000	100%	28.155.459	100%	29.218.735	100%	30.303.777	100%	31.411.032	100%	31.518.721	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	-	100%	3.000.000	100%	3.075.000	100%	3.151.875	100%	3.230.672	100%	3.311.439	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100	20.000.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	1.500.000	100	4.500.000	Kec Cigugur

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100	-	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	1.500.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100,00	-	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	1.500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100	28.683.400	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	33.000.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	20.000.000	100%	805.000	100%	821.100	100%	909.310	100%	927.495	100%	2.156.700	Kec Cimerak
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	5.000.000	100%	69.000	100%	70.380	100%	571.788	100%	583.223	100%	620.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	1.000.000	100%	1.020.000	100%	1.030.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	500.000	100%	510.000	100%	520.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	28.224.300	100%	25.414.300	100%	26.454.374	100%	27.486.470	100%	28.539.206	100%	36.490.421	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100,00%	40.000.000	100,00 %	1.040.000	100,00 %	970.000	100,00%	1.140.000	100,00 %	1.225.064	100,00 %	3.012.000	Kec Mangunjaya
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100,00%	-	100,00 %	200.000	100,00 %	400.000	100,00%	500.000	100,00 %	500.000	100,00 %	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0%	0,00%	-	100,00 %	150.000	100,00 %	200.000	100,00%	200.000	100,00 %	200.000	100,00 %	500.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100,00%	28.662.848	100,00 %	25.340.000	100,00 %	27.010.000	100,00%	28.520.000	100,00 %	29.054.936	100,00 %	32.408.566	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00%	0,00%	-	100,00 %	150.000	100,00 %	150.000	100,00%	150.000	100,00 %	200.000	100,00 %	300.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100,00%	100	20.000.000	100	1.000.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	Kec Padaherang
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100,00%	100		100	1.000.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00%	100		100	1.000.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	100	25.139.275	100	26.813.738	100	27.883.022	100	28.973.691	100	30.086.173	100	57.871.334	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00%	100		100	1.000.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	20.000.000	100%	20.500.000	100%	22.517.000	100%	23.462.000	100%	25.157.510	100%	72.779.000	Kec Pangandaran
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	400.000	100%	500.000	100%	600.000	100%	700.000	100%	800.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	-	100%	250.000	100%	350.000	100%	500.000	100%	750.000	100%	1.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	26.684.300	100%	27.676.000	100%	25.850.000	100%	25.000.000	100%	23.255.490	100%	22.573.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	-	100%	250.000	100%	350.000	100%	500.000	100%	700.000	100%	1.000.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	20.000.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	Kec Parigi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	26.875.851	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	20.000.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	20.500.000	Kec Sidamulih

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	26.875.851	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	100%	29.000.000	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	20.000.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	1.500.000	100%	4.500.000	Kec Langkaplancar
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	-	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.500.000	

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatnya implementasi penyelenggaraan pemerintahan umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100,00%	100%	-	100%	500.000	100%	2.500.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.500.000	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	-	100%	500.000	100%	2.000.000	100%	500.000	100%	500.000	100%	1.500.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	23.081.362	100%	25.000.000	100%	29.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	33.000.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	62%	63%	234.891.538.942	64%	223.925.662.400	65%	232.078.362.553	66%	236.771.115.219	67%	241.552.083.154	68%	248.758.431.750	Dinas Kesehatan
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kinerja yang berkualitas														
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	N/A	52,00	8.082.714.162	53,00	7.629.869.000	54,00	7.782.466.000	55,00	7.938.116.000	56,00	8.096.878.000	57,00	8.258.815.000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan layanan kepegawaian	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	N/A	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	52%	52%	325.704.944.631	53%	332.293.325.000	54%	338.940.028.000	55%	345.717.086.000	56%	352.629.680.000	57%	359.854.020.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kinerja yang berkualitas														
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93	93	3.118.160.515	100	3.118.160.515	100	3.429.976.566	100	3.772.974.221	100	4.150.271.641	100	4.565.298.802	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	84	84%	3.197.372.898	85%	3.707.689.000	86%	3.740.807.312	87%	3.748.128.000	88%	3.805.694.000	89%	3.880.807.312	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	93	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase perencanaan dan evaluasi	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Kinerja yang berkualitas														
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	N/A	52%	3.576.436.000	53	3.597.965.000	54	3.720.924.000	55	3.795.343.000	56	3.871.250.000	57	3.871.250.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	97	100,00	10.582.798.584	100,00	9.294.765.046	100,00	9.531.026.376	100,00	9.697.783.707	100,00	9.868.194.037	100,00	12.696.720.440	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	90	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan layanan kepegawaian	79	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase sarana prasarana	63	91		92,00		93,00		94,00		95,00		96,00		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		kantor yang terpenuhi														
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	87,44%	91%	5.172.108.406	92%	5.067.120.000	93%	5.085.785.500	94%	5.157.116.697	95%	5.254.335.975	96,00	6.908.906.998	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	97,14%	91%		92%		93%		94%		95%		96,00		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	91%		92%		93%		94%		95%		96,00		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	90,70%	91%		92%		93%		94%		95%		96,00		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93	93	7.658.343.144	100	7.430.916.000	100	7.579.535.000	100	7.731.125.000	100	7.885.748.000	100	8.043.463.000	Inspektorat
		Persentase Laporan keuangan dengan	93	93		100		100		100		100		100		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		kualitas yang baik														
		Cakupan layanan kepegawaian	93	93		100		100		100		100		100		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	93	93		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	72,32%	72,32%	32.052.069.262,00	83%	31.636.613.600,00	85%	32.405.189.035,00	90%	32.751.121.500,00	93%	32.923.692.000,00	95%	38.307.094.700,00	Sekretariat DPRD
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	88,94	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase pelayanan keuangan dan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat	N/A	80%		82%		84%		86%		88%		90%		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
		Daerah yang terlayani														
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	70%	70%	38.486.969.401	70%	32.427.721.130	75%	33.521.742.994	80%	33.675.569.651	85%	34.614.019.180	90%	44.603.578.628	Sekretariat Daerah
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Indeks Pelayanan Publik	4,44	4,5		4,53		4,55		4,57		4,6		4,62		
		Nilai Laporan Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	70,75	69,99		71,99		74		76		78,01		80,01		
		Persentase Laporan Keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Daerah	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas tata	Program Penunjang	Persentase sarana	61%	62%		63%		64%		65%		66%		67%		Badan Perenca

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
kelola operasional pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	prasarana kantor yang terpenuhi			6.917.104.505		6.867.537.000		7.004.887.000		7.144.985.000		7.287.885.000		7.787.328.926	naan Pembangunan Daerah
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	52%	52%	3.062.036.432	53	3.013.862.000	54	3.074.140.000	55	3.135.622.000	56	3.198.335.000	57	3.262.301.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola	Program Penunjang Urusan	Persentase sarana prasarana		52%	2.860.056.703	53%	3.247.790.000	54%	3.312.746.000	55%	3.379.001.000	56%	3.446.581.000	57%	3.515.512.000	Badan Kesatuan

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
operasional pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	kantor yang terpenuhi														Bangsa Dan Politik
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	4.267.626.937	100%	4.186.923.000	100%	4.270.662.000	100%	4.356.075.000	100%	4.443.196.000	100%	4.532.060.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola	Program Penunjang Urusan	Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%	2.856.062.643	100%	2.721.184.000	100%	2.775.608.000	100%	2.831.120.000	100%	2.887.743.000	100%	2.945.497.000	Dinas Penanaman

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
operasional pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%	4.623.436.772	100%	4.392.813.317	100%	4.492.632.932	100%	4.580.681.228	100%	4.670.090.988	100%	5.592.998.426	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	85%	85%		86%		87%		88%		89%		90%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola	Program Penunjang Urusan	Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%	7.820.825.817	100%	7.851.743.000	100%	8.010.278.000	100%	8.171.983.000	100%	8.336.923.000	100%	8.635.161.000	Dinas Pertanian

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
operasional pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	20%	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan kepegawaian	85%	100%	2.299.313.688	100%	2.685.334.000	100%	2.701.240.000	100%	2.761.500.000	100%	2.829.000.000	100%	3.597.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	85%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola	Program Penunjang Urusan	Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%	3.875.975.252	100%	3.943.595.000	100%	4.022.467.000	100%	4.102.917.000	100%	4.184.975.000	100%	4.268.674.000	Dinas Koperasi,

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
operasional pemerintah Daerah	Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan, Dan Perindustrian
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	70%	70%		70%		70%		70%		70%		70%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	93%	94%	3.720.543.414	91%	3.563.115.000	92%	3.634.377.000	93%	3.707.065.000	94%	3.781.206.000	95%	6.298.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	5.702.410.944	100%	4.383.874.010	100%	4.383.874.010	100%	4.383.874.010	100%	4.383.874.010	100%	5.383.874.010	Dinas Lingkungan Hidup Dan

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kebersihan
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	N/A	52%	8.929.719.336	53%	9.068.314.000	54%	9.249.880.000	55%	9.425.078.000	56%	9.613.980.000	57%	9.806.659.000	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	N/A	100	8.824.721.843	100	6.658.105.000	100	6.791.267.000	100	6.927.092.000	100	7.065.634.000	100	7.206.947.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	N/A	95%	13.113.297.547	96%	12.894.887.000	97%	13.152.785.000	98%	13.415.841.000	99%	13.684.157.000	100%	13.957.841.000	Dinas Perhubungan
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%	11.796.993.339	100%	9.139.313.000	100%	9.322.099.000	100%	9.508.540.800	100%	9.698.711.636	100%	9.892.685.689	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
		Persentase Laporan keuangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
	Kabupaten/ Kota	dengan kualitas yang baik														
		Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	68,91%	69,91%		70,91%		71,91%		72,91%		73,91%		74,91%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.502.607.400	100%	1.520.207.100	100%	1.548.916.355	100%	1.580.090.805	100%	1.611.609.873	100%	1.674.968.044	Kec Cijulang
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.516.467.128	100%	1.547.447.247	100%	1.573.811.469	100%	1.607.351.047	100%	1.639.277.250	100%	1.714.578.212	Kec Kalipucang

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.324.567.738	100%	1.346.118.000	100%	1.373.250.000	100%	1.400.921.000	100%	1.429.142.000	100%	1.477.557.000	Kec Cigugur
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.274.236.079	100%	1.324.272.485	100%	1.350.151.395	100%	1.376.452.995	100%	1.403.363.955	100%	1.474.190.390	Kec Cimerak

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.305.317.932	100%	1.322.961.000	100%	1.348.549.000	100%	1.373.238.000	100%	1.400.329.000	100%	1.452.667.434	Kec Mangunjaya
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.568.982.816	100%	1.632.845.262	100%	1.666.316.978	100%	1.698.411.309	100%	1.731.139.827	100%	1.808.087.666	Kec Padaherang

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.324.470.134	100%	1.342.710.000	100%	1.369.564.000	100%	1.396.956.000	100%	1.424.895.000	100%	1.453.392.000	Kec Pangandaran
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.111.983.772	100%	1.165.688.000	100%	1.189.489.000	100%	1.213.760.000	100%	1.238.511.000	100%	1.314.901.000	Kec Parigi

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatnya kualitas tata kelola operasional pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.293.941.585	100%	1.341.816.000	100%	1.360.915.000	100%	1.395.537.000	100%	1.423.194.000	100%	1.513.941.000	Kec Langkaplancar
		Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Meningkatkan kualitas tata kelola operasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	100%	100%	1.180.816.500	100%	1.225.664.390	100%	1.253.551.121	100%	1.281.591.909	100%	1.309.826.656	100%	1.357.654.762	Kec Sidamulih

Urusan/ Outcome	Program	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	Tahun												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
pemerintah Daerah	Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Cakupan layanan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Sumber: Hasil analisis Bappeda Pangandaran, 2025

Program, Indikator Kinerja, beserta pagu anggaran yang ditampilkan pada tabel di atas telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Seluruh urusan baik itu urusan wajib maupun pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah telah dicantumkan dalam Program beserta *outcome* dan Indikator Kinerjanya. Keselarasan setiap Program dengan Misi, Tujuan, dan Sasaran telah ditampilkan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya Program ini akan diturunkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah disesuaikan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang akan dicapai. Ketentuan mengenai Perangkat Daerah penanggungjawab untuk masing-masing Program tidak bersifat kaku dan mengikat, artinya perubahan dapat dilakukan apabila terjadi perubahan nomenklatur nama Perangkat Daerah atau ketentuan lain yang didasari dengan dasar hukum yang sesuai dan berlaku.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah dan indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* Program pembangunan Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi Kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari Program Prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu Indikator Kinerja Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian Kinerja Program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator Kinerja Daerah. Sebagai sebuah Daerah yang otonom, diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan. Target pencapaian ini adalah kunci Kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja utama disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kesehatan	Poin	84,78	85,14	85,49	85,85	86,20	86,55	86,91
1.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,34	75,57	75,80	76,03	76,26	76,49
2	Indeks Pendidikan	Poin	61,19	61,62	62,06	62,5	62,94	63,39	63,84
2.1	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Nilai	80	82	84	86	88	90	92
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,70	85,88	85,96	86,04	86,12	86,20	86,28

No	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.1	persentase cakupan pelayanan infrastruktur	Persen	NA	38,10	40,47	42,80	47,64	49,98	52,14
3.2	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	1,73	1,75	1,77	1,79	1,81	1,83	1,85
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,99	66,01	66,26	66,51	67,77	67,02	67,27
3.4	Indeks risiko bencana	Poin	133,13	133,00	131,35	129,7	128,05	126,4	124,75
4	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	N/A	0,2	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5
4.1	Indeks Kepuasan Wisatawan	Poin	NA	70	72	74	77	80	82
4.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	10,13	10,36	10,43	10,69	11,34	11,40	11,47
4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	52	53	55	57	59	61
5	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,14	82,34	82,54	82,74	82,94	83
5.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	73,09	73,78	74,47	75,16	75,85	76
5.2	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	NA	63,7	67,7	71,7	75,7	79,7	83,7
6	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	76,39	77,39	78,39	79,90	80,39	81,39	82,39
6.1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,22	4,11	3,96	3,78	3,57	3,34	3,12
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,46	76,50	76,80	77,00	78,00	79,00	80,00
7.1	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Poin	67,98	70,39	72,79	75,20	77,60	80,01	80,01
7.2	Indeks Integritas Nasional	Poin	65,66	71,85	72,37	72,90	73,42	73,94	74,46
7.3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	58,8	59,69	60,51	61,34	62,16	62,98
7.4	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,65	3,87	3,90	3,93	3,95	3,98	4,01
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,2	5,62	5,65	5,78	6,03	5,59
8.1	Kontribusi Sektor Unggulan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto	persen	NA	35,51	35,55	35,65	35,83	35,88	35,98
8.2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,75	8,20	7,78	6,98	6,02	4,99	4,6
8.3	Indeks Desa Membangun	Poin	0,84	0,8613	0,8713	0,8813	0,8913	0,9013	1,00

Sumber: Penyusun Diolah, 2025

Selanjutnya ditampilkan tabel Indikator Makro Pembangunan Daerah menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian

pembangunan melalui beberapa indikator utama, diantaranya seperti Indeks Pembangunan Manusia, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, dan Indeks Gini. Data ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta daya saing Daerah. Melalui pemantauan indikator tersebut, Pemerintah Daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Makro pembangunan Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,12	5,2	5,62	5,65	5,78	6,03	5,59
2	Indeks Gini	Poin	0,286	0,286	0,285	0,284	0,283	0,282	0,281
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,75	8,20	7,78	6,98	6,02	4,99	4,6
4	Laju Inflasi	Persen	0,43	0,42	0,41	0,40	0,39	0,38	0,37
5	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,03	71,53	71,77	72,53	73,03	73,53	74,03
6	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita	Juta Rupiah/ Perkapita	35,65	40	41,75	43,5	45,25	50,91	55,51
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,58	1,43	1,47	1,39	1,38	1,37	1,36
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Ton CO2 eq/Miliar	N/A	10	10,17	11,37	11,57	12,30	12,9
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,99	66,01	66,26	66,51	67,77	67,02	67,27
10	Prevalensi Stunting	Persen	17,2	15,5	14,04	12,79	11,71	10,77	9,97

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Pangandaran, 2025

Adapun indikator utama pembangunan Daerah memuat data-data yang mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Target indikator utama pembangunan ini merupakan salah satu wujud keselarasan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten.

Tabel 4. 4 Penetapan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025-2030

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TRANSFORMASI SOSIAL									
Kesehatan untuk Semua									
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,11	75,34	75,57	75,8	76,03	76,26	76,49
2	Kesehatan Ibu dan Anak:								

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	a. Angka Kematian Ibu per tahun	Jumlah	n/a	2	2	2	1	1	1
	b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	17,2	15,5	14,04	12,79	11,71	10,77	9,97
3	Penanganan Tuberkulosis:								
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis *(treatment coverage)*	Persen	91,35	91,7	92,05	92,4	92,75	93,1	93,45
	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*)	Persen	91,35	91,7	92,05	92,4	92,75	93,1	93,45
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	99,22	99,43	99,6	99,8	99,9	99,95	100
Pendidikan Berkualitas yang Merata									
5	Hasil pembelajaran								
	a. Persentase satuan pendidikan Sekolah Dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:								
	i) Literasi Membaca	Persen	80,37	81	82	83	84	85	86
	ii) Numerasi	Persen	81,26	82	83	84	85	86	87
	b. Persentase satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:								
	i) Literasi Membaca	Persen	79,93	80,35	80,55	80,75	80,85	81	81,15
	ii) Numerasi	Persen	73,71	74	74,35	74,65	74,85	75,15	75,35
6	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,24	8,34	8,45	8,55	8,65	8,76	8,86
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,4	12,55	12,65	12,75	12,85	12,95
8	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	0,048	0,060	0,068	0,077	0,086	0,094	0,103
Perlindungan sosial yang adaptif									
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	8.75	8.20	7.78	6.98	06.02	4,99	4,6
TRANSFORMASI EKONOMI									
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi									
10	Rasio Produk Domestik Regional Bruto Industri Pengolahan	Persen	n/a	5,13	5,22	5,31	5,41	5,50	5,61
11	Pengembangan Pariwisata								
	Rasio Produk Domestik Regional Bruto Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum - Sektor Pariwisata	Persen	10,13	10,36	10,43	10,69	11,34	11,4	11,47
12	Produktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah,								

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah								
	a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Non Pertanian	Persen	1,6	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
	c. Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	n/a	4,31	4,52	4,74	4,97	5,21	5,47
	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	0,035	0,15	0,161	0,179	0,227	0,275	0,323
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,58	1,48	1,47	1,39	1,38	1,37	1,36
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	70,98	71	71,02	71,04	71,06	71,08	71,2
15	Indeks Inovasi Daerah	Poin	48,03	48	49	49	50	50	51
Penerapan Ekonomi Hijau									
16	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau								
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Poin	n/a	15,21	17,55	19,05	20,96	22,97	25,06
Transformasi Digital									
17	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi								
	Persentase aplikasi e-government yang terintegrasi	Persen	n/a	54	56.3	58.6	60.9	63.2	65.5
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persentase Produk Domestik Regional Bruto)	Persen	n/a	22,09	22,17	22,25	22,33	22,40	22,47
19	Ekspor Barang dan Jasa (Persentase Produk Domestik Regional Bruto)	Persen	n/a	1	1,03	1,06	1,09	1,12	1,15
Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi									
20	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan								
	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	N/A	58,09	59,43	60,77	62,11	63,42	65,70
	b. Persentase Desa Mandiri	Persen	38	46,24	52,69	61,29	73,12	92,47	96,77
TRANSFORMASI TATA KELOLA									
Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif									
21	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,34	70	73	76	79	82	85
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,52	3,53	3,58	3,63	3,68	3,73	3,78
23	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,44	4,5	4,53	4,55	4,57	4,6	4,62
24	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	58,8	59,69	60,51	61,34	62,16	62,98
25	Indeks Integritas Nasional	Persen	N/A	71,85	72,37	72,9	73,42	73,94	74,46
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA									
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial									

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	- Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Poin	0,28	0,3	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39
27	Indeks Demokrasi Indonesia								
	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	NA	63,7	67,7	71,7	75,7	79,7	83,7
Stabilitas Ekonomi Makro									
28	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	NA	0,7	0,74	0,78	0,82	0,86	0,9
29	Tingkat Inflasi	Persen	0,43	0,42	0,41	0,4	0,39	0,38	0,37
Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah									
30	Efektivitas Kerjasama Internasional								
	a. Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,65	3,87	3,90	3,93	3,95	3,98	4,01
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI									
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama									
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan								
	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,14	82,34	82,54	82,74	82,94	83
Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemuda, dan Kesetaraan Gender									
32	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,415	0,405	0,395	0,385	0,375	0,365	0,355
Lingkungan Hidup Berkualitas									
33	Kualitas Lingkungan Hidup								
	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	58,99	66,01	66,26	66,51	67,77	67,02	67,27
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	N/A	6,54	11,92	17,29	22,67	28,04	33,42
34	Pengelolaan Sampah								
	a. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	26	27,62	31,30	35,47	40,20	45,56	48,09
	b. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan									
35	Ketahanan Energi								
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	5,22	4,11	3,96	3,78	3,57	3,34	3,12
36	Ketahanan Air								
	a. Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	0,66	0,80	0,93	1,07	1,21	1,35
	b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	27,47	31,09	34,72	38,35	41,97	45,60
Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim									
37	Indeks Risiko Bencana	Poin	133,13	133	131,35	129,7	128,05	126,4	124,75
38	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	Ton CO2 eq	N/A	253.223,76	277.455,29	303.147,23	332.719,18	365.997,58	401.729,14

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencakup seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasnya dengan melihat pencapaian keberhasilan melalui indikator – indikator yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Perangkat Daerah terkait. Untuk melihat Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah sesuai dengan aspek pembangunan maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	76,39	77,39	78,39	79,90	80,39	81,39	82,39	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,22	4,11	3,96	3,78	3,57	3,34	3,12	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	27,47	31,10	34,72	38,35	41,98	45,60	49,23	
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	58,99	66,01	66,26	66,51	67,77	67,02	67,27	
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	6,54	11,92	17,29	22,67	28,04	33,42	
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	26	27,62	31,30	35,47	40,20	45,56	48.09	
7	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	ton CO2 eq/Miliar	N/A	10	10,17	10,78	11,57	12,30	12,9	
9	Indeks Risiko Bencana	poin	133,13	133,00	131,35	129,7	128,05	126,4	124,75	
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	
11	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,12	5,2	5,62	5,65	5,78	6,03	5,59	
2	Tingkat Kemiskinan	persen	8,75	8,20	7,78	6,98	6,02	4,99	4,6	
3	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	Rp Juta	35,65	40	41,75	43,5	45,25	50,91	55,51	
4	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	2.79	2.92	2.98	3.04	3.10	3.17	3.20	
5	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,24	0,27	0,30	0,33	0,36	0,39	0,42	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,58	1,41	1,47	1,39	1,38	1,37	1,36	
7	Indeks Gini	Poin	0,286	0,286	0,285	0,284	0,283	0,282	0,281	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,03	71,53	71,77	72,53	73,03	73,53	74,03	
9	Usia Harapan Hidup	tahun	75,11	75,34	75,57	75,80	76,03	76,26	76,49	
10	Prevalensi Stunting	persen	17,2	15,5	14,04	12,79	11,71	10,77	9,97	
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	8,24	8,34	8,45	8,55	8,65	8,76	8,86	
12	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,36	12,43	12,49	12,56	12,62	12,69	12,75	
13	Indeks Numerasi	Poin	N/A	49	49,55	50,1	50,65	51,2	51,75	
14	Indeks Literasi	Poin	N/A	62	62,4	62,8	63,2	63,6	64	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	98.46	98,54	98,61	98,69	98,77	98,85	98,92	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	73,09	73,78	74,47	75,16	75,85	76	
17	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,4	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	N/A	5,13	5,22	5,31	5,41	5,5	5,6	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,36	10,43	10,49	10,56	10,62	10,69	10,75	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	25	26	27	28	29	30	31	
4	Indeks Inovasi Daerah	poin	48,03	48	49	49	50	50	51	
5	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	N/A	15,21	17,55	19,05	20,96	22,97	25,06	
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	N/A	22,09	22,17	22,25	22,33	22,4	22,47	
8	Ekspor Barang dan Jasa (Persentase Produk Domestik Regional Bruto)	Persen	15,34	16,54	17,74	20,14	22,54	24,94	27,34	
9	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	poin	85,8	85,88	85,96	86,04	86,12	86,2	86,28	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	58,09	60,19	62,28	64,38	66,47	68,57	70,66	
11	Persentase Desa Mandiri	Persen	N/A	46,24	52,69	61,29	73,12	92,47	96,77	
12	Indeks Desa Membangun	Poin	0,84	0,8613	0,8713	0,8813	0,8913	0,9013	1,00	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto	Persen	0,7	0,74	0,78	0,82	0,86	0,9	0,94	
14	Tingkat Inflasi	Persen	6,15	5,95	5,75	5,55	5,35	5,15	4,95	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,34	70	73	76	79	82	85	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,52	3,53	3,58	3,63	3,68	3,73	3,78	
3	Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,44	4,5	4,53	4,55	4,57	4,6	4,62	
4	Indeks Integritas Nasional	Persen	N/A	71,85	72,37	72,90	73,42	73,94	74,46	
5	Persentase Penegakan Perda	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat Pemahaman Kesatuan Bangsa	Poin	N/A	63,7	67,7	71,7	75,7	79,7	83,7	
7	Angka Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan yang tertangani	Poin	0,28	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,39	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,65	3,87	3,90	3,93	3,95	3,98	4,01	
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
	Pendidikan									
1	Nilai Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,31	12,31	12,55	12,65	12,75	12,85	12,95	
2	Persentase kelulusan siswa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio jumlah guru dengan jumlah siswa pada tingkat Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio	N/A	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	1:12	
4	Persentase Siswa yang menggunakan bahasa ibu dengan benar	Persen	N/A	88	89	90	91	92	94	
	Kesehatan									
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Esensial	Persen	N/A	85	87	89	91	93	95	
2	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang meningkat kapasitasnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Izin Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persen	85	85	85	85	85	85	85	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	N/A	81,44	1	84,64	86,24	87,84	90,00	
2	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Persen	60	60	66	69	72	75	78	
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	60	65,00	66,30	67,63	68,98	70,36	71,77	
4	Persentase terbangunnya sarana persampahan	Persen	N/A	0,00	10	11	13	44	46	
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	N/A	6,54	11,92	17,29	22,67	28,04	33,42	
6	Persentase jaringan drainase lingkungan yang berfungsi baik	Persen	N/A	10	10,50	11	13	15	17	
7	Jumlah Bangunan Gedung Sesuai Regulasi	Persen	N/A	50,00	51,00	52,02	53,06	54,12	55	
8	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Persen	N/A	0	76,50	78,03	79,59	81,18	82,81	
9	Persentase penataan sesuai rencana tata ruang wilayah	Persen	45,04	47,54	48,04	53,04	58,04	63,04	68,04	
	Sosial									
1	Persentase Keluarga Miskin yang Meningkat Kemampuannya dalam mencapai taraf kesejahteraan yang lebih baik	Persen	15	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
2	Persentase Penanganan Korban Bencana yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sehingga mampu Bertahan Hidup	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Taman Makam Makam Pahlawan yang dikelola	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persen	100	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persen	100	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	*Response Time Rate*	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Persen	N/A	16	20	22	24	28	32	
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	N/A	80	90	95	100	100	100	
5	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang ditangani	Persen	N/A	0,00	44,12	46,32	48,53	50,73	52,94	
2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	N/A	0,00	56,98	57,03	57,08	57,18	61,18	
3	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Satuan Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persen	N/A	50	52,50	55,13	57,88	60,78	63,81	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
	Tenaga Kerja									
1	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Diselesaikan	Persen	80	100	0	100	100	0	100	
2	Persentase peserta pelatihan yang kompeten	Persen	70	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Tenaga Kerja yang diserap	Persen	70	50	55	60	65	70	75	
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
	Transmigrasi									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Masyarakat yang Memahami Program Transmigrasi	Persen	0	0	80	85	90	95	100	
2	Persentase Laju Kemandirian Transmigran	Persen	0	0	0	100	100	100	100	
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
1	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Poin	N/A	0	501	601	601	701	801	
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kualitas Keluarga	Poin	N/A	76	76	76	77	77	77	
4	Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang terkelola dan valid	Persen	N/A	0	100	100	100	100	100	
5	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak	Poin	696,71	710	725	740	755	780	810	
6	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100		100					
	Pangan									
1	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Poin	94,93	95,00	95,05	95,10	95,15	95,20	95,40	
2	Jumlah desa yang memiliki cadangan pangan pemerintah desa	Desa	N/A	2 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	12 Desa	
3	Persentase desa rentan rawan pangan	Persen	0	10	8	6	4	2	1	
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	89,6	89,60	89,65	89,70	89,75	89,80	89,85	
	Pertanahan									
1	Persentase sengketa tanah yang terselesaikan	Persen	100	10	20	30	40	50	60	
2	Cakupan Penggunaan Tanah Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan pelaksanaan redistribusi tanah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Lingkungan Hidup									
1	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	20,00	21,43	35,71	50,00	6428,00	7857,00	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Persen	30,10	30,50	31,50	32,50	33,50	34,50	35,50	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	26	27,62	31,30	35,47	40,20	45,56	48,09	
4	Persentase Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dikelola	Persen	0	5	10	15	20	25	30	
5	Persentase Jumlah kegiatan dan/atau usaha dilakukan pengawasan yang memiliki izin lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	72	80	85	87,50	88,90	90	90,90	
6	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100,00	100	100	100	100	
7	Persentase Program Penghargaan yang diikuti	Persen	0	0	50	75	100	100	100	
8	Persentase luas ruang terbuka hijau yang dikelola (taman, hutan kota)	Persen	0,80	2,87	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Data Kependudukan yang dikelola secara Elektronik	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
1	Persentase penataan desa	Persen	N/A	2	2	2	2	2	2	
2	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	Persen	N/A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
3	Persentase Administrasi Desa yang baik dan tertib	Persen	65	65,00	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	Persen	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
1	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Poin	N/A	32,6	32,5	32,4	32,3	32,1	32	
2	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persen	N/A	9,47	9,27	9,07	8,87	8,67	8.47	
3	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	N/A	35	35,2	35,4	35,6	35,8	36	
	Perhubungan									
1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten	Persen	39	39,00	45,00	52,00	65,00	78,00	91,00	
2	Persentase Fasilitas Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan yang Layak Fungsi	Persen	n/a	n/a	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	
	Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks SPBE	Poin	3,52	3,53	3,58	3,63	3,68	3,73	3,78	
2	Persentase tata kelola layanan informasi publik	Persen	60	60	61	62	63	64	65	
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah	Persen	50,60	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56	
2	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	Persen	14,56	14,56	14,66	14,76	14,86	14,96	15	
3	Persentase Sumber Daya Manusia pengelola koperasi yang bersertifikat	Persen	2,94	0,00	4,90	5,88	6,86	7,84	9	
4	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	Persen	24,00	0,00	17,00	14,00	13,00	11,00	10	
5	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	Persen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0	
	Penanaman Modal									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persen	0,0	0,00	1,20	1,30	0,00	1,50	1,60	
2	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Persen	1	-	-	-	1,40	-	1,60	
3	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun	1,536	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,74	
4	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	2,00	2,00	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	
6	Kepemudaan dan Olahraga									
7	Jumlah pemuda yang aktif berorganisasi	Orang	22409	22409	22509	22609	22709	22809	22909	
8	Jumlah atlet olahraga	Orang	200	200	205	210	215	220	225	
9	Jumlah pemuda yang aktif dalam kepramukaan	Orang	44792	44792	44892	44992	45000	45100	45200	
	Persandian									
1	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman	Persen	30	35	40	45	50	55	60	
2	Statistik									
3	Persentase publikasi data statistik sektoral	Persen	65	40	45	50	55	60	65	
	Kebudayaan									
1	Persentase Warisan Budaya Yang Dilindungi	Persen	20,24	25,00	29,76	34,52	39,29	44,05	48,81	
2	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan dan Dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Perpustakaan									
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	19,95	19,95	20,24	20,53	20,82	21	
5	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka dan Naskah Kuno yang dilestarikan	Persen	N/A	10	10	10	10	10	10	
	Kearsipan									
1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Poin	3353	3732	4180	4684	5245	5875	6583	
2	Indikator Program Persentase Laporan Audit Kearsipan Eksternal	Persen	N/A	89,29	100	100	100	100	100	
Urusan Pemerintahan Pilihan										

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2403	1900	1905	1910	1915	1920	1925	
2	Persentase Penanganan Laporan Tindak Pelanggaran di Sektor Perikanan	Persen	N/A	40	40	45	50	60	70	
3	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	312	320	328	336	344	352	360	
4	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	900	920	940	960	980	1000	1020	
	Pariwisata									
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	3.297.362	4.200.000,00	4.400.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	Rata-rata Lama Kunjungan Wisatawan	Hari	1,84	1,85	1,95	2,05	2,15	2,25	2,35	
3	Persentase Produk Ekonomi Kreatif Yang Didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	N/A	1,29	2,58	3,86	5,15	6,44	7,73	
4	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	11,83	12,87	13,92	14,96	16,01	17,05	18,10	
	Pertanian									
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	215564,17	218797,63	222079,59	225410,79	228791,95	232223,83	235707,18	
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	8766,04	8897,53	9030,99	9166,46	9303,96	9443,51	9585,17	
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	51708,39	52225,47	52747,73	53275,21	53807,96	54346,04	54889,5	
4	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persen	80	81,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Jumlah Produksi Daging	Ton	4596	5286	5312	5338,9	5365,57	5392,38	5419	
6	Jumlah Produksi Telur	Ton	3503	1196	1202	1208,05	1214,09	1220,16	1226	
7	Jumlah Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	486	400	1255	1435	1875	1670	2150	
8	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	Persen	N/A	0,00	30,00	40,00	50,00	60,00	65	
9	Persentase Kenaikan Skor Kelas Kelompok Tani	Persen	9,94	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	
	Perdagangan									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
2	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	Persen	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	19,23	23	
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	76,19	80,95	85,71	90,48	95,24	100,00	100	
4	Ekspor barang dan jasa (Persentase Produk Domestik Regional Bruto)	Persen	15,34	0,00	17,74	20,14	22,54	24,94	27	
5	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Persen	23,39	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	100	
6	Persentase penggunaan produk lokal oleh Pemerintah Daerah	Persen	77,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88	
	Perindustrian									
1	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri di dalam sentra	Persen	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5	
2	Persentase industri kecil dan menengah yang berizin	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan										
	Perencanaan									
1	Capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	N/A	80	82	84	86	88	90	
2	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki keselarasan Program RPJMD dan RKPD	Persen	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persen	N/A	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Keuangan									
1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	Rendah (0,94)	Rendah (1)	Rendah (1,05)	Sedang (1,141)	Sedang (1,2)	Sedang (1,3)	Tinggi (1,378	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase Capaian kualitas pengelolaan kas Daerah	Persen	N/A	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	
3	Cakupan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan penatausahaan Keuangan Daerah	Persen	90,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan akuntabel	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Persen	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Persentase Realisasi Pajak Daerah Sektor Pajak Daerah Lainya	Persen	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah	Persen	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Kepegawaian									
1	Persentase formasi sesuai dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Jumlah Formasi/Jumlah Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Persen	N/A	40	42	44	46	48	50	
2	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan lanjutan (Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan lanjutan/jumlah Pegawai Negeri Sipil)	Persen	N/A	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	
3	Persentase layanan pengembangan karir Aparatur Sipil Negara	Persen	N/A	75	78	80	82	84	86	
4	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unsur Pengukuran Kinerja	Poin	19,81	20,51	21,21	21,91	22,61	23,32	23,32	
	Pendidikan dan Pelatihan									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Sertifikat dalam pengembangan kompetensi	Persen	1	1	2	3	4	5	6	
	Penelitian dan Pengembangan									
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	48,03	48	49	49	50	50	51	
2	Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik	Persen	50	100	100	100	100	100	100	
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
	Inspektorat Daerah									
1	Persentase Hasil Pengawasan	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah komponen evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	Poin	17,36	17,97	18,59	19,20	19,82	20,43	20,43	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Persen	84,94	85,04	85,14	85,24	85,34	85,44	85,54	
4	Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Poin	3,09	3,19	3,29	3,39	3,49	3,59	3,69	
5	Manajemen Risiko Indeks	Poin	3,397	3,447	3,497	3,547	3,597	3,647	3,697	
6	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Poin	2,784	2,834	3,010	3,030	3,05	3,070	3,090	
7	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	Persen	3,85	4,85	5,85	6,85	7,85	8,85	9,85	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah									
1	Persentase pencapaian prolegda yang terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan	Persen	60	70	73	76	80	85	88	
	Sekretariat Daerah									
1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	
2	Cakupan pelayanan kesejahteraan rakyat	Persen	80	85	90	95	100	100	100	

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,34	70	73	76	79	82	85	
4	persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan pembangunan Daerah	Persen	90	90	90	90	90	100	100	
5	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	84,83	84,85	85,9	86,95	88	89,5	90,10	
6	persentase pelaksanaan pengendalian kebijakan perekonomian Daerah	Persen	80	85	90	95	100	100	100	
	Unsur Pemerintahan Umum									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Persentase masyarakat yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	81	82	82	83	83	84	84	
2	Persentase Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan	Persen	73	75	75	75	75	75	76	
3	Persentase Masyarakat yang memahami Politik Dalam Negeri	Persen	75	76	76	77	77	78	78	
4	Persentase Masyarakat yang memahami tentang pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	60	61	62	63	64	65	66	
5	Persentase pelaksanaan koordinasi kewaspadaan Daerah	Persen	80	81	82	83	84	85	86	
	Unsur Kewilayahan									
1	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Laporan keuangan dengan kualitas yang baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan layanan kepegawaian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perencanaan dan evaluasi Kinerja yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Hasil Analisis, 2025

BAB V
PENUTUP

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan yang berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Visi Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 , dan RPJMN Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini telah melalui tahapan sesuai dengan amanat ketentuan pasal 48 sampai dengan pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, dan evaluasi dan pengendalian RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana di bawah ini.

1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2030 yang dilaksanakan pada Tahun 2029. Sebagaimana diketahui, tahun 2029 adalah tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD Tahun 2025- 2045. Selanjutnya RKPD Tahun 2030 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2030. Pemerintah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2029 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2029, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, Kabupaten dan lain-lain.

2. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Daerah berkewajiban untuk mengarahkan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mengarahkan semua potensi dan sumberdaya;
2. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan Program yang terdapat dalam RPJMD tahun 2025-2029, melakukan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha;

3. Seluruh Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah agar segera menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029;
5. Perangkat Daerah yang mengampu fungsi perencanaan Daerah di bawah kepemimpinan Sekretariat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029;
6. RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
7. Penyusunan RKPD harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang.
8. RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja.
9. RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun anggaran berikutnya.
10. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas Kinerja lima tahunan dan tahunan.

3. Evaluasi dan Pengendalian

Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dapat memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan selaras, efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka diperlukan upaya berkesinambungan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang cermat, tepat, aspiratif dan akuntabel. Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi Kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah. Pengendalian mencakup rumusan Visi Misi, strategi dan kebijakan, rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang berlaku.

Dalam melaksanakan RPJMD Tahun 2025-2029 didukung oleh sumber pendanaan melalui berbagai sumber pendanaan pembangunan yang ada yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerh Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, *Corporate Social Responsibility*, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dana umat, produk ekonomi syariah dan peran serta masyarakat. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pemangku kepentingan yang turut serta dalam pembangunan, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kinerja maupun fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 serta mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat ketercapaiannya maka diperlukan pendekatan manajemen risiko sebagai bagian integral dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta merespons berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap dinamika perubahan. Dengan demikian, pendekatan manajemen risiko bukan hanya sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai komitmen strategis dalam menjaga konsistensi arah pembangunan dan menjamin pencapaian Visi Daerah secara akuntabel dan berkesinambungan.

BUPATI PANGANDARAN,

CITRA PITRIYAMI